

PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO



Kantor Pusat
 Jl. PHH. Mustopa Komp. Surapati Core
 Blok AB (Anggrek Boulevard) No.16
 Bandung
 Tel : +6222 87240220
 Faks : +6222 87242652
 Email : investor.relations@protelindo.net
 Website : www.protelindo.co.id/www.ptsmn.co.id

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 17 November 2016	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 23 November 2016
Masa Penawaran	: 18 November 2016	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 24 November 2016
Tanggal Penjatahan	: 21 November 2016		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi

Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Indonesia

<p>Kantor Pusat Jl. PHH. Mustopa Komp. Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No.16 Bandung Tel: +6222 87240220 Faks: +6222 87242652 Email: investor.relations@protelindo.net Website: www.protelindo.co.id/www.ptsmn.co.id</p>	<p>Kantor Cabang Menara BCA Lantai 53 dan 55 Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Tel: +6221 2358 5500 Faks: +6221 2358 6446</p>
---	---

**PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
 OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO
 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.500.000.000.000,- (ENAM TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 ("OBLIGASI")
 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp103.000.000.000,- (seratus tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 23 November 2019 untuk Obligasi Seri A, 23 November 2021 untuk Obligasi Seri B dan 23 November 2023 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DIUMUMKAN DALAM SURAT KABAR. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"):
**AAA(idn)
 (triple A)**
 Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek di dalam Prospektus.



Penawaran atas Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

WALI AMANAT
 PT Bank Permata Tbk

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWaan MENARA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2016

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK, dahulu bernama Bapepam dan LK) dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 melalui surat No. 143/CS-OJK/PTI/IX/16 tertanggal 16 September 2016 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016" dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan Bursa Efek sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-009/BEI.PP2/09-2016 tertanggal 15 September 2016. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xi
SINGKATAN ENTITAS ANAK	xii
DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO TAHAP I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	8
III. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN	9
IV. PERNYATAAN UTANG	10
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
1. Umum	23
2. Faktor-faktor Signifikan yang Mempengaruhi Hasil Usaha Perseroan dan Entitas Anak	23
3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	26
4. Keuangan	31
5. Manajemen Risiko	45
VI. RISIKO USAHA	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	55
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	56
A. Riwayat Singkat Perseroan	56
B. Perizinan	56
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	57
D. Struktur Organisasi Perseroan	58
E. Pengurusan dan Pengawasan	58
F. Sumber Daya Manusia	64
G. Keterangan Ringkas Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	68
H. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak	69
I. Keterangan Mengenai Struktur Kepemilikan Perseroan	74
J. Hubungan Kepemilikan Serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Entitas Anak Dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	74
K. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	75
I. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	83
M. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	86
N. Asuransi	87
O. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	88
P. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	90
Q. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak	91
R. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	91
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	92
A. Umum	92
B. Keunggulan Kompetitif	93
C. Prospek Usaha	96
D. Strategi Usaha	97
E. Portofolio <i>Telecommunication Tower Sites</i>	99
F. Layanan dan Jasa	102
G. Kapasitas Menara	104
H. Pelanggan Perseroan	105
I. Penjualan dan Pemasaran	106
J. Persaingan	107
K. Kontraktor	107
L. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	107
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	112
XI. EKUITAS	115
XII. PERPAJAKAN	116
XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	117
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	118
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	121
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN PERNYATAAN MANAJEMEN	146
XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	340
XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK	355
XIX. ANGGARAN DASAR	358
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	366
XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	370
XXII. AGEN PEMBAYARAN	378
XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPO	379

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran** : KSEI, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- AMDAL** : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- Bagian Penjaminan** : Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini, yang telah mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual kepada Masyarakat pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
- Bank Pembayaran** : Bank umum yang ditunjuk oleh KSEI untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi Obligasi.
- Bank Kustodian** : Bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
- Bapepam** : Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.
- Bapepam dan LK** : Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 2005 nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2010, nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- BEI atau Bursa Efek** : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya di mana Obligasi dicatatkan.
- BKPM** : Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Bunga Obligasi** : Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- CGIF** : *Credit Guarantee and Investment Facility*, sebuah *trust fund* dari *Asian Development Bank*.
- Daftar Pemegang Rekening** : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, alamat, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda** : Sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi** : Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Efek** : Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM, dimana efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- Efektif** : Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 - i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau
 - ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.
- dengan ketentuan bahwa Pernyataan Pendaftaran harus menjadi Efektif selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016.
- Entitas Anak** : Perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Emisi** : Penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Force Majeure** : Salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan.

- Hari Bursa** : Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender** : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Hari Kerja** : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- IAPI** : Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Jumlah Terhutang** : Semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
- Kegiatan Usaha** : Kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar masing-masing Perseroan dan/atau Entitas Anak.
- Konfirmasi Tertulis** : Laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan-laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- Konfirmasi Tertulis Untuk Rupo atau KTUR** : Surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- KSEI** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
- Kustodian** : Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Manajer Penjatahan** : Pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, yang dalam penawaran umum Obligasi ini adalah PT Bahana Securities.
- Mast Companies** : Berarti Antenna Mast Company (I) B.V., Antenna Mast Company (II) B.V., Antenna Mast Company (III) B.V., Antenna Mast Company (IV) B.V. yang melebur dengan Protelindo Towers B.V. yang berlaku efektif pada tanggal 12 Februari 2013.
- Masyarakat** : Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan hukum dari suatu negara, dimana penawaran dan pembelian Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi oleh warga negara atau badan hukum di negara tersebut dipandang sebagai bertentangan dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku di negara tersebut) satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia

- Menkumham** : Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yaitu sebagai berikut:
- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp103.000.000.000,- (seratus tiga miliar Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 23 November 2019 untuk Obligasi Seri A, 23 November 2021 untuk Obligasi Seri B dan 23 November 2023 untuk Obligasi Seri C.
- Obligasi ini merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah Obligasi dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”).
- Pembiayaan** : Fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip konvensional dan/atau syariah, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak peminjam dan/atau pihak yang dibiayai melunasi seluruh kewajibannya dan/atau mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga maupun imbalan jasa atau bagi hasil.
- Pemegang Obligasi** : Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- Pemegang Rekening** : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- Pemeringkat** : Perseroan terbatas PT Fitch Ratings Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK yang disetujui penggantian oleh Wali Amanat.
- Penawaran Umum** : Kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : Kegiatan Penawaran Umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan I, sesuai dengan Peraturan OJK No. 36.
- Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014** : Kegiatan penawaran umum atas Obligasi Protelindo I Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.
- Penitipan Kolektif** : Jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Obligasi** : Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Bahana Securities, dan PT BCA Sekuritas (terafiliasi).
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi** : Pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Bahana Securities dan PT BCA Sekuritas (terafiliasi), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Pengakuan Utang** : Pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana ternyata dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016, No. 118 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 61 tanggal 8 November 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Agen Pembayaran** : Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 120 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi** : Perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek perihal pencatatan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-009/BEI.PP2/09-2016 tertanggal 15 September 2016 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI** : Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0057/PO/KSEI/0916 tertanggal 15 September 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI di bawah tangan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi** : Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 119 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 8 tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 62 tanggal 8 November 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Perwaliamanatan** : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 117 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 7 tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 60 tanggal 8 November 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan** : Akta pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo No. 116 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 6 tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 59 tanggal 8 November 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Efektif** : Pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dapat menawarkan dan menjual Obligasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Pendaftaran** : Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal *juncto* Peraturan Bapepam No. IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2011 No. Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Emiten kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Perseroan atau Protelindo** : PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang berkantor pusat di Jl. PHH. Mustopa Komp. Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16 Bandung dan memiliki kantor cabang di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.

- Perusahaan Efek** : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Pihak Berelasi** : Orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan Entitas Anak (entitas pelapor):
- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - 2) Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - 3) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
 - b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010).
- PMDN** : Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- Pokok Obligasi** : Jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
- Obligasi seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah)
 - Obligasi seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah)
 - Obligasi seri C dalam jumlah pokok sebesar Rp103.000.000.000,- (seratus tiga miliar Rupiah)
- Jumlah Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliananatan.
- Rekening Efek** : Rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.

- RUPO** : Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
- RUPS** : Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Satuan Pemindahbukuan** : Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Seri Obligasi** : 3 (tiga) seri obligasi, yaitu:
- Obligasi Seri A sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo.
 - Obligasi Seri B sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.
 - Obligasi Seri C sebesar Rp103.000.000.000,- (seratus tiga miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada tanggal jatuh tempo.
- Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan Pasal 5 dan 6 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Sertifikat Jumbo Obligasi** : Bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C.
- Sisminbakum** : Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Tanggal Distribusi** : Tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil penawaran umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
- Tanggal Emisi** : Tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi** : Tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Tanggal Pembayaran** : Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Efek Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi ke dalam rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.

- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi** : Tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Tanggal Penjataan** : Tanggal dilakukannya penjataan Obligasi.
- UKL** : Upaya Pengelolaan Lingkungan.
- UPL** : Upaya Pemantauan Lingkungan.
- UPM** : Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
- UUPT** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- UUWDP** : Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
- Wali Amanat** : Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Axis	:	Berarti PT AXIS Telekom Indonesia (d/h PT Natrindo Telepon Seluler).
Berca	:	Berarti PT Berca Global-Access.
BTEL	:	Berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
First Media	:	Berarti PT First Media Tbk.
Hutchison	:	Berarti PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications)
Indosat	:	Berarti PT Indosat Tbk.
Sampoerna	:	Berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
Smart	:	Berarti PT Smart Telecom.
Smartfren	:	Berarti PT Smartfren Telecom Tbk.
SMN	:	Berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
TMG	:	Berarti PT Triipta Mandhala Gumilang.
Telkom	:	Berarti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Telkomsel	:	Berarti PT Telekomunikasi Selular.
XL	:	Berarti PT XL Axiata Tbk. (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk.).

SINGKATAN ENTITAS ANAK

Iforte	:	Berarti PT Iforte Solusi Infotek
IGI	:	Berarti PT Iforte Global Internet
PFBV	:	Berarti Protelindo Finance B.V.
PLS	:	Berarti Protelindo Luxembourg S.A.R.L

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- 3G** : Berarti teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga yang bisa memberikan kecepatan akses sebesar 144 kbps untuk kondisi bergerak cepat (*mobile*), atau 384 kbps untuk kondisi berjalan (*pedestrian*), atau 2 Mbps untuk kondisi diam di suatu tempat.
- 3,5G** : Berarti sebuah protokol telekomunikasi bergerak yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan 3G dan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar, yaitu sampai dengan 14,4 Mbps dari jaringan ke arah perangkat pelanggan.
- 4G** : Berarti peningkatan dari 3G, termasuk implementasi *Long Term Evolution* (LTE) untuk *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS) dan WiMax 3G, untuk menciptakan sistem *mobile broadband* dengan layanan multimedia yang telah ditingkatkan.
- Bps** : Berarti *bits per second*.
- BTS** : Berarti *Base Transceiver Station*, yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari dan ke telepon selular.
- Build-to-Suit** : Berarti pemberi tugas kepada penyedia jasa *telecommunication tower sites* independen untuk membangun dan memiliki *telecommunication tower sites* di mana pemberi kerja akan mendapat jaminan ruang sesuai perjanjian jangka panjang. Pembangunan *telecommunication tower sites* ini dilakukan melalui pihak ketiga.
- EBITDA** : Berarti laba operasi sebagai hasil pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan lainnya, beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi (tanpa dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi, kerugian lain-lain, neto dan segala bentuk pajak).
- Lattice** : Berarti suatu struktur dari menara yang terdiri dari gabungan bentangan-bentangan besi, beberapa disusun secara bersilangan.
- Monopole** : Berarti suatu struktur dari menara yang biasanya terdiri elemen berbentuk silinder.
- Self-supporting** : Berarti jenis konstruksi yang berdiri atas kekuatan sendiri atau yang mampu menopang beban konstruksi itu sendiri.
- Shelter** : Berarti tempat berbagai peralatan pemancar, penerima, dan peralatan *switching* para operator telekomunikasi.
- Telecommunication tower sites** : Berarti infrastruktur yang pada umumnya terdiri dari menara dan/atau *shelter* untuk memuat perangkat BTS yang berdiri di atas suatu lahan tertentu.
- WiMax** : Berarti *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, sebuah protokol telekomunikasi yang menyediakan akses internet tetap dan dapat dioperasikan di mana saja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Umum

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 8 November 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhirnya adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan atas perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan. Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0022828 tanggal 12 Februari 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0019094.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016.

Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi. Perseroan merupakan perusahaan PMDN berdasarkan surat Kepala BKPM No.29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

Saat ini kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah jasa penunjang telekomunikasi. Perseroan memiliki Entitas Anak yang berbentuk perseoan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yaitu Iforte dan IGI.

Lebih lanjut, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tercatat memiliki kepemilikan saham dalam 2 (dua) Entitas Anak yang berkedudukan hukum di luar wilayah negara Republik Indonesia, masing-masing yaitu Protelindo Luxembourg S.a r.l yang didirikan menurut hukum negara Luxemburg, dan Protelindo Finance B.V. yang didirikan menurut hukum negara Belanda dan dimiliki Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam Protelindo Luxembourg S.a r.l.

Penawaran Umum Obligasi

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, dan 7 (tujuh) tahun.
- Seri Obligasi : Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah).
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah).
- Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp103.000.000.000,- (seratus tiga miliar Rupiah).

Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Tingkat Suku Bunga Obligasi	:	Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan persen) per tahun untuk Obligasi Seri A, 8,25% (delapan koma dua lima persen) tahun untuk Obligasi Seri B, dan 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) tahun untuk Obligasi Seri C. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.
Jenis Obligasi	:	Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Jenis Tingkat Suku Bunga	:	Tetap.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Kuartalan.
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	23 Februari 2017
Rencana Penggunaan Dana	:	Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan menara dan pengoperasian menara.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Hasil Pemeringkatan	:	AAA(idn) (<i>triple A</i>) dari Fitch.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak Senioritas Atas Utang	:	Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.
Pembelian Kembali	:	Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut diumumkan dalam surat kabar. Perseroan wajib mengumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham oleh masing-masing pemegang saham tersebut dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.600.187	332.260.018.700	99,9994
2. PT Triipta Mandhala Gumilang	10.000	1.000.000	0,0003
3. PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.322.620.187	332.262.018.700	100,0000
Saham dalam Portepel	6.677.379.813	667.737.981.300	

Keterangan Tentang Entitas Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan pada 4 (empat) Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Domisili	Bentuk Kepemilikan Langsung (%)	Bentuk Kepemilikan Tidak Langsung (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional
Iforte	Penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik	Jakarta	99,99%	-	1997	2015	Aktif
IGI	Perdagangan dan jasa	Jakarta	-	99,98%	1997	2015	Aktif
PLS	Perusahaan Investasi	Luxembourg	100%	-	2012	2012	Tidak Aktif
PFBV*	Perusahaan Induk Keuangan	Amsterdam	-	100%	2012	2012	Tidak Aktif

*dalam proses likuidasi

Risiko Usaha

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga menghadapi berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Berikut merupakan keterangan ringkas mengenai risiko-risiko usaha yang telah disusun sesuai dengan bobot dari masing-masing risiko yang dihadapi oleh Perseroan:

Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan:

Risiko usaha Perseroan adalah:

1. Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara.
2. Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan pelanggan, termasuk kemampuan kredit pelanggan.
3. Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara atau tidak diperpanjangnya kontrak sewa menara dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
4. Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
5. Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli.
6. Kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun penafsiran atau implementasi atas peraturan perundangan yang berlaku.
7. Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan.
8. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa *Telecommunication Tower Sites*, fiber optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang.

9. Kemampuan Perseroan untuk membangun *Telecommunication Tower Sites* baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*.
10. Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa dan pembangunan dan akuisisi *Telecommunication Tower Sites*.
11. Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja operasional.
12. Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai.
13. Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa *Telecommunication Tower Sites*.
14. Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel.
15. Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan terhadap jaringan kabel.
16. Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga.
17. Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas.
18. Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan.
19. Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan.
20. Jumlah utang Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan.
21. Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
22. Perseroan rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan.

Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi:

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan; dan
3. Risiko adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dan risiko investasi yang terkait dengan Obligasi dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

Prospek Usaha dan Strategi Perseroan

Perseroan percaya bahwa sejalan dengan tumbuhnya industri komunikasi nirkabel, persaingan telah menjadi lebih ketat. Sebagai akibatnya, banyak operator nirkabel berminat untuk melakukan penghematan modal dan meningkatkan kecepatan masuk ke pasar baru dengan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berakibat langsung pada pelayanan dan pertumbuhan pelanggan dan menggunakan jasa dari luar dalam hal kebutuhan infrastruktur seperti memiliki, membangun melalui pihak ketiga dan merawat menara. Ini khususnya dapat dicapai dengan melakukan kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh penyedia menara independen seperti Perseroan. Tren akan meningkatnya kolokasi kemungkinan dipercepat karena peraturan pembatasan menara dan bertambahnya kecenderungan dari pemerintah yang mendorong *Telecommunication Tower Sites* untuk dapat menampung beberapa penyewa.

Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong operator telekomunikasi nirkabel di Indonesia untuk menyewa infrastruktur menara dari penyedia menara independen adalah:

- Mengurangi pengeluaran modal dan memperbaiki imbal hasil atas modal yang ditanamkan;
- Menggunakan jasa untuk kegiatan yang bukan merupakan usaha inti dan memusatkan perhatian pada usaha inti telekomunikasi nirkabelnya;
- Melakukan penggelaran jaringan (*network roll-out*) yang lebih cepat dan waktu pemasaran yang lebih cepat, khususnya bagi pendatang baru;
- Peraturan dan himbauan pemerintah yang mendukung kolokasi; dan
- Mencapai perluasan jangkauan dan peningkatan kapasitas di wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi.

Sebagai tambahan dari faktor-faktor diatas, manajemen percaya bahwa industri penyedia menara independen akan mendapat keuntungan dari beberapa faktor tambahan, termasuk hal-hal yang berikut:

- Pendapatan yang stabil dan berkembang berdasarkan pada perjanjian sewa jangka panjang dengan operator nirkabel;
- Rendahnya tingkat perpindahan penyewa dikarenakan tingginya biaya dan gangguan berkenaan dengan memindahkan peralatan nirkabel ke *Telecommunication Tower Sites* baru dan cenderung menyebabkan penataan ulang jaringan nirkabel;
- Industri yang terdiri dari pelanggan-pelanggan yang pada dasarnya terdiri dari perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional besar yang memiliki skala usaha yang besar;
- Kebutuhan modal perawatan di masa depan yang relatif rendah;
- Arus kas jangka panjang dan rasio laba yang baik dengan efisiensi biaya operasional; dan
- Inisiatif Pemerintah untuk mengendalikan penambahan jumlah *Telecommunication Tower Sites* dan karenanya mendorong operator mengkolokasikan peralatan mereka di *Telecommunication Tower Sites* yang dibangun (baik melalui pihak ketiga ataupun tidak melalui pihak ketiga) untuk kolokasi.

Selain itu, prospek usaha Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang telekomunikasi adalah membuka peluang dan memperluas investasi di sektor telekomunikasi khususnya bisnis menara telekomunikasi.

Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan *Telecommunication Tower Sites* yang luas milik Perseroan, disain dan lokasi *Telecommunication Tower Sites*, basis pelanggan yang beragam dan arus kas yang kuat merupakan faktor-faktor yang memperkuat posisi Perseroan di industri menara Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan memiliki posisi dan kapasitas yang kuat untuk menampung penyewa kolokasi dalam jumlah yang besar. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk melakukan beberapa strategi usaha untuk memperkuat posisi Perseroan di dalam industri dan memperluas jaringan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan melalui pembangunan dan akuisisi.

Strategi usaha Perseroan antara lain adalah:

1. Memaksimalkan sewa kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* Perseroan.
2. Pertumbuhan melalui pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru.
3. Pertumbuhan melalui akuisisi aset penunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau perusahaan pemilik aset penunjang menara.
4. Fokus terhadap kualitas layanan.
5. Penerapan kebijakan keuangan yang cermat.

Keterangan selanjutnya mengenai prospek usaha dan strategi Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 147/DIR/RAT/IX/2016 tanggal 8 September 2016 dari Fitch, Obligasi telah mendapat peringkat:

AAA(idn)
(triple A)

Perseroan akan melakukan peringkat tahunan atas Obligasi yang diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan seluruh kewajiban yang terkait Obligasi ini telah selesai dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta laporan auditor independen tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit

oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012*	2011*
Aset Lancar	4.557.423	3.532.622	2.637.372	2.207.036	1.456.813	907.140
Aset Tidak Lancar	21.706.025	17.880.335	14.636.954	13.370.908	12.192.718	7.720.949
Total Aset	26.263.448	21.412.957	17.274.326	15.577.944	13.649.531	8.628.089
Liabilitas Jangka Pendek	4.150.857	2.000.002	2.048.789	2.420.701	1.202.506	1.173.231
Liabilitas Jangka Panjang	13.131.200	11.754.320	10.520.888	9.466.146	8.966.040	5.874.071
Total Liabilitas	17.282.057	13.754.322	12.569.677	11.886.847	10.168.546	7.047.302
Total Ekuitas	8.981.391	7.658.635	4.704.649	3.691.097	3.480.985	1.580.787

*) Disajikan kembali berdasarkan perhitungan manajemen. Laporan keuangan tahun 2012 dan 2011 sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012*	2011*
		(tidak diaudit)					
Pendapatan	2.423.134	2.141.131	4.469.784	4.106.175	3.197.139	2.265.260	1.650.906
Laba Bruto	2.106.428	1.870.429	3.899.044	3.530.770	2.728.803	1.977.425	1.446.042
Laba Usaha	2.035.745	1.833.167	4.496.680	2.393.854	755.590	2.998.782	820.779
Laba Tahun/Periode Berjalan	1.324.774	1.174.475	2.956.750	1.089.684	149.930	1.857.763	281.611
Total Penghasilan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan, Sesudah Pajak	1.322.756	1.184.316	2.953.982	1.013.552	212.660	1.898.006	294.108

*) Disajikan kembali berdasarkan perhitungan manajemen. Laporan keuangan tahun 2012 dan 2011 sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Obligasi yang Pernah Diterbitkan oleh Perseroan

Pada tahun 2014, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 yang telah dicatatkan di BEI dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Penerbitan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 tersebut telah memperoleh surat Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK pada tanggal 20 Februari 2014.

Pada tahun 2014, PFBV menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar-besarnya SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang jatuh tempo pada tahun 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran PFBV sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh CGIF, sebuah lembaga dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam jaminan CGIF. Obligasi Senior ini tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Singapura pada tanggal 28 November 2014. Berdasarkan persetujuan yang diperoleh dalam rapat umum pemegang obligasi tertanggal 22 Juli 2016, PFBV telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas Obligasi Senior kepada Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah obligasi terutang Perseroan adalah sebesar Rp2.720.219 juta.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII pada Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Keterangan Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XXI Keterangan Mengenai Wali Amanat.

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO TAHAP I

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.500.000.000.000,- (ENAM TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi sebagai berikut:

- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah).
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah).
- Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp103.000.000.000,- (seratus tiga miliar Rupiah).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap kuartalan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 23 November 2019 untuk Obligasi Seri A, 23 November 2021 untuk Obligasi Seri B dan 23 November 2023 untuk Obligasi Seri C.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari Fitch dengan peringkat:

AAA(idn)
(triple A)

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek di dalam Prospektus.



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi

Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. PHH. Mustopa Komp. Surapati Core
Blok AB (Angrek Boulevard) No.16 Bandung
Tel: +6222 87240220 Faks: +6222 87242652
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.protelindo.co.id/www.ptmsn.co.id

Kantor Cabang

Menara BCA Lantai 53 dan 55
Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310
Tel: +6221 2358 5500 Faks: +6221 2358 6446

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tertanggal 16 September 2016 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik No. 05653/PSS-AS/2016 tanggal 13 September 2016.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

• Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016.

• Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

• Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Obligasi Seri B sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
3. Obligasi Seri C sebesar Rp103.000.000.000,- (seratus tiga miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

• Harga Penawaran Obligasi

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

• Bunga Obligasi

Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

1. Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan persen) per tahun;
2. Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan
3. Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap kuartalan sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Februari 2017 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 23 November 2019 untuk Obligasi Seri A, Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 23 November 2021 untuk Obligasi Seri B, dan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 23 November 2023 untuk Obligasi Seri C. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
Bunga Obligasi Ke-1	23 Februari 2017	23 Februari 2017	23 Februari 2017
Bunga Obligasi Ke-2	23 Mei 2017	23 Mei 2017	23 Mei 2017
Bunga Obligasi Ke-3	23 Agustus 2017	23 Agustus 2017	23 Agustus 2017
Bunga Obligasi Ke-4	23 November 2017	23 November 2017	23 November 2017
Bunga Obligasi Ke-5	23 Februari 2018	23 Februari 2018	23 Februari 2018
Bunga Obligasi Ke-6	23 Mei 2018	23 Mei 2018	23 Mei 2018
Bunga Obligasi Ke-7	23 Agustus 2018	23 Agustus 2018	23 Agustus 2018
Bunga Obligasi Ke-8	23 November 2018	23 November 2018	23 November 2018
Bunga Obligasi Ke-9	23 Februari 2019	23 Februari 2019	23 Februari 2019
Bunga Obligasi Ke-10	23 Mei 2019	23 Mei 2019	23 Mei 2019
Bunga Obligasi Ke-11	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
Bunga Obligasi Ke-12	23 November 2019	23 November 2019	23 November 2019
Bunga Obligasi Ke-13		23 Februari 2020	23 Februari 2020
Bunga Obligasi Ke-14		23 Mei 2020	23 Mei 2020
Bunga Obligasi Ke-15		23 Agustus 2020	23 Agustus 2020
Bunga Obligasi Ke-16		23 November 2020	23 November 2020
Bunga Obligasi Ke-17		23 Februari 2021	23 Februari 2021
Bunga Obligasi Ke-18		23 Mei 2021	23 Mei 2021
Bunga Obligasi Ke-19		23 Agustus 2021	23 Agustus 2021
Bunga Obligasi Ke-20		23 November 2021	23 November 2021
Bunga Obligasi Ke-21			23 Februari 2022
Bunga Obligasi Ke-22			23 Mei 2022
Bunga Obligasi Ke-23			23 Agustus 2022
Bunga Obligasi Ke-24			23 November 2022
Bunga Obligasi Ke-25			23 Februari 2023
Bunga Obligasi Ke-26			23 Mei 2023
Bunga Obligasi Ke-27			23 Agustus 2023
Bunga Obligasi Ke-28			23 November 2023

- **Satuan Pemindahbukuan**

Satuan Pemindahbukuan adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

- **Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

- **Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak pemegang Obligasi ini adalah *paripassu* tanpa hak preferen berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

- **Hasil Pemeringkatan Obligasi**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 147/DIR/RAT/IX/2016 tanggal 8 September 2016 dari Fitch, Obligasi telah mendapat peringkat:

AAA(idn)
(triple A)

Fitch memberikan peringkat AAA(idn) untuk Obligasi dengan nilai maksimal sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan akan melakukan peringkat tahunan atas Obligasi yang diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan seluruh kewajiban yang terkait Obligasi ini telah selesai, dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11.

Perusahaan pemeringkat efek, dalam hal ini Fitch, tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

- **Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

- **Wali Amanat**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Permata Tbk, beralamat di WTC II Lantai 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920.

- **Pembatasan, Kewajiban dan Kelalaian Perseroan**

Sesuai dengan pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, sesuai pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

- **Rapat Umum Pemegang Obligasi**

Penjelasan mengenai RUPO dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

- **Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

- **Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi**

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

- **Perpajakan**

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.

- **Hak Senioritas Atas Utang**

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

- **Tambahan Utang yang Dapat Dibuat Perseroan**

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan penerbitan instrumen Efek bersifat hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya *non-recourse* yang diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan lebih lanjut dari tambahan utang yang dapat diperoleh Perseroan pada masa yang akan datang dapat dilihat pada Bab XVII Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus ini.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya pada rekening yang ditunjuk untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau bunga Obligasi yaitu sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.: VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi

- kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4.
6. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut diumumkan dalam surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang dikemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

- b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan menara dan pengoperasian menara.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sampai dengan seluruh dana telah direalisasikan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/ 2015.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPU sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/ 2015.

Pelaksanaan seluruh transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan Perseroan (tidak termasuk PPN) adalah sebesar kurang lebih 1,58% dari nilai Emisi Obligasi. Semua biaya di bawah ini merupakan persentase dari total perkiraan biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,35%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,300%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,70% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,49%, Konsultan Hukum sekitar 0,16% dan Notaris sekitar 0,05%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,30% yang terdiri dari: Wali Amanat sekitar 0,22% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,08%.
- Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sekitar 0,09%.
- Biaya Pencatatan, yang terdiri biaya pencatatan di KSEI sekitar 0,02% dan BEI sekitar 0,02%.
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, dan *investor gathering*) sekitar 0,10%.

III. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Pada tahun 2014, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 yang telah dicatatkan di BEI dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Penerbitan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 tersebut telah memperoleh surat Pernyataan Efektif dari OJK pada tanggal 20 Februari 2014.

Pada tahun 2014, PFBV menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar-besarnya SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang jatuh tempo pada tahun 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran PFBV sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh CGIF, sebuah lembaga dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam jaminan CGIF. Obligasi Senior ini tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Singapura pada tanggal 28 November 2014. Berdasarkan persetujuan yang diperoleh dalam rapat umum pemegang obligasi tertanggal 22 Juli 2016, PFBV telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas Obligasi Senior kepada Perseroan.

IV. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Feniwati Chendana, CPA.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp17.282.057 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2016
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang pembangunan menara dan lainnya	
Pihak ketiga	145.884
Pihak berelasi	29.515
Utang lain-lain – pihak ketiga	7.228
Utang pajak	141.724
Pendapatan diterima di muka	1.789.794
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22.443
Beban akrual	268.656
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	750.800
Utang obligasi	994.813
Total Liabilitas Jangka Pendek	4.150.857
Liabilitas Jangka Panjang	
Pendapatan diterima di muka	85.024
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	9.078.123
Utang obligasi	1.725.406
Utang swap valuta asing	131.252
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	76.713
Liabilitas pajak tangguhan, neto	1.782.815
Provisi jangka panjang	251.867
Total Liabilitas Jangka Panjang	13.131.200
TOTAL LIABILITAS	17.282.057

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Pembangunan Menara dan Lainnya

Saldo utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp145.884 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Smart Telecom	11.638
PT Tata Bersama	11.558
PT Ciptakomunindo Pradipta	9.045
Tn. Novan Soekarno	8.847
PT Central Investindo	5.846
PT Bahana Sandisat Global	5.209
CV Lintas Reka Cipta	4.616
PT Bach Multi Global	4.081
PT Mitra Iswara & Rorimpandey	3.979
PT Dwijaya Cipta Persada	3.855
PT Advanced Net Indonesia	3.691
PT Mitraselaras Inti Prima	3.616
Tn. Harsa Tanaya Rully	3.497
PT Dwi Pilar Pratama	2.410

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Grentech Indonesia	2.170
PT Serang Berkah Mandiri	2.036
Tn. Banindria Nigroho	1.567
PT Sarana Artha Lestari	1.467
PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa	1.393
PT Marsa Kanina Bestari	1.303
CV Karunia Pertiwi	942
CV Tirta Kusuma	756
PT Handal Karya Abadi	666
PT Pilar Gapura Nusa	629
PT Protech Mitra Perkasa	519
PT A Dua Sakti	483
CV Buana Pilar Mandiri	468
PT Trikarya Mulia Perkasa	367
PT Delvin Mitra Persada	335
PT Insani Daya Kreasi	227
PT Puncak Monterado	210
PT Kartika Asri Prima	204
PT Amala	192
PT Hutchison 3 Indonesia	190
PT Cakra Hexa Swadaya	169
PT Maxima Arta	167
PT Sanjiwani Karya Mandiri	163
CV Multi Engineering	157
PT Citicon Adinugraha	156
PT Pas Perkasa	138
PT HWL Construction	133
PT Sempurna Delapan	130
PT Danusari Mitra Sejahtera	79
CV Bhuztan Teknik Sandhika	27
PT Danakar	25
KPN B.V	-
PT Jardine Lloyd Thompson	-
PT Bukaka Teknik Utama	-
Lain-lain (kurang dari Rp3.000)	46.528
Jumlah	145.884

Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga tidak dijamin, tidak berbunga dan dilunasi dalam jangka waktu normal selama 30 - 60 hari.

2. Utang Lain-lain

Akun ini sebagian besar merupakan provisi Perseroan atas pengurangan utang sewa Telkom dan Smartfren sebesar 5% sampai 35% karena adanya penambahan penyewa menara (sebagai penyewa kedua dan ketiga) oleh Telkomsel, BTEL, XL, Hutchison, Smartfren, Berca, Axis, Sampoerna, First Media, dan Indosat.

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp141.724 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan:	
Pajak penghasilan karyawan - Pasal 21	6
Pajak penghasilan - 2016	133.264
	<hr/>
	133.270
Entitas Anak:	
Pajak pertambahan nilai	106
Pajak penghasilan karyawan	488
Pemotongan pajak penghasilan - Pasal 23/26	264
Pemotongan pajak penghasilan - Pasal 4(2)	36

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan - 2015	83
Pajak penghasilan - 2016	7.477
	8.454
Jumlah	141.724

4. Pendapatan Diterima di Muka

Total saldo pendapatan diterima dimuka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.874.818 juta yang terdiri dari bagian jangka pendek sebesar Rp1.789.794 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp85.024 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Hutchison 3 Indonesia	1.379.379
PT XL Axiata Tbk.	373.356
KPN B.V.	42.884
PT Telekomunikasi Selular	33.476
PT Indosat Tbk.	23.211
PT Internux	19.054
PT Smartfren Telecom Tbk.	2.224
PT Smart Telecom	99
PT Bakrie Telecom Tbk.	93
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	68
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	49
Lainnya	925
	1.874.818
Bagian jangka pendek	(1.789.794)
Bagian jangka panjang	85.024

5. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Saldo liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp22.443 juta.

6. Beban Akrua

Saldo beban akrual Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp268.656 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga:	
Perizinan dan lisensi	91.071
Pemeliharaan	35.797
Bunga pinjaman dan biaya bank	29.919
Jasa professional	18.226
Penalti	11.296
Bunga obligasi	9.625
Sewa lahan	8.616
Biaya pembangunan menara	806
Lainnya (kurang dari Rp3.000)	49.177
Pihak berelasi:	
Jasa konsultasi manajemen kunci	14.177
Jumlah	268.656

7. Bagian Utang Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun - Pihak Ketiga

Saldo bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp750.800 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pinjaman Fasilitas:	
Pihak ketiga:	
Management Tower Europe S.à r.l.	214.935
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta	343.393
PT Bank DBS Indonesia, cabang Jakarta	196.000
	754.328
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3.528)
	750.800

8. Bagian Utang Obligasi Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Saldo bagian utang obligasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp994.813 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Obligasi:	
Bagian jangka pendek	
Seri I	1.000.000
Dikurangi: Biaya obligasi yang belum diamortisasi	(5.187)
	994.813

9. Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun - Pihak Ketiga

Saldo utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp9.078.123 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pinjaman Fasilitas:	
Pihak ketiga:	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta	2.161.063
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura	1.611.018
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura	1.318.000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta	1.198.540
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, cabang Jakarta	1.000.000
DBS Bank Ltd., cabang Singapura	659.000
ING Bank N.V., cabang Singapura	293.018
BNP Paribas, cabang Singapura	197.700
Credit Suisse AG, cabang Singapura	197.700
CIMB Bank Berhad, cabang Singapura	197.700
Standard Chartered Bank, cabang Dubai	197.700
JPMorgan Chase Bank, N.A., cabang Singapura	197.700
	9.222.139
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(151.016)
	9.078.123

Amortisasi atas biaya pinjaman yang diakui pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp26.685 juta.

Pinjaman Fasilitas

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2016

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp500.000 juta dan USD38.000.000 dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, LTD., Cabang Jakarta ("BTMU") ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp500.000 juta ("Fasilitas Pinjaman A") dan dan USD38.000.000 ("Fasilitas Pinjaman B") ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BTMU"). Iforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari XL. Perseroan dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman A adalah satu bulan, dan untuk Fasilitas Pinjaman B adalah tiga bulan. Fasilitas-fasilitas pinjaman BTMU jatuh tempo pada periode bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2021.

Fasilitas Pinjaman A dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman B dikenakan tingkat persentase per tahun sebagaimana disetujui oleh BTMU dan Perseroan dalam konfirmasi. Fasilitas-fasilitas pinjaman BTMU telah dicairkan pada tanggal 29 Juni 2016.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara Iforte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BTMU sebagai pemberi pinjaman.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman Rupiah dan Dolar Amerika Serikat tersebut masing-masing adalah 8,93% dan 2,68% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Iforte telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp1.000.000 juta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") ("Perjanjian Fasilitas BNI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BNI tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp1.000.000 juta ("Fasilitas Pinjaman BNI") dan Iforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BNI adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari XL. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman BNI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman BNI adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman BNI jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2023.

Fasilitas Pinjaman BNI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman BNI telah dicairkan pada tanggal 29 Juni 2016.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BNI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara Iforte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BNI sebagai agen fasilitas.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut berkisar antara 8,52% sampai 10,85% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Iforte telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp1.000.000 juta dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI") ("Perjanjian Fasilitas BSMI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BSMI tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp1.000.000 juta ("Fasilitas Pinjaman BSMI") dan Iforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BSMI adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari XL. Perseroan dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman BSMI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman BSMI adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman BSMI jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2021.

Fasilitas Pinjaman BSMI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman BSMI telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 29 Juni 2016.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BSMI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara Iforte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BSMI sebagai pemberi pinjaman.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut adalah 9,06% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Iforte telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2015

Pada tanggal 11 Agustus 2015, Iforte dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp350.000 juta dengan PT Bank DBS Indonesia ("BDI") ("Perjanjian Fasilitas BDI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BDI tersebut, Iforte menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp350.000 juta ("Fasilitas Pinjaman BDI") dan Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Iforte atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BDI ini adalah untuk (i) melunasi fasilitas pinjaman yang dimiliki Iforte berdasarkan perjanjian fasilitas tertanggal 22 Februari 2013 beserta amandemennya yang dibuat oleh dan antara Iforte dan BDI, dan (ii) keperluan korporasi yang bersifat umum dari Iforte. Iforte dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman BDI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman DBS adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman Berulang BDI jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 11 Agustus 2016.

Fasilitas Pinjaman BDI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu sebesar 2,15% per tahun. Fasilitas Pinjaman BDI telah dicairkan sebagian pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp150.000 juta, tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp13.000 juta, tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp5.000 juta, tanggal 21 Desember sebesar Rp13.000 juta dan tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp5.000 juta.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BDI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Pergantian Kerugian Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2015 oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BDI sebagai agen fasilitas.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut berkisar antara 8,22% sampai 8,47% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Selain itu, Entitas Anak juga diwajibkan untuk memenuhi ketentuan *running EBITDA to interest expenses*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anaknya telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014

Pada tanggal 19 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka EUR20.000.000 dan Kredit Berulang USD100.000.000 dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC tersebut, Protelindo Finance B.V. menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah EUR20.000.000 ("Fasilitas Pinjaman A") dan USD100.000.000 ("Fasilitas Pinjaman B") ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC") dan Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Protelindo Finance B.V. atas fasilitas-fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Protelindo Finance B.V. dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman A akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2019. Fasilitas Pinjaman B akan jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

Fasilitas Pinjaman A akan dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan EURIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman B akan dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Dolar AS dan Euro tersebut masing-masing berkisar antara 2,36% sampai 2,40% dan 1,95% sampai 1,95% per tahun. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 20 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang USD100.000.000 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura ("Perjanjian Fasilitas SMBC"), sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 30 Juni 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah USD100.000.000 mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas SMBC kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman SMBC") dan lforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Tujuan Perjanjian Fasilitas SMBC ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman SMBC ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman SMBC adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman SMBC jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

Fasilitas Pinjaman SMBC dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah marjin yang berlaku, yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman SMBC telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Dolar AS tersebut berkisar antara 2,36% sampai 2,40% per tahun. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 19 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang USD50.000.000 dengan DBS Bank Ltd. ("Perjanjian Fasilitas DBS") sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 30 Juni 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah USD50.000.000 mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas DBS kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman DBS") dan lforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Tujuan Perjanjian Fasilitas DBS ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman DBS ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman DBS adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman DBS jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

Fasilitas Pinjaman DBS dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah marjin yang berlaku, yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman DBS telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Dolar AS tersebut berkisar antara 2,35% sampai 2,40% per tahun. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Pada tanggal 19 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka EUR20.000.000 dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura ("Perjanjian Fasilitas ING"), sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 30 Juni 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan ING"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan ING tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah EUR20.000.000 mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam

Perjanjian Fasilitas ING kepada Perseroan (“Fasilitas Pinjaman ING”) dan Iforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan ING adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Tujuan Perjanjian Fasilitas ING ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman ING (“Periode Bunga”). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman ING adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman ING jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

Fasilitas Pinjaman ING dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan EURIBOR ditambah marjin yang berlaku, yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman ING telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Euro tersebut berkisar antara 1,95% per tahun. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 20 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Kredit Berulang USD90.000.000 dengan grup kreditur yang terdiri BNP Paribas, bertindak melalui cabangnya di Singapura, Credit Suisse AG, Cabang Singapura, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Pusat Keuangan Internasional Dubai, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta, dan JPMorgan Chase Bank, N.A, Cabang Jakarta (“Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi”). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi tersebut, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah USD90.000.000 (“Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi”). Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Protelindo Finance B.V. dan Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Protelindo Finance B.V. atau Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi (“Periode Bunga”). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi adalah tiga bulan. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 26 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Dolar AS tersebut berkisar antara 2,36% sampai 2,40% per tahun. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas Pinjaman Desember 2012

Pada tanggal 20 Desember 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas sampai dengan Rp1.100.000 juta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama tanggal 20 Mei 2013, Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 25 Februari 2014, Perjanjian Perubahan tanggal 30 Juni 2015 dan Perjanjian Perubahan terakhir tanggal 30 Juni 2016 (“Fasilitas Pinjaman Desember 2012”) dan Iforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Seluruh dana dari Fasilitas Pinjaman Desember 2012 telah digunakan untuk membayar Pinjaman Antar Perusahaan kepada Protelindo Towers B.V. Protelindo Towers B.V., selanjutnya, telah mendistribusikan dana yang diterima kepada Protelindo Netherlands B.V. yang selanjutnya telah digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman dari Protelindo Finance B.V. Selanjutnya Protelindo Finance B.V. menggunakan dana yang diterima untuk membayar sebagian Fasilitas Pinjaman *Bridge* yang diterimanya.

Fasilitas Pinjaman Desember 2012 ini akan dibayar secara kuartalan mulai 31 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2019 dan dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 2,95% per tahun. Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 berkisar antara 8,53% sampai 10,85% per tahun (31 Desember 2015 berkisar antara 9,17% sampai per 10,85% per tahun,

31 Desember 2014 berkisar antara 9,55% sampai dengan 10,90% per tahun, 31 Desember 2013 berkisar antara 7,50% sampai dengan 10,45% per tahun).

Perseroan diminta untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan telah melunasi cicilan pinjaman masing-masing sebesar Rp55.000 juta, Rp110.000 juta, Rp44.000 juta, dan Rp27.500 juta. Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 jumlah sisa pinjaman dari Fasilitas Pinjaman Desember 2012 masing-masing sebesar Rp863.500 juta, Rp918.500 juta, Rp1.028.500 juta dan Rp1.072.500 juta.

Fasilitas Pinjaman Desember 2011

Pada tanggal 23 Desember 2011, Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai maksimum sampai dengan sebesar Rp2.000.000 juta sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 10 Desember 2012, Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 20 Desember 2012, Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 20 Mei 2013, Perjanjian Perubahan Keempat tertanggal 25 Februari 2014, Perjanjian Perubahan tanggal 30 Juni 2015 dan Perjanjian Perubahan terakhir tanggal 30 Juni 2016 (“Fasilitas Pinjaman Desember 2011”) dan lforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini.

Fasilitas Pinjaman ini digunakan untuk (i) membayar biaya-biaya dan beban-beban yang terkait, (ii) untuk membiayai akuisisi menara, akuisisi kepemilikan saham perusahaan-perusahaan menara telekomunikasi, membiayai pembangunan build to suit untuk lokasi menara yang baru, dan (iii) untuk melunasi fasilitas yang ada sebatas diijinkan berdasarkan Fasilitas Pinjaman Mei 2010, Fasilitas Pinjaman Mei 2011 dan Fasilitas Pinjaman Desember 2010. Pinjaman ini telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 2 November 2012.

Fasilitas Pinjaman Desember 2011 ini dibayar secara kuartalan mulai 31 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2018. Fasilitas Pinjaman Desember 2011 ini dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 2,95% per tahun. Terhitung sejak 7 Juli 2015, margin yang berlaku adalah sebesar 2,50% per tahun. Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 berkisar antara 8,53% sampai 10,85% per tahun (31 Desember 2015 berkisar antara 9,17% sampai per 10,85% per tahun, 31 Desember 2014 berkisar antara 9,55% sampai dengan 10,90% per tahun, 31 Desember 2013 berkisar antara 7,50% sampai dengan 10,45% per tahun).

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian Perubahan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., (“Perjanjian Perubahan”) yang merupakan perubahan perjanjian Fasilitas Pinjaman Desember 2011. Perjanjian Perubahan mengubah ketentuan, diantaranya, mengenai jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dimana seluruh jaminan sebelumnya yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah dilepaskan.

Perseroan diminta untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Untuk periode enam bulan pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan telah melunasi cicilan pinjaman masing-masing sebesar Rp79.219 juta, Rp96.024 juta, Rp96.024 juta, dan Rp80.000 juta. Pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 jumlah sisa pinjaman dari Fasilitas Pinjaman Desember 2012 masing-masing sebesar Rp640.957 juta, Rp720.176 juta, Rp816.200 juta dan Rp912.223 juta.

10. Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun - Pihak Ketiga

Saldo bagian utang obligasi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.725.406 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Obligasi:	
Bagian jangka pendek	
CGIF	1.758.702
Dikurangi: Biaya obligasi yang belum diamortisasi	(33.296)
	1.725.406

Obligasi Protelindo I Tahun 2014

Pada tanggal 20 Februari 2014, Protelindo telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK melalui surat No. S-95/D.04/2014 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Maret 2014. Obligasi ini dikeluarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017. Wali amanat sehubungan dengan penawaran umum ini adalah PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Protelindo. Pada tanggal 13 Mei 2016, Obligasi AAA (idn) mendapat peringkat dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi telah dipergunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian saldo utang Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bunga dari Obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2014 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok Obligasi. Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- o Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas
- o Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- o Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang terakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar 10,565%.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance B.V. menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang akan jatuh tempo di 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran dari Protelindo Finance B.V. sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF"), sebuah dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF. Sehubungan dengan Obligasi Senior, Perseroan, Protelindo Finance B.V., dan CGIF telah menandatangani suatu perjanjian pembayaran kembali dan ganti rugi yang mana, antara lain, mengatur tentang pembayaran biaya penjaminan dan lainnya sehubungan Jaminan CGIF dan dasar dari biaya yang dibayarkan oleh CGIF berdasarkan Jaminan CGIF akan diganti dan dijamin oleh Protelindo Finance B.V. dan Perseroan.

DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Senior. Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT") pada tanggal 28 November 2014.

Obligasi Senior tersebut dikenakan bunga sejak 27 November 2014 pada tingkat suku bunga sebesar 3,25 % per tahun, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November, setiap tahunnya, dimulai sejak 27 Mei 2015. Dibawah ini adalah beberapa ketentuan sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut:

- a) Baik Perseroan, Protelindo Finance B.V. ataupun para Entitas Anak akan, membuat atau mengizinkan untuk menjamin seluruh atau sebagian dari properti, aset ataupun pendapatan (termasuk saham yang belum dibayarkan) yang ada atau yang akan ada.
- b) Protelindo Finance B.V. akan tetap menjadi Entitas Anak dari Perseroan.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 3,27%, 3,27% dan 3,29%.

Pada tanggal 13 November 2014, Standard dan Poor's Ratings Services memberikan peringkat 'AA' untuk Obligasi Senior tersebut. Protelindo Finance B.V. mempergunakan dana dari penerbitan Obligasi Senior, setelah dipotong biaya manajemen, komisi dan biaya lainnya sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut, untuk melunasi sebagian dari pinjamannya yang ada.

11. Utang Swap Valuta Asing

Saldo swap valuta asing Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp131.252 juta.

12. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp76.713 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas	76.713
Biaya jasa lalu yang tidak diakui - belum menjadi hak	-
Kerugian aktuarial yang belum diakui	-
Jumlah	76.713

13. Liabilitas Pajak Tangguhan, neto

Saldo liabilitas pajak tangguhan neto Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.782.815 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan:	
Aset pajak tangguhan:	
Provisi biaya perijinan dan lisensi	22.754
Provisi imbalan kerja	14.823
Akrual bonus karyawan	3.906
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	33.261
	<u>74.744</u>
Liabilitas pajak tangguhan:	
Aset tetap	5.279
Properti investasi	(1.613.311)
Provisi potongan harga	(308)
Aset tak berwujud	(162.394)
Biaya pinjaman	(48.257)
	<u>(1.818.991)</u>
Liabilitas pajak tangguhan Perseroan, neto	(1.744.247)

Entitas Anak:

Aset pajak tangguhan:	
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	205
Penyisihan biaya perijinan	66
Kewajiban imbalan kerja	3.054
	3.325
Liabilitas pajak tangguhan:	
Aset tetap	(6.333)
Properti investasi	(35.560)
	(41.893)
	(38.568)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak	(38.568)
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	(1.782.815)

14. Provisi Jangka Panjang

Saldo provisi jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp251.867 juta.

TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA

- Pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan sebagai penjamin, dan Protelindo Luxembourg S.a.r.l ("Protelindo Luxembourg") sebagai penjual telah menandatangani *Share Purchase Agreement* dengan masing-masing, Cellnex Telecom S.A. ("Cellnex") sebagai pembeli dan Management Tower Europe S.a.r.l. ("Management Tower") sebagai penjual terkait dengan penjualan seluruh saham dalam Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV") kepada Cellnex ("Transaksi"). Berdasarkan Transaksi dimaksud di atas, Cellnex telah sepakat untuk membeli dan menerima pengalihan seluruh saham dalam PNBV, yang dimiliki oleh Protelindo Luxembourg (56%) dan Management Tower Europe S.a.r.l. (44%) (secara bersama-sama "Para Penjual"), yang penyelesaiannya akan dilaksanakan paling lambat pada 31 Oktober 2016. Seluruh rangkaian Transaksi telah diselesaikan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement* pada tanggal 1 Juli 2016.
- Pada tanggal 1 Juli 2016, Fasilitas Pinjaman *Management Tower Europe* (MTE) telah dilunasi seluruhnya.
- Pada tanggal 1 Juli 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Novasi dan Perubahan untuk mengubah Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka EUR20.000.000 dan Kredit Berulang USD100.000.000 dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC") ("Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah EUR20.000.000 ("Fasilitas Pinjaman A") dan USD100.000.000 ("Fasilitas Pinjaman B") mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas-Fasilitas-Fasilitas OCBC kepada Perseroan dan Iforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan.
- Pada tanggal 1 Juli 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Novasi dan Perubahan untuk mengubah Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Kredit Berulang USD90.000.000 dengan grup kreditur yang terdiri BNP Paribas, bertindak melalui cabangnya di Singapura, Credit Suisse AG, Cabang Singapura, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Pusat Keuangan Internasional Dubai, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta dan JPMorgan Chase Bank, N.A, Cabang Jakarta ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi") ("Perjanjian Novasi dan Perubahan Sindikasi"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan Sindikasi tersebut, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah USD90.000.000, mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi kepada Perseroan dan Iforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan Sindikasi adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan.
- Pada tanggal 1 Juli 2016, Iforte dan Perseroan menandatangani Perjanjian Perubahan untuk mengubah Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp350.000 juta dengan PT Bank DBS Indonesia ("Perjanjian Perubahan BDI"). Tujuan Perjanjian Perubahan BDI ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas BDI dengan perjanjian-perjanjian fasilitas Perseroan yang telah diamandemen dan dinovasi.
- Pada tanggal 14 Juli 2016, Fasilitas Pinjaman ING telah dilunasi seluruhnya.
- Pada tanggal 14 Juli 2016 dan 28 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan atas Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC masing-masing sebesar EUR20.000.000 dan AS\$40.000.000.
- Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani (i) *Amended and Restated Trust Deed*, (ii) *Amended and Restated Agency Agreement*, (iii) *Deed of Amendment relating to the Reimbursement*

and Indemnity Agreement, dengan *Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank* sebagai Penjamin, DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat, Deutsche Bank AG, Cabang Hong Kong sebagai *Principal Paying Agent* dan *Transfer Agent* dan Deutsche Bank Luxembourg S.A. sebagai Registrar. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tindak lanjut diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* pada tanggal 22 Juli 2016 untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Surat Utang, yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Surat Utang ("Transaksi") terhadap para pemegang surat utang (*bondholders*). Pada tanggal 3 Agustus 2016, Perseroan juga telah menandatangani ISDA 2002 *Master Agreement, Novation Agreement* dan *Termination Deed* masing-masing dengan DBS Bank Ltd dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga sehubungan dengan Transaksi.

- Pada tanggal 22 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V., Entitas Anak, telah didaftarkan untuk proses pembubaran perusahaan di *The Netherland Chamber of Commerce Commercial Register*, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Register Komersial Kamar Dagang Belanda (*The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register Extract*) tanggal 1 September 2016.
- Pada tanggal 25 Agustus 2016, Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi telah dilunasi seluruhnya.
- Pada tanggal 23 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan sebagian atas Fasilitas Pinjaman DBS sebesar AS\$20.000.000.
- Pada tanggal 28 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan sebagian atas Fasilitas Pinjaman SMBC sebesar AS\$40.000.000.
- Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak dan untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak, pada tanggal 28 September 2016 Perseroan menyampaikan surat pernyataan harta kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I dan membayarkan uang tebusan sebesar Rp71 juta pada tanggal 26 September 2016.
- Pada tanggal 1 Oktober 2016, Iforte dan Perseroan menandatangani Perjanjian Perubahan Kedua untuk mengubah Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp350.000 juta beserta perubahannya dengan PT Bank DBS Indonesia ("Perjanjian Perubahan Kedua BDI"). Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua BDI, tanggal jatuh tempo diperpanjang menjadi tanggal 1 Oktober 2017.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Umum

Perseroan dan Entitas Anak adalah pemilik dan operator independen utama dari menara-menara operator telekomunikasi di Indonesia dan Belanda. Pada 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 14.775 *Telecommunication Tower Sites* (RFI), termasuk *Telecommunication Tower Sites* di Jawa, yang merupakan pulau dengan populasi terpadat di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak memiliki basis pelanggan yang bervariasi termasuk empat operator telekomunikasi utama di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak saat ini memiliki MLA (*master lease agreement*) dengan seluruh pelanggan yang mencakup sejumlah 24.726 sewa lokasi pada 30 Juni 2016.

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah menyewakan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak kepada operator telekomunikasi. Ruang yang disewakan ini mencakup ruang vertikal dari menara dimana pelanggan Perseroan dan Entitas Anak dapat memasang antena frekuensi radio (*Radio Frequency*) dan antena gelombang pendek (*microwave*), serta lahan tanah pada setiap lokasi untuk pendirian *shelters* yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik. Pelanggan Perseroan dan Entitas Anak biasanya menyewa tambahan ruang dari Perseroan dan Entitas Anak untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan cakupan dan jasa jaringan nirkabel.

Portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan merupakan portofolio yang terbesar yang dimiliki oleh penyedia menara independen di Indonesia per tanggal 30 Juni 2016, dan sebagian besar tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar lokasi *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak tidak berdekatan dengan *Telecommunication Tower Sites* perusahaan pesaing. Jaringan lokasi *Telecommunication Tower Sites* yang luas memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dari operator telekomunikasi di Indonesia. Jaringan ini bersama-sama dengan basis pelanggan Perseroan yang relatif bervariasi, memberikan Perseroan peluang usaha baru dari sumber yang berbeda-beda. Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki potensi pertumbuhan karena Perseroan dan Entitas Anak dapat menambah penyewa baru yang merupakan pengguna bersama (kolokasi) dan penyewa menara yang sudah ada dapat menambah peralatan baru.

2. Faktor-faktor Signifikan yang Mempengaruhi Hasil Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah:

- Permintaan atas ruang pada menara dan harga sewa;
- Ukuran portofolio *Telecommunication Tower Sites* dan jumlah pengguna bersama menara (kolokasi);
- Belanja modal dan biaya akuisisi;
- Fluktuasi nilai tukar mata uang; dan
- Jumlah biaya dan kewajiban.

Permintaan atas Ruang pada Menara Perseroan dan Harga Sewa

Permintaan atas ruang pada menara Perseroan disebabkan sejumlah faktor termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, strategi operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan jasa nirkabel dan keputusan operator telekomunikasi untuk mengoperasikan menara mereka sendiri atau mengalihdayakan kepada penyedia menara independen. Sementara itu, pertumbuhan industri telekomunikasi tergantung dari kondisi umum makroekonomi Indonesia, pola konsumsi serta daya beli masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) GDP Indonesia tumbuh 5,6% pada 2013, 5,0% pada 2014 dan 4,8% tahun 2015 dengan tingkat inflasi sebesar 8,38% pada 2013, 8,36% pada 2014 dan 3,35% pada 2015. Menurut informasi yang dikeluarkan oleh operator telekomunikasi, industri komunikasi nirkabel Indonesia, terutama jumlah pengguna telepon genggam tumbuh pesat pada empat tahun terakhir sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Indonesia dan juga sebagai akibat dari persaingan diantara operator telekomunikasi dan tekanan ke bawah atas harga yang dibayar pelanggan pada periode tersebut. Selain itu, pengenalan *smart phone* di

Indonesia telah menyebabkan permintaan yang lebih tinggi atas jaringan pelanggan nirkabel karena penggunaan data memerlukan *bandwidth* yang lebih besar dibandingkan komunikasi suara. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan pelanggan atas kapasitas jaringan dan cakupan jaringan yang lebih besar.

Lebih jauh, pengenalan teknologi telepon genggam yang progresif dan maju seperti 3G dan 4G diperkirakan akan menyebabkan permintaan atas menara-menara baru, karena jarak maksimum transmisi untuk 3G dan 4G cenderung lebih pendek dibandingkan jarak pada teknologi yang ada saat ini, dan karena itu menyebabkan operator telekomunikasi harus memasang peralatan transmisi tambahan untuk mengkompensasi kisaran yang relatif lebih rendah dari 3G dan 4G. Operator telekomunikasi menggunakan strategi *asset-light* untuk menanggapi permintaan yang meningkat dengan cara (i) melepas portofolio menara mereka kepada perusahaan menara independen (ii) mengalihdayakan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen melalui rancangan *build-to-suit* dan (iii) menyewa ruang pada menara yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia menara independen sebagai pengguna bersama menara (kolokasi). Strategi ini memungkinkan operator telekomunikasi untuk menurunkan belanja modal dan memperluas jaringan dan kapasitas jaringan mereka dengan lebih cepat dibandingkan apabila mereka diharuskan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan menara mereka sendiri. Hal ini juga memungkinkan operator telekomunikasi untuk memonetisasi portofolio menara mereka terutama pada saat menara mendekati akhir periode depresiasi.

Perubahan dan adopsi teknologi telekomunikasi yang baru juga dapat mempengaruhi permintaan atas ruang lahan pada menara karena operator telekomunikasi menggunakan teknologi baru yang mungkin membutuhkan penggunaan ruang yang lebih luas pada menara.

Ukuran Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak dan Jumlah Pengguna Bersama Menara (Kolokasi)

Jumlah *Telecommunication Tower Sites* pada portofolio Perseroan dan Entitas Anak membawa pengaruh signifikan pada pendapatan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Untuk mengelola biaya terkait dengan penambahan *Telecommunication Tower Sites*, Perseroan dan Entitas Anak hanya mengakuisisi atau membangun *Telecommunication Tower Sites* dan/atau infrastruktur pendukungnya sesudah Perseroan memiliki jaminan sewa jangka panjang dari penyewa utama *Telecommunication Tower Sites* tersebut.

Faktor signifikan lain yang mempengaruhi pendapatan Perseroan adalah jumlah pengguna bersama (kolokasi). Ukuran dari portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan memberikan kesempatan bagi pelanggan Perseroan untuk menyewa ruang pada menara Perseroan dan memenuhi kebutuhan rancangan disain dan perluasan jaringan mereka. Adanya kolokasi memberi keuntungan karena peningkatan belanja modal untuk mengakomodasi sedikitnya penambahan penyewa kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan biaya membangun atau mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites* baru. Perseroan biasanya membangun *Telecommunication Tower Sites* untuk mengakomodasi sedikitnya empat penyewa. Karena itu jumlah kolokasi dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan jumlah kolokasi merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan, laba operasi, margin keuntungan dan imbal hasil investasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan dalam menarik tambahan kolokasi terefleksikan pada *tenancy ratio*, yang mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan portofolio *Telecommunication Tower Sites*.

Biaya pemeliharaan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak, yang diperlukan dalam kegiatan usaha relatif rendah dibandingkan pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak.

Tabel berikut memperlihatkan informasi terkait dengan *Telecommunication Tower Sites* RFI Perseroan dan Entitas Anak dan penyewa:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
Jumlah <i>Telecommunication Tower Site</i>	14.775	12.237	11.595	9.766
Jumlah sewa	24.726	21.038	20.138	18.322

Belanja Modal Perseroan dan Biaya Akuisisi

Total belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk membangun dan mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites* baru pada 31 Desember 2013, 2014, 2015, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016 masing-masing adalah Rp1.530.649 juta, Rp1.701.569 juta, Rp1.639.443 juta, Rp962.380 juta dan Rp3.896.014 juta. Rata-rata belanja modal *Telecommunication Tower Sites* meningkat dalam satu tahun terakhir sebagai hasil dari ekspansi Perseroan dan Entitas Anak yang secara kontinyu mengembangkan portofolio *Telecommunication Tower Sites* baik melalui akuisisi maupun pembangunan *Telecommunication Tower Sites*. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak mengasumsikan akan terus

menyiapkan belanja modal untuk pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru dan Perseroan dan Entitas Anak dapat terbebani biaya akuisisi untuk mengembangkan usaha dan jaringan Perseroan dan Entitas Anak, mayoritas belanja modal bersifat fleksibel dan Perseroan akan meneruskan pada saat perkiraan kriteria imbal hasil Perseroan dan Entitas Anak terpenuhi, termasuk pada saat mendapatkan penyewa utama. Faktor lainnya yang dipertimbangkan Perseroan sebelum mengeluarkan belanja modal untuk pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru adalah kredibilitas dari calon penyewa, mata uang yang dipakai untuk pembayaran sewa dari penyewa dan mata uang yang dipakai pada saat belanja modal dibayarkan karena biaya pinjaman (*borrowing cost*) bervariasi tergantung dari denominasi mata uang pinjaman.

Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memberi pengaruh pada laba atau rugi bersih Perseroan dan Entitas Anak karena pinjaman Perseroan sebagian besar dalam denominasi Dolar Amerika Serikat sementara pencatatan akuntansi dan laporan keuangan dilakukan dan dinyatakan dalam Rupiah. Karena itu, pada setiap akhir periode laporan keuangan, Perseroan membukukan pada laporan laba komprehensif, pengaruh bersih yang direalisasikan dan belum direalisasikan karena depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama periode tersebut. Volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya selama lebih dari tiga tahun telah memberi pengaruh signifikan pada laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Sebagai contoh, pada tahun 2013, Perseroan membukukan kerugian selisih kurs bersih sebesar Rp887.902 juta sebagai akibat depresiasi yang signifikan dari Rupiah pada tahun tersebut dibandingkan kerugian selisih kurs bersih sebesar Rp4.962 juta pada 2014. Pada tahun 2015, Perseroan dan Entitas Anak membukukan kerugian selisih kurs bersih sebesar Rp427.947 juta. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak membukukan keuntungan selisih kurs bersih sebesar Rp195.405 juta.

Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, sekitar 35% dari pendapatan Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam Dolar Amerika Serikat (khususnya dari Hutchison) dan sisanya sebagian besar dalam denominasi Rupiah, sementara sebagian besar beban pokok pendapatan dan beban usaha adalah dalam denominasi Rupiah. Dengan struktur pinjaman yang dimiliki saat ini, Perseroan dan Entitas Anak memperkirakan saldo pinjaman dalam denominasi Dolar Amerika Serikat tidak akan menurun secara signifikan pada jangka waktu dekat, dengan demikian fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, sekitar 32% dari pendapatan Perseroan adalah dalam Dolar Amerika Serikat dan sisanya sebagian besar dalam denominasi Rupiah, sementara sebagian besar beban pokok pendapatan dan beban usaha adalah dalam denominasi Rupiah dan porsi besar dari kewajiban *debt service*, termasuk pembayaran bunga adalah dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.

Perseroan dan Entitas Anak dapat terkena ketidaksesuaian (*mismatch*) yang signifikan antara pinjaman dan pembayaran kewajiban dalam denominasi Dolar Amerika Serikat jika ada kenaikan dalam tingkat suku bunga dan/atau pembayaran kembali pokok pinjaman. Dalam kondisi seperti itu, depresiasi yang signifikan dari nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dapat memberi pengaruh yang merugikan terhadap laba bersih Perseroan (atau meningkatkan rugi bersih Perseroan) baik dalam Dolar Amerika Serikat maupun Rupiah. Saat ini, Perseroan tidak mengalami *mismatch* yang signifikan antara pendapatan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan pembayaran kewajiban. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak memperoleh pendapatan berdenominasi Dolar Amerika Serikat sebesar USD66.286.704 dan membayar dalam denominasi Dolar Amerika Serikat sebesar USD8.375.642 untuk bunga dan nihil untuk pembayaran pokok pinjaman. Jika Rupiah mengalami depresiasi terhadap USD sebesar 1,0%, laba sebelum beban pajak penghasilan akan menurun masing-masing sebesar Rp47.142 juta, Rp42.345 juta, Rp44.178 juta, dan Rp38.764 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014, 2015, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Saat ini, Perseroan telah melaksanakan kontrak lindung nilai untuk obligasi dengan mata uang SGD. Untuk meminimalkan pengaruh fluktuasi nilai mata uang, selain obligasi dalam mata uang SGD Perseroan kemungkinan akan melaksanakan kontrak lindung nilai di masa yang akan datang. Perseroan memperkirakan bahwa jumlah pinjaman dalam denominasi Dolar Amerika Serikat atau saldo kas dalam Dolar Amerika Serikat tidak akan menurun signifikan dalam waktu dekat. Karena itu, hasil usaha Perseroan tergantung pada fluktuasi nilai tukar mata uang antara Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

Jumlah Biaya dan Kewajiban

Untuk membiayai ekspansi yang pesat dari jaringan menara Perseroan dan Entitas Anak antara tahun 2010 dan 2012, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sejumlah kewajiban yang signifikan. Pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, total utang jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar Rp9.307.607 juta, Rp9.353.982 juta, Rp9.902.539 juta, dan Rp12.549.142 juta. Secara historis, Perseroan melakukan pinjaman untuk membiayai akuisisi *Telecommunication Tower Sites* dan pengembangan lokasi *Telecommunication Tower Sites*, dan ke depannya akan melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang sama. Beban bunga Perseroan dan Entitas Anak masing-masing sebesar Rp447.474 juta, Rp538.606 juta dan Rp503.499 juta untuk

tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, dan masing-masing Rp237.325 juta dan Rp249.360 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Jumlah kewajiban Perseroan dan Entitas Anak meningkat, sejalan dengan peningkatan *cost of funding*.

3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

a. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan dan Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain.

Pengendalian didapat ketika Perseroan terekspos atau memiliki hal atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Perseroan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*)
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Perseroan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Perseroan dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain
- Hak suara dan hak suara potensial Perseroan.

Perseroan menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai ketika Perseroan memiliki pengendalian atas Entitas Anak dan berhenti ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas Entitas Anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dari tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan menghentikan pengendalian atas Entitas Anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perseroan dan pada kepentingan non pengendali, walaupun hasil di kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perseroan akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Perubahan kepemilikan di Entitas Anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Perseroan dan Entitas Anaknya:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Perseroan akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

b. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar maupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi

ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar saat tanggal akuisisi.

Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laba rugi atau pendapatan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perseroan dan Entitas Anak yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Aset Tetap dan Penyusutan

Perseroan dan Entitas Anaknya telah memilih model biaya untuk aset tetap. Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun
Mesin	8
Peralatan kantor	4-8
Kendaraan bermotor	8
Peralatan proyek	4-25
Perabotan kantor	3-5

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah siap dipakai.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

e. Properti Investasi

Properti investasi awalnya diukur pada harga perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi dinyatakan sebesar nilai wajar, yang mencerminkan kondisi pasar pada tanggal pelaporan. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi termasuk dalam laporan laba rugi pada periode di mana mereka muncul, termasuk pengaruh pajak. Nilai wajar ditentukan berdasarkan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui dan didukung oleh bukti pasar.

Properti investasi adalah tanah atau bangunan (termasuk menara) atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke (atau dari) properti investasi hanya ketika ada perubahan penggunaan. Untuk transfer dari properti investasi ke pemilik-properti yang dimiliki, biaya perolehan berikutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang dimiliki menjadi properti investasi, Perseroan dan Entitas Anak mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan tanggal perubahan penggunaan.

Nilai kini dari biaya yang diharapkan untuk pembongkaran suatu aset setelah penggunaannya termasuk dalam biaya aset yang bersangkutan jika kriteria pengakuan untuk ketentuan terpenuhi. Jika efek dari nilai waktu dari uang material, provisi untuk pembongkaran didiskontokan menggunakan tarif sebelum pajak saat ini yang mencerminkan, jika sesuai, risiko spesifik untuk liabilitas. Ketika diskonto digunakan, peningkatan penyisihan pembongkaran karena berlalunya waktu diakui sebagai bagian dari biaya keuangan. Estimasi biaya masa depan atas pembongkaran ditinjau setiap tahun dan disesuaikan sewajarnya. Perubahan estimasi biaya masa depan, atau di tingkat diskonto yang diterapkan, ditambahkan atau dikurangi dari biaya aset.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari sewa operasi diakui pada saat diperoleh.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset dan liabilitas keuangan.

g. Perpajakan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan dan Entitas Anaknya menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Amandemen terhadap PSAK No. 46 (Revisi 2014) menghapuskan referensi terhadap pajak final yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup standar, dan menetapkan praduga perdebatan bahwa jumlah tercatat properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK No. 13, Properti Investasi, akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perseroan dan Entitas Anaknya memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan tanah, penghasilan sewa tanah dan jasa rekayasa dan konstruksi sebagai pos tersendiri. Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perseroan dan Entitas Anak juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini". Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan dan Entitas Anak menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan dan Entitas Anak mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini. Aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal *goodwill* (untuk liabilitas pajak tangguhan) atau aset atau kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan, pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba komersial maupun laba atau rugi fiskal.

h. **Goodwill dan Aset Tak Berwujud**

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset neto pada tanggal akuisisi. *Goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan. Keuntungan dan kerugian pelepasan entitas mencakup jumlah tercatat *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

Goodwill dialokasikan pada unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana *goodwill* tersebut timbul.

Aset takberwujud terdiri dari hubungan pelanggan yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 2 sampai 15 tahun.

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai *Goodwill*

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perseroan dan Entitas Anak menimbulkan *goodwill*. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Nilai tercatat *goodwill* Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp333.737 juta (31 Desember 2013: Rp207.730 juta; 31 Desember 2014: Rp186.883 juta; 31 Desember 2015: Rp363.150 juta).

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. *Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

ESTIMASI DAN ASUMSI

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Instrumen Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan dan Entitas Anak

menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perseroan dan Entitas Anak.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Nilai Wajar Properti Investasi

Pada akhir tahun, Perseroan menerima penilaian yang dilakukan oleh penilai independen untuk menetapkan nilai wajar properti investasi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan asumsi yang mencakup pendapatan sewa di masa depan, biaya pemeliharaan yang diantisipasi, biaya pengembangan di masa depan, dan tingkat suku bunga diskon yang sesuai. Penilai juga membuat referensi terhadap bukti pasar harga transaksi properti yang serupa. Pada tanggal pelaporan interim, Perseroan melakukan penilaian internal atas properti investasi dengan mengikuti perhitungan yang digunakan oleh penilai independen pada pelaporan tahun sebelumnya. Nilai properti investasi - menara Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, dan perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap menara yang direvaluasi.

Estimasi Biaya Pembongkaran Properti Investasi

Perseroan dan entitas anak melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran properti investasi pada akhir periode laporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan.

4. Keuangan

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Feniwati Chendana, CPA. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2015 (tidak diaudit) telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410.

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dihasilkan dari penyewaan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak dan penyewaan pemancar di dalam menara. Tabel berikut memperlihatkan pendapatan Perseroan untuk periode yang diindikasikan dengan rincian yang dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2016		2015		2015		2014		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Sewa menara (sewa operasi)	2.343.383	96,7	2.141.131	100,0	4.419.689	98,9	4.104.806	100,0	3.195.372	99,9
Sewa VSAT (sewa operasi)	52.399	2,2			24.211	0,5				
Sewa MWIFO (sewa operasi)	27.352	1,1			25.884	0,6				
Sewa pemancar (sewa pembiayaan)							1.369	0,0	1.767	0,1
Total	2.423.134	100,0	2.141.131	100,0	4.469.784	100,0	4.106.175	100,0	3.197.139	100,0

Untuk tetap menciptakan iklim usaha perusahaan menara independen terjaga dengan baik, Perseroan berkeyakinan bahwa harga jual bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberlangsungan bisnis menara independen. Beberapa faktor lain seperti pelayanan kepada pelanggan, hubungan baik dengan pelanggan, ketersediaan menara di lokasi yang dibutuhkan, dan aspek-aspek lainnya juga berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan menara independen termasuk kondisi makro ekonomi serta bisnis operator telekomunikasi khususnya.

Perseroan memiliki kontrak jangka panjang (minimal 10 tahun) dengan semua pelanggan, dengan kondisi adanya penyesuaian inflasi setiap tahun atas porsi dari bagian harga sewa, hal yang umum juga dilakukan oleh perusahaan menara independen lainnya. Dengan demikian bagi Perseroan, hal ini akan tetap menjaga posisi EBITDA margin yang sehat (di atas 80%) dan dapat menjaga pelayanan kepada pelanggan dengan baik.

Menurunkan harga jual bisa dimungkinkan tentunya dengan kesepakatan yang saling menguntungkan antara Perseroan dengan pelanggan, misal dengan kesepakatan jumlah *volume sites* yang akan disewa, sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan margin keuntungan Perseroan namun tetap dapat menjaga pelayanan yang baik kepada pelanggan tersebut.

Depresiasi dan Amortisasi

Depresiasi dan amortisasi terdiri depresiasi dari aset tetap, amortisasi dari asuransi portofolio *Telecommunication Tower Sites* dan pemancar, amortisasi sewa tanah dan lainnya, dan amortisasi aset takberwujud. Depresiasi dihitung dengan metode *straight-line* dengan estimasi masa manfaat dari aktiva tetap menara Perseroan yang diestimasikan akan selama 4-8 tahun. Tabel berikut memperlihatkan depresiasi dan amortisasi Perseroan untuk periode yang diindikasikan dengan rincian yang dinyatakan sebagai persentase dari total depresiasi dan amortisasi.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2016		2015 (tidak diaudit)		2015		2014		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Amortisasi sewa tanah	143.800	65,8	132.827	77,7	274.113	70,5	254.302	75,4	187.350	71,7
Amortisasi aset tak berwujud	56.316	25,8	22.226	13,0	78.979	20,3	48.416	14,4	44.207	16,9
Depresiasi aset tetap	14.845	6,8	11.002	6,4	25.645	6,6	24.123	7,2	19.080	7,3
Amortisasi asuransi	3.431	1,6	4.406	2,6	9.514	2,4	9.742	2,9	10.092	3,9
Lain-lain	197	0,0	448	0,3	807	0,2	551	0,1	451	0,2
Total	218.589	100,0	170.909	100,0	389.058	100,0	337.134	100,0	261.180	100,0

Beban Pokok Pendapatan Lainnya

Beban pokok pendapatan lainnya terutama terdiri dari biaya terkait pengoperasian dan pemeliharaan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak. Tabel berikut memperlihatkan beban pokok pendapatan lainnya dari periode yang diindikasikan dengan rincian yang dinyatakan sebagai persentase dari beban pokok pendapatan lainnya.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2016		2015 (tidak diaudit)		2015		2014		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perawatan lokasi	64.006	65,2	93.863	94,0	150.639	82,9	190.055	79,7	152.833	73,8
Perjalanan dinas	9.030	9,2	5.780	5,8	12.728	7,0	11.174	4,7	10.204	4,9
Listrik	3.439	3,5	-	0,0	3.164	1,8	36.397	15,3	44.118	21,3
Lain-lain	21.642	22,1	150	0,2	15.151	8,3	645	0,3	1	0,0
Total	98.117	100,0	99.793	100,0	181.682	100,0	238.271	100,0	207.156	100,0

Beban Penjualan dan Pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari gaji dan kesejahteraan karyawan, perjalanan dan transportasi, representasi dan jamuan, dan beban lainnya.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari gaji dan biaya kesejahteraan karyawan, imbal jasa profesional, perizinan dan lisensi, keperluan kantor, imbalan kerja, biaya perbankan dan beban lain-lain.

(Kerugian)/Keuntungan Lain-lain, Neto

(Kerugian)/keuntungan lain-lain, neto Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari keuntungan/(kerugian) selisih kurs, neto, kerugian penjualan aset tetap, beban penurunan nilai piutang usaha, beban penurunan nilai *goodwill* dan (kerugian)/keuntungan lainnya. Keuntungan/(kerugian) selisih kurs Perseroan terutama terkait dengan keuntungan dan kerugian belum direalisasikan yang dicatat sebagai hasil dari pengaruh fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan Dolar Amerika Serikat/Euro pada deposito dan pinjaman dalam denominasi Dolar Amerika Serikat/Euro Perseroan dan Entitas Anak.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan bunga bank yang diterima Perseroan dan Entitas Anak.

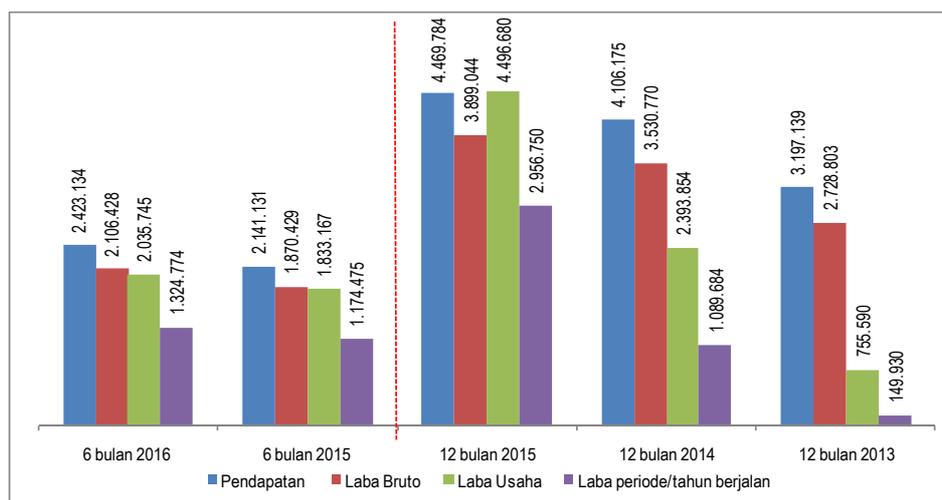
Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beban bunga bank, beban bunga obligasi, amortisasi biaya pinjaman, dan beban keuangan lainnya. Beban bunga bank dan beban bunga obligasi, amortisasi biaya pinjaman Perseroan terkait dengan utang jangka panjang. Beban keuangan lain antara lain terkait dengan bunga implisit dari kesepakatan dengan pelanggan dan provisi biaya pembongkaran aset.

Perpajakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban pajak kini maupun pajak yang ditangguhkan. Beban pajak kini adalah berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau kewajiban pajak tangguhan diakui untuk konsekuensi pajak yang akan datang yang timbul dari perbedaan jumlah aset dan kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban tersebut Perseroan mengakui kewajiban pajak tangguhan untuk semua perbedaan kena pajak temporer dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer pajak yang boleh dikurangkan, sejauh besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak tersebut akan tersedia pada masa yang akan datang dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perseroan dan Entitas Anak menghitung pajak tangguhan pada tarif pajak yang substansial berlaku atau pada tanggal laporan keuangan Perseroan untuk tahun/periode yang bersangkutan.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Laba Bruto, Laba Usaha dan Laba Periode/Tahun Berjalan
(dalam jutaan Rupiah)



Tabel berikut memperlihatkan perubahan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak pada setiap periode yang diindikasikan:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase dan nilai per saham)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	Δ%	2015 (tidak diaudit)	2015	Δ%	2014	Δ%	2013
Pendapatan	2.423.134	13,2	2.141.131	4.469.784	8,9	4.106.175	28,4	3.197.139
Depresiasi dan amortisasi	(218.589)	27,9	(170.909)	(389.058)	15,4	(337.134)	29,1	(261.180)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	Δ%	2015 (tidak diaudit)	2015	Δ%	2014	Δ%	2013
Beban pokok pendapatan lainnya	(98.117)	(1,7)	(99.793)	(181.682)	(23,7)	(238.271)	15,0	(207.156)
Beban Pokok Pendapatan	(316.706)	17,0	(270.702)	(570.740)	(0,8)	(575.405)	22,9	(468.336)
Laba Bruto	2.106.428	12,6	1.870.429	3.899.044	10,4	3.530.770	29,4	2.728.803
Beban penjualan dan pemasaran	(27.188)	(1,8)	(27.699)	(60.811)	19,4	(50.932)	40,9	(36.157)
Beban umum dan administrasi	(193.539)	(14,8)	(227.166)	(463.636)	12,7	(411.555)	28,9	(319.205)
Kenaikan/(Penurunan) nilai wajar properti investasi	109.730	(79,4)	531.428	1.631.663	(499,7)	(408.220)	(39,1)	(670.674)
Keuntungan/(Kerugian) lain-lain, neto	40.314	(112,8)	(313.825)	(509.580)	91,4	(266.209)	(71,9)	(947.177)
Laba Usaha	2.035.745	11,1	1.833.167	4.496.680	87,8	2.393.854	216,8	755.590
Pendapatan keuangan, bruto	38.974	332,8	9.005	15.368	77,6	8.652	73,0	5.002
Pajak final atas pendapatan keuangan	(7.795)	332,8	(1.801)	(3.010)	74,4	(1.726)	72,4	(1.001)
Pendapatan keuangan, neto	31.179	332,8	7.204	12.358	78,4	6.926	73,1	4.001
Biaya keuangan	(284.642)	6,7	(266.784)	(562.512)	(34,3)	(855.586)	55,2	(551.345)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.782.282	13,3	1.573.587	3.946.526	155,4	1.545.194	642,0	208.246
Beban pajak penghasilan	(457.508)	14,6	(399.112)	(989.776)	117,3	(455.510)	681,1	(58.316)
Laba tahun/periode berjalan	1.324.774	12,8	1.174.475	2.956.750	171,3	1.089.684	626,8	149.930
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain:								
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:								
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	(9.973)	(235,3)	7.369	13.752	n/a	-	-	-
Pajak penghasilan tangguhan terkait	2.493	(235,3)	(1.842)	(3.438)	n/a	-	-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:								
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	3.572	(534,5)	(822)	(4.736)	(88,7)	(41.912)	(150,1)	83.640
Keuntungan/(kerugian) bersih dari lindung nilai arus kas	3.711	(43,6)	6.574	(12.707)	(78,7)	(59.597)	n/a	-
Pajak penghasilan tangguhan terkait	(1.821)	26,6	(1.438)	4.361	(82,8)	25.377	(221,4)	(20.910)
Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain, sesudah pajak	(2.018)	(120,5)	9.841	(2.768)	(96,4)	(76.132)	(221,4)	62.730
Total laba komprehensif tahun berjalan, sesudah pajak	1.322.756	11,7	1.184.316	2.953.982	191,4	1.013.552	376,6	212.660
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:								
Pemilik entitas induk	1.321.510	12,7	1.172.982	2.950.500	170,5	1.090.934	609,4	153.785
Kepentingan non-pengendali	3.264	118,6	1.493	6.250	(600,0)	(1.250)	(67,6)	(3.855)
	1.324.774	12,8	1.174.475	2.956.750	171,3	1.089.684	626,8	149.930
Total laba/(rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:								
Pemilik entitas induk	1.319.552	11,6	1.182.724	2.947.649	190,0	1.016.531	369,0	216.735
Kepentingan non-pengendali	3.204	101,3	1.592	6.333	(312,6)	(2.979)	(26,9)	(4.075)
	1.322.756	11,7	1.184.316	2.953.982	191,4	1.013.552	376,6	212.660
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	398	12,7	353	888	170,7	328	613,0	46

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Pendapatan. Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.423.134 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp282.003 juta, atau 13,2%, dari posisi sebelumnya Rp2.141.131 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan pendapatan ini terutama berasal dari tambahan sewa menara kepada pihak ketiga yang mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp202.252 juta, atau 9,4%, menjadi sebesar Rp2.343.383 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari posisi sebelumnya Rp2.141.131 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan pendapatan juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa lokasi menjadi sebesar 24.726 pada tanggal 30 Juni 2016 dari sebesar 20.368 pada tanggal 30 Juni 2015. Pelanggan utama Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah Hutchison, Telkomsel, dan XL dengan kontribusinya terhadap total pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 masing-masing adalah 39,0%, 20,0% dan 19,0%.

Depresiasi dan Amortisasi. Depresiasi dan amortisasi Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp218.589 juta, meningkat sebesar Rp47.680 juta, atau 27,9%, dari posisi sebelumnya Rp170.909 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan amortisasi aset tidak berwujud sebesar 153,4% atau Rp34.090 juta menjadi Rp56.316 juta dan amortisasi sewa tanah dan lainnya yang meningkat sebesar 8,3% atau Rp10.973 juta menjadi Rp143.800 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah aset tidak berwujud dari akuisisi Entitas Anak Iforte dan peningkatan jumlah sewa tanah seiring dengan peningkatan jumlah *Telecommunication Tower Sites*.

Laba Bruto. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba bruto Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.106.428 juta, meningkat sebesar Rp235.999 juta atau 12,6%, dari posisi sebelumnya Rp1.870.429 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Beban Penjualan dan Pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp27.188 juta, menurun sebesar Rp511 juta atau 1,8% dari Rp27.699 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, terutama disebabkan penurunan biaya travel dan transport karyawan, serta biaya hiburan dan representasi. Rasio beban penjualan dan pemasaran terhadap pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 1,1% dan 1,3%.

Beban Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp193.539 juta, yang menurun sebesar Rp33.627 juta, atau 14,8%, dari posisi sebelumnya Rp227.166 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan ini terutama berasal dari menurunnya beban jasa profesional. Penurunan tersebut dikarenakan berkurangnya jasa konsultasi yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak kepada manajemen kunci selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Keuntungan/(kerugian) Lain-lain Neto. Perseroan dan Entitas Anak mencatat keuntungan lain-lain neto sebesar Rp40.314 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, meningkat sebesar Rp354.139 juta, atau 112,8%, dibandingkan dengan kerugian lain-lain sebesar Rp313.825 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, terutama disebabkan oleh keuntungan selisih kurs akibat terapresiasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar amerika serikat serta meningkatnya jumlah kas dan setara kas dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak.

Pendapatan Keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp31.179 juta, meningkat sebesar Rp23.975 juta, atau 332,8%, dari posisi sebelumnya Rp7.204 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo kas dan setara kas serta adanya deposito yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak selama enam bulan tersebut.

Biaya Keuangan. Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp284.642 juta, meningkat sebesar Rp17.858 juta, atau 6,7%, dari Rp266.784 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga bank dan bunga obligasi karena fluktuasi suku bunga pinjaman tertentu dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.782.282 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp208.695 juta atau 13,3%, dari posisi sebelumnya Rp1.573.587 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp457.508 juta, meningkat sebesar Rp58.396 juta, atau 14,6%, dari posisi sebelumnya Rp399.112 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan pada periode berjalan.

Laba Periode/Tahun Berjalan. Perseroan dan Entitas Anak mencatat laba periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp1.324.774 juta, mengalami peningkatan Rp150.299 juta, atau 12,8%, dibandingkan posisi sebelumnya Rp1.174.475 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Pendapatan/(Rugi) Komprehensif Lain. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mencatat rugi komprehensif lain sesudah pajak periode berjalan sebesar Rp2.018 juta, dari sebelumnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Perseroan memperoleh pendapatan komprehensif lain sebesar Rp9.841 juta. Hal ini berasal dari kerugian aktuarial dan penurunan keuntungan lindung nilai arus kas.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Sesudah Pajak. Total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak meningkat sebesar Rp138.440 juta atau 11,7% menjadi Rp1.322.756 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari Rp1.184.316 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan. Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp4.469.784 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp363.609 juta, atau 8,9%, dari posisi sebelumnya Rp4.106.175 juta pada tahun 2014. Pendapatan Perseroan dari sewa menara kepada pihak ketiga pada tahun 2015 adalah sebesar Rp4.419.689 juta, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp364.978 juta, atau 8,9%, dari Rp4.104.806 juta pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa lokasi menjadi sebesar 21.038 pada tahun 2015 dari 20.138 pada tahun 2014, peningkatan kurs tengah rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebesar 11% dimana pendapatan dalam dollar diperoleh dari Hutchison yang memiliki kontribusi sebesar 38,3% dari total pendapatan, peningkatan jumlah menara di pulau Jawa sebesar 458 dibandingkan tahun 2015 sebesar 6.666 menara yang mayoritas berasal dari pelanggan Hutchison dan XL. Selain itu pada pertengahan tahun 2015, Perseroan melalui Entitas Anak - Iforte mengakuisisi lebih dari 450 menara. Pendapatan dari sewa pemancar mengalami penurunan dibanding tahun 2014, hal ini disebabkan pada tahun 2015 perseroan sudah tidak menyewakan pemancar karena tidak diperpanjangnya kontrak sewa pemancar yang telah habis masa sewanya. Pelanggan utama Perseroan pada tahun 2015 adalah Hutchison, Telkomsel, dan XL dengan kontribusinya terhadap total pendapatan tahun 2015 masing-masing sebesar 38,3%, 20,1%, dan 19,9%.

Depresiasi dan Amortisasi. Depresiasi dan amortisasi pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp389.058 juta, meningkat sebesar Rp51.924 juta atau 15,4% dari Rp337.134 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan kenaikan amortisasi aset tak berwujud meningkat sebesar Rp30.563 juta atau 63,1% menjadi Rp78.979 juta dikarenakan adanya akuisisi anak perusahaan, dan amortisasi sewa tanah dan lainnya sebesar Rp19.811 juta atau 7,8% menjadi Rp274.113 juta, kenaikan ini disebabkan karena adanya akuisisi anak perusahaan pada bulan September 2015.

Beban Pokok Pendapatan Lainnya. Beban pokok pendapatan lainnya pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp181.682 juta, menurun sebesar Rp56.589 juta atau 23,7% dari Rp238.271 juta pada tahun 2014. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan biaya perawatan lokasi dan biaya listrik. Biaya perawatan lokasi menurun sebesar Rp39.416 juta atau 20,7% menjadi Rp150.639 juta, biaya listrik menurun sebesar Rp33.233 juta atau 91,3% menjadi Rp3.164 juta. Penurunan ini disebabkan karena adanya penghematan biaya oleh perusahaan. Serta perubahan perjanjian dengan *customer* yang mana biaya listrik akan langsung dibayarkan oleh *customer* itu sendiri sebelumnya biaya listrik akan dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan.

Laba Bruto. Laba bruto pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp3.899.044 juta, meningkat sebesar Rp368.274 juta atau 10,4% dari Rp3.530.770 juta pada tahun 2014 seiring dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 8,9%.

Beban Penjualan dan Pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp60.811 juta, meningkat sebesar Rp9.879 juta atau 19,4% dari Rp50.932 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp8.739 juta atau 49,5% menjadi Rp26.388 juta di tahun 2015 dan kenaikan beban representasi dan jamuan sebesar Rp1.212 juta atau 6,7% menjadi Rp19.240 juta di tahun 2015. Rasio beban penjualan terhadap pendapatan adalah 1,4% pada tahun 2015, meningkat dari 1,2% pada tahun 2014.

Beban Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp463.636 juta, meningkat sebesar Rp52.081 juta atau 12,7% dari Rp411.555 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp21.952 juta atau 10,8% menjadi Rp224.938 juta dan gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp17.893 juta atau 13,2% menjadi Rp153.777 juta. Rasio beban umum dan administrasi terhadap pendapatan adalah 10,4% pada tahun 2015 dan 10,0% pada tahun 2014.

Kerugian Lain-lain, Neto. Kerugian lain-lain neto adalah sebesar Rp509.580 juta pada tahun 2015, meningkat Rp243.371 juta atau 91,4% dari Rp266.209 juta pada tahun 2014 terutama disebabkan kerugian selisih kurs sebesar Rp427.947 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan kerugian selisih kurs sebesar Rp4.962 juta pada tahun 2014. Perubahan kerugian selisih kurs neto ini terutama disebabkan depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang signifikan pada tahun 2015.

Pendapatan Keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp12.358 juta pada tahun 2015, meningkat sebesar Rp5.432 juta atau 78,4%, dari Rp6.926 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan meningkatnya saldo rata-rata kas di bank karena peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Biaya Keuangan. Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah Rp562.512 juta pada tahun 2015, menurun sebesar Rp293.074 juta atau 34,3%, dari Rp855.586 juta pada tahun 2014 dikarenakan penurunan signifikan pada amortisasi sebesar Rp256.518 juta atau sebesar 82,8% dikarenakan ada penghapusan biaya pinjaman di 2014.

Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp2.401.332 juta menjadi Rp3.946.526 juta pada tahun 2015 dari Rp1.545.194 juta pada tahun 2014.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp989.776 juta, meningkat dari posisi sebelumnya Rp455.510 juta pada tahun 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak tangguhan yang berasal dari peningkatan yang signifikan pada kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Beban pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2015 adalah sekitar Rp586.588 juta, meningkat sebesar Rp550.640 juta dari posisi sebelumnya Rp35.948 juta pada tahun 2014.

Laba Periode/Tahun Berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp2.956.750 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan Rp1.089.684 juta pada tahun 2014.

Rugi Komprehensif Lain, Sesudah Pajak. Rugi komprehensif lain sesudah pajak adalah sebesar Rp2.768 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan rugi komprehensif lain sesudah pajak sebesar Rp76.132 juta pada tahun 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada selisih kurs penjabaran mata uang asing.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Sesudah Pajak. Total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak meningkat menjadi Rp2.953.982 juta pada tahun 2015 dari Rp1.013.552 juta pada tahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan. Pendapatan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp4.106.175 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp909.036 juta atau 28,4%, dari posisi sebelumnya Rp3.197.139 juta pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan Perseroan ini terutama disebabkan peningkatan pendapatan dari sewa menara menjadi sebesar Rp4.104.806 juta pada tahun 2014, meningkat sebesar Rp909.434 juta atau 28,5%, dari posisi sebelumnya Rp3.195.372 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini tereduksi oleh penurunan pendapatan dari sewa *repeater* menjadi sebesar Rp1.369 juta, dari sebelumnya Rp1.767 juta, atau berkurang sebesar Rp398 juta atau 22,5%. Peningkatan pendapatan sewa menara ini disebabkan karena peningkatan jumlah sewa lokasi dimana pada tahun 2013 Perseroan memiliki 18.322 sewa lokasi menjadi 20.138 sewa lokasi pada tahun 2014. Pelanggan utama Perseroan pada tahun 2014 terdiri dari Hutchison, Telkomsel, dan XL dengan kontribusinya terhadap total pendapatan masing-masing sebesar 39%, 19%, dan 20%.

Depresiasi dan Amortisasi. Depresiasi dan amortisasi pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp337.134 juta, meningkat sebesar Rp75.954 juta atau 29,1% dari Rp261.180 juta pada tahun 2013 terutama disebabkan kenaikan amortisasi sewa tanah sebesar Rp66.952 juta atau 35,7% menjadi Rp254.302 juta dari sebelumnya sebesar Rp187.350 juta. Rasio depresiasi dan amortisasi terhadap pendapatan stabil di kisaran 8,2% baik pada tahun 2014 dan 2013.

Beban Pokok Pendapatan Lainnya. Beban pokok pendapatan lainnya pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp238.271 juta, meningkat sebesar Rp31.115 juta atau 15,0% dari Rp207.156 juta pada tahun 2013, terutama disebabkan kenaikan biaya perawatan lokasi pada tahun berjalan. Rasio beban pokok pendapatan lainnya terhadap pendapatan adalah 5,8% pada tahun 2014, menurun dari 6,5% pada tahun 2013.

Laba Bruto. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba bruto Perseroan menjadi Rp3.530.770 juta pada tahun 2014, meningkat sebesar Rp801.967 juta atau 29,4%, dari Rp2.728.803 juta pada tahun 2013.

Beban Penjualan dan Pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp50.932 juta, meningkat sebesar Rp14.775 juta atau 40,9% dari Rp36.157 juta pada tahun 2013, terutama disebabkan kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya travel dan transport karyawan, serta biaya hiburan dan representasi. Rasio beban penjualan dan pemasaran terhadap pendapatan pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 1,2% dan 1,1%.

Beban Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp411.555 juta, meningkat sebesar Rp92.350 juta atau 28,9% dari Rp319.205 juta pada tahun 2013, terutama disebabkan kenaikan biaya gaji karyawan seiring dengan penambahan jumlah karyawan, biaya perizinan dan lisensi, serta biaya jasa profesional yang dikeluarkan Perseroan pada tahun berjalan.

Kerugian Lain-lain, Neto. Perseroan dan Entitas Anak membukukan kerugian lain-lain, neto sebesar Rp266.209 juta pada tahun 2014 yang mengalami penurunan sebesar Rp680.968 juta pada tahun 2013 yang sebelumnya senilai Rp947.177 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kerugian kurs dari pinjaman yang dimiliki Perseroan dan Entitas anak.

Pendapatan Keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp6.926 juta, meningkat sebesar Rp2.925 juta, atau 73,1%, dari Rp4.001 juta pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata saldo kas di bank serta adanya deposito yang Perusahaan miliki di bank-bank tertentu.

Biaya Keuangan. Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp855.586 juta, meningkat sebesar Rp304.241 juta atau 55,2% dari Rp551.345 juta pada tahun 2013 terutama karena adanya penghapusan biaya pinjaman dari sebesar Rp215.859 juta yang terjadi dalam tahun tersebut. Selain itu pada tahun 2014 terdapat pula tambahan biaya bunga obligasi sebesar Rp94.846 juta yang sepenuhnya tidak terdapat dalam tahun 2013.

Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan menjadi Rp1.545.194 juta pada tahun 2014, meningkat sebesar Rp1.336.948 juta atau 642% dari Rp208.246 juta pada tahun 2013.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak meningkat menjadi Rp455.510 juta pada tahun 2014 dari Rp58.316 juta pada tahun 2013, disebabkan karena meningkatnya beban pajak ini seiring dengan peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan.

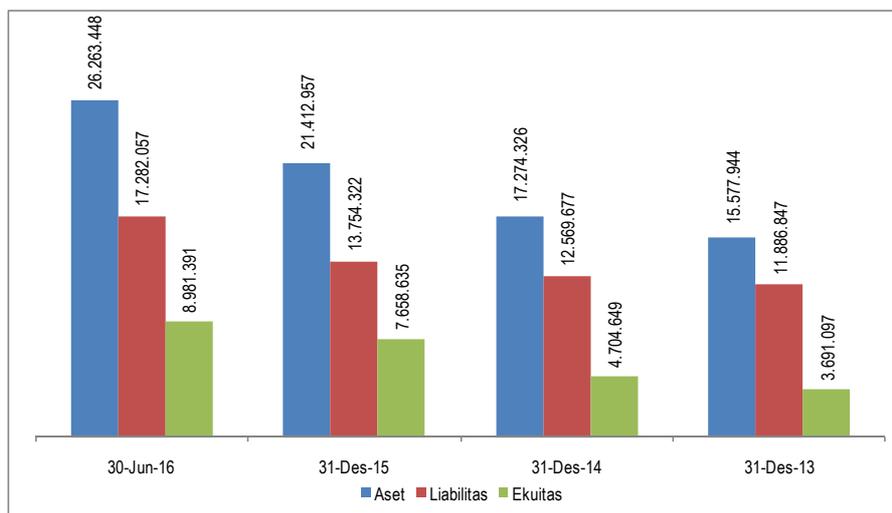
Laba Periode/Tahun Berjalan. Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp1.089.684 juta pada tahun 2014 dibandingkan dengan laba tahun 2013 sebesar Rp149.930 juta.

Pendapatan/(Kerugian) Komprehensif Lain, Sesudah Pajak. Rugi komprehensif lain sesudah pajak menurun menjadi sebesar Rp76.132 juta pada tahun 2014 dibandingkan dengan pendapatan komprehensif lain sesudah pajak sebesar Rp62.730 juta pada tahun 2013, disebabkan karena penurunan dalam selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan sebesar Rp125.552 juta dan juga tambahan kerugian dari lindung nilai arus kas sebesar Rp59.597 juta, sebelum efek pajak tangguhan dari penghasilan-penghasilan tersebut.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Sesudah Pajak. Total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak meningkat menjadi sebesar Rp1.013.552 juta pada tahun 2014 dari total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak sebesar Rp212.660 juta pada tahun 2013, atau mengalami peningkatan sebesar Rp800.892 juta atau 376,6%.

ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS

Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah)



Aset

Tabel berikut memperlihatkan perubahan aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal yang bersangkutan dengan tanggal sebelumnya:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember				
	2016	Δ%	2015	Δ%	2014	Δ%	2013
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	3.598.156	20,5	2.986.279	48,9	2.005.669	33,6	1.501.784
Piutang usaha pihak ketiga, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	569.259	21,0	470.519	(17,7)	571.914	(15,1)	673.753
Piutang lain-lain							
Pihak ketiga	4.370	443,5	804	(23,1)	1.045	2.077,1	48
Persediaan	-	n/a	11.076	n/a	-	n/a	508
Pajak dibayar dimuka	345.695	1.311,2	24.497	28,6	19.044	n/a	-
Beban dibayar dimuka	21.955	(1,8)	22.346	(5,3)	23.604	43,3	16.468
Uang muka	17.988	5,2	17.101	6,2	16.096	11,2	14.475
Total Aset Lancar	4.557.423	29,0	3.532.622	33,9	2.637.372	19,5	2.207.036
Aset Tidak Lancar							
Investasi sewa pembiayaan neto	-	-	-	-	-	n/a	125
Properti investasi	17.952.636	22,3	14.683.352	18,7	12.367.983	11,2	11.126.846
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan							
penyusutan	175.445	11,6	157.179	124,4	70.030	(7,2)	75.432
Sewa lokasi jangka panjang	1.839.283	41,7	1.297.608	2,3	1.268.441	25,6	1.009.732
Goodwill	333.737	(8,1)	363.150	94,3	186.883	(10,0)	207.730
Aset takberwujud	1.220.382	2,8	1.186.775	96,9	602.680	16,5	721.585
Aset pajak tangguhan	13.345	(27,0)	18.293	0,3	18.241	n/a	-
Estimasi pengembalian pajak	2.700	(31,1)	3.919	(95,1)	80.380	-	80.380
Piutang lain-lain – pihak berelasi	135.775	(2,7)	139.494	3.176,8	4.257	39,0	3.062
Aset tidak lancar lainnya	32.722	7,1	30.565	(19,7)	38.059	(73,9)	146.016
Total Aset Tidak Lancar	21.706.025	21,4	17.880.335	22,2	14.636.954	9,5	13.370.908
TOTAL ASET	26.263.448	22,7	21.412.957	24,0	17.274.326	10,9	15.577.944

Pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp26.263.448 juta, meningkat sebesar 22,7% atau Rp4.850.491 juta dari Rp21.412.957 juta pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh penambahan kas dan setara kas, pajak dibayar dimuka, properti investasi, dan sewa lokasi jangka panjang. Penambahan kas dan setara kas sebesar Rp611.877 juta atau sebesar 20,5% diperoleh dari penerimaan utang jangka panjang yang dilakukan perusahaan induk kepada beberapa bank. Sementara penambahan pajak dibayar dimuka sebesar Rp321.198 juta atau 1.311,2% terdiri atas kelebihan Pajak Pertambahan Nilai masukan per tanggal posisi tersebut. Untuk properti investasi, peningkatan sebesar Rp3.269.284 juta atau 22,3% berasal dari akuisisi menara telekomunikasi baru atas proyek Phuket, yakni sebanyak 2.500 menara. Penambahan menara-menara telekomunikasi ini berdampak pula terhadap penambahan sewa lokasi jangka panjang sebesar Rp541.675 juta atau 41,7%.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp21.412.957 juta, meningkat sebesar 24,0% atau Rp4.138.631 juta dari Rp17.274.326 juta pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh penambahan kas dan setara kas, properti investasi, goodwill, aset takberwujud, dan piutang lain-lain – pihak berelasi. Penambahan kas dan setara kas sebesar Rp980.610 juta atau sebesar 48,9% diperoleh dari hasil bersih penerimaan arus kas selama tahun berjalan yang kemudian sebagian diinvestasikan dalam bentuk deposito berjangka di beberapa bank. Sedangkan untuk properti investasi yang meningkat sebesar Rp2.315.369 juta atau sebesar 18,7%, didapat dari peningkatan jumlah menara telekomunikasi dari 11.595 menara telekomunikasi – siap untuk diinstalasi, menjadi 12.237 menara telekomunikasi – siap untuk diinstalasi. Lalu untuk goodwill dan aset takberwujud yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp176.267 juta dan Rp584.095 juta atau sebesar 94,3% dan 96,9% diperoleh dari hasil akuisisi anak perusahaan baru (I-Forte) yang terjadi pada bulan Juli 2015. Sementara kenaikan piutang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp 135.237 juta atau sekitar 3.176,8% diperoleh dari adanya piutang kepada salah satu direksi anak perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp17.274.326 juta, meningkat sebesar 10,9% atau Rp1.696.382 juta dari Rp15.577.944 juta pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penambahan kas dan setara kas, properti investasi, dan sewa lokasi jangka panjang. Penambahan kas dan setara kas sebesar Rp503.885 juta atau 33,6% diperoleh dari perputaran arus kas selama periode berjalan. Sedangkan untuk properti investasi yang meningkat sebesar

Rp1.241.137 juta atau 11,2% diperoleh dari peningkatan jumlah menara telekomunikasi dari 9.766 menara telekomunikasi – siap untuk diinstalasi, menjadi 11.595 menara telekomunikasi – siap untuk diinstalasi. Sementara peningkatan sewa lokasi jangka panjang sebesar Rp258.709 juta atau 25,6% berasal dari penambahan lokasi sewa yang cukup signifikan pada tahun tersebut demi memenuhi kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi baru.

Liabilitas

Tabel berikut memperlihatkan perubahan liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal yang bersangkutan dengan tanggal sebelumnya:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		2015		31 Desember		2013
	2016	Δ%	2015	Δ%	2014	Δ%	
LIABILITAS							
Liabilitas Jangka Pendek							
Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga	145.884	(32,7)	216.607	(53,8)	468.813	(3,3)	484.822
Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak berelasi	29.515	(6,7)	31.630	66,0	19.057	229,6	5.782
Utang lain-lain - pihak ketiga	7.228	(64,2)	20.167	(49,3)	39.773	(20,1)	49.774
Utang pajak	141.724	132,6	60.933	(81,8)	334.484	1.297,7	23.931
Pendapatan diterima dimuka	1.789.794	118,0	820.858	29,7	632.944	31,4	481.691
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22.443	(53,6)	48.398	(1,8)	49.300	12,2	43.956
Beban akrual	268.656	(24,4)	355.270	17,9	301.416	23,3	244.390
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Pihak ketiga	750.800	68,3	446.139	119,8	203.002	(81,3)	1.086.355
Bagian utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Pihak ketiga	994.813	n/a	-	-	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	4.150.857	107,5	2.000.002	(2,4)	2.048.789	(15,4)	2.420.701
Liabilitas Jangka Panjang							
Pendapatan diterima dimuka	85.024	(24,8)	113.000	(25,0)	150.687	(15,1)	177.428
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Pihak ketiga	9.078.123	34,7	6.741.254	3,5	6.512.960	(20,8)	8.221.252
Utang obligasi	1.725.406	(36,5)	2.715.146	2,9	2.638.020	n/a	-
Utang swap tingkat bunga	131.252	(42,4)	227.954	159,6	87.795	n/a	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	76.713	31,6	58.301	18,1	49.352	33,7	36.926
Liabilitas pajak tangguhan, neto	1.782.815	5,5	1.690.027	85,5	910.852	3,4	880.515
Provisi jangka panjang	251.867	20,7	208.638	21,9	171.222	14,1	150.025
Total Liabilitas Jangka Panjang	13.131.200	11,7	11.754.320	11,7	10.520.888	11,1	9.466.146
TOTAL LIABILITAS	17.282.057	25,6	13.754.322	9,4	12.569.677	5,7	11.886.847

Pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp17.282.057 juta, meningkat sebesar 25,6% atau Rp3.527.735 juta dari Rp13.754.322 juta pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh penambahan pendapatan diterima dimuka – jangka pendek serta utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Penambahan pendapatan diterima dimuka dari Rp820.858 juta menjadi Rp1.789.794 juta, atau sebesar Rp968.936 juta atau 118% disebabkan oleh adanya pendapatan diterima dimuka dari beberapa pelanggan yakni, Hutchison dan XL Axiata. Sedangkan untuk penambahan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dari Rp6.741.254 juta menjadi Rp9.078.123 juta, atau sebesar Rp2.336.869 juta atau 34,7% dikarenakan adanya pinjaman baru ke beberapa bank yakni, BNI, Bank Sumitomo Indonesia, dan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, yang diperoleh dalam periode berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp13.754.322 juta, meningkat sebesar 9,4% atau Rp1.184.645 juta dari Rp12.569.677 juta pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh penambahan pendapatan diterima dimuka – jangka pendek, utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dan liabilitas pajak tangguhan. Penambahan pendapatan diterima dimuka – jangka pendek sebesar Rp187.914 juta atau 29,7% disebabkan oleh adanya porsi tambahan dari akuisisi Entitas Anak perusahaan baru (I-Forte) serta peningkatan pendapatan diterima dimuka dari pelanggan Telkomsel. Sedangkan untuk penambahan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp228.294 atau 3,5% disebabkan oleh perubahan fluktuasi nilai tukar mata uang USD dari Rp12.440/USD per 31 Desember 2014 menjadi Rp13.795/USD per 31 Desember 2015. Penurunan nilai mata uang Rupiah terhadap USD mengakibatkan meningkatnya nilai tercatat utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun karena mayoritas utang tersebut didenominasi

mata uang USD. Kemudian peningkatan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp779.175 juta atau 85,5% berasal dari revaluasi properti investasi yang terjadi pada tahun bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp12.569.677 juta, meningkat sebesar 5,7% atau Rp682.830 juta dari Rp11.886.847 juta pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penambahan utang pajak, pendapatan diterima dimuka – jangka pendek, dan utang obligasi. Penambahan utang pajak sebesar Rp310.553 juta atau 1.297,7% disebabkan oleh adanya utang pajak penghasilan tahun 2014 yang belum terbayarkan pada saat tanggal pelaporan. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan diterima dimuka – jangka pendek sebesar Rp151.253 juta atau 31,4% dikarenakan adanya penambahan dari pelanggan PT Hutchison 3 Indonesia dan PT Telekomunikasi Selular masing-masing sebesar Rp45.439 juta dan Rp80.566 juta. Dan untuk peningkatan utang obligasi sebesar Rp2.638.020 juta digunakan Perseroan untuk melunasi sebagian utang Bank BNI yang terlihat dari adanya penurunan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun maupun utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal yang bersangkutan dengan tanggal sebelumnya:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember				
	2016	Δ%	2015	Δ%	2014	Δ%	2013
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	332.262	-	332.262	-	332.262	-	332.262
Saldo laba							
Yang belum ditentukan penggunaannya	8.661.696	18,0	7.340.286	67,2	4.389.886	33,1	3.299.052
Yang telah ditentukan penggunaannya	300	50,0	200	100,0	100	n/a	-
Pendapatan komprehensif lainnya	(14.452)	15,7	(12.494)	(29,6)	(9.643)	(114,9)	64.760
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.979.806	17,2	7.660.254	62,5	4.712.605	27,5	3.696.074
Kepentingan non-pengendali	1.585	197,9	(1.619)	79,7	(7.956)	(59,9)	(4.977)
Total Ekuitas	8.981.391	17,3	7.658.635	62,8	4.704.649	27,5	3.691.097

Pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan menjadi Rp8.981.391 juta pada tanggal 30 Juni 2016, meningkat sebesar Rp1.322.756 juta atau 17,3% dari sebesar Rp7.658.635 juta pada tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya karena adanya laba tahun berjalan beserta revaluasi yang dilakukan di tahun tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas Perseroan menjadi Rp7.658.635 juta pada tahun 2015, meningkat sebesar Rp2.953.986 juta atau 62,8%, dari sebesar Rp4.704.649 juta pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya karena adanya laba tahun berjalan beserta revaluasi yang dilakukan di tahun tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas Perseroan menjadi Rp4.704.649 juta pada tahun 2014, meningkat sebesar Rp1.013.552 juta atau 27,5%, dari sebesar Rp3.691.097 juta pada tahun 2013. Hal ini terutama disebabkan kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya karena adanya laba tahun berjalan.

ARUS KAS

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.463.404	2.442.083	3.420.591	3.336.666	2.431.976
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4.360.763)	(1.065.811)	(1.960.961)	(2.147.492)	(1.776.410)
Arus kas yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.599.912	(338.177)	(706.778)	(792.181)	(637.604)
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(90.676)	157.236	227.758	106.892	359.709
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	611.877	1.195.331	980.610	503.885	377.671

Kas yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp2.463.404 juta, meningkat sebesar Rp21.321 juta dibandingkan sebesar Rp2.442.083 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Perubahan ini terutama disebabkan oleh jumlah penurunan jumlah pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp86.390 juta, atau 13,86%, dari sebesar Rp709.573 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp623.183 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sejalan dengan peningkatan jumlah sewa lokasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp3.420.591 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp3.336.666 juta pada tahun 2014. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp511.182 juta pada tahun 2015, meningkat sebesar 11,07%, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa lokasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp3.336.666 juta pada tahun 2014 dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp2.431.976 juta pada tahun 2013. Peningkatan sebesar Rp904.690 juta ini terutama disebabkan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang berasal dari peningkatan sewa.

Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp4.360.763 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, meningkat sebesar Rp3.294.952 juta, atau 309%, dari sebesar Rp1.065.811 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, terutama disebabkan oleh meningkatnya arus kas yang digunakan untuk pembelian properti investasi sebesar Rp3.078.212 juta menjadi Rp3.599.752 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari sebesar Rp521.540 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.960.961 juta pada tahun 2015, menurun sebesar Rp186.531 juta, atau 8,7%, dari sebesar Rp2.147.492 juta pada tahun 2014 terutama disebabkan menurunnya pembelian properti investasi sebesar Rp660.137 juta pada tahun 2015 dari sebesar Rp 1.606.043 pada tahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.147.492 juta pada tahun 2014, meningkat sebesar Rp371.082 juta, atau 21,0%, dari Rp1.776.410 juta pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh arus kas untuk pembelian properti investasi menjadi sebesar Rp1.606.043 juta pada tahun 2014, meningkat sebesar Rp193.394 juta dari sebesar Rp1.412.649 juta pada tahun 2013.

Kas yang Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Arus kas bersih yang diperoleh pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.599.912 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 meningkat dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp338.177 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, peningkatan tersebut terutama disebabkan pada periode berjalan, Perseroan dan Entitas Anak menerima dana yang berasal dari pinjaman baru sebesar Rp3.015.308 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp706.778 juta pada tahun 2015, menurun sebesar Rp85.403 juta, atau 10,8%, dari Rp792.181 juta pada tahun 2014. Penurunan terutama berasal dari menurunnya pembayaran beban bunga bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp792.181 juta pada tahun 2014 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp637.604 juta pada tahun 2013 terutama berasal dari biaya-biaya terkait penerbitan Obligasi Protelindo I Tahun 2014.

LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Sumber likuiditas utama Perseroan dan Entitas Anak adalah kas yang dihasilkan dari hasil usaha, bank dan pembiayaan utang lainnya, dan kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan. Pada 30 Juni 2016, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar USD207.030.474, EUR9.106.669, SGD6.954, dan Rp736.004 juta, fasilitas perbankan utang jangka panjang dan utang obligasi sampai sejumlah agregat USD378.000.000, EUR54.670.462, SGD180.000.000 dan Rp5.200.456 juta. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama muncul dari pembiayaan utang *outstanding*, kebutuhan modal kerja dan belanja modal untuk akuisisi dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru.

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek (rasio lancar).

Rasio lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 adalah masing-masing sebesar 1,1x, 1,8x, 1,3x, dan 0,9x.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yang dapat dihitung dengan berbagai cara, yaitu: (i) rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah utang (hasil penjumlahan dari utang jangka panjang dan utang obligasi termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, tidak termasuk biaya pinjaman yang belum diamortisasi) dengan jumlah ekuitas, (ii) rasio utang bersih terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah utang bersih (hasil penjumlahan dari utang jangka panjang dan utang obligasi termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, tidak termasuk biaya pinjaman yang belum diamortisasi setelah dikurangi dengan kas dan setara kas) dengan jumlah ekuitas, dan (iii) rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

Tabel berikut menggambarkan rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang bersih terhadap ekuitas, dan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
Rasio utang terhadap ekuitas	1,4x	1,3x	2,0x	2,6x
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	1,0x	0,9x	1,6x	2,2x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,9x	1,8x	2,7x	3,2x

Perkembangan rasio solvabilitas yang membaik dari tahun ke tahun antara lain disebabkan meningkatnya saldo ekuitas dari tahun ke tahun yang berasal dari peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya berasal dari laba tahun/periode berjalan.

IMBAL HASIL INVESTASI

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah aset.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 adalah masing-masing sebesar 10,1%, 13,8%, 6,3% dan 1,0%.

Peningkatan imbal hasil investasi dari tahun 2013 ke tahun 2014 terutama disebabkan oleh persentase peningkatan laba bersih yang lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total aset. Laba bersih tahun 2014 meningkat 626,8% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan total aset meningkat hanya sebesar 10,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian juga halnya peningkatan imbal hasil investasi dari tahun 2014 ke tahun 2015.

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 adalah masing-masing sebesar 29,5%, 38,6%, 23,2% dan 4,1%.

Pada umumnya, peningkatan imbal hasil ekuitas dari tahun 2013 ke tahun 2014 terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah ekuitas.

BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURES*)

Belanja modal historis Perseroan dan Entitas Anak disajikan pada tabel berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2015	2014	2013
Belanja Modal	3.896.014	1.639.443	1.701.569	1.530.649

(dalam jutaan Rupiah)

Perseroan dan Entitas Anak melakukan belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi serta pinjaman jangka panjang dan pendek. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya akibat beberapa faktor seperti kondisi operasional dan keuangan, arus kas masa mendatang, perubahan kondisi ekonomi, perubahan peraturan dan perundang-undangan, serta perubahan rencana bisnis dan strategi Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan menggunakan belanja modal untuk pengeluaran terkait aset menara yaitu pembangunan *Telecommunications Tower Sites* baru, akuisisi perusahaan penyedia jasa penunjang telekomunikasi, dan penyertaan saham pada perusahaan penyedia jasa penunjang telekomunikasi. Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan pengeluaran modal berupa penambahan menara baik melalui akuisisi maupun pembangunan dan juga pengeluaran modal terkait kegiatan kolokasi pada tahun 2016. Pembiayaan pengeluaran modal ini akan dilakukan melalui kas internal Perseroan. Pembelian barang modal dalam mata uang asing akan dibiayai melalui arus kas dalam mata uang asing yang dihasilkan dari kegiatan operasi Perseroan. Perseroan hanya akan membeli dan membangun menara yang sudah memiliki kepastian kontrak penyewaan untuk menghindari masalah ketidaksesuaian pembelian dan tujuannya.

5. Manajemen Risiko

Untuk mencapai pertumbuhan di masa mendatang, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah, cakupan, serta pelanggan *Telecommunication Tower Sites* dengan melakukan akuisisi, pembangunan menara baru, dan kolokasi. Untuk mengelola pertumbuhan secara efektif, Perseroan diharapkan dapat mengimplementasikan dan meningkatkan sistem operasional, prosedur, dan pengendalian internal secara tepat waktu. Dalam melakukan mitigasi akan adanya kendala dalam pembiayaan, ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*, dan kualitas kontraktor Perseroan melakukan studi kelayakan terkait dengan kebutuhan pendanaan, kelayakan target akuisisi lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan menara, dan pemilihan kontraktor dengan persyaratan yang komprehensif agar seluruh rencana baik akuisisi maupun pembangunan menara baru dapat direalisasikan. Untuk mengatasi ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan perpanjangan sewa lahan, Perseroan mempunyai kebijakan untuk memulai negosiasi sedini mungkin syarat dan kondisi perpanjangan masa sewa lahan untuk menara telekomunikasi sebelum masa sewa lahan berakhir. Dengan memperhatikan jangka waktu yang cukup tersebut, maka Perseroan tetap memiliki waktu yang cukup untuk melihat lokasi lain yang dapat menggantikan lokasi tersebut, dan karenanya, Perseroan akan selalu mampu untuk memenuhi permintaan kebutuhan pelanggan tanpa ada gangguan yang berarti.

Dalam melakukan mitigasi risiko terkait dengan pelanggan, Perseroan senantiasa berubah menjalin hubungan yang baik dan melakukan tinjauan berkala atas kemampuan pembayaran dari pelanggan, dimana secara bersamaan Perseroan juga terus mengusahakan peningkatan jumlah penyewa kolokasi secara merata untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh kemampuan finansial dari pelanggan. Selain itu, Perseroan berusaha lebih tanggap untuk menyediakan lokasi menara sesuai dengan kebutuhan seiring dengan perubahan tren dalam teknologi komunikasi dan informasi, dengan cara menyediakan menara yang berkualitas dan cepat dalam memasarkan ruang menara baru. Ke depannya, Perseroan berharap dengan cara ini dapat mencapai diversifikasi pelanggan yang dapat mengurangi ketergantungan pada beberapa pelanggan tertentu. Perseroan juga telah memiliki kontrak jangka panjang dengan para pelanggan/operator sehingga jika terjadinya merger atau konsolidasi operator di kemudian hari, pendapatan Perseroan akan tetap terjaga dan hanya akan berpengaruh pada penyewaan-penyewaan yang akan datang.

Pemeliharaan dari *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan dilakukan dengan lingkup kerja yang tepat yang telah kami kembangkan dan diawasi oleh personel-personel manajemen kunci. Pemeliharaan sehari-hari dari *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan, yang meliputi tindakan pemeliharaan yang bersifat pencegahan dan perbaikan, juga dibantu oleh penyedia-penyedia jasa yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan juga melakukan audit secara periodik untuk tujuan menjaga kualitas dan untuk memastikan bahwa *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan berfungsi dengan baik dan dipelihara sesuai dengan standar Perseroan sehingga diharapkan dapat memperkecil timbulnya dampak yang negatif terhadap reputasi Perseroan.

Perseroan selalu berusaha untuk menerapkan kebijakan dengan memperhatikan kepentingan karyawan-karyawannya antara lain dengan pemberian remunerasi, fasilitas dan tunjangan yang kompetitif serta memberikan kesempatan pengembangan karir dan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi para karyawan, sehingga dapat menciptakan *corporate culture* rasa memiliki akan Perseroan dan karenanya dapat meminimalisasi risiko kehilangan manajemen kunci maupun tenaga ahli. Di lain pihak, Perseroan juga memberikan kesempatan peningkatan kemampuan karyawan melalui pemberian program *training* yang berkelanjutan. Selain itu Perseroan juga akan selalu menerapkan prinsip keuangan secara hati-hati, dengan antara lain melakukan perencanaan keuangan yang matang, bijaksana dan konsisten serta tetap menjaga rasio-rasio keuangan dan strategi pencadangan dana yang mencukupi untuk permintaan arus kas Perseroan sehingga dapat menjaga pertumbuhan dan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien.

Dalam mengatasi risiko terkait regulasi dan perizinan, Perseroan selalu berupaya selalu mengikuti perkembangan terkini agar dapat menyesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang dibutuhkan baik untuk *Telecommunication Tower Sites* yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan juga berusaha membina hubungan baik dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan *Telecommunication Tower Sites*, dan akuisisi dapat berjalan dengan lancar, salah satunya dengan melakukan sosialisasi terkait dengan keberadaan *Telecommunication Tower Sites* yang juga memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat sekitarnya.

Kinerja keuangan Perseroan secara umum dipengaruhi risiko pasar seperti risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditas. Dalam mengelola risiko nilai tukarnya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki lindung nilai alami melalui keseimbangan pendapatan dan kebutuhan pembayaran yang berdenominasi dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Perseroan dan Entitas Anak belum pernah mengalami ketidakseimbangan yang signifikan antara pendapatan yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan kebutuhan pembayaran. Perseroan juga menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasional dan meminimalisir eksposur risiko tingkat suku bunga dengan menandatangani kontrak lindung nilai dengan menukar tingkat suku bunga mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap selama durasi pinjaman. Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak belum menggunakan lindung nilai untuk seluruh pinjaman, risiko suku bunga dan komoditas, ke depannya Perseroan akan mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan lindung nilai untuk memitigasi risiko tingkat suku bunga, nilai tukar, dan komoditas.

VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini, beserta dengan informasi-informasi lainnya yang terdapat pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan/atau operasional dan/atau prospek Perseroan secara negatif. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Setiap calon investor dalam Penawaran Umum ini harus memperhatikan seluruh fakta yang dibuat dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan ringkas mengenai risiko-risiko usaha yang telah disusun dengan bobot dari masing-masing risiko yang dihadapi oleh Perseroan:

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA

1. Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara.

Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara. Pelanggan Perseroan memiliki beberapa alternatif dalam penyewaan ruang menara, termasuk operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia, yaitu Telkomsel, Dayamitra Telekomunikasi (anak perusahaan Telkom), Indosat dan XL, dan penyedia jasa penyewaan menara independen seperti Tower Bersama Grup dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, serta PT Retower Asia (Retower). Perseroan memiliki keyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara di Indonesia bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas menara dan kecepatan dalam memasarkan ruang menara baru.

Seluruh operator telekomunikasi besar di Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang berukuran lebih besar dari Perseroan sehingga memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat. Beberapa operator telekomunikasi memiliki portofolio menara yang lebih besar daripada yang dimiliki Perseroan. Operator telekomunikasi di Indonesia mulai berbagi ruang menara pada operator telekomunikasi Indonesia lainnya atau afiliasinya dibandingkan menyewa ruang menara dari operator menara independen. Sebagai contoh, Telkomsel, Indosat dan XL dalam beberapa tahun terakhir mulai menyewakan ruang menara miliknya kepada operator telekomunikasi lainnya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Persaingan harga pada industri penyewaan menara dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Kegagalan dalam mempertahankan atau menarik pelanggan baru akibat penetapan harga atau faktor lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha dan prospek Perseroan dan meningkatnya kompetisi dapat menyebabkan akuisisi aset menara yang berkualitas semakin mahal. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan dapat berhasil bersaing di tengah industri yang semakin kompetitif.

2. Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan pelanggan, termasuk kemampuan kredit pelanggan

Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 5 besar pelanggan utama Perseroan memiliki kontribusi sekitar 89,8% dari seluruh pendapatan Perseroan, dimana Hutchison memiliki kontribusi sekitar 39,4% terhadap pendapatan Perseroan. Apabila Hutchison atau pelanggan penting lainnya tidak mau atau tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian dengan Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya, termasuk lembaga keuangan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Dalam kegiatan usaha yang wajar, Perseroan terkadang mengalami perselisihan dengan para pelanggan, sebagai contoh kerap terjadi pelanggan Perseroan meminta tambahan dokumen sebagai salah satu syarat penagihan akan tetapi syarat tambahan dokumen tersebut tidak terdapat didalam perjanjian penyewaan. Apabila Perseroan diharuskan untuk memperkarakan perselisihan tersebut, maka hubungan dengan pelanggan dapat terganggu yang pada akhirnya akan mengurangi pertumbuhan pendapatan Perseroan dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan kontrak sewa Perseroan yang bersifat jangka panjang, Perseroan bergantung pada keberlangsungan operasional dan kekuatan keuangan dari para pelanggannya. Apabila satu atau lebih pelanggan utama Perseroan mengalami kesulitan keuangan, Perseroan dapat mengalami piutang usaha yang tidak tertagih atau ditangguhkan. Secara khusus, karena Perseroan menerima sebagian besar pendapatan hanya dari beberapa pelanggan, adanya kejadian yang mempengaruhi kelayakan kredit dan kemampuan dalam pemenuhan kewajiban terhadap Perseroan akan berdampak

negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan memiliki pengalaman dalam keterlambatan pembayaran dari beberapa pelanggan.

3. *Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara atau tidak diperpanjangnya kontrak sewa menara dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.*

Strategi usaha dan rencana belanja modal Perseroan didasarkan atas ekspektasi jumlah pengguna jasa komunikasi nirkabel dan penggunaan data nirkabel di Indonesia akan meningkat. Apabila industri jasa layanan komunikasi nirkabel di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan atau lebih rendah dari tingkat ekspektasi pertumbuhan, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Faktor – faktor yang menyebabkan penurunan permintaan untuk jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menurunnya belanja modal operator telekomunikasi;
- Menurunnya pertumbuhan penggunaan data atau industri komunikasi nirkabel secara umum;
- Perkembangan yang terhambat karena izin pemerintah untuk spektrum dan telekomunikasi dan regulasi lainnya;
- Merger atau konsolidasi diantara operator telekomunikasi;
- Meningkatnya penggunaan *network sharing*, *roaming* atau perjanjian penjualan kembali diantara operator telekomunikasi;
- Penundaan atau perubahan dalam penggunaan 3G, 4G, WiMax atau teknologi komunikasi lainnya;
- Perubahan strategi operator telekomunikasi yang merugikan terkait kepemilikan atau pembagian ruang menara;
- Perkembangan terkait pembagian zona, lingkungan, kesehatan, dan regulasi pemerintah lainnya yang merugikan;
- Menurunnya permintaan pelanggan jasa komunikasi nirkabel; dan
- Memburuknya kondisi keuangan secara umum pada operator telekomunikasi sebagai hasil menurunnya tarif, konvergensi media dan faktor-faktor lainnya.

4. *Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.*

Perseroan berkeyakinan bahwa industri komunikasi nirkabel mulai mengalami konsolidasi yang akan berlanjut di masa depan. Konsolidasi para pelanggan yang signifikan pada saat ini maupun di masa yang akan datang akan berakibat pada menurunnya belanja modal secara keseluruhan karena adanya tumpang tindih pada rencana jaringan dan ekspansi dari beberapa operator telekomunikasi. Apabila konsolidasi tersebut terjadi, segmen tertentu dari pelanggan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang pada jaringan gabungan hasil konsolidasi akan dianggap berlebihan dan pelanggan tersebut akan mengurangi kelebihan ini. Hasil dari operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat terkena dampak negatif apabila sebagian besar kontrak sewa saat ini tidak diperpanjang ketika konsolidasi terjadi. Akibat yang serupa dapat terjadi apabila para operator telekomunikasi mulai memberlakukan pembagian, *roaming* atau perjanjian penjualan kembali dibandingkan menyewa menara dari penyedia menara independen.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa para operator telekomunikasi Indonesia tidak akan melakukan konsolidasi, yang akan berdampak pada penurunan pertumbuhan dan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

5. *Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli.*

Keberhasilan yang telah dicapai Perseroan maupun yang diharapkan akan dicapai Perseroan di kemudian hari, sampai pada tahap tertentu, bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempertahankan manajemen kunci dan tenaga ahli. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Menarik dan mempertahankan talenta manajerial berkualitas merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan industri Perseroan pada khususnya akibat adanya perkembangan yang pesat dan masuknya pesaing baru. Kegagalan untuk menarik atau mempertahankan manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

6. *Kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun penafsiran atau implementasi atas peraturan perundangan yang berlaku.*

Industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia tunduk pada berbagai macam peraturan perundangan. Setiap perubahan atas peraturan perundangan tersebut maupun penafsiran atau interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha maupun prospek Perseroan serta dapat mempengaruhi secara negatif hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Sebagai contoh, pada tanggal 17 Maret 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) mengeluarkan Peraturan Menkominfo

No. 2/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Menkominfo”). Peraturan Menkominfo mengatur antara lain mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dimana pada satu menara telekomunikasi wajib digunakan secara bersama-sama oleh semua operator telekomunikasi sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan peraturan bersama yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama”). Peraturan Bersama dimaksud, meskipun tidak mengacu kepada Peraturan Menkominfo dalam bagian pertimbangannya, mengatur juga antara lain mengenai pedoman pembangunan menara telekomunikasi dan penggunaan menara bersama untuk dapat diselaraskan di setiap institusi pemerintahan sebagai acuan. Lebih lanjut, penerapan kedua peraturan tersebut, dalam prakteknya dapat memiliki interpretasi yang berbeda antara tiap pemerintah daerah, contohnya mengenai penerapan Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) atas menara telekomunikasi yang memiliki persyaratan yang berbeda-beda di setiap daerah. Perubahan peraturan, atau diterbitkannya peraturan baru yang mengatur hal yang sama di kemudian hari ataupun penerapan yang berbeda terhadap ketentuan dalam suatu peraturan perundangan dalam atau terkait dengan industri penyewaan menara, serta terbatasnya contoh penerapan atau pedoman terkait dengan interpretasi dan implementasi atas peraturan perundangan tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki IMB atas sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan. Adapun atas sebagian *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan yang izin-izinnya belum lengkap, atau belum memiliki IMB, saat ini sedang diproses permohonan izin-izinnya pada lembaga terkait yang berwenang.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (“Peraturan No. 14/2014”). Peraturan No. 14/2014 tersebut mengatur syarat-syarat untuk mendirikan menara telekomunikasi di DKI Jakarta, termasuk persyaratan dan perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap menara telekomunikasi baik yang sudah berdiri maupun yang baru akan dibangun. Pembangunan menara baru di daerah DKI Jakarta hanya dapat dilakukan di dalam area Zona Menara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah (“Zona Menara”). Sebelum mendirikan menara telekomunikasi, diperlukan suatu Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (“Rekomendasi Zona Menara”). Setelah mendapatkan Rekomendasi Zona Menara, penyedia menara telekomunikasi harus mendapatkan IMB, kecuali menara tersebut berada secara tersembunyi dalam bangunan gedung dan tidak memiliki ketinggian lebih dari 6 meter. Pembangunan menara harus dilakukan paling lambat 1 bulan sejak dikeluarkannya IMB. IMB berlaku tanpa batas waktu jika tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan beban antenna terpasang tidak melebihi kemampuan daya dukung beban maksimum menara telekomunikasi.

Selain IMB, penyedia menara telekomunikasi di daerah DKI Jakarta juga harus memiliki Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi (“IPPT”) yang dimohonkan kepada Dinas Kominfo dan harus memenuhi Persyaratan Teknis Menara yang dibuktikan dengan Surat Kelayakan Konstruksi Menara (“SKKM”) dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. SKKM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Peraturan No. 14/2014 juga mewajibkan penyedia menara untuk mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasionalnya menara.

Tidak ada jaminan bahwa *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan akan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut atau termasuk dalam Zona Menara atau pemerintah yang berwenang tidak akan mengeluarkan peraturan baru yang terkait dengan Zona Menara.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, apabila izin-izin yang diperlukan atas *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan tersebut tidak berhasil didapatkan, seperti contohnya, IMB atas *Telecommunication Tower Sites*, maka lembaga terkait yang berwenang, dapat memberlakukan bermacam sanksi terhadap Perseroan, seperti teguran, peringatan dan denda, untuk ketidakpatuhan terhadap pemenuhan persyaratan izin dan persetujuan yang relevan dan bahkan untuk menyegel maupun meminta Perseroan untuk merelokasi ataupun membongkar menara-menara telekomunikasi milik Perseroan tersebut. Kegagalan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan persetujuan dan izin atas *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan juga dapat mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban Perseroan berdasarkan beberapa perjanjian sewa dengan pelanggan Perseroan. Demikian halnya dengan kelalaian untuk memenuhi persyaratan dari Peraturan No. 14/2014 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal Perseroan diwajibkan untuk memindahkan ataupun membongkar baik (i) berdasarkan putusan *final* dan mengikat yang telah ditetapkan pengadilan, 10% atau lebih dari *Telecommunication Tower Sites* Perseroan; ataupun (ii) berdasarkan setiap bentuk perintah atau putusan otoritas yang berwenang, 15% atau lebih dari *Telecommunication Tower Sites* Perseroan; dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut, dapat mengakibatkan wanprestasi atas utang dan dapat menyebabkan percepatan pembayaran utang Perseroan.

Terjadinya salah satu atau lebih dari peristiwa atau hal-hal yang disebutkan di atas, dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selanjutnya, penerapan peraturan di bidang lingkungan hidup terkait dengan kegiatan usaha Perseroan juga dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan menyebutkan bahwa untuk jenis kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 30 April 2010, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ("Permendag No. 32/2010") yang memungkinkan Perseroan untuk mengajukan permintaan untuk IMB baru untuk lokasi menara Perseroan yang belum memiliki IMB. Dalam Permendag No. 32/2010, salah satu persyaratan administratif untuk mendapatkan IMB adalah dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi yang terkena kewajiban. Secara umum, penyediaan menara telekomunikasi yang dijalankan Perseroan dengan menyewakan portofolio *Telecommunication Tower Sites* miliknya tidak termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki AMDAL. Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya serta tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi. Namun, dalam prakteknya, untuk memperoleh IMB, instansi pemerintah di daerah tertentu mensyaratkan agar pemohon untuk memenuhi persyaratan kewajiban pemantauan lingkungan hidup. Beberapa *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan yang telah memiliki IMB mungkin belum dilengkapi dengan dokumen pemantauan lingkungan hidup. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa instansi pemerintah tidak akan mengharuskan Perseroan untuk memiliki UKL-UPL meskipun Perseroan telah memiliki IMB sesuai Permendag No. 32/2010. Apabila hal ini diterapkan terhadap Perseroan, Perseroan dapat dikenakan denda atau sanksi akibat tidak dimilikinya dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut atau Perseroan justru akan mengeluarkan biaya tambahan guna mengurus perolehan dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, pada tanggal 15 September 2009, Pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU No. 28/2009") dengan peraturan pelaksana yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("PP 69/2010"). Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2009, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemanfaatan ruang daerah untuk menara maksimum sebesar 2% dari nilai penjualan menara. Pemerintah Daerah juga dapat memungut retribusi sebagai pembayaran jasa untuk IMB dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta. Pemerintah Daerah menghitung retribusi untuk IMB berdasarkan peraturan setempat dan formula yang digunakan untuk menghitung retribusi dari izin gangguan saat ini masih tidak jelas. Undang-undang tersebut akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan. Selanjutnya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa implementasi dari UU No. 28/2009 atau peraturan pemungutan retribusi setempat yang diperkirakan akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tidak akan meningkatkan pengeluaran Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, tidak adanya jaminan bahwa peraturan-peraturan yang baru di masa yang akan datang akan dapat mendukung kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

7. Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan.

Perseroan membutuhkan modal dalam jumlah yang besar untuk mengakuisisi, membangun dan memperluas portofolio *Telecommunication Tower Sites*. Jumlah dan waktu kebutuhan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang dapat berbeda dari perkiraan Perseroan sebagai akibat dari beberapa hal antara lain penundaan yang tidak terduga atau pembengkakan biaya, timbulnya biaya yang tidak terduga atau faktor teknis dan perubahan peraturan.

Perseroan berencana untuk memanfaatkan pembiayaan utang yang efektif dan efisien dalam melaksanakan beberapa rencana ekspansinya. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tersebut dengan persyaratan komersial yang wajar bergantung pada beberapa faktor, yaitu kondisi keuangan Perseroan, hasil kegiatan operasional dan arus kas, kondisi pasar secara umum dalam industri penyewaan menara dan ekonomi, politik serta kondisi lainnya di Indonesia.

Beberapa perjanjian pembiayaan Perseroan, seperti perjanjian pengakuan utang, dapat memiliki persyaratan tertentu dan pembatasan lainnya yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan, melakukan belanja modal dan investasi, membagikan dividen, melakukan merger atau konsolidasi atau menjaminkan aset yang dimilikinya. Perseroan juga memerlukan persetujuan dari beberapa atau seluruh kreditur untuk melaksanakan beberapa atau seluruh transaksi tersebut. Perseroan memiliki risiko yang terkait dengan pembiayaan utang, termasuk risiko tidak memadainya arus kas dari kegiatan operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga, risiko valuta asing sehubungan dengan utang berdenominasi mata uang asing, risiko tingkat suku bunga dan risiko ketidakmampuan Perseroan untuk

melunasi utang dengan persyaratan yang menguntungkan. Perseroan tidak dapat memastikan keberhasilan dalam negosiasi dengan bank untuk melakukan pembiayaan kembali atas utang yang ada atau memperoleh kredit yang cukup, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan likuiditas bagi Perseroan dan membutuhkan alternatif pendanaan yang lain. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

8. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa Telecommunication Tower Sites, fiber optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang.

Pengembangan dan pengoperasian sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* Perseroan termasuk pembangunan *Telecommunication Tower Sites*, membutuhkan ijin-ijin yang diterbitkan oleh pemerintah, termasuk ijin mendirikan bangunan. Untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan, Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari warga sekitar yang tinggal dalam radius menara. Dalam kondisi tertentu dibutuhkan pula rekomendasi ketinggian menara, persetujuan penempatan antena dan tiang, ijin gangguan, ijin penggunaan fasilitas umum yang relevan dan beberapa ijin atau rekomendasi lainnya. Ijin-ijin tersebut dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang dan Perseroan dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan ijin-ijin tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk mencari lokasi alternatif dan/atau mengeluarkan upaya dan biaya yang besar apabila lokasi alternatif *Telecommunication Tower Sites* yang sesuai tidak tersedia.

Oleh karena adanya jangka waktu yang lama antara pengajuan permohonan dan perolehan perijinan, Perseroan secara konsisten melakukan praktik yang umum di dalam industri yaitu melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* (terkadang telah selesai dibangun) sebelum memperoleh seluruh perizinan yang dibutuhkan. Perseroan melakukan hal tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan yaitu penyelesaian target para pelanggan. Pihak yang berwenang di DKI Jakarta, Bali, Bandung, Yogyakarta dan wilayah lainnya telah mengambil tindakan penegakan hukum terhadap penyedia menara lain dengan memaksa operator untuk membongkar menara yang tidak mematuhi peraturan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan tidak akan diharuskan untuk membongkar atau memindahkan *Telecommunication Tower Sites* dan/atau dikenakan sanksi apabila Perseroan tidak memperoleh perizinan yang diperlukan atau tidak mematuhi peraturan daerah yang ada. Adanya akibat atau sanksi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan usaha Entitas Anak adalah menyelenggarakan jaringan tetap berbasis VSAT dan fiber optik, serta jasa penyelenggara akses internet, dimana hal tersebut juga memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. Entitas Anak juga dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan ijin-ijin tertentu sehingga dapat menyebabkan Entitas Anak mengeluarkan upaya dan biaya yang besar.

Ijin-ijin dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa pihak yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang merugikan sehubungan dengan ijin-ijin tersebut atau bahwa ijin-ijin tersebut akan diperpanjang atau diperbaharui pada persyaratan yang wajar secara komersial. Apabila ijin-ijin yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak hilang atau tidak diperbaharui, hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

9. Kemampuan Perseroan untuk membangun Telecommunication Tower Sites baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang rooftop.

Kemampuan Perseroan untuk membangun *Telecommunication Tower Sites* baru bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk menentukan dan menyewa atau mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites* yang sesuai dengan harga yang wajar secara komersial yang cocok untuk *Telecommunication Tower Sites* Perseroan, ketersediaan modal, perencanaan jaringan konsumen dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh ijin-ijin yang diperlukan. Identifikasi lokasi untuk mendirikan sebuah *Telecommunication Tower Sites* memerlukan keahlian dalam komunikasi teknik infrastruktur, manajemen menara dan konsultasi jaringan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh lokasi *Telecommunication Tower Sites* yang tepat dan membangun dan memperoleh *Telecommunication Tower Sites* baru pada tingkat yang diperlukan untuk memenuhi rencana ekspansi pelanggan. Faktor-faktor ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

10. Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa dan pembangunan dan akuisisi Telecommunication Tower Sites.

Strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya terdiri dari beberapa komponen, yaitu meningkatkan jumlah kolokasi, pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru dan akuisisi *Telecommunication Tower Sites* dari penyedia menara independen dan operator telekomunikasi. Pelaksanaan strategi ini akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk

kemampuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator komunikasi, kemampuan untuk membangun *Telecommunication Tower Sites* secara tepat waktu dan hemat biaya, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar serta kemampuan untuk memperoleh pembiayaan untuk melakukan akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pencarian peluang akuisisi dan komunikasi terkait dengan pihak ketiga akan berujung pada akuisisi di masa depan.

Kemampuan Perseroan untuk berkembang melalui akuisisi tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti kesediaan operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia (diantaranya adalah pelanggan utama Perseroan) untuk bekerja sama dengan Perseroan dalam transaksi *sale and leaseback* untuk portofolio *Telecommunication Tower Sites* miliknya dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut memenuhi kriteria tingkat imbal hasil investasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan hubungan dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk ekspansi portofolio *Telecommunication Tower Sites*. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat membuat Perseroan rentan terhadap kewajiban atau risiko yang belum diketahui tanpa jaminan yang memadai atau perlindungan hukum lainnya.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada risiko dan ketidakpastian termasuk kemampuan Perseroan untuk:

- Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator telekomunikasi;
- Membangun menara *Build-to-Suit* dengan tepat waktu dan hemat biaya;
- Mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Pendanaan yang mencukupi untuk melaksanakan akuisisi atau investasi yang lebih besar dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Menghasilkan arus kas yang memadai untuk membayar utang Perseroan dan mengelola serta mendanai belanja modal dan operasional;
- Mempertahankan dan memperoleh pelanggan dan secara akurat menilai dan mengevaluasi kebutuhan mereka dan permintaan pasar;
- Menawarkan produk dan jasa dengan harga yang kompetitif;
- Menanggapi perubahan pada peraturan di industri penyewaan menara; dan
- Menarik, mempertahankan, dan melatih tenaga kerja ahli.

Keberhasilan strategi pertumbuhan akan bergantung pada beberapa faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil mengatasi risiko dan ketidakpastian tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan memperkirakan bahwa pertumbuhan Perseroan akan meningkatkan permintaan terhadap manajemen dan tenaga kerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil atau apabila terdapat kekurangan pada pengendalian internal dan pengawasan pada saat ini dan di masa yang akan datang yang dapat berakibat pada inkonsistensi standar internal pada prosedur operasional, Perseroan tidak dapat memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mempekerjakan dan mempertahankan karyawan baru, membuka kegiatan usaha baru atau mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan secara efektif.

11. Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja operasional.

Perseroan menyewa sebagian besar bidang tanah dan properti di lokasi menara. Secara umum, jangka waktu perjanjian sewa tersebut berkisar antara 5 hingga 20 tahun dengan opsi perpanjangan dan memberikan Perseroan hak untuk menggunakan lokasi yang disewakan untuk kegiatan usaha.

Setiap pengakhiran perjanjian sewa lahan Perseroan atau ketidakmampuan untuk memperbaharui perjanjian sewa lahan dengan ketentuan yang wajar secara komersial dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan pendapatan. Pembongkaran dan pemindahan *Telecommunication Tower Sites* dapat menimbulkan biaya yang besar dan Perseroan tidak dapat membebaskan biaya tersebut kepada pelanggan atau mencegah adanya gangguan yang disebabkan oleh pembongkaran dan pemindahan *Telecommunication Tower Sites* tersebut pada kegiatan operasional Perseroan maupun pelanggan. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan, memperbaharui dan melindungi hak sewa pada *Telecommunication Tower Sites* dengan ketentuan yang wajar secara komersial, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Untuk beberapa sebab, seperti ketiadaan atau keterlambatan dalam mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak atas tanah dan hal-hal lainnya sebelum menandatangani perjanjian sewa menara. Apabila terdapat sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hal-hal lainnya, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan *Telecommunication Tower Sites*. Penghentian perjanjian sewa tanah dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Apabila hal tersebut terjadi

pada *Telecommunication Tower Sites* dengan nilai yang material, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Apabila kepemilikan atau operasi pada *Telecommunication Tower Sites* menjadi tidak sah akibat berakhirnya masa sewa tanah atau sebaliknya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah seperti pelanggaran atau penghentian sewa dengan pelanggan berdasarkan perjanjian penyewaan induk. Selanjutnya, kegagalan untuk memperoleh perpanjangan sewa tanah pada *Telecommunication Tower Sites* yang masa sewa lokasinya masih berlaku dapat menimbulkan biaya terkait dengan pemindahan *Telecommunication Tower Sites* ke lokasi alternatif atau mengembalikan porsi yang belum terpakai dari biaya sewa dibayar dimuka. Penyewa juga secara umum memiliki hak untuk membatalkan penyewaan *Telecommunication Tower Sites* pada keadaan tersebut. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

12. Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai.

Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti badai, banjir, gempa bumi, longsor, sambaran petir dan kejadian-kejadian lainnya. Adanya kerusakan pada *Telecommunication Tower Sites* dan aset lainnya milik Perseroan sebagai akibat dari kejadian-kejadian di atas atau kejadian lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Walaupun Perseroan mengasuransikan *Telecommunication Tower Sites* dan aset lainnya untuk mengurangi potensi dampak dari risiko-risiko tersebut, Perseroan mungkin tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai secara menyeluruh untuk perbaikan, rekonstruksi, dan biaya pertanggungjawaban umum. Ketidakmampuan dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan sebagai akibat dari kerusakan *Telecommunication Tower Sites* atau infrastruktur terkait dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

13. Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa *Telecommunication Tower Sites*.

Perseroan telah dan mungkin akan terus mengalami penolakan dari masyarakat setempat terhadap keberadaan *Telecommunication Tower Sites* yang telah ada atau terhadap pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru karena berbagai alasan termasuk keindahan lingkungan dan dugaan masalah kesehatan. Sebagai akibat dari penolakan tersebut, Perseroan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang setempat untuk membongkar dan memindahkan *Telecommunication Tower Sites* tertentu. *Telecommunication Tower Sites* Perseroan juga dapat terkena risiko sabotase, perusakan dan pencurian seperti pencurian kabel tembaga dari *Telecommunication Tower Sites* Perseroan. Apabila Perseroan diharuskan untuk memindahkan sejumlah *Telecommunication Tower Sites* yang jumlahnya material dan tidak dapat menentukan *Telecommunication Tower Sites* pengganti yang dapat diterima pelanggan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

14. Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel

Pembangunan konstruksi jaringan kabel untuk fiber optik akan menentukan banyaknya jumlah pelanggan dan kualitas jasa internet. Entitas Anak mempunyai rencana memperluas pembangunan jaringan di tahun-tahun mendatang yang membutuhkan kecukupan dana, perizinan dan pasokan material. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalian pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk mengembangkan bisnis Entitas Anak, menarik pelanggan baru ditahun-tahun mendatang, meminimalkan *churn rate* maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Entitas Anak.

15. Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan terhadap jaringan kabel

Kegiatan usaha Entitas Anak sangat bergantung dengan jaringan kabel yang terentang panjang di daerah yang bebas. Jaringan kabel tersebut dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, robohnya tiang tumpuan dan bencana alam. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Entitas Anak, meningkatkan *churn rate*, memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Entitas Anak.

16. Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga.

Perseroan memiliki deposito pada beberapa bank domestik dan internasional serta institusi keuangan. Namun, kebijakan lindung nilai mungkin tidak memadai untuk melindungi Perseroan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan dapat berakibat

pada tingginya biaya bunga dan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, pengaturan lindung nilai yang dilakukan di masa depan akan rentan terhadap risiko kerugian terkait gagal bayar, termasuk sebagai akibat pihak lainnya gagal memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian terkait.

17. Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas.

Kontraktor-kontraktor Perseroan bergantung pada pembelian komoditas seperti baja untuk membangun *Telecommunication Tower Sites*. Ketidakstabilan harga komoditas lokal atau global khususnya harga baja akan mempersulit Perseroan dan kontraktor dalam memperkirakan biaya untuk membangun *Telecommunication Tower Sites* yang sesuai dengan rencana ekspansi Perseroan. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan jumlah belanja modal yang dibutuhkan untuk rencana ekspansi tersebut. Adanya kenaikan pada kebutuhan belanja modal dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

18. Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan.

Terdapat spekulasi publik terkait potensi risiko kesehatan pada masyarakat yang berasal dari pengaruh medan elektromagnetik dari menara dan peralatan komunikasi nirkabel. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa studi di masa yang akan datang terkait risiko kesehatan tidak menghubungkan antara medan elektromagnetik dengan masalah kesehatan. Hal ini dapat membawa Perseroan pada tuntutan hukum dari orang perorangan dan mungkin akan menyebabkan Perseroan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat setempat untuk meredakan keluhan mereka serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Persepsi publik yang negatif dapat memperlambat pertumbuhan operator telekomunikasi dan industri penyewaan menara secara umum. Potensi keterkaitan antara emisi radio dan efek negatif terhadap kesehatan telah menjadi studi yang penting di kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa perkara hukum terkait kesehatan telah terjadi di seluruh dunia sehubungan dengan perusahaan dibidang nirkabel dan produsen perangkat nirkabel. Faktor tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan karena dapat berpotensi meningkatkan biaya terkait perkara hukum dan mengurangi laba bersih, atau gangguan pada kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang penting sehubungan dengan risiko ini.

19. Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan.

Pengembangan dan implementasi teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat menurunkan permintaan jaringan nirkabel berbasis menara dan mengurangi permintaan operator telekomunikasi atas ruang pada menara. Beberapa teknologi yaitu *spectrally efficient technologies*, yang dapat meringankan masalah kapasitas jaringan dan mengurangi permintaan atas ruang menara untuk penempatan antena atau VoIP yang dapat berakibat pada menurunnya lalu lintas suara pada jaringan pelanggan dan permintaan ruang pada menara Perseroan.

20. Jumlah utang Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan.

Per tanggal 30 Juni 2016, total utang Perseroan adalah sebesar Rp12.742 miliar. Perjanjian kredit yang ada pada saat ini memperbolehkan Perseroan untuk menerima tambahan utang namun dengan pembatasan tertentu. Ketentuan pendanaan pada saat ini dan masa depan dapat mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dibatasi oleh beberapa pembatasan dan risiko seperti di bawah ini:

- Perseroan diharuskan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari aktivitas operasional untuk pembayaran utang, yang mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi fleksibilitas dalam perencanaan, respon terhadap perubahan pada kegiatan usaha dan industri penyewaan menara;
- Perseroan mungkin tidak dapat menerima pendanaan untuk akuisisi usaha dan proyek-proyek baru;
- Perseroan lebih berisiko dibandingkan para pesaingnya terhadap dampak penurunan siklus ekonomi dan penurunan perkembangan kegiatan usaha Perseroan;
- Perseroan berada pada posisi yang lebih dirugikan dibandingkan dengan para kompetitor yang lebih sedikit menggunakan pembiayaan utang;
- Perseroan mungkin dapat memiliki pembatasan dalam hal pembayaran dividen; dan
- Kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan kas yang cukup untuk membayar utang atau kewajiban finansial lainnya yang berakibat pada gagal bayar sesuai dengan perjanjian utang.

Adanya salah satu kejadian di atas dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

21. Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Mata uang Rupiah secara umum mudah ditukarkan dan dipindahkan (kecuali bank-bank di Indonesia yang tidak dapat memindahkan mata uang Rupiah ke rekening yang dikelola oleh bank di dalam atau luar Indonesia yang dimiliki oleh orang atau badan asing yang bukan ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau investasi). Di sisi lain, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi pada pasar nilai tukar mata uang dengan membeli atau menjual mata uang Rupiah atau menggunakan mata uang asing yang dimilikinya. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa mata uang Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berkelanjutan, tidak ada perubahan pada kebijakan nilai tukar mata uang mengambang dari Bank Indonesia, mata uang Rupiah tidak mengalami depresiasi terhadap mata uang lainnya (termasuk dolar Amerika Serikat), atau Pemerintah tidak akan mengambil langkah untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai dari mata uang Rupiah atau apabila salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan akan berhasil.

Perubahan kebijakan nilai tukar mata uang mengambang akan berakibat pada tingginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas dan pemberlakuan kontrol terhadap arus modal dan nilai tukar atau pemotongan bantuan keuangan oleh debitur multinasional. Hal ini dapat berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi, kegagalan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memenuhi kewajiban utangya dan resesi ekonomi, gagal bayar pada pinjaman atau menurunnya permintaan pelanggan yang akan berakibat pada kesulitan untuk mendanai belanja modal dan implementasi strategi usaha Perseroan. Adanya salah satu kejadian tersebut di masa yang datang akan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak signifikan terhadap hasil operasional karena utang Perseroan didominasi oleh dolar Amerika Serikat dan penyajian akuntansi dan laporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Apabila mata uang Rupiah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

22. Perseroan rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan.

Perseroan menggunakan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk menyediakan berbagai jasa sehubungan dengan konstruksi, *access management*, perawatan dan keamanan *Telecommunication Tower Sites*. Perseroan rentan terhadap risiko apabila jasa yang diberikan oleh kontraktor-kontraktor pihak ketiga tidak memuaskan dan sesuai dengan harapan pelanggan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan, antara lain, risiko yang signifikan terhadap reputasi Perseroan, menanggung biaya tinggi untuk mengganti kerugian atas kecacatan atau kerusakan, menawarkan diskon yang besar kepada pelanggan Perseroan untuk dapat mempertahankan pelanggan tersebut, dan/atau dapat menyebabkan pelanggan yang tidak puas terhadap jasa Perseroan sehingga dapat mengakhiri atau tidak memperpanjang kontrak mereka dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan; dan
3. Risiko adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 3 Oktober 2016 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 November 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Sejak dilaksanakannya Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan dan pengubahannya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan persetujuan atas perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan kewenangan Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0022828 tanggal 12 Februari 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0019094.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016.

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah jasa penunjang telekomunikasi. Keterangan mengenai izin usaha yang dimiliki Perseroan serta izin penunjang kegiatan usaha Perseroan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang berbentuk perseoan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yaitu Iforte dan IGI.

Lebih lanjut, Perseroan juga telah tercatat memiliki kepemilikan saham dalam 2 (dua) Entitas Anak yang berkedudukan hukum di luar wilayah negara Republik Indonesia, masing-masing yaitu Protelindo Luxembourg S.a r.l yang didirikan menurut hukum negara Luxemburg dan Protelindo Finance B.V. yang didirikan menurut hukum negara Belanda dan dimiliki Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam Protelindo Luxembourg S.a r.l.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki kegiatan usaha yang serupa, yaitu menyediakan sarana penunjang telekomunikasi. Iforte, sebagai perusahaan yang secara khusus menawarkan layanan *fiber optic* dan menara *micro-cell* di Indonesia, menyediakan infrastruktur penting bagi operator telekomunikasi dalam pembangunan jaringan 3G dan 4G untuk memenuhi permintaan yang tinggi atas data nirkabel di Indonesia. Dengan aset yang terkonsentrasi di daerah perkotaan dan padat, Iforte akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menyediakan layanan bagi pelanggan sejalan dengan teknologi yang terus berkembang.

B. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

I. Perseroan

No	Instansi yang Berwenang	Nomor dan Tanggal Surat Izin	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku
1	Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM")	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IU/II/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011 tanggal 20 Januari 2011	Izin Usaha Perluasan	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
2	BKPM	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri BKPM No. 14/1/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Oktober 2014	Izin Prinsip Perluasan	3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan.
3	Badan Pelanan Perizinan Terpadu ("BPPT"), Pemerintah Kota Bandung	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 510/3-AY30/BPPT tanggal 24 September 2014	Izin Usaha Perdagangan dengan Jenis Barang/Jasa Dagang Utama berupa Alat/Peralatan/ Suku Cadang: Telekomuinikasi Elektronik, Komputer, Jasa: Penunjang Telekomunikasi	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib didaftarkan ulang/ herregistrasi setiap 3 tahun sekali

No	Instansi yang Berwenang	Nomor dan Tanggal Surat Izin	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku
4	BPPT, Pemerintah Kota Bandung	Kartu Herregistrasi Izin Gangguan No. 503/IG/BH83BPPT tanggal 24 September 2014	Izin Gangguan untuk Jenis Usaha Kantor Jasa Penunjang Telekomunikasi	22 September 2017

Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, terkait dengan *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh IMB atas sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan yang saat ini dioperasikan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

II. Entitas Anak

a. Iforte

No	Instansi yang Berwenang	Nomor dan Tanggal Surat Izin	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku
1	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Keputusan No. 805 Tahun 2015 tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1129 TAHUN 2016 tanggal 21 Juni 2016	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

b. IGI

No	Instansi yang Berwenang	Nomor dan Tanggal Surat Izin	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Keputusan No. 91 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet	Berlaku sampai dengan 10 Februari 2019

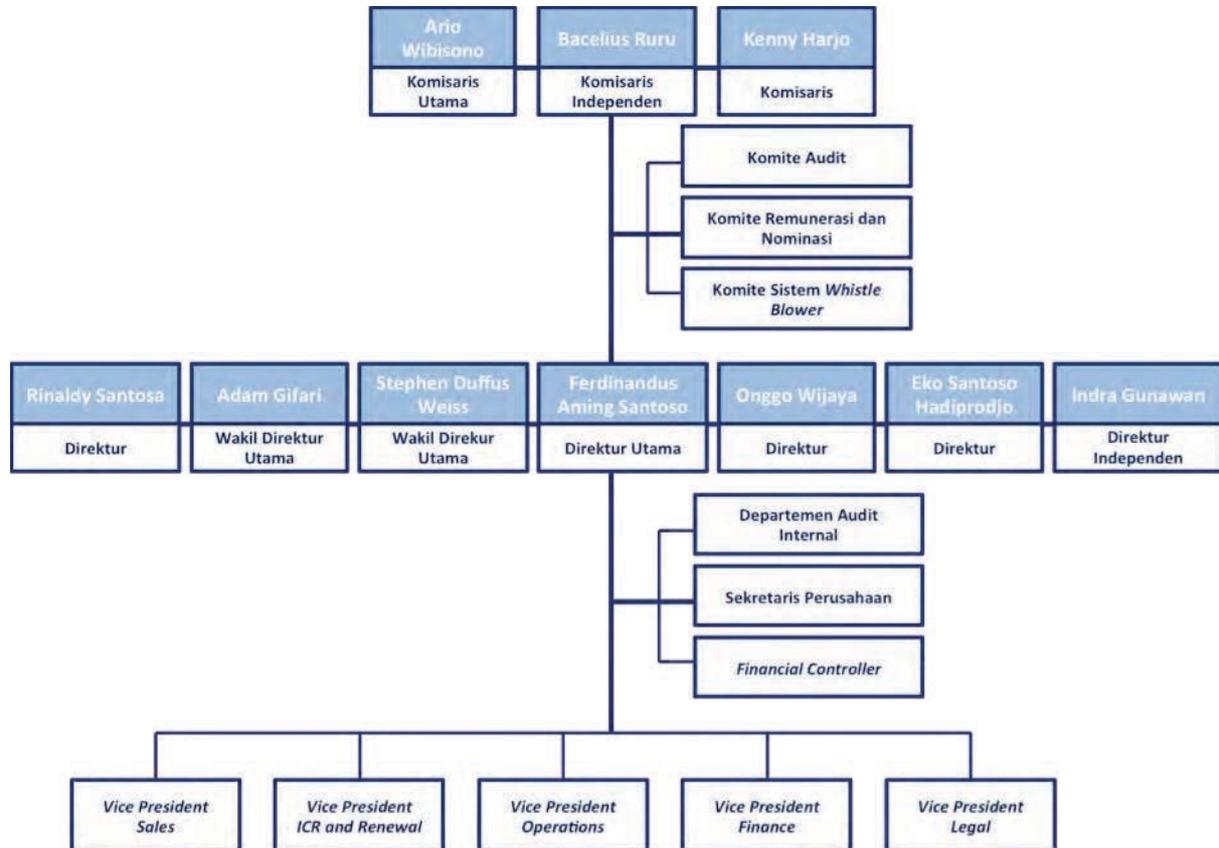
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak tanggal Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini diterbitkan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terkakhir adalah sebagaimana yang ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta dan daftar pemegang saham Perseroan terakhir tanggal 21 Desember 2012, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.600.187	332.260.018.700	99,9994
2. PT Tricipta Mandhala Gumilang	10.000	1.000.000	0,0003
3. PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.322.620.187	332.262.018.700	100,0000
Saham dalam Portepel	6.677.379.813	667.737.981.300	

D. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



Sumber: Perseroan

E. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 259 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., sebagai pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0085318 tanggal 30 September 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0115228.AH.01.11 tanggal 30 September 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ario Wibisono
 Komisaris : Kenny Harjo
 Komisaris Independen : Bacelius Ruru

Direksi

Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso
 Wakil Direktur Utama : Adam Gifari
 Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss
 Direktur : Rinaldy Santosa
 Direktur : Onggo Wijaya
 Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
 Direktur Independen : Indra Gunawan

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



Ario Wibisono, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan Magister di bidang Manajemen dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen di Jakarta pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada Juni 2014 dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sejak November 2014. Saat ini beliau menjabat juga sebagai Komisaris di SMN sejak Juni 2011. Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Komisaris Perseroan dari tahun 2009 – 2014, Direktur Utama di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari tahun 2006 – 2007, Direktur di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari tahun 1999 – 2006, Direktur di Peregrine Sewu Securities sekaligus Asisten Direktur di Peregrine Fixed Income Limited – Hong Kong dari tahun 1996 – 1999.



Kenny Harjo, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1980 dan memiliki izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi dari negara bagian Colorado dan negara bagian Montana, Amerika Serikat pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juni 2014. Saat ini beliau menjabat juga sebagai Direktur di SMN sejak tahun 2009 dan Komisaris di PT Ecogreen Oleochemicals sejak tahun 2004. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dari tahun 2011 – 2014, Direktur Perseroan dari tahun 2008 – 2011, *Business Development Manager* di PT Djarum dari tahun 2002 – 2004, Deputy Direktur di Dharmala Grup di Jakarta dari tahun 1990 – 2001, Deputy Kontroler di PT Kalimantan Plantation Development, Jakarta dari tahun 1988 – 1989, Akuntan Senior di PT Marathon Petroleum Indonesia di Jakarta dari tahun 1985 – 1987 dan Auditor di PricewaterhouseCoopers di Pittsburgh, Amerika Serikat dari tahun 1981 – 1983.



Bacelius Ruru, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 68 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Depok, pada tahun 1975 dan gelar *Master* di bidang hukum (*Lex Legibus Magister/LL.M*) dari Harvard Law School pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013, anggota Komite Audit sejak Februari 2014 dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sejak November 2014. Sebelumnya pernah memegang berbagai jabatan senior di pemerintahan, diantaranya di Departemen Keuangan dari tahun 1983 – 1998, termasuk sebagai staf ahli di Menteri Keuangan dari tahun 1990 – 1993, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) dari tahun 1993 – 1995, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tahun 1998 – 2004, antara lain sebagai Sekretaris Kementerian, Deputy Menteri Negara, Asisten Menteri dan Direktur Jenderal Pembinaan. Beliau mulai aktif di sektor bisnis swasta sejak tahun 2001. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, sejak tahun 2011, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Agung Podomoro Land Tbk, sejak tahun 2016, dan Wakil Komisaris Utama PT Jababeka, Tbk., sejak tahun 2015, Komisaris Independen di PT Mitra Keluarga Sehat Sejahtera sejak tahun 2014, Presiden Komisaris di PT Axie Asia sejak tahun 2008, Komisaris Utama di PT Polychem Indonesia sejak tahun 2005 dan komisaris Utama di PT Tuban Petrochemical Industries sejak tahun 2003. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, termasuk menjabat sebagai Anggota Pengurus Perhimpunan Santo Carolus, dan Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), sejak tahun 2007.

DIREKSI



Ferdinandus Aming Santoso, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan juga Direktur Utama SMN sejak November 2015. Beliau bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional Perseroan. Beliau menjabat juga sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris di beberapa perusahaan dalam Grup Djarum, termasuk PT Cipta Karya Bumi Indah sebagai Direktur Utama, PT BCA Sekuritas sebagai Komisaris Utama dan PT Grand Indonesia sebagai Komisaris. Sebelumnya beliau pernah bekerja di Divisi Keuangan Perusahaan Ernst & Young, Jakarta dan *Business Advisor* pada Arthur Andersen Global Corporate Finance, Jakarta.



Adam Gifari, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 39 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia, Depok pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan juga Wakil Direktur Utama SMN sejak November 2015. Beliau bertanggung jawab atas bidang keuangan perusahaan (*corporate finance*) dan hubungan investor Perseroan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak April 2007 – 2015 dan juga Direktur Utama SMN sejak November 2009 – 2015. Sebelum menjabat di Perseroan, beliau bekerja pada Divisi *Investment Banking* di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas pada tahun 2003 – 2007 dan sebelumnya beliau menjabat sebagai *Research Analyst* di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari 1999 – 2002.



Stephen Duffus Weiss, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Amerika Serikat. Saat ini berusia 61 tahun. Meraih gelar *Bachelors of Science Degree in Economics* dari Stanford University dan *Masters of Business Administration* dari Anderson School of Management di University of California, Los Angeles.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan *Chief Financial Officer* dan juga Wakil Direktur Utama dan *Chief Financial Officer* SMN sejak November 2015. Beliau bertanggung jawab atas bidang keuangan perusahaan (*corporate finance*) dan hubungan investor Perseroan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Independen SMN sejak Juni 2014 – 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memiliki pengalaman di industri perbankan selama 15 tahun dengan jabatan terakhir sebagai kepala *TMT and Renewable Energy Sector* untuk The Royal Bank of Scotland di Asia. Sebelumnya, pernah bekerja di First Interstate Bank, Standard Chartered Bank, dan ABN Amro Bank di bidang perbankan dan Indosat di Indonesia dan Tele2 di Swedia untuk bidang korporasi. Beliau juga pernah menjabat sebagai *Foreign Service Officer* di US Department of State untuk Turki dan Mesir.



Rinaldy Santosa, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993 dan meraih gelar Magister dalam bidang Keuangan dari University of Technology, Sydney, Australia pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010, dan bertanggung jawab untuk mengawasi operasional keuangan dan aspek akuntansi Perseroan. Sebelumnya beliau pernah menjabat juga sebagai Direktur di SMN sejak tahun 2010 – 2014, bekerja PricewaterhouseCoopers selama 9 tahun dari tahun 1993 – 2002; Direktur di Indopacific Public Relation dari tahun 2002 – 2003; *Financial Specialist* di Conoco Philips dari tahun 2003 – 2004; Kepala Konsultan untuk LM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari tahun 2004 – 2005; CFO EyeCorp Media Indonesia dari tahun 2005 – 2007; dan VP Keuangan Perseroan dari tahun 2007 – 2009.



Eko Santoso Hadiprodjo, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister di bidang Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan dan juga Direktur SMN sejak November 2015. Beliau bertanggung jawab atas bidang keuangan, sumber daya manusia dan teknologi informasi Perseroan. Sebelumnya, beliau bekerja pada PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Kepala Bagian Pajak, PT Grand Indonesia sebagai General Manager Keuangan & Akuntansi, dan PricewaterhouseCoopers, Jakarta.



Onggo Wijaya, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 40 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Elektro dari Universitas Brawijaya pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012, dan bertanggung jawab atas operasional proyek Perseroan. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak Mei 2008 sebagai *Project Director* lalu dipromosikan menjadi *Vice President of Development* pada April 2010. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Bapak Wijaya bekerja di PT Siemens Indonesia dari tahun 2001 – 2007 dengan jabatan terakhir sebagai *Project Control Manager*; PT Nokia Siemens Network sebagai *Cost and Progress Manager* pada tahun 2007; dan PT Mobile-8 Telecom Tbk sebagai *Senior Project Manager* dari tahun 2007-2008.



Indra Gunawan, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 41 tahun. Meraih gelar Doktor di bidang Bisnis dan Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2012. Meraih gelar Magister di bidang Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005, dan meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Elektro, Jurusan Telekomunikasi dari Institut Sepuluh November pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2012. Beliau bertanggung jawab atas bidang perizinan dan pengembangan bisnis Perseroan. Pada Agustus 2003, beliau memulai karirnya di Perseroan sebagai *General Manager of Operations* lalu dipromosikan menjadi *Vice President of Inter-Carrier and External Relations*. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Bapak Gunawan berkerja dengan PT Siemens Indonesia dari tahun 1997-2003 di berbagai jabatan manajer seperti *Project Controller*, *Group Leader of Product Management*, *Project Coordinator*, dan *Siemens Wireless Java Coordinator*. Beliau aktif sebagai kontributor di berbagai majalah dan Koran dan juga menjadi pembicara di berbagai seminar tentang telekomunikasi dan teknologi informasi.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A butir III.1.6, tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.

Dalam memilih dan mengangkat Direksi, Perseroan memiliki beberapa kualifikasi atau kriteria pemilihan seperti, pengalaman kerja yang terbukti di bidang yang relevan, memiliki integritas yang baik dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, besarnya jumlah kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp14.329 juta dan Rp13.614 juta, serta Rp22.564 juta, Rp13.029 juta dan Rp9.832 juta. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Dasar penetapan kompensasi (gaji dan tunjangan lainnya) terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan BEI No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Juni 2014, dengan Susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

- Ketua : Bacelius Ruru (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
- Anggota : Anang Yudiansyah Setiawan
Saat ini berusia 47 tahun, telah menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Februari 2014. Beliau memperoleh gelar Akuntan dan Sertifikasi Auditor Internal dan dia adalah anggota dari The Institute of Internal Auditor dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Beliau telah berpengalaman lebih dari 23 tahun melakukan konsultasi dan audit di berbagai bidang industri. Beliau adalah anggota dari Komite Audit SMN dari September 2010-Juni 2013; Senior Manager di Ernst & Young dari Maret 2000-April 2009; dan Kepala Audit Internal PT Semen Cibinong, Tbk dari Maret 1996- 2000. Saat ini beliau adalah Penasehat Senior PT DEX Solutions Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1994.
- Anggota : Patricia Marina Sugondo.
Saat ini berusia 49 tahun, telah menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Februari 2014. Sebelumnya, adalah anggota Komite Audit SMN dari September 2010-Juni 2013. Beliau adalah seorang ahli di bidang Akuntansi, Keuangan, dan Audit dan memiliki pengalaman sebagai auditor/akuntan publik di PricewaterhouseCoopers selama 12 tahun dari tahun 1990-2002. Saat ini, beliau adalah penasihat senior di PT GNV Solution sejak tahun 2008. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta pada tahun 1990 dan telah Bersertifikat Akuntan Publik. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT Samudera Indonesia, Tbk dan PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk.

Masa jabatan Komite Audit adalah sejak tanggal keputusan ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2019 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-waktu. Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 1 April 2016, Komite Audit bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan;
7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan.

PIAGAM DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Peraturan OJK No.56 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal per tanggal 1 April 2016. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan surat pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal Perseroan tanggal 31 Mei 2013, Johannes Edwin diangkat sebagai Kepala Departemen Audit Internal sejak 16 Mei 2013, yang diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Berikut riwayat singkat mengenai Kepala Departemen Internal Audit Perseroan:

Johannes Edwin, 46 tahun, menjadi Kepala Departemen Audit Internal sejak Mei 2013 dan juga menjabat sebagai Kepala Departemen Audit Internal SMN. Beliau bertanggung jawab dalam mendokumentasikan prosedur operasional standar dan menyusun kebijakan Departemen Audit Internal yang meliputi pedoman audit, rencana audit dan penempatan karyawan. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai Group Corporate Audit di Central Cipta Murdaya sejak 2007 – 2009, System and Procedure Manager di PT Mayora Indah Tbk sejak Januari 2006 – Juli 2007, Internal Auditor di Internal Audit Department dan Section Head of Business System and Control Department di PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Bogasari Flour Mills sejak 2000 – 2005.

Beliau lulus dari Pasca Sarjana di bidang Teknologi Informasi, Universitas Indonesia dan sebelumnya memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta.

Departemen Internal Audit adalah unit kerja dalam suatu perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal. Departemen internal audit beroperasi dalam kerangka yang tertuang dalam Piagam dan kode etik internal audit yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Departemen internal audit melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian manajemen serta proses tata kelola, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

Departemen Internal Audit melakukan tugas-tugas, antara lain, sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Aditya Masno sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 7 Mei 2015.

Fungsi sekretaris perusahaan antara lain adalah:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 April 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Bacelius Ruru
Anggota	:	Ario Wibisono
Anggota	:	Doni Kusuma

Masa jabatan Komite Remunerasi adalah sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sewaktu-waktu.

F. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya. Pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah adalah keikutsertaan Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), sedangkan untuk fasilitas lainnya yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawannya meliputi asuransi tunjangan kesehatan, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Berbagai pelatihan diberikan Perseroan kepada karyawan-karyawannya baik melalui pelatihan oleh tenaga eksternal Perseroan maupun oleh karyawan Perseroan kepada karyawan Perseroan yang lain. Selain itu, Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jumlah karyawan sebanyak 903 orang, yang terdiri dari 753 karyawan tetap dan 150 karyawan kontrak. Perseroan memiliki manajemen kunci dan tenaga ahli yang berjumlah 18 orang, yang terdiri dari Direksi, *Vice President*, Kepala Departemen Audit Internal, dan Sekretaris Perusahaan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ("IMTA") dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan dan status kerja (tetap/kontrak) sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
Senior Manajer	12	13	14	14
Manajer	108	115	126	124
Pekerja	499	526	594	551
Jumlah	619	654	734	689

Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
18-25	19	29	54	53
26-35	335	374	428	413
36-45	234	222	226	201
46-55	31	29	26	22
Di atas 55	-	-	-	-
Jumlah	619	654	734	689

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
s.d SLTA	27	27	27	26
Akademi/D3	120	120	120	111
Sarjana/S1	443	478	559	525
Pasca Sarjana/S2	29	29	28	27
Jumlah	619	654	734	689

Berdasarkan Status

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
Tetap	534	543	593	530
Kontrak	85	111	141	159
Jumlah	619	654	734	689

Komposisi Karyawan Entitas Anak

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	ISI		IGI	
	30-Jun	31-Des	30-Jun	31-Des
	2016	2015	2016	2015
Manajemen	7	6	2	2
Manajer	25	23	8	8
Pekerja	111	121	131	134
Jumlah	143	150	141	144

Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	ISI		IGI	
	30-Jun	31-Des	30-Jun	31-Des
	2016	2015	2016	2015
18-25	22	30	40	39
26-35	77	73	81	85
36-45	29	29	18	18
36-55	13	15	1	1
Di atas 55	2	3	1	1
Jumlah	143	150	141	144

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	ISI		IGI	
	30-Jun	31-Des	30-Jun	31-Des
	2016	2015	2016	2015
s.d SLTA	48	53	72	71
Akademi/D3	29	30	19	17
Sarjana/S1	61	62	47	53
Pasca Sarjana/S2	5	5	3	3
Jumlah	143	150	141	144

Berdasarkan Status

Keterangan	ISI		IGI	
	30-Jun	31-Des	30-Jun	31-Des
	2016	2015	2016	2015
Tetap	110	103	109	103
Kontrak	33	47	32	41
Jumlah	143	150	141	144

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan Prospektus ini disusun, Perseroan mempekerjakan 7 (karyawan) orang tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Passport	Izin	
					IMTA	KITAS
1.	William Clinton McCarrol	Tower Development Specialist	Amerika Serikat	512693588	KEP.00456/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 14 Januari 2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2017	2C21JD0822-Q berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2017
2.	Weiss Stephen Duffus	Wakil Direktur Utama	Amerika Serikat	452051452	KEP.27275/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 2 Mei 2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2017	2C21JD0491-Q berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2017
3.	James Leon Young	Management Telekomunikasi Specialist	Amerika Serikat	455925321	KEP.02143/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 16 Februari 2016 berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2017	2C21JE2729-Q berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2017
4.	Brandon Scott Curson	Quality Control Advisor	Amerika Serikat	461088345	KEP.10319/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 30 Juni 2016 berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2017	2C21JE1691AQ berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2017
5.	Jacopo Rigamonti	Research & Development Advisor	Italia	YA2672684	KEP.04168/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 29 Maret 2016 berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2017	2C21JE3878-Q berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2017
6.	Sander Wim Van litsenburg	Research & Development Advisor	Belanda	NYD8R5794	KEP.18759/MEN/P/IMTA/2015 tanggal 28 Oktober 2015 berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2016	2C21JD4957-P berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2016
7.	Yu Xuan	Planning Construction Specialist	Republik Rakyat Cina	E08589755	KEP.04169/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 29 Maret 2016 berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2017	2C21JE4237-Q berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2017

Keterangan:

IMTA : Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas.

T.A : Tenaga Ahli

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.40 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing yang merupakan peraturan

pelaksana dari Pasal 46 UU No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku, tenaga kerja asing dilarang menempati posisi dalam bidang personalia.

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melaksanakan pelatihan dan pengembangan karyawan dengan mengikutsertakan lebih dari 1.000 peserta dalam lebih dari 50 pelatihan. Berikut merupakan program pendidikan dan pelatihan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2013 hingga 2016:

Tahun	Peserta			Pelatihan Internal	Pelatihan Eksternal
	Internal	Eksternal	Jumlah		
2013	82	176	258	1	13
2014	26	368	394	1	17
2015	177	258	435	8	18
2016	0	94	94	0	6
Jumlah	285	896	1.181	10	54

Contoh-contoh pelatihan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan	Topik Pelatihan
Tahun 2013		
1.	Eksternal	Win-win Sales Negotiation
2.	Eksternal	Kewajiban Hukum bagi Para Pelaku Usaha terkait Outsourcing di Indonesia Pasca Penerbitan Permenakertrans No. 19/2012
3.	Eksternal	TAX PLANNING (STRATEGI TEPAT MENGHEMAT PAJAK)
4.	Eksternal	PMP Training + Exam
5.	Eksternal	Contractor Safety Management System
Tahun 2014		
1.	Eksternal	Ahli K3 Umum (AK3 Umum)
2.	Eksternal	Internal Audit Training (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, and PAS 99)
3.	Eksternal	IDEA Audit Software- Introduction
4.	Eksternal	Master Class Enterprise Risk Governance
5.	Internal	Leadership Development Training
Tahun 2015		
1.	Eksternal	5th PMI Indonesia International Symposium & Exhibition (SymEx)
2.	Internal	Internal Executive Coaching
3.	Eksternal	Introduction to International Merger and Acquisition
4.	Eksternal	Akuntansi Asset – PSAK 16, PSAK 48, PSAK 58, PSAK 14, ISAK 9, dan ISAK 11 berlaku efektif per 1 Jan 2015
5.	Internal	Leadership Training Module 1 – Leadership Development
Tahun 2016		
1.	Eksternal	Implementation of ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2.	Eksternal	PSAK IMBALAN KERJA, MANFAAT PURNAKARYA DAN ASPEK PERPAJAKANNYA – PSAK 24
3.	Eksternal	UNDERSTANDING AND ANALYZING FINANCIAL STATEMENT
4.	Eksternal	Behavior Based Safety Training
5.	Eksternal	First Aid Training
6.	Eksternal	Admin ELO professional and ELO enterprise 9

Fasilitas dan Tunjangan Karyawan

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja karyawan, Perseroan hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan memberikan beberapa fasilitas dan tunjangan karyawan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

0. Upah pokok yang dibayarkan kepada karyawan setiap akhir bulan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP), dimana pajak penghasilan karyawan ditanggung dan dibayarkan oleh Perseroan;
0. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yaitu program perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia. Program Jamsostek meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam hal ini, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya pada program Jamsostek dimana Perseroan membayarkan iuran sebesar 6,54% per bulan dari upah pokok karyawan;
0. Tunjangan dan asuransi kesehatan yang diberikan untuk karyawan beserta keluarganya, seperti:
 - Penggantian biaya berobat jalan (pengobatan dan perawatan biasa yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit) bagi karyawan dan anggota keluarga sahnya;
 - Penggantian biaya rawat inap bagi karyawan dan anggota keluarga sahnya; dan.
 - Penggantian biaya perawatan, pengobatan dan pencabutan gigi.
0. Manfaat melahirkan bagi karyawan wanita dan istri karyawan, dimana Perseroan akan mengganti biaya persalinan sampai dengan persalinan anak ketiga bagi istri sah karyawan tetap atau karyawan tetap wanita berkeluarga.

Penggantian biaya persalinan berlaku apabila pertolongan diberikan oleh dokter atau bidan yang berada di bawah pengawasan dokter.

Peraturan Perusahaan Antara Perseroan dengan Karyawan

Peraturan Perusahaan disusun bersama antara Perseroan dengan beberapa wakil karyawan berdasarkan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik bagi Perseroan maupun karyawan dalam semangat kebersamaan serta bertujuan untuk:

- Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis;
- Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kemajuan Perseroan; dan
- Menjaga/mempertahankan kelangsungan hidup Perseroan.

Peraturan Perusahaan tersebut diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Status dan Golongan Karyawan;
- Pengupahan, Jam Kerja;
- Cuti dan Ijin Meninggalkan Pekerjaan;
- Penilaian karyawan;
- Jaminan-jaminan kesehatan dan sosial, serta manfaat lain;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Keluh Kesah dan Tindakan disipliner;
- Keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja;
- Etika dan tata tertib; dan
- Pemutusan hubungan kerja.

Peraturan Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 936/PHIJSK-PK/PP/VIII/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 24 Agustus 2015. Peraturan perusahaan tersebut mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2017. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja, mengingat tidak terdapat karyawan Perseroan yang tergabung dalam serikat pekerja di Perseroan.

G. Keterangan Ringkas Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Desember 2012, pemegang saham utama Perseroan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan kepemilikan 20% atau lebih adalah SMN yang memegang/memiliki 3.322.600.187 saham, yang merupakan 99,9994% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Keterangan singkat mengenai SMN adalah sebagai berikut:

a. Pendirian SMN

SMN adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMN No. 31, tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.64.00369, dengan Agenda Pendaftaran No. 462/BH-11.25/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran Dasar SMN telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perseroan No. 189, tanggal 22 Mei 2015, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar SMN dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu (i) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka, dan (ii) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SMN No. AHU-AH.01.03-0940177 tanggal 11 Juni 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3517365.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015.

b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SMN adalah berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMN dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

- Kegiatan usaha utama SMN, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa dan investasi termasuk tetapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain; dan
- Kegiatan usaha penunjang SMN, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

c. Permodalan SMN

Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan pemegang saham SMN sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham SMN yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra pada tanggal 31 Juli 2016, adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sapta Adhikari Investama	3.337.954.200	166.898.710.000	32,72
2. Masyarakat	6.864.970.800	343.248.540.000	67,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.202.925.000	510.146.250.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.797.075.000	489.853.750.000	

d. Susunan pengurus dan pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas SMN No. 129 tanggal 20 November 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sismimbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0986221 tanggal 8 Desember 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-3590042.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tonny Kusnadi
 Komisaris : Ario Wibisono
 Komisaris Independen : John Aristianto Prasetyo

Direksi

Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso
 Wakil Direktur Utama : Adam Gifari
 Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss
 Direktur : Kenny Harjo
 Direktur : Michael Todd Bucey
 Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
 Direktur Independen : Steven James Mudder

H. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak

a. Iforte

Pendirian

Iforte adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan semula bernama PT Prisma Sentra Telekomunikasi, berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7361 HT.01.01.TH.1997 tanggal 30 Juli 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No.889.

Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 7 Februari 2002, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, nama PT Prisma Sentra Telekomunikasi diubah menjadi PT Iforte Solusi Infotek. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-05902 HT.01.02.TH.2002 tanggal 9 April 2002.

Domisili

Iforte berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat kantor Menara BCA Lantai 41 Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. MH. Thamrin No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Iforte sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Iforte memiliki maksud dan tujuan seta kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Iforte ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Iforte dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*) antara lain pembangunan, perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan lapangan golf, pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitas termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi lapangan, jembatan, jalan, taman, bendungan, pegairan/irigasi, landasan, dermaga, perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pembangkit listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, sistem pengaman, dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal);
 - (ii) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai perantara/komisioner, agen, waralaba, leveransir, *supplier*, distributor sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain antara lain hasil pembuatan perangkat *software* dan *hardware* pembuatan program komputer dan peralatan lainnya serta alat-alat telekomunikasi;
 - (iii) Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, perangkat *software* dan *hardware*, jenis komoditi yang dapat didata dengan komunikasi sistem komunikasi tanpa kabel produksi serta alat komunikasi lainnya, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), keramik, kulit, karet, kertas tekstil, pakaian jadi (*garmen*), kimia, farmasi, dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel (*furniture*), kendaraan bermotor, termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-lat rumah tangga, kerajinan tangan;
 - (iv) Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;
 - (v) Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan termasuk argoindustri yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, hortikultura, kehutanan;
 - (vi) Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, ablon, offset;
 - (vii) Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (*maintenance*) dan showroom kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan alat-alat berat;
 - (viii) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa telekomunikasi dasar dan non dasar termasuk tetapi tidak terbatas pada operator seluler, operator radio panggil, jasa komputer dan internet termasuk pembuatan paket program komputer (*software*), pelatihan komputer, *Uninterruptible Power Supply*, *panel control* serta alat telekomunikasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, *catering* jasa boga, restoran, tempat-tempat hiburan beserta penunjangnya, perawatan dan kebersihan (*cleaning servie*), kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan Iforte adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp136.000.000.000,-, terbagi atas 136.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,-;
Modal Ditempatkan	:	Rp34.000.000.000,-, terbagi atas 34.000 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,-;
Modal Disetor	:	Rp34.000.000.000,- terbagi atas 34.000 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- atau 100% dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam lforte.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham lforte adalah sebagaimana termasuk dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	136.000	136.000.000.000	100
Modal Ditempatkan:			
1. Perseroan	33.999	33.999.000.000	99,997
2. PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1	1.000.000	0,003
Jumlah Modal Disetor	34.000	34.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	102.000	102.000.000.000	-

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting lforte:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset	605.626	552.996	427.706
Liabilitas	359.018	335.081	246.706
Ekuitas	246.608	217.915	181.000
Pendapatan	119.234	151.997	127.318
Laba Kotor	82.388	98.036	62.072
Laba Usaha	51.849	75.056	64.086
Laba Periode Berjalan	30.684	35.695	31.195

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Aset

Peningkatan total aset sebesar Rp125.290 juta atau 29,29% dari Rp427.706 juta per 31 Desember 2014 menjadi Rp552.996 juta per 31 Desember 2015 mayoritas disebabkan karena adanya peningkatan dalam aset tetap dan properti investasi selama tahun berjalan. Peningkatan aset tetap berupa aset-aset dalam pelaksanaan terkait dengan pembangunan perangkat mikro BTS. Sementara peningkatan properti investasi pada tahun berjalan berasal dari hasil revaluasi dan juga penambahan dalam perangkat mikro BTS.

Liabilitas

Peningkatan total liabilitas sebesar Rp88.375 juta atau 35,82% dari Rp246.706 juta per 31 Desember 2014 menjadi Rp335.081 juta per 31 Desember 2015 mayoritas disebabkan karena adanya tambahan pinjaman kepada PT Bank DBS Indonesia dari sebelumnya Rp117.742 juta per 31 Desember 2014 menjadi Rp181.000 juta per 31 Desember 2015.

Ekuitas

Peningkatan total ekuitas sebesar Rp36.915 juta atau 20,40% dari Rp181.000 juta per 31 Desember 2014 menjadi Rp217.915 juta per 31 Desember 2015 disebabkan karena akumulasi saldo laba yang diperoleh dari tahun berjalan, yang kemudian berdampak pada meningkatnya saldo laba ditahan.

Laba Kotor

Peningkatan laba kotor sebesar Rp35.964 juta atau 57,94% dari Rp62.072 juta per 31 Desember 2014 menjadi Rp98.036 juta per 31 Desember 2015 disebabkan karena adanya peningkatan penjualan seiring dengan berkembangnya usaha perusahaan pada tahun berjalan. Peningkatan penjualan ini mayoritas dikontribusikan dari peningkatan pada segmen bisnis mikro BTS dan jasa VSAT.

b. IGI
Pendirian

IGI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan semula bernama PT Solusi Infrastruktur Nusantara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 276, tanggal 21 November 1997, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 tanggal 13 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No.TDP 090315229415 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.665/BH.09.03/VII/2000 tanggal 26 Juli 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 22 Desember 2000, Tambahan No.7811.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 298 tanggal 25 Maret 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, nama PT Solusi Infrastruktur Nusantara diubah menjadi PT Iforte Global Internet. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33460.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-0058435.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013.

Domisili

IGI berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat kantor Menara BCA Lantai 41 Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. MH. Thamrin No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar IGI sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 257 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta IGI memiliki kegiatan usaha utama adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas IGI dapat melaksanakan kegiatan usaha diantaranya (i) menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan umum, perdagangan peralatan telekomunikasi dan elektronik beserta bagian-bagiannya, perdagangan peralatan sistem informasi, perangkat *software* dan *hardware* pembuatan program komputer peralatan lainnya, (ii) menjalankan usaha-usaha di bidang jasa penyelenggara *service provider*, *content provider* dan *roaming provider* serta jasa komunikasi terkait dan (iii) menjalankan usaha-usaha di bidang jasa VOIP dan FOIP yaitu jasa penyelenggara *voice over internet protocol* dan *fax over internet protocol* serta jasa komunikasi terkait.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan IGI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas IGI No. 234 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp170.000.000.000,-, terbagi atas 170.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,-;
Modal Ditempatkan	:	Rp42.620.000.000.00,-, terbagi atas 42.620 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,-;
Modal Disetor	:	Rp42.620.000.000,- terbagi atas 42.620 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- atau 100% dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam IGI.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham IGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	170.000	170.000.000.000	100
Modal Ditempatkan:			
1. PT Iforte Solusi Infotek	42.619	42.619.000.000	99,998
2. PT Iforte Mitra Gemilang	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Disetor	42.620	42.620.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	127.380	127.380.000.000	-

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting IGI:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset	117.447	89.884	60.145
Liabilitas	33.988	32.174	11.554
Ekuitas	83.459	57.710	48.591
Pendapatan	71.095	62.328	52.635
Laba Kotor	45.044	29.774	13.575
Laba Usaha	35.068	12.627	6.119
Laba Periode Berjalan	26.144	9.175	5.668

Periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Aset

kenaikan aset sebesar Rp27.563 juta atau sebesar 30,7% dari Rp89.884 juta di tahun 2015 menjadi sebesar Rp117.447 juta di tahun 2016 disebabkan karena adanya peningkatan secara signifikan dari piutang sebesar Rp31.230 juta kenaikan ini disebabkan karena peningkatan signifikan dari pendapatan selama periode 6 bulan.

Ekuitas

kenaikan ekuitas sebesar Rp25.749 juta atau sebesar 44,6% dari Rp57.710 juta di tahun 2015 menjadi Rp83.459 juta di tahun 2016 dikarenakan adanya peningkatan dari saldo laba sebesar Rp26.144 juta. Peningkatan saldo laba ini disebabkan laba bersih di 2015 dan juga peningkatan laba bersih per Juni 2016.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Aset

kenaikan aset sebesar Rp29.739 juta atau sebesar 49,4% dari Rp60.145 juta di tahun 2014 menjadi Rp89.884 juta di tahun 2015 kenaikan ini disebabkan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp13.587 juta yang dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp9.693 juta, serta terdapat pembayaran dari pelanggan hal ini terlihat dari penurunan piutang sebesar Rp967 juta. perusahaan juga belum melakukan pembayaran ke pemasok, hal itu dapat dilihat dari peningkatan hutang yang signifikan yaitu sebesar Rp16.309 juta.

Liabilitas

kenaikan liabilitas secara signifikan sebesar Rp20.620 juta atau sebesar 178,5% dari Rp11.554 juta di tahun 2014 menjadi Rp20.620 juta di tahun 2015 di sebabkan karena kenaikan utang usaha dan lain-lain secara signifikan sebesar Rp16.309 juta dikarenakan kenaikan dari beban penjualan sebesar Rp3.055 juta dan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp6.686 juta. Perusahaan juga belum melakukan pembayaran hutang kepada pemasok karena belum jatuh tempo, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kas dan setara kas perusahaan yang meningkat secara signifikan sebesar Rp13.587 juta.

Laba Kotor

kenaikan laba kotor sebesar Rp16.199 juta atau sebesar 119% dari Rp13.575 juta di tahun 2014 menjadi Rp29.774 juta di tahun 2015 disebabkan karena kenaikan dari pendapatan usaha sebesar Rp9.693 juta yang disebabkan karena peningkatan jasa segmen Vsat, serta penurunan dari beban pokok pendapatan dikarenakan penurunan dari perangkat komputer.

Laba Usaha

kenaikan laba usaha sebesar Rp6.509 juta atau sebesar 106,4% dari Rp6.119 juta per tahun 2014 menjadi Rp21.627 juta per 2015 dikarenakan kenaikan laba kotor yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp9.693 juta yang disebabkan meningkatnya segmen Vsat. Peningkatan laba usaha juga disebabkan karena penurunan beban pokok pendapatan serta biaya lain-lain.

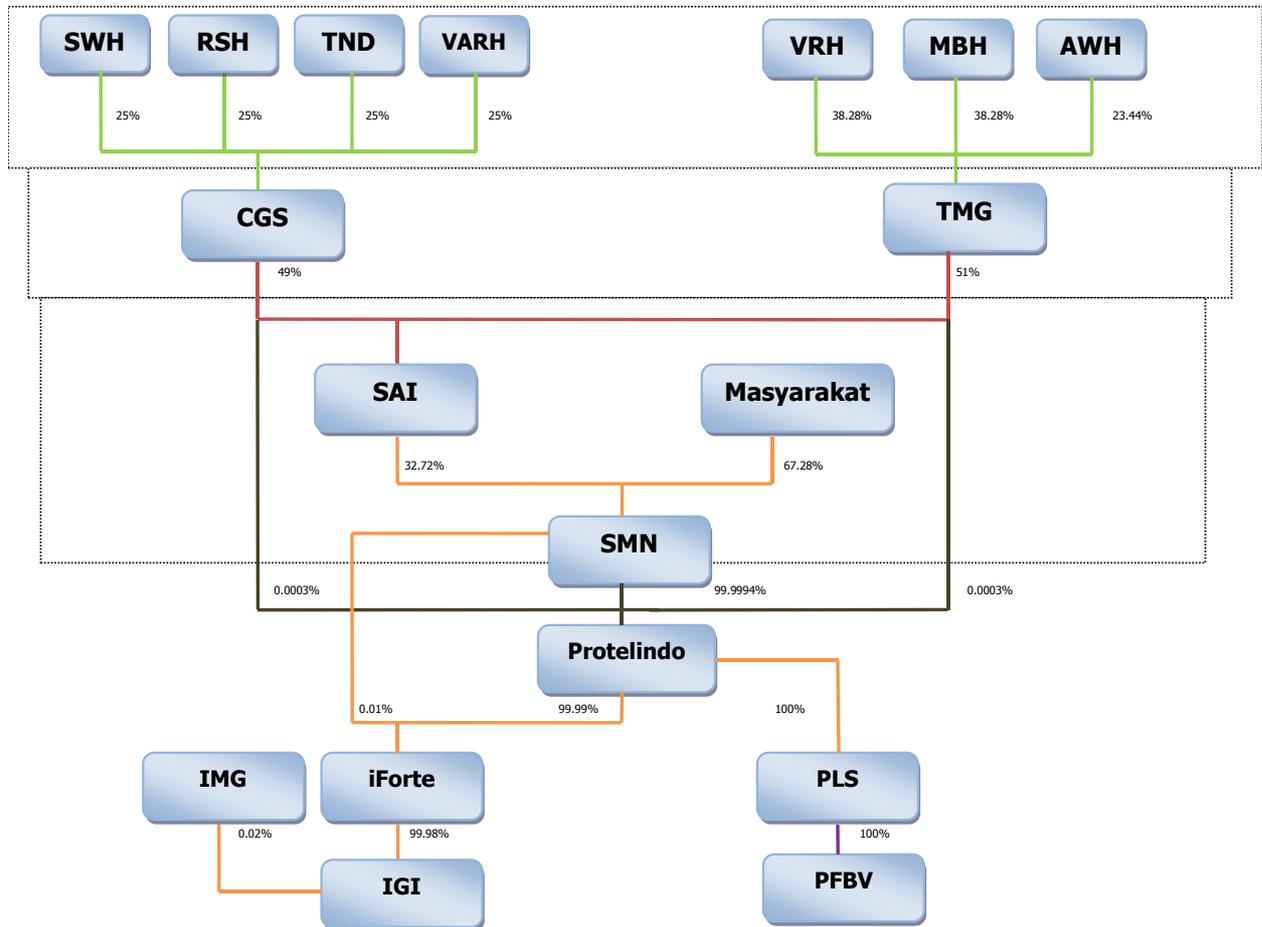
Laba Periode Berjalan

kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp3.507 juta atau sebesar 61,9% dari Rp5.668 juta di tahun 2014 menjadi Rp 9.175 juta di tahun 2015 disebabkan karena peningkatan dari laba kotor dan laba usaha yang di sebabkan karena peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp9.693 juta dengan peningkatan terbesar dari segment Vsat. Kenaikan juga

terjadi pada pendapatan lain-lain. Di sisi lain kenaikan laba periode berjalan terjadi karena penurunan pada beban pokok pendapatan serta biaya lain-lain

I. Keterangan Mengenai Struktur Kepemilikan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



KETERANGAN:

- SWH : Stefanus Wijaya Hartono
- RSH : Roberto Setiabudi Hartono
- TND : Tessa Natalia Damayanti Hartono
- VARH : Vanessa Ratnasari Hartono
- VRH : Victor Rachmat Hartono
- MBH : Martin Basuki Hartono
- AWH : Armand Wahyudi Hartono
- CGS : PT Caturguwiratna Sumapala
- TMG : PT Tricipta Mandhala Gumilang
- SMN : PT Sarana Menara Nusanantara, Tbk
- Protelindo : PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
- PLS : Protelindo Luxembourg S.à r.l. (Luxembourg)
- PFBV : Protelindo Finance B.V. (The Netherlands)
- SAI : PT Sapta Adhikari Investama
- Iforte : PT Iforte Solusi Infotek
- IGI : PT Iforte Global Internet
- IMG : PT Iforte Mitra Gemilang

J. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan			
	SMN	Perseroan	Iforte	IGI
Tonny Kusnadi	KU			
Ario Wibisono	K	KU		

Nama	Jabatan			
	SMN	Perseroan	Iforte	IGI
John Aristianto Prasetio	KI			
Ferdinandus Aming Santoso	DU	DU		
Adam Gifari	WDU	WDU		
Stephen Duffus Weiss	WDU	WDU		
Kenny Harjo	D	K		
Michael Todd Bucey	D			
Eko Santoso Hadiprodjo	D	D		
Steven James Mudder	DI			
Bacelius Ruru		KI		
Rinaldy Santosa		D		
Onggo Wijaya		D	K	
Indra Gunawan		DI	K	
Kusmayanto Kadiman			KU	
Peter Djatmiko			DU	KU
Agung Sampurna			D	D
Herdiansyah			D	
Silvi Liswanda			D	
Hendarso Hadiparmono				K

Keterangan:

KU: Komisaris Utama
 KI: Komisaris Independen
 K: Komisaris
 DU: Direktur Utama
 WDU: Wakil Direktur Utama
 D: Direktur
 DI: Direktur Independen

Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan Dengan Perseroan
PT Grand Indonesia	Bergerak di bidang pembangunan, jasa perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan	Hubungan Afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	Lembaga Penyedia Jasa Keuangan	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA

K. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

a. Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 584/LGL-AGR/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/HAW-RI/Tech/VIII/07 tanggal 15 Agustus 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No.3 to the Lease Agreement and Amandemen No.1 to the TOPA HCPT No.408/LGL-Colo MLA/AMD3/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/RS-MM/Tech/VIII/12 tanggal	i. Perseroan; dan ii. PT Hutchison CP Telecommunications (sekarang berubah nama menjadi PT Hutchison 3 Indonesia) ("HCPT") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	HCPT berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> yang dimiliki Perseroan untuk pengoperasian peralatan komunikasi termasuk sebidang tanah di setiap <i>telecommunication tower sites</i> untuk pendirian tempat penampungan peralatan HCPT.	Perjanjian ini berlaku sejak efektifnya Perjanjian (15 Agustus 2007) dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site License</i> yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site License</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal").	Pembayaran sewa dilakukan secara tahunan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa
	9 Agustus 2012 ("Perjanjian").			Perpanjangan Masa Sewa Jangka waktu Perjanjian akan diperpanjang: (i) Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk 5 tahun tambahan setelah selesainya Jangka Waktu Awal ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali HCPT memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai; dan (ii) Jangka waktu dapat diperpanjang kembali untuk 5 tahun setelah selesainya Periode Perpanjangan Kedua ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali HCPT memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.	
2.	<i>Master Lease Agreement</i> No.147/LGL-AGR-Master Lease/Protelindo/FLB-RS/TECH/III/08 tanggal 18 Maret 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Amandemen No.3 <i>to the Master Lease Agreement</i> HCPT No. 407/LGL-MLA-AMD3/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/RS-MM/Tech/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Hutchison CP Telecommunications (sekarang berubah nama menjadi PT Hutchison 3 Indonesia) ("HCPT") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	Perseroan sepakat untuk membeli menara komunikasi dan infrastruktur terkait dengan mengalihkan, novasi atau mengalihkan hak-hak dan kepentingan HCPT berdasarkan <i>Tower Transfer Agreement</i> ("TTA"). Sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi.	Jangka waktu sewa <i>telecommunication tower sites</i> untuk TTA 2008 adalah selama 12 (dua belas) tahun yang dapat diperpanjang selama 6 (enam) tahun dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan. Jangka waktu sewa <i>telecommunication tower sites</i> untuk TTA 2010 adalah selama 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.	Sewa di bayarkan pada tanggal 1 April setiap tahun, selama perjanjian berlangsung.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Induk tanggal 2 Juli 2007 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Amandemen No. 2 tanggal 8 Mei 2009 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Bakrie Telecom Tbk ("BTEL") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	BTEL akan menyewa <i>telecommunication tower sites</i> untuk pengoperasian peralatan komunikasinya termasuk sebidang tanah di setiap <i>telecommunication tower sites</i> untuk pendirian tempat penampungan peralatan dan generator.	Sewa berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 5 tahun dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan
4.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 735/EST-PKS/Perseroan/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Bakrie Telekom Tbk ("BTEL") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	BTEL sepakat untuk menyewa infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki Perseroan untuk penempatan antena seluler, antena microwave, <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) beserta fasilitas pendukung yang dimiliki Perseroan untuk penempatan perangkat telekomunikasi.	Jangka waktu Perjanjian adalah sejak tanggal 14 Agustus 2006 dan akan berlangsung sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa lokasi (site) yang tercantum dalam Berita Acara Sewa ("BAS") terakhir.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Induk No. 041/PKS/NET-STI/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("STI") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	STI berkeinginan untuk menyewa <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi STI di <i>telecommunication tower sites</i> yang	Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak tanggal 7 Desember 2007 dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site License</i> yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site License</i> adalah sejak	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa
			ditentukan.	<p>tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun</p> <p><u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u> Jangka waktu akan diperpanjang: (i) Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk 10 tahun tambahan setelah selesainya Jangka Waktu Awal ("Periode Perpanjangan Pertama"); dan ii) Jangka waktu dapat diperpanjang kembali untuk 10 tahun setelah selesainya Periode Perpanjangan Pertama, kecuali STI tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu maka STI memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 120 hari sebelum dimulainya periode perpanjangan.</p>	
6.	<p><i>Master Lease Agreement</i> untuk Kolokasi, tertanggal 14 Desember 2007 ("Perjanjian").</p>	<p>i. Perseroan; dan ii. PT Natrindo Telepon Selular (sekarang berubah nama menjadi PT Axis Telekom Indonesia) ("NTS") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.</p>	<p>NTS berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Perjanjian ini.</p>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak berlaku efektifnya Perjanjian (14 Desember 2007) dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal").</p> <p><u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u></p> <p>i Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 10 tahun ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali NTS memberi pemberitahuan tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai;</p> <p>ii Jangka waktu dapat diperpanjang selama 10 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali NTS memberi pemberitahuan tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.</p>	<p>Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan</p>
7.	<p>Perjanjian Induk Sewa Menyewa Untuk Kolokasi No. 425/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 2 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga tanggal 5 Maret 2012 ("Perjanjian").</p>	<p>i. Perseroan; dan ii. PT Indosat Tbk ("Indosat") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.</p>	<p>Indosat berkeinginan untuk menyewa dari Perseroan suatu tempat lokasi yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi dari Indosat. Indosat berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk pengoperasian peralatan komunikasi.</p>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 2 Juli 2008 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal").</p> <p><u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u> Jangka waktu akan</p>	<p>Pembayaran sewa dilakukan setiap 6 bulan (semester).</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa
				<p>diperpanjang: (i) Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk 10 tahun tambahan setelah selesainya Jangka Waktu Awal ("Periode Perpanjangan Pertama"); ii) Jangka waktu dapat diperpanjang kembali untuk 10 tahun setelah selesainya Periode Perpanjangan Pertama, kecuali Indosat tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu maka indosat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 120 hari sebelum dimulainya periode perpanjangan.</p>	
8.	<p>Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi ("<i>Master Lease Agreement for Colocation</i>") tanggal 17 Juni 2010 ("Perjanjian").</p>	<p>i. Perseroan; dan ii. PT Berca Global-Access dan PT Berca Global Hardayaperkasa (selanjutnya secara bersama-sama disebut BERCA) Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.</p>	<p>BERCA berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>tower</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya.</p>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 17 Juni 2010 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan BERCA yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal")</p> <p><u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u></p> <p>i. Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 10 tahun ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali BERCA memberitahukan secara tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai; dan ii. Jangka waktu dapat diperpanjang selama 10 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali BERCA memberitahukan secara tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.</p>	<p>Pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 Januari, dan setiap tanggal 1 Juli setiap tahunnya.</p>
9.	<p>Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi ("<i>Master Lease Agreement for Colocation</i>") antara Perseroan dengan PT First Media Tbk, tanggal 25 Juni 2010 sebagaimana telah dinovasi berdasarkan <i>Assignment Agreement</i> tanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan, PT First Media Tbk dan PT Internux ("Perjanjian") ("Perjanjian").</p>	<p>i. Perseroan; dan ii. PT First Media Tbk ("First") iii. PT Internux ("Internux"). Selanjutnya disebut sebagai para pihak.</p>	<p>Internux berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>tower</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya. First Media setuju untuk menjamin kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Sewa Lokasi yang Telah Ada berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi untuk suatu periode waktu tertentu.</p>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 25 Juni 2010 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan Internux yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal").</p> <p><u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u></p> <p>i. Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 5 tahun ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali First memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum</p>	<p>Pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 Januari, dan setiap tanggal 1 Juli setiap tahunnya.</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa
				Periode Perpanjangan Pertama dimulai; dan ii. jangka waktu dapat diperpanjang selama 5 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali First memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.	
10.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi (" <i>Master Lease Agreement for Colocation</i> ") antara Perseroan dengan PT First Media Tbk, tanggal 29 Agustus 2014 ("Perjanjian").	i. Perseroan; ii. First Media; Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	First Media berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>tower</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 18 Juli 2014 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan First Media yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal"). <u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u> i. Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 5 tahun ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali First Media memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai; dan Jangka waktu dapat diperpanjang selama 5 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali First Media memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.	Sewa Dasar awal dibayar dimuka. Sewa Dasar dan Tambahan Sewa untuk: i. setiap lokasi kolokasi makro dan mikro dibayarkan setiap setengah tahunan di muka; dan ii. setiap lokasi <i>micro build to suit</i> dibayarkan setiap tahun di muka.
11.	Perjanjian Sewa Induk tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian terkait 720 <i>Site Project</i> dan <i>Axis Legacy Sites</i> tanggal 19 Mei 2014 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Excelcomindo Pratama Tbk. (sekarang berubah nama menjadi PT XL Axiata, Tbk). ("XL") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	XL berkeinginan untuk menyewa <i>telecommunication tower</i> site milik Perseroan. Dengan metode <i>build to suit</i> dan <i>co-location</i>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak tanggal dilaksanakan Perjanjian ini. Periode Awal untuk setiap <i>Site Lease</i> dari setiap Lokasi akan dimulai sejak tanggal di laksanakan dan berlanjut selama 10 (sepuluh) tahun. <u>Perpanjangan jangka waktu sewa:</u> Jangka waktu akan diperpanjang selama 5 (lima) tahun kedepan kecuali apabila XL menyatakan tidak akan memperpanjang yang akan diberitahukan 120 (seratus dua puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Awal.	Pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 Januari, dan setiap tanggal 1 Juli setiap tahunnya.
12.	<i>Master Lease Agreement</i> tertanggal 15 Maret 2007 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 1 to the Master Lease Agreement</i> tanggal 1	i. Perseroan; dan ii. PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang berubah nama menjadi PT Smartfren	Mobile-8 berkeinginan untuk menyewa ruang di <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk pengoperasian	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 15 Maret 2007 dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada sewa lokasi dengan Mobile-8	Sewa pokok dibayar dalam periode 11 tahun pertama untuk setiap <i>site</i>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa
	November 2007 ("Perjanjian").	Telecom Tbk) ("Mobile-8") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	peralatan komunikasi, termasuk tempat pokok untuk pemasangan peralatan untuk berindung maupun generator pada seluruh tempat tempat sesuai pada Perjanjian ini.	yang berlaku. Jangka waktu untuk setiap berita acara adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 11 (sebelas) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.	
13.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi No. 080/BC/PROC-01/LOG/2009 tanggal 27 Oktober 2009 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 1</i> atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi tanggal 6 April 2015 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	Telkomsel berkeinginan untuk menyewa suatu tempat lokasi milik Perseroan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi Telkomsel.	<p>Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada tanggal 27 Oktober 2009 dan, kecuali diakhiri lebih awal, akan tetap berlaku sehubungan dengan setiap sewa lokasi, selama setiap sewa lokasi masih berlaku, dan Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada sewa lokasi dengan Telkomsel yang masih berlaku.</p> <p>Jangka waktu awal untuk setiap lokasi dimulai pada tanggal dimulainya setiap sewa lokasi tersebut dan akan berlanjut selama 10 (sepuluh) tahun ("Jangka Waktu Awal").</p> <p><u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Jangka waktu dapat diperpanjang secara otomatis selama 10 tahun setelah selesainya jangka waktu awal; dan Jangka waktu diperpanjang kembali selama 10 tahun untuk perpanjangan jangka waktu kedua. <p>Tanggal dimulainya setiap sewa lokasi adalah 14 (empat belas) hari setelah tanggal Sertifikat RFI.</p>	Pembayaran sewa dilakukan pada tanggal 1 Juli setiap tahunnya.
14.	<i>Master Lease Agreement for Colocation No. 092/Procurement/Smart/MLA-Protelindo/III/2010</i> tanggal 1 Maret 2010 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Smart Telecom ("Smart") Selanjutnya keduanya disebut para pihak.	Smart berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya.	<p>Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan Smart yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal").</p> <p><u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 10 tahun ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali Smart memberitahukan secara tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai; dan Jangka waktu dapat diperpanjang selama 10 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali Smart memberitahukan secara tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai. 	Pembayaran sewa dilakukan setiap 3 bulan.
15.	Perjanjian <i>Build to Suit</i> No. 425/FKTR/B00-BBB/08 dan No. SRM 310000401 tanggal 13 Mei 2011.	i. Perseroan; dan ii. PT Indosat Tbk ("Indosat"); Selanjutnya keduanya disebut para pihak.	Syarat dan ketentuan pengadaan, konstruksi, dan sewa kembali dari Lokasi <i>Build to Suit</i> dari Perseroan.	10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun kecuali ditentukan lain oleh para pihak.	Pembayaran sewa dilakukan setiap enam bulan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa
16.	Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa Repeater System & Jaringan Indoor BTS No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004 tanggal 12 Februari 2004, sebagaimana diubah dengan Amandemen I No: K.TEL.215/HK.820/DFW-A1041000/2007 tanggal 26 Oktober 2007 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Telkom"); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	Penyewaan <i>repeater system and indoor base transceiver station</i> .	Jangka waktu sewa-menyewa berlaku sejak tanggal berita acara dan akan berlangsung selama 9 (sembilan) tahun.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.
17.	Perjanjian Ambil atau Bayar 1.000 Lokasi ("TOPA") tanggal 31 Agustus 2010, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 7 Juni 2012 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Smartfren Telecom Tbk ("Smart"); Selanjutnya keduanya disebut para pihak.	Smart setuju untuk menyewa 1.000 lokasi sebelum 28 Februari 2013.	Masa berlaku perjanjian ini adalah selama 6 tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 periode secara otomatis dengan jangka waktu pembaharuan masing-masing selama 5 tahun.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.
18.	Master Lease Agreement For Acquired Sites tanggal 7 Juni 2012 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Smartfren Telecom Tbk ("Smart"); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	Penyewaan menara atas lokasi-lokasi yang dibeli oleh Protelindo dari penyedia-penyedia menara lain dimana Smart adalah penyewa awal.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 7 Juni 2012 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada Site Lease dengan Smart yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap Site Lease adalah sejak tanggal dilaksanakan dan akan berlanjut sesuai dengan yang diatur dalam Site Lease masing-masing site.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.
19.	Perjanjian <i>Build to Suit</i> dan Perjanjian Sewa Induk tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan <i>Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements</i> tanggal 20 September 2013 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT XL Axiata Tbk("XL"); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	XL berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini.	Site Lease berlaku 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun.	Pembayaran sewa dilakukan setiap tahun.
20.	Perjanjian pemakaian bersama peralatan dan komitmen tanggal 7 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 1 terhadap BTS dan Perjanjian Sewa Induk tanggal 1 November 2012 ("Perjanjian")	i. Perseroan; dan ii. PT XL Axiata Tbk("XL"); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	XL berkomitmen dengan kemampuan terbaiknya untuk menyewa minimum sebanyak 1.500 menara telekomunikasi baru milik Perseroan berdasarkan Perjanjian.	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2014	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.
21.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara tanggal 28 Maret 2016 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT XL Axiata Tbk. ("XL"); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan 2.432 Menara ("Tempat Yang Disewakan") kepada XL, dan XL telah menyetujui sewa tersebut.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 29 Juni 2016 (yang merupakan tanggal penutupan Perjanjian Pembelian Aset) ("Tanggal Mulai Perjanjian") dan kecuali diakhiri lebih dulu oleh salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan terus berlaku hingga hari pertama seluruh perjanjian sewa menara terkait sudah tidak berlaku lagi. Jangka Waktu Awal untuk setiap perjanjian sewa Menara ("TLA") akan dimulai pada 29 Juni 2016 dan berakhir pada tanggal setelah jangka waktu 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.	Dibayarkan setiap bulan

b. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Lainnya

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
1.	<p><i>Reimbursement and Indemnity Agreement</i> tanggal 27 November 2014 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan <i>Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement</i> tanggal 3 Agustus 2016 ("Perjanjian").</p>	<p>i. Perseroan ("Obligor"); ii. Protelindo Finance BV ("Penerbit Awal"); dan iii. Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank ("CGIF"); Selanjutnya ketiganya disebut Para Pihak.</p>	<p>Obligor telah menerbitkan surat utang atau Bonds tanpa jaminan yang diterbitkan dalam mata uang Dolar Singapura dengan nilai SGD180.000.000 (seratus delapan puluh juta Dollar Singapura) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2024 ("Surat Utang"). Penandatanganan Perjanjian ini merupakan implementasi atau pelaksanaan dari diperolehnya jaminan dari CGIF atas Surat Utang tersebut berdasarkan <i>Deed of Amendment Guarantee Agreement</i> tanggal 3 Agustus 2016 antara CGIF, DB Trustees (Hong Kong) Limited ("Wali Amanat") dan Penerbit Awal ("Penanggung"). Perjanjian ini mengatur prasyarat untuk pemberian Penanggung tersebut oleh CGIF, pembayaran biaya penanggung dan jumlah uang lainnya sehubungan dengan Penanggung dan jumlah uang lainnya sehubungan dengan Penanggung dan dasar dimana jumlah yang dibayarkan oleh CGIF berdasarkan Penanggung tersebut wajib dibayarkan kembali dan diganti rugi oleh Obligor.</p>	<p>Perjanjian ini mulai berlaku pada pemberlakuan efektif Penanggung tersebut, dan akan berakhir pada saat pembayaran semua biaya penanggung, penghentian penanggung sesuai dengan persyaratan dan pelaksanaan atau pelepasan penuh dari kewajiban penggantian Obligor berdasarkan Perjanjian ini.</p>
2.	<p><i>Amended and Restated Agency Agreement</i> tanggal 3 Agustus 2016 ("Perjanjian").</p>	<p>i. Protelindo Finance B.V. ("Penerbit Awal") ii. Perseroan ("Penerbit"); iii. DB Trustees (Hong Kong) Limited ("Wali Amanat"); iv. Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong ("Agen Pembayaran Pokok" dan "Agen Pengalihan"); dan v. Deutsche Bank Luxembourg S.A. ("Registrar" dan, bersama-sama dengan Agen Pembayaran Pokok, agen pembayaran lainnya yang ditunjuk berdasarkan perjanjian ini oleh Penerbit dari waktu ke waktu, dan Agen Pengalihan, "Para Agen"), Selanjutnya seluruhnya disebut Para Pihak.</p>	<p>Penerbit Awal telah menerbitkan surat utang atau Bonds tanpa jaminan yang diterbitkan dalam mata uang Dolar Singapura dengan nilai SGD180.000.000 (seratus delapan puluh juta Dollar Singapura) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2024 ("Surat Utang"). Penerbit menunjuk Para Agen dan masing-masing Agen menerima penunjukan tersebut untuk bertindak sebagai para agen Penerbit sehubungan dengan Obligasi sesuai dengan Persyaratan pada kantor yang ditentukan mereka masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Masing-masing Agen wajib melakukan hanya tugas-tugas yang diwajibkan darinya berdasarkan Perjanjian ini dan Persyaratan dan tidak akan mempunyai tugas yang tersirat. Kewajiban-kewajiban Para Agen adalah terpisah dan tidak bersama-sama. Jika Persyaratan diubah pada atau setelah suatu tanggal dimana suatu Agen menerima penunjukan dengan cara yang mempengaruhi tugas yang secara tegas akan</p>	<p>Perjanjian ini berlaku, sepanjang tidak diakhiri, sampai dengan dilunasinya Surat Utang tersebut.</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
			dilakukan oleh Agen tersebut, Agen tersebut tidak wajib untuk melakukan tugas yang diubah tersebut kecuali Agen tersebut sebelumnya telah setuju secara tertulis untuk melakukan tugas yang diubah tersebut.	

L. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan ekuitas langsung dan tidak langsung, dan/atau dibawah kendali pihak yang sama, dan/atau melalui manajemen kunci yang sama. Berikut adalah sifat hubungan dengan pihak afiliasi:

Sifat Hubungan	Pihak Afiliasi	Transaksi
Pemegang saham Perseroan	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Biaya pemasaran dan perijinan, penggantian biaya (perjanjian pemasaran dan perijinan pada tanggal 1 Agustus 2009 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kedua pada tanggal 26 Juli 2013
Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Bank Central Asia	PT Bank Central Asia Tbk.	Kas dan setara kas
Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Grand Indonesia	PT Grand Indonesia	Pembayaran sewa kantor
Presiden Direktur Iforte	Peter Djatmiko	<i>Management Incentive Program Agreement</i> dan Perjanjian Pinjaman
Entitas anak Perseroan	Iforte	<i>Loan Agreement, Bond Subscription Agreement, Warrant Issuance Agreement</i>

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu	Pembatasan dan Pembebanan	Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan	Saldo Terhutang per 30 Juni 2016
1.	Akta Perjanjian Sewa No. 57 tanggal 5 Mei 2011, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H., Msi., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan <i>First Amendment</i> tanggal 30 Juni 2015 ("Perjanjian Sewa Kantor 1")	Perseroan dan PT Grand Indonesia ("GI")	Perseroan menyewa ruangan dari GI seluas ±3.004,52 semi gros m ² dengan Suite No 5301 yang terletak di lantai 53 dan 5501, yang terletak di lantai 55 Menara BCA.	Jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor 1 ini berlaku 5 tahun sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.	-	Perjanjian Sewa Kantor 1 ini dibuat dan diatur dengan hukum Indonesia namun demikian perjanjian ini ditafsirkan dan diatur dalam Bahasa Inggris dan setiap penyelesaian sengketa akan dilakukan dalam Bahasa Inggris, kecuali apabila pengadilan secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan.	N/A
2.	<i>Lease Agreement No. 004/OFC/GI-LGL/III/12</i> tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana dari waktu ke waktu diubah dengan <i>First Amendment</i> tanggal 29 Oktober 2012, <i>Second Amendment</i> tanggal 24 Juni 2013, <i>Third Amendment</i>	Perseroan dan PT Grand Indonesia ("GI")	Perseroan menyewa sejumlah ruangan milik GI, seluas 2.064,8 m ² . Yang terbagi atas 4 area, yaitu: - Suite No. 4304 dengan luas 705,23 m ² - Suite No. 4308 dengan luas 368,45 m ² - Suite No. 4307 dengan luas 119,07 m ² - Suite No. 4901 dengan luas 872,05 m ² Bahwa pada Tanggal	Jangka waktu sewa untuk seluruh area sewa adalah 5 tahun (60 bulan) yang berlaku sejak 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2021.	Perseroan selama dalam masa Perjanjian Sewa Kantor 2 ini dilarang untuk menjaminkan, mengalihkan objek sewa dalam perjanjian ini.	Perjanjian Sewa Kantor 2 ini dibuat dan diinterpretasikan dengan Hukum Indonesia dan setiap penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	N/A

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu	Pembatasan dan Pembebanan	Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan	Saldo Terhutang per 30 Juni 2016
	tanggal 18 Desember 2013, dan terakhir berdasarkan <i>Fourth Amendment</i> tanggal 30 Juni 2015 ("Perjanjian Sewa Kantor 2").		Pemeriksaan. Perseroan telah menerima Surat No. 35/GI/MBCA-LSG/LS/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal persetujuan GI atas permohonan Perseroan untuk mengubah Perjanjian Sewa Kantor 2, termasuk antara lain mengubah objek sewa menjadi hanya Suite 4304, 4308 dan 4307 dengan total luas 1.192,75 m ² serta pengakhiran sewa Suite No. 4901.				
3.	<i>Marketing and License Agreement</i> tertanggal 1 Agustus 2009 sebagaimana diubah dengan <i>Second Amendment of the Marketing and License Agreement</i> tertanggal 26 Juli 2013 ("Perjanjian Marketing dan License")	Perseroan dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("SMN")	Perseroan menunjuk SMN untuk melakukan pemasaran dan pengurusan perizinan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan.	Jangka waktu Perjanjian Marketing dan License ini adalah selama 2 tahun sejak ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya.	-	Perjanjian Marketing dan License ini dibuat dan diatur dengan hukum Indonesia namun demikian perjanjian ini ditafsirkan dan diatur dalam Bahasa Inggris	Rp29.514.950.429 (AP kepada SMN)
4.	<i>Management Incentive Program Agreement</i> tanggal 18 Desember 2015 ("Perjanjian MIP").	Perseroan; dan Peter Djatmiko ("PD")	Perseroan memberikan fasilitas dan program insentif kepada PD serta mengikat PD sebagai Presiden Direktur Iforte, dimana PD setuju untuk menjadi Presiden Direktur Iforte dan menjalankan segala kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Direktur Iforte. Dalam Perjanjian, juga disebutkan bahwa PD dapat memperoleh sejumlah saham dari SMN dan setelah penandatanganan Perjanjian dengan cara membeli dari Perseroan atau pihak yang ditentukan oleh Perseroan sejumlah 55.000.000 (lima puluh lima juta) saham yang mewakili sekitar 0,54% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan dalam SMN.	Jangka Waktu pengikatan PD sebagai Presiden Direktur berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.	Tidak satupun Pihak dapat mengalihkan seluruh ataupun sebagian kepentingannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.	Perjanjian MIP ini dibuat dan diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan dalam Perjanjian MIP melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).	N/A

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu	Pembatasan dan Pembebanan	Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan	Saldo Terhutang per 30 Juni 2016
5.	Perjanjian Pinjaman tanggal 18 Desember 2015 ("Perjanjian").	Perseroan; dan Peter Djatmiko ("PD")	Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada PD sebesar US\$9.635.140,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh Dolar Amerika) yang seluruhnya wajib digunakan oleh PD untuk mengakuisisi 34.000.000 (tiga puluh empat juta) saham dari SMN yang mewakili 0.33% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan dalam SMN.	Tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016.	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh PD tanpa persetujuan Perseroan. Perjanjian ini dapat dialihkan atau dinovasikan, seluruh atau sebagiannya, oleh Perseroan tanpa persetujuan PD, namun Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PD terkait dengan pengalihan tersebut.	Perjanjian ini dibuat dan diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan dalam Perjanjian ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).	N/A
6.	<i>Loan Agreement</i> tanggal 12 Februari 2016 ("Perjanjian").	Perseroan dan Iforte	Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada Iforte sejumlah Rp30.393.754.446,00 yang akan digunakan Iforte untuk modal kerja usaha mikro BTS milik Iforte.	Jangka waktu fasilitas ini adalah 5 tahun, berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.	-	Perjanjian ini dibuat dan diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan dalam Perjanjian ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).	N/A
7.	<i>Bond Subscription Agreement relating to US\$10,000,000 Bonds</i> tanggal 28 Juli 2010, sebagaimana telah beberapa kali dialihkan, yaitu berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 19 Juli 2011, Perjanjian Pengalihan tanggal 1 Mei 2012, dan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Mei 2015 yang telah diamandemen berdasarkan Perjanjian Amandemen tanggal 1 Juli 2015, serta terakhir kali diamandemen berdasarkan <i>Amendment</i>	Perseroan dan Iforte	Iforte menerbitkan (i) Obligasi I pada tanggal 25 Januari 2011 berdasarkan Bond Certificate No. 001 dengan jumlah sebesar US\$4.500.000 (empat juta lima ratus ribu dolar Amerika) yang masa berlakunya sampai dengan 31 Juli 2017; dan (ii) Obligasi II pada tanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Bond Certificate No. 002 dengan jumlah sebesar US\$5.500.000 (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika) yang masa berlakunya sampai dengan 31 Juli 2017, kepada Perseroan.	-	-	Perjanjian ini dibuat dan diatur berdasarkan Hukum Singapura. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan dalam Perjanjian ini melalui arbitrase Singapura sesuai dengan peraturan Singapore International Arbitration Centre (SIAC).	N/A

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu	Pembatasan dan Pembebanan	Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan	Saldo Terhutang per 30 Juni 2016
	Agreement tanggal 26 Agustus 2016 ("Perjanjian").						
8.	Warrant Issuance Agreement tanggal 28 Juli 2010, sebagaimana telah beberapa kali dialihkan, yaitu berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 19 Juli 2011, Perjanjian Pengalihan tanggal 1 Mei 2012, dan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Mei 2015 yang telah diamandemen berdasarkan Perjanjian Amandemen tanggal 1 Juli 2015, serta terakhir kali diamandemen berdasarkan Amendment Agreement tanggal 26 Agustus 2016 ("Perjanjian").	Perseroan dan Iforte	Iforte menerbitkan (i) Warrant I pada tanggal 25 Januari 2011 berdasarkan Collective Warrant Certificate No. 001 sebanyak 12,897 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) Warrant yang dapat ditukarkan terhadap 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen); dan (ii) Warrant II pada tanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Collective Warrant Certificate No. 002 sebanyak 28,659 (dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan) Warrant yang dapat ditukarkan terhadap 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) saham dalam Iforte, kepada Perseroan.	-	-	Perjanjian ini dibuat dan diatur berdasarkan Hukum Singapura. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan dalam Perjanjian ini melalui arbitrase Singapura sesuai dengan peraturan Singapore International Arbitration Centre (SIAC).	N/A

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dari transaksi yang dilakukan dengan salah satu pihak terafiliasinya yaitu GI adalah:

- Perseroan dapat menciptakan koordinasi yang lebih mudah dan lebih baik secara internal perusahaan maupun dengan klien potensial Perseroan.
- Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas ruangan.

Perseroan melakukan setiap ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian dengan pihak berelasi tersebut telah atau akan terjadi dengan ketentuan yang wajar (*arm's-length*) atau dengan ketentuan serupa jika seandainya transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi sejenis dengan pihak lain.

M. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal 30 Juni 2016 Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap dengan jumlah nilai buku sebesar Rp175.445 juta, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp165.509 juta. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tercatat memiliki atau menguasai aset berupa beberapa bidang tanah yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Lokasi/Luas	Pemegang Hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 358/ 6 Agustus 2003	1 November 2040	Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta/ 323 m ²	Perseroan
2.	SHGB No. 02/ 22 Agustus 2008	14 Agustus 2028	Desa Majener, Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat/ 400 m ²	Perseroan
3.	SHGB No. 02/ 14 Agustus 2008	14 Agustus 2028	Desa Makbalim, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua	Perseroan

No.	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Lokasi/Luas	Pemegang Hak
			Barat/ 400 m ²	
4.	SHGB No. 33/ 20 September 2007	25 Juni 2026	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua/ 140 m ²	Perseroan

N. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset tetap yang berkaitan dengan kegiatan usahanya termasuk bangunan, dari risiko kerusakan dan musibah umum lainnya dan juga terhadap risiko tanggung gugat publik. Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi Perseroan telah memadai untuk melindungi aset tetap Perseroan yang material dan dipertanggungjawabkan. Hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengasuransikan aset tetapnya melalui beberapa perusahaan asuransi, yaitu:

No.	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	<i>Industrial Special Risks including Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami</i> No. 3431000021 tanggal 23 Maret 2016.	PT AIG Insurance Indonesia dan PT Asuransi Umum BCA (terafiliasi)	Perseroan dan/atau SMN dan/atau Entitas Anak	Semua harta kekayaan, termasuk bangunan, isi, panel elektrikal, pencahayaan, genset pelindung, perlengkapan kantor, mesin menara, transmisi, media data eksternal dan seluruh peralatan elektronik, produksi, dan teknikal serta teknologi dan seluruh isinya di seluruh lokasi kegiatan usaha Perseroan, SMN, dan Entitas Anak di Indonesia.	Rp7.304.495.231.477,-	1 Maret 2016 sampai dengan 1 September 2017
2.	<i>Terrorism and Sabotage Insurance</i> Polis No. 3439000001 tanggal 1 Maret 2016	PT AIG Insurance Indonesia	Perseroan dan/atau SMN dan/atau Protelindo Tower	Semua harta kekayaan nyata dan barang milik pribadi apapun jenis dan uraiannya milik Tertanggung atau yang Tertanggung bertanggungjawab untuk mengasuransikan sebelum terjadinya kerusakan tersebut di Indonesia.	Rp7.304.495.231.447,-	1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017
3.	<i>General Liability – Polis Otomotif</i> No. 0301005499 tanggal 28 Maret 2016	PT AIG Insurance Indonesia	Perseroan dan/atau SMN dan/atau Entitas Anak	Cidera tubuh dan kerusakan pada harta kekayaan pada lokasi kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada penyedia menara telekomunikasi dan infrastruktur terkait dan/atau seluruh kegiatan utama dan/atau yang berhubungan dengannya	Setiap kejadian: USD5.000.000 Agregat: USD10.000.000	1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017

Penanggung atas asuransi yang dimiliki Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, kecuali PT Asuransi Umum BCA baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

O. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. SMN, sebagai suatu Perseroan publik terdaftar di Indonesia, dan Entitas Anaknya yaitu Perseroan tunduk pada peraturan-peraturan yang tegas dan standar perilaku yang tinggi, termasuk perilaku keuangan, manajemen risiko dan pengawasan internal, yang sangat dipatuhi oleh Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan kejujuran dan integritas dan sesuai dengan seluruh kriteria hukum yang berlaku dan standar etika yang tinggi. Perseroan berkomitmen pada perlakuan yang adil dan merata terhadap seluruh Karyawannya yang berdedikasi. Perseroan dan para Direktur dan Karyawannya harus mematuhi seluruh undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Berikut ini adalah Pedoman Perilaku (“Pedoman”) yang diterapkan di dalam Perseroan:

a. Transaksi Yang Wajar

Karyawan harus melakukan transaksi yang wajar dengan pelanggan, pemasok, kompetitor dan karyawan. Tidak seorangpun dapat mengambil keuntungan secara tidak wajar dari siapapun dengan cara manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan informasi istimewa, penyajian yang keliru mengenai fakta material atau praktik transaksi yang tidak wajar lainnya.

b. Kerahasiaan

Rahasia bisnis dan informasi rahasia Perseroan atau mitranya secara kontraktual atau pelanggan harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Kewajiban ini terus berlangsung setelah hubungan kerja berakhir. Dalam hal informasi rahasia harus diungkapkan karena suatu keputusan pengadilan yang berwenang atau otoritas administratif, Departemen Legal dan Kepatuhan yang terkait akan membantu dalam menentukan pengungkapan apa yang diperlukan. Sehubungan dengan informasi non-publik, Karyawan atau anggota Direksi, yang memiliki informasi non-publik tersebut atau informasi rahasia Perseroan, harus mengetahui aturan perdagangan oleh orang dalam. Berdasarkan aturan perdagangan oleh orang dalam, dengan memperhatikan persyaratan tertentu atau pengecualian yang ditetapkan dalam aturan perdagangan oleh orang dalam, pihak yang memiliki informasi non-publik tersebut dilarang melakukan perdagangan atas efek Perseroan. Aturan perdagangan oleh orang dalam ini akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

c. Konflik Kepentingan, Hadiah dan Keuntungan Pribadi

Karyawan harus menghindari situasi dimana kepentingan pribadi atau keuangan mereka bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Manajemen harus menghindari penempatan bawahan dalam situasi yang demikian. Dalam hal ini, manajemen harus mendorong prinsip pengungkapan secara sukarela untuk mendeteksi potensi situasi yang demikian sebelum hal itu terjadi.

Karyawan dilarang untuk (a) mengambil kesempatan untuk diri mereka pribadi yang termasuk dalam lingkup kegiatan Perseroan, (b) menggunakan properti, informasi atau jabatan dalam Perseroan untuk keuntungan pribadi, dan (c) bersaing dengan Perseroan. Karyawan mempunyai kewajiban terhadap Perseroan untuk mendahulukan kepentingan Perseroan yang sah dengan kemampuan mereka yang terbaik.

Karyawan disarankan untuk tidak menerima atau menawarkan hadiah, perjalanan atau kegiatan khusus dengan nilai yang signifikan pada kegiatan yang bersifat pribadi atau sosial (misalnya, Hari Raya Keagamaan) atau pada waktu lain, dari pemasok atau pihak lainnya yang melakukan bisnis dengan Perseroan. Hadiah, penawaran perjalanan atau kegiatan khusus dengan nilai yang signifikan harus ditolak dengan sopan atau dikembalikan dengan hormat kepada pihak yang menawarkan jika memungkinkan.

Tidak ada keberatan untuk menerima atau menawarkan undangan untuk acara makan sehubungan dengan bisnis, kegiatan bisnis atau sosial, kegiatan olahraga atau hiburan dengan nilai yang signifikan sepanjang hanya diterima atau ditawarkan sekali-kali dan tidak sering dan sepanjang undang-undang dan kebijakan Perseroan tidak dilanggar. Dalam hal apapun, penilaian dengan itikad baik harus diterapkan dan jika ada pertanyaan mengenai penerimaan hadiah, perjalanan atau kegiatan khusus (nilai hadiah tidak jelas, tujuan hadiah meragukan, dsb.), Karyawan harus berkonsultasi dengan supervisornya.

d. Harta Perseroan

Seluruh karyawan, pejabat dan direktur harus melindungi harta Perseroan dan memastikan penggunaan harta secara efisien. Pencurian, kecerobohan dan pemborosan mempunyai dampak negatif yang langsung terhadap profitabilitas

Perseroan. Seluruh harta Perseroan hanya dapat digunakan untuk tujuan bisnis yang sah. Dana atau harta Perseroan tidak boleh digunakan untuk hadiah atau bantuan. Ini tidak menghalangi hadiah atau bantuan yang memenuhi seluruh persyaratan berikut: (a) hadiah atau bantuan diberikan untuk tujuan bisnis yang sah dan bukan untuk menerima keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang setempat atau untuk menghindari kewajiban yang dikenakan oleh undang-undang setempat, (b) hadiah atau bantuan tersebut tidak terlalu besar jumlahnya dan diberikan sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku dan tidak dianggap sebagai jenis suap atau melanggar undang-undang setempat sebagaimana yang ditafsirkan dan diterapkan, (c) pengungkapan hadiah atau bantuan tersebut tidak akan mempermalukan Perseroan atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan (d) hadiah atau bantuan tersebut disetujui oleh manager atau supervisor yang bertanggung jawab. Jika, dalam penilaian manager atau supervisor yang bertanggung jawab, jumlahnya dianggap tidak kecil, maka manager atau supervisor tersebut harus meminta pengarahan dari atasannya. Dana atau harta Perseroan tidak boleh digunakan untuk sumbangan kepada partai politik.

e. Laporan mengenai Pelanggaran

Setiap karyawan yang saat ini berada dalam suatu situasi atau melihat suatu kegiatan atau mengetahui suatu kegiatan yang kelihatannya bertentangan dengan Pedoman ini harus segera memberitahukan fakta-fakta yang bersangkutan kepada Vice President di areanya atau kepada Direktur. Laporan tersebut akan diperlakukan secara rahasia dan Perseroan tidak akan bertoleransi dengan segala bentuk pembalasan terhadap pihak manapun untuk keluhan atau laporan yang dibuat dengan itikad baik.

Departemen Legal dan Kepatuhan atau Divisi Sumber Daya Manusia yang terkait akan menangani laporan-laporan yang diterima. Dalam hal pelanggaran terhadap Pedoman ini, Divisi Sumber Daya Manusia akan mengambil langkah disipliner yang pantas, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan setiap tindakan hukum selanjutnya.

f. Konflik Kepentingan

Karyawan diharapkan untuk menghindari kegiatan pribadi dan kepentingan keuangan yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya terhadap Perseroan. Karyawan tidak boleh mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan jabatan mereka. Keputusan bisnis harus dibuat untuk kepentingan yang terbaik dari Perseroan, tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sebagai kebijakan Perseroan, seluruh Direktur dan Karyawan harus menghindari setiap konflik kepentingan yang nyata atau yang dirasakan.

Suatu "konflik kepentingan" terjadi jika suatu kepentingan pribadi seseorang turut campur atau bertentangan dalam cara apapun (atau bahkan tampak turut campur atau bertentangan) dengan kepentingan Perseroan. Suatu situasi konflik kepentingan dapat timbul jika Direktur atau Karyawan mengambil tindakan atau memiliki kepentingan (keuangan atau lainnya) yang dapat membuat kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya secara obyektif dan efektif. Konflik kepentingan dapat juga timbul jika seorang Direktur atau Karyawan atau seorang anggota keluarganya menerima keuntungan pribadi yang tidak wajar sebagai akibat dari jabatannya dalam Perseroan, tanpa memperhatikan apakah keuntungan tersebut diterima dari Perseroan atau suatu pihak ketiga. Pinjaman kepada, atau jaminan kewajiban dari, Direktur atau Karyawan dan anggota keluarga mereka menjadi perhatian khusus.

g. Larangan Terhadap Perdagangan Oleh Orang Dalam/Transaksi Oleh Orang Dalam

Setiap Direktur atau Karyawan yang memiliki akses kepada, atau mengetahui mengenai, informasi material non-publik dari atau mengenai Perseroan dilarang untuk membeli, menjual atau memperdagangkan saham atau efek lainnya milik SMN. "Informasi material non-publik" termasuk setiap informasi, positif atau negatif, yang belum tersedia atau diungkapkan kepada publik dan yang mungkin berarti bagi investor, sebagai bagian dari seluruh gabungan informasi, dalam menetapkan apakah akan membeli atau menjual saham atau efek lainnya milik SMN. Orang dalam tersebut juga dilarang memberikan "petunjuk" mengenai informasi material non-publik, yang secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, termasuk anggota keluarga, sanak saudara atau teman, sehingga mereka dapat melakukan perdagangan saham atau efek lainnya milik SMN. Selanjutnya, jika, selama masa kerja dengan Perseroan, seorang Direktur atau Karyawan mendapatkan informasi material non-publik mengenai perusahaan lain, misalnya salah satu dari pelanggan atau pemasok atau afiliasi kami, atau seorang Direktur atau Karyawan mengetahui bahwa Perseroan merencanakan untuk melakukan suatu transaksi besar dengan perusahaan lain (misalnya suatu akuisisi), Direktur atau Karyawan tersebut dilarang melakukan perdagangan efek perusahaan lain tersebut.

Berdasarkan UUPM, definisi "Orang Dalam" terdiri dari setiap Karyawan, Komisaris, Direktur dan Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Publik dan pihak ketiga lainnya, yang karena hubungan usaha mereka memiliki akses kepada, atau mengetahui mengenai, Informasi di Dalam mengenai Perusahaan Publik, atau pihak manapun yang dalam enam bulan terakhir adalah salah satu dari para pihak yang disebut di atas. Para pihak tersebut dilarang melakukan perdagangan saham atau efek lainnya milik SMN selama memiliki Informasi di Dalam. "Informasi Orang Dalam" berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia berarti informasi material yang belum diungkapkan kepada publik, termasuk setiap fakta yang

penting dan terkait mengenai kejadian, insiden atau data yang dapat berdampak pada harga efek pada suatu bursa atau yang dapat mempengaruhi keputusan investor, calon investor atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam informasi tersebut. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia melarang Orang Dalam untuk mempengaruhi atau memberikan Informasi Orang Dalam kepada pihak ketiga yang dapat mengarah kepada perdagangan efek terkait. Setiap pelanggaran terhadap larangan perdagangan oleh orang dalam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dikenakan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang Pasar Modal Indonesia juga mengatur bahwa setiap manipulasi pasar lebih jauh akan terkena ketentuan denda pidana yang sama seperti untuk perdagangan oleh orang dalam. Manipulasi pasar tersebut termasuk penipuan dengan segala cara, memberikan pernyataan palsu mengenai fakta material atau kegagalan untuk mengungkapkan fakta material tersebut. Siapapun yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam tindakan penipuan, perdagangan palsu, manipulasi bursa efek atau memberikan informasi yang menyesatkan, baik karena sengaja atau lalai, akan dikenakan denda pidana yang sama seperti denda untuk perdagangan oleh orang dalam yang disebut diatas.

Dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan pembentukan Komite Audit dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Obligasi Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan berikutnya, mana yang lebih dahulu.

Perseroan melaksanakan Rapat Dewan Komisaris, Direksi dengan Manajemen sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan serta Standar Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. Perseroan juga mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahun untuk melakukan melakukan perumusan atas kebijakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam hukum dan perundangan yang berlaku dan mendapatkan laporan pertanggungjawaban atas jalannya Perseroan yang telah dijalankan oleh Direksi dengan pengawasan yang benar oleh Dewan Komisaris.

P. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan menyadari akan perlunya suatu bentuk pemberian kembali kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada Perseroan. Perseroan secara aktif melakukan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berlokasi dekat kantor pusat Perseroan dan di tempat dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu contoh bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan adalah pemberian sumbangan kepada beberapa yayasan, panti asuhan, organisasi kepemudaan. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan kualitas infrastruktur di beberapa lokasi di Indonesia.

Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Total Biaya Per Tahun
1 Januari 2016 – 30 Juni 2016	Donor Darah Donasi untuk Panti Asuhan Donasi untuk Infrastruktur Donasi untuk Pemberian Sponsor Donasi untuk Bencana Alam Program Beasiswa Pelatihan Guru Pelestarian Alam	Bandung, Bogor, Bandar Lampung, Banda Aceh, Boyolali, Bali, Banten, Banyumas, Cirebon, Garut, Jakarta, Jambi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jayapura, Kalimantan, Kediri Madura, Merauke, Malang, Surabaya, Sukabumi, Banjar, Surakarta, Semarang, Surabaya, Sulawesi Selatan Sorong, Ternate, Toraja, Yogyakarta	Rp. 2.379.383.347
Tahun 2015	Donor Darah Donasi untuk Panti Asuhan Donasi untuk Infrastruktur Donasi untuk Pemberian Sponsor Donasi untuk Bencana Alam Program Beasiswa Pelatihan Guru	Banjarmasin, Bali, Banten, Bogor, Bekasi, Banyumas, Bandung, Deli Serdang, Cirebon, Garut, Jakarta, Jepara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kediri, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kudus, Lampung, Makassar, Madura, Malang, Pati, Pangandaran, Surabaya, Sukabumi, Semarang, Solo, Surakarta Sumatera Selatan, Samarinda, Semarang, Surabaya, Sulawesi Selatan, Toraja, Tangerang, Yogyakarta	Rp. 2.673.524.915
Tahun 2014	Donor Darah Donasi untuk Panti Asuhan Donasi untuk Infrastruktur Donasi untuk Pemberian Sponsor Donasi untuk Bencana Alam Program Beasiswa Pelatihan Guru	Bangka, Bontang, Banjarnegara, Banjarmasin, Deli Serdang, Garut, Jakarta, Jepara, Lampung, Manado, Makassar, Medan, Malang, Pati, Semarang, Solo, Sukabumi, Tangerang, Toraja, Yogyakarta,	Rp. 2.085.198.637

Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Total Biaya Per Tahun
	Donasi untuk Pemberian Sponsor Donasi untuk Bencana Alam		

Q. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, administratif atau arbitrase yang sedang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh merugikan secara material terhadap keuntungan, bisnis, kelangsungan usaha (*going concern*) atau posisi finansial Perseroan secara terkonsolidasi dan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini.

R. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan telah memperoleh merek dagang untuk melindungi HAKI milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat Merek	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang/ Jasa	Uraian Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	IDM000380256		38	Biru, Hitam, Putih	10 tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2011	Perseroan
2.	IDM000380280		38	Biru, Putih	10 tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2011	Perseroan

Lebih lanjut, salah satu Entitas Anak yaitu Iforte sedang dalam proses untuk pendaftaran atas kekayaan intelektual berupa merek yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Agenda dan Tanggal Masuk	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang/ Jasa	Pemohon Merek	Status Proses Pendaftaran pada Direktorat Jenderal HAKI
1.	J002016035192 tanggal 25 Juli 2016	Free Wifi Connect to enjoyfreewifi	38	Iforte	Dalam status pengecekan terkait dengan ada atau tidaknya keberatan dari pihak ketiga terkait dengan pendaftaran merek tersebut
2.	J002014021697 tanggal 30 April 2014	Iforte	38	Iforte	Dalam proses pemeriksaan formalitas

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HAKI milik Perseroan maupun Entitas Anak tidak sedang dijamin dan/atau dijadikan agunan kepada pihak manapun.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Umum

Perseroan merupakan salah satu *market leader* dalam bisnis dan penyediaan menara telekomunikasi di tanah air (Sumber: Majalah SWA, 21 Juli 2016). Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 14.775 *Telecommunication Tower Sites* di Indonesia dan Belanda, termasuk 7.826 *Telecommunication Tower Sites* di pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak memiliki basis pelanggan yang beragam, antara lain operator telekomunikasi utama di Indonesia yaitu Telkomsel, XL, Indosat, dan Hutchison. Pada saat ini Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penyewaan induk dengan seluruh pelanggan Perseroan yang mencakup 24.726 sewa lokasi per tanggal 30 Juni 2016.

Perseroan didirikan pada tahun 2003 di Bandung yang diawali dengan diperolehnya kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan memiliki 232 *Telecommunication Tower Sites* dengan jangka waktu antara tahun pendirian hingga bulan Maret 2007. Perseroan telah tumbuh secara signifikan sejak tim manajemen senior Perseroan mengambil kendali atas kegiatan operasional Perseroan pada bulan Maret 2007 dan telah meningkatkan portofolio *Telecommunication Tower Sites*nya dari sebanyak 232 *Telecommunication Tower Sites* menjadi sebanyak 14.775 *Telecommunication Tower Sites* per tanggal 30 Juni 2016 melalui sejumlah akuisisi dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru. Perseroan melakukan beberapa akuisisi diantaranya terhadap Hutchison dan XL disamping juga mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites* dari perusahaan-perusahaan penyedia menara berskala kecil. Di Juli 2015, Perseroan melakukan akuisisi atas PT Iforte Solusi Infotek, sebuah perusahaan penyedia menara *micro-cell* terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan lebih dari 450 menara *micro-cell* dan 7 BTS hotel. Iforte juga memiliki dan mengoperasikan lebih dari 700 kilometer jaringan *fiber optic* dengan lebih dari 180 *Points-of-Presence* ("PoP") di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya.

Selain akuisisi, Perseroan telah melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru bagi para pelanggannya untuk meningkatkan portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan memenuhi kebutuhan jaringan para pelanggan. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. PHH Mustopa Komp. Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No.16 Kota Bandung, sedangkan kantor cabang Perseroan berlokasi di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan ruang pada menara untuk para operator telekomunikasi. Ruang yang disewakan terdiri atas ruang vertikal untuk menara-menara, dimana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio (*radio frequency/RF*) dan antena gelombang pendek (*microwave*) serta ruang pada permukaan di setiap lokasi untuk pendirian *shelters* yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik. Para pelanggan Perseroan umumnya menghendaki agar peralatan-peralatan tersebut ditempatkan di berbagai lokasi di sepanjang wilayah target layanan mereka dan cakupan wilayah yang telah ada untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel kepada konsumen akhir mereka. Para pelanggan Perseroan umumnya menyewa ruang tambahan untuk memperluas dan meningkatkan cakupan jaringan nirkabelnya serta meningkatkan kualitas layanan mereka. Dengan bergabungnya Iforte, Perseroan juga secara khusus menawarkan layanan *fiber optic* dan menara *micro-cell* di Indonesia, menyediakan infrastruktur penting bagi operator telekomunikasi dalam pembangunan jaringan 3G dan 4G untuk memenuhi permintaan yang tinggi atas data nirkabel di Indonesia.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan kepada para pelanggannya yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan jaringan mereka pada saat ini maupun di masa yang akan datang serta memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari para konsumen pelanggannya.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri menara telekomunikasi Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik sebagai dampak dari peningkatan penggunaan telepon selular yang sangat pesat (terutama penggunaan *smart phone*) sebagai akibat dari rendahnya tingkat penetrasi penggunaan telepon *fixed line* di Indonesia, meningkatnya akses terhadap layanan data nirkabel termasuk internet nirkabel, rencana dari para operator telekomunikasi untuk memindahkan investasinya dari infrastruktur yang bersifat pasif ke ekspansi dan peningkatan jaringan dan meningkatnya daya beli masyarakat yang dikarenakan pertumbuhan makroekonomi Indonesia yang berkesinambungan dan penurunan harga telepon genggam. Kondisi-kondisi tersebut memberikan dorongan bagi para operator telekomunikasi nirkabel untuk memperluas dan meningkatkan jaringan yang dimilikinya dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan industri penyewaan menara di Indonesia. Kegiatan usaha penyewaan menara Perseroan dengan kontrak jangka panjang dikarakteristikan dengan peningkatan hasil operasional yang tinggi dan hasil arus kas yang cenderung stabil. Faktor-faktor yang diyakini Perseroan akan terus mendukung Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. **Kontrak sewa menara jangka panjang yang memuat komponen kenaikan tarif sewa.** Kontrak sewa lokasi yang dimiliki Perseroan dengan para operator telekomunikasi pada umumnya memiliki masa kontrak selama 10 atau 12 tahun, dengan opsi perpanjangan masa sewa. Kontrak sewa ini tidak dapat dibatalkan. Saat ini sebagian besar kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Perseroan memberikan hak untuk menerima pembayaran sewa di muka selama 1 tahun dan memuat komponen kenaikan tarif sewa tahunan yang dikaitkan dengan tingkat inflasi Indonesia yang diukur berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen.
2. **Biaya operasional cenderung stabil.** Biaya operasional Perseroan umumnya cenderung stabil sekalipun terdapat penambahan operator telekomunikasi nirkabel yang menyewa ruang pada sebuah menara. Oleh karena itu, dengan adanya tambahan penyewa pada ruang sebuah menara atau kolokasi, sebagian besar tambahan pendapatan yang dihasilkan akan menjadi laba operasional.
3. **Belanja modal untuk pemeliharaan yang rendah.** Perseroan memiliki rata-rata belanja modal tahunan yang rendah untuk pemeliharaan suatu *Telecommunication Tower Sites*. Rendahnya tingkat belanja modal untuk pemeliharaan terutama disebabkan oleh rata-rata umur *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan yang rendah. Umur ekonomis *Telecommunication Tower Sites* yang lazim dalam industri penyewaan menara adalah sekitar 20 tahun sesuai dengan praktek depresiasi yang umum atau lebih lama apabila dipelihara dengan baik.
4. **Tingkat perpanjangan kontrak sewa yang tinggi.** Operator-operator telekomunikasi cenderung untuk memperpanjang kontrak-kontrak sewa pada *Telecommunication Tower Sites* yang ada pada saat ini daripada melakukan perpindahan ke *Telecommunication Tower Sites* yang baru karena adanya kemungkinan tidak tersedianya *Telecommunication Tower Sites* alternatif dan perpindahan tersebut dapat menimbulkan biaya yang mahal serta hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan operasional dan kualitas jaringan mereka.
5. **Layanan yang sangat diperlukan.** Jaringan sebagai salah satu aset utama dari para pelanggan Perseroan ditempatkan pada *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan menyediakan layanan yang sangat diperlukan oleh para pelanggan agar mereka dapat sepenuhnya mengoperasikan jaringan dan memberikan layanan kepada konsumen. Menara-menara telekomunikasi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam mata rantai komunikasi nirkabel.

Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Perseroan percaya bahwa sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan tidak terletak dekat dengan *Telecommunication Tower Sites* lainnya. Dengan adanya jaringan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan yang luas, Perseroan dapat memenuhi kebutuhan yang beragam dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia. Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan juga menghasilkan potensi pertumbuhan bagi Perseroan karena Perseroan memiliki kesempatan untuk menambah jumlah penyewa kolokasi dan menambah peralatan baru untuk penyewa menara Perseroan yang ada pada saat ini. Perseroan memiliki kapasitas yang signifikan untuk menambah jumlah penyewa kolokasi pada portofolio *Telecommunication Tower Sites* nya.

Pendapatan dan EBITDA Perseroan dan Entitas Anak secara berturut-turut adalah sebesar Rp2.423.134 juta dan Rp2.104.290 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

B. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan seperti yang dijabarkan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang membedakan Perseroan dengan para kompetitornya dan merupakan faktor-faktor penting untuk mengimplementasikan strategi usaha Perseroan.

1. Perseroan merupakan salah satu *market leader* dalam bisnis dan penyediaan menara telekomunikasi di tanah air yang memiliki portofolio *Telecommunication Tower Sites* sebanyak 14.775 *Telecommunication Tower Sites* per tanggal 30 Juni 2016.

Para pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beberapa operator telekomunikasi utama di Indonesia. Sekitar 88,1% dari *Telecommunication Tower Sites commenced* yang dimiliki Perseroan terletak di pulau-pulau padat penduduk di Indonesia, yakni di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana sekitar 53,0% dari *Telecommunication Tower Sites* tersebut terletak di pulau Jawa, yang merupakan pulau dengan jumlah dan kepadatan populasi yang tertinggi di Indonesia. Tabel berikut ini menunjukkan distribusi *Telecommunication Tower Sites* Perseroan di wilayah-wilayah utama Indonesia dan Belanda per tanggal 30 Juni 2016:

Wilayah	Jumlah	Persentase dari Jumlah
Jawa	7.826	53,0%
Sumatera	2.324	15,7%
Kalimantan	1.410	9,5%
Nusa Tenggara	216	1,5%
Kepulauan Riau	588	4,0%
Sulawesi	1.464	9,9%
Bali	452	3,1%
Bangka Belitung	108	0,7%
Belanda	260	1,8%
Lainnya	127	0,8%
Jumlah	14.775	100,0%

Perseroan telah mengalami pertumbuhan jumlah portofolio *Telecommunication Tower Sites* dan hasil operasional yang tinggi di masa lalu melalui akuisisi portofolio *Telecommunication Tower Sites*, pembangunan *Telecommunication Tower Sites* dan meningkatkan jumlah kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* telekomunikasi Perseroan. Sebagai sebuah penyedia menara independen, Perseroan tidak dimiliki, atau tidak terafiliasi dengan operator telekomunikasi manapun sehingga tidak bersaing dengan para pelanggan Perseroan, yang mungkin tidak ingin menyewa ruang pada menara milik operator telekomunikasi lainnya. Oleh karena itu, Perseroan dapat menargetkan layanannya kepada seluruh operator telekomunikasi di Indonesia.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang masih berusia muda yang sebagian besar dibangun untuk disewakan kepada 4 penyewa atau lebih, yang dapat ditambahkan dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, *Telecommunication Tower Sites* Perseroan terletak di lokasi yang strategis untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dengan menara-menara yang dioperasikan oleh perusahaan penyedia menara lainnya dan perusahaan komunikasi nirkabel. Perseroan memiliki fokus untuk membangun portofolio *Telecommunication Tower Sites* nya sebagian besar melalui pembangunan dengan kontrak *Built-to-Suit* dan menerapkan kriteria kinerja yang ketat terhadap *Telecommunication Tower Sites* baru untuk memastikan tercapainya tingkat pengembalian yang ditargetkan oleh Perseroan. Di samping itu, Perseroan terus menerapkan kebijakan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* yang konservatif dimana Perseroan hanya akan melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* ketika terdapat penyewa utama yang menandatangani perjanjian sewa dengan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keuntungan sebagai salah satu pionir di dalam industri penyedia menara telekomunikasi. Hambatan yang dihadapi oleh pemain-pemain baru untuk masuk ke dalam industri ini cukup signifikan yang disebabkan oleh:

- Besarnya modal awal yang diperlukan untuk membangun atau mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites*;
- Besarnya biaya operator telekomunikasi dalam pemindahan peralatan ke *Telecommunication Tower Sites* yang baru;
- Risiko-risiko operasional dari adanya gangguan yang dihadapi oleh operator telekomunikasi ketika melakukan perpindahan ke *Telecommunication Tower Sites* yang lain;
- Kebutuhan untuk memperoleh portofolio *Telecommunication Tower Sites* dengan skala tertentu dan lokasi yang beragam untuk menarik operator-operator telekomunikasi;
- Pembatasan-pembatasan dari adanya peraturan-peraturan, termasuk pembatasan atas adanya penanaman modal asing dan proses perolehan perizinan yang diperlukan; dan
- Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan negosiasi atas perjanjian penyewaan induk dengan para operator telekomunikasi.

Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini memiliki kapasitas tambahan yang signifikan untuk penambahan penyewa-penyewa kolokasi. Perseroan melakukan akuisisi dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* yang diutamakan untuk penyewaan kolokasi. Kolokasi menciptakan adanya skala ekonomis, terutama terkait pemeliharaan *Telecommunication Tower Sites*, dan dengan adanya kolokasi, Perseroan memiliki jumlah kapasitas *Telecommunication Tower Sites* yang tinggi untuk menunjang kebutuhan jaringan para pelanggannya. Selain itu, kolokasi juga meningkatkan margin operasional dan tingkat pengembalian atas investasi Perseroan.

Model bisnis dan struktur permodalan Perseroan telah terbukti dalam menunjang kesinambungan profitabilitas Perseroan yang kuat. Perseroan berkeyakinan bahwa adanya peningkatan tingkat penyewaan, kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang berusia muda dengan biaya pemeliharaan yang relatif rendah, Perseroan dapat memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan, EBITDA dan arus kas yang tinggi. Margin EBITDA Perseroan pada umumnya berada dalam posisi yang stabil. Margin EBITDA Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 secara berturut-turut adalah sebesar 82,4%, 82,9%, 84,2% dan 86,8%. Selain itu, Perseroan juga memiliki tingkat konversi kas yang tinggi, yaitu rata-rata sebesar 98,3% dari 31 Desember 2013 sampai dengan 30 Juni 2016. Tingkat konversi kas diperoleh dari membagi *Free Cash Flow* dengan EBITDA.

2. Model bisnis yang stabil dengan karakteristik perolehan pendapatan dan arus kas yang jelas dan mudah diperkirakan di masa yang akan datang.

Perseroan merupakan pemilik dan operator menara independen berskala besar yang pertama di Indonesia dengan kontrak penyewaan *Telecommunication Tower Sites* yang berjangka waktu panjang (masa kontrak awal pada umumnya adalah selama 10 atau 12 tahun), yang tidak dapat dibatalkan, dan dengan adanya opsi untuk memperpanjang kontrak dengan adanya ketentuan tambahan dan peningkatan tarif sewa. Dengan adanya kontrak-kontrak tersebut, Perseroan memiliki basis operasional yang stabil dan arus kas yang mudah diperkirakan.

Perjanjian-perjanjian penyewaan induk yang dimiliki oleh Perseroan memiliki ketentuan bahwa biaya-biaya tertentu sehubungan dengan operasional *Telecommunication Tower Sites* akan ditanggung oleh para pelanggannya, seperti biaya listrik dan biaya administrasi tertentu kepada pemerintah. Perjanjian-perjanjian penyewaan induk tersebut pada umumnya memiliki ketentuan peningkatan sebagian tarif sewa yang dikaitkan dengan tingkat inflasi dan ketentuan untuk membebaskan biaya sewa pada peralatan tambahan yang ditempatkan pada *Telecommunication Tower Sites* untuk penambahan kapasitas para pelanggannya. Selain itu, Perseroan juga memiliki basis pelanggan yang stabil dimana pada umumnya pelanggan dilarang mengalihkan kewajibannya tanpa persetujuan dari Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa model bisnis Perseroan menciptakan perlindungan kredit yang kuat bagi Perseroan. Para operator telekomunikasi pada umumnya melakukan pembayaran dimuka kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Perseroan memiliki metode yang efektif untuk memastikan para pelanggannya melakukan pembayaran tepat pada waktunya, termasuk kemampuan untuk menghentikan kegiatan operasional peralatan atau membatalkan kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites*-nya dan menerima nilai kontrak sewa yang tersisa sebagai kompensasi. Mekanisme ini terbukti efektif dalam menempatkan Perseroan di posisi yang baik dalam jadwal pembayaran para pelanggannya, yang pada akhirnya membantu Perseroan dalam mempertahankan arus kas yang stabil.

3. Perseroan menyediakan layanan yang penting kepada para pelanggannya dan memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan operator-operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia.

Posisi Perseroan di dalam mata rantai komunikasi nirkabel menunjukkan bahwa Perseroan menyediakan layanan penting kepada para pelanggannya. Jaringan yang berfungsi secara penuh merupakan sebuah faktor yang penting bagi operator-operator telekomunikasi nirkabel dalam menyediakan layanannya kepada para pelanggan. Dengan demikian, *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan akan terus memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri layanan komunikasi nirkabel Indonesia di masa yang akan datang.

Perseroan menyediakan layanan penting tersebut kepada operator-operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Operator-operator tersebut merupakan operator-operator yang mapan, memiliki rekam jejak kredit yang kuat dan telah menunjang bisnis Perseroan secara berkesinambungan. Tabel berikut ini memperlihatkan persentase kontribusi pendapatan Perseroan dari operator-operator telekomunikasi tertentu untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011:

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Hutchison	39,4	39,5	38,3	38,8	36,4	39,0	43,3
Telkomsel	19,6	20,5	20,1	18,8	15,3	11,9	5,9
XL	18,8	20,5	19,9	20,1	16,8	17,5	15,4
Smartfren	6,5	7,3	7,0	7,4	8,8	9,3	11,3
Indosat	5,4	5,4	5,4	4,9	4,6	5,1	3,8
Telkom	-	0,4	1,3	1,0	1,8	2,1	3,0
Esia	-	-	-	3,2	5,6	7,7	10,4
Total	89,7	93,6	92,0	94,2	89,3	92,6	93,1

Sumber : Perseroan, Desember 2011 – Juni 2016

Kemajuan teknologi dalam industri telekomunikasi nirkabel merupakan sebuah faktor yang positif bagi bisnis Perseroan. Teknologi-teknologi baru, seperti 4G, memerlukan peningkatan teknologi atas peralatan yang ada atau penambahan peralatan baru oleh operator telekomunikasi. Peningkatan teknologi dan penambahan peralatan baru tersebut memiliki potensi peningkatan permintaan atas ruang dan/atau layanan tambahan pada menara, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan dari penyewaan ruang atas menara-menara Perseroan. Perseroan tidak memiliki biaya tambahan untuk melakukan penggantian atau peningkatan teknologi atas *Telecommunication Tower Sites* Perseroan, dimana biaya tersebut ditanggung oleh para penyewa menara. Selain itu, oleh karena *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan tidak terikat dengan teknologi tertentu, layanan yang diberikan Perseroan cenderung tidak usang di dalam

industri telekomunikasi nirkabel berbasiskan menara. Hal tersebut memberikan arus kas jangka panjang yang berkesinambungan bagi Perseroan meskipun terdapat perubahan-perubahan di dalam industri telekomunikasi nirkabel.

4. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak global dan dukungan yang kuat dari pemegang saham Perseroan.

Anggota tim manajemen senior dan konsultan Perseroan juga merupakan salah satu pelopor dalam industri menara di Indonesia dan telah berhasil melakukan akuisisi, pembangunan dan pengoperasian portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang besar di Indonesia. Pengetahuan yang dimiliki oleh tim manajemen senior dan konsultan Perseroan dalam bisnis menara merupakan sebuah keunggulan yang membedakan Perseroan dari para pesaingnya. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2003 sebagai salah satu perusahaan penyedia menara independen pertama di Indonesia. Sebagian besar tim manajemen senior dan konsultan Perseroan telah bergabung dengan Perseroan pada bulan Maret 2007 dan telah berhasil mengembangkan bisnis menara di Indonesia secara bersama-sama dengan para karyawan dan manajer Perseroan. Tim manajemen senior Perseroan telah mengembangkan bisnis Perseroan dari pemilik dan operator menara independen berskala kecil yang hanya memiliki 232 *Telecommunication Tower Sites* pada bulan Maret 2007 menjadi perusahaan menara yang dioperasikan secara profesional dengan portofolio *Telecommunication Tower Sites* terbesar di Indonesia, yakni sebanyak 14.775 *Telecommunication Tower Sites* per tanggal 30 Juni 2016. Sejak 5 tahun yang lalu, Perseroan telah melakukan rekrutmen dan pelatihan terhadap 903 karyawan tetap mengenai aspek-aspek fundamental dalam bisnis menara. Para manajer dan karyawan Perseroan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan praktik yang lazim terkait dengan akuisisi, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan menara di Indonesia.

Selain itu, tim manajemen Perseroan juga telah berhasil melakukan penawaran umum perdana saham yang pertama atas sebuah perusahaan menara di Indonesia melalui pencatatan saham pemegang saham Perseroan, SMN, pada tanggal 8 Maret 2010 di Bursa Efek Indonesia.

5. Kegiatan usaha yang didukung oleh perekonomian Indonesia dan prospek pertumbuhan industri yang kuat

Bisnis penyedia menara independen telah berkembang menjadi sebuah komponen yang signifikan dalam sistem telekomunikasi nirkabel di Indonesia secara keseluruhan, dengan didorong oleh peningkatan permintaan atas akses nirkabel terhadap layanan data melalui internet dan peningkatan penggunaan telepon genggam (terutama *smart phone*) yang disebabkan karena rendahnya tingkat penetrasi penggunaan telepon *fixed line* di Indonesia, yang juga didukung oleh terus meningkatnya jumlah masyarakat ekonomi kelas menengah di Indonesia. Tingkat PDB Indonesia telah tumbuh sebesar 5,6% pada tahun 2013, 5,0% pada tahun 2014 dan 4,8% pada tahun 2015, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.

Perseroan berkeyakinan bahwa perusahaan telekomunikasi pada saat ini sedang fokus pada strategi untuk meminimalisir jumlah menara, dimana mereka cenderung memilih untuk menyewa menara dibandingkan dengan mengeluarkan modal untuk membangun atau mengakuisisi menara. Hal tersebut akan menguntungkan bisnis penyewaan menara. Kenaikan permintaan atas layanan 3G dan 4G juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan atas ruang pada menara, karena jaringan dengan frekuensi yang tinggi hanya menyediakan cakupan jaringan yang terbatas sehingga membutuhkan menara-menara tambahan untuk memperoleh cakupan jaringan yang lebih luas. Pertumbuhan dalam layanan data juga akan memerlukan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan layanan *basic voice*, sehingga memerlukan peningkatan jumlah menara untuk mempertahankan cakupan dan kualitas layanan yang baik.

C. Prospek Usaha

Perseroan percaya bahwa sejalan dengan tumbuhnya industri komunikasi nirkabel, persaingan telah menjadi lebih ketat. Sebagai akibatnya, banyak operator nirkabel berminat untuk melakukan penghematan modal dan meningkatkan kecepatan masuk ke pasar baru dengan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berakibat langsung pada pelayanan dan pertumbuhan pelanggan dan menggunakan jasa dari luar dalam hal kebutuhan infrastruktur seperti memiliki, membangun melalui pihak ketiga dan merawat menara. Ini khususnya dapat dicapai dengan melakukan kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh penyedia menara independen seperti Perseroan. Tren akan meningkatnya kolokasi kemungkinan dipercepat karena peraturan pembatasan menara dan bertambahnya kecenderungan dari pemerintah yang mendorong *Telecommunication Tower Sites* untuk dapat menampung beberapa penyewa.

Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong operator telekomunikasi nirkabel di Indonesia untuk menyewa infrastruktur menara dari penyedia menara independen adalah:

- Mengurangi pengeluaran modal dan memperbaiki imbal hasil atas modal yang ditanamkan;
- Menggunakan jasa untuk kegiatan yang bukan merupakan usaha inti dan memusatkan perhatian pada usaha inti telekomunikasi nirkabelnya;

- Melakukan penggelaran jaringan (*network roll-out*) yang lebih cepat dan waktu pemasaran yang lebih cepat, khususnya bagi pendatang baru;
- Peraturan dan imbauan pemerintah yang mendukung kolokasi; dan
- Mencapai perluasan jangkauan dan peningkatan kapasitas di wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi.

Sebagai tambahan dari faktor-faktor diatas, manajemen percaya bahwa industri penyedia menara independen akan mendapat keuntungan dari beberapa faktor tambahan, termasuk hal-hal yang berikut:

- Pendapatan yang stabil dan berkembang berdasarkan pada perjanjian sewa jangka panjang dengan operator nirkabel;
- Rendahnya tingkat perpindahan penyewa dikarenakan tingginya biaya dan gangguan berkenaan dengan memindahkan peralatan nirkabel ke *Telecommunication Tower Sites* baru dan cenderung menyebabkan penataan ulang jaringan nirkabel;
- Industri yang terdiri dari pelanggan-pelanggan yang pada dasarnya terdiri dari perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional besar yang memiliki skala usaha yang besar;
- Kebutuhan modal perawatan di masa depan yang relatif rendah;
- Arus kas jangka panjang dan rasio laba yang baik dengan efisiennya biaya operasional; dan
- Inisiatif Pemerintah untuk mengendalikan penambahan jumlah *Telecommunication Tower Sites* dan karenanya mendorong operator mengkolokasikan peralatan mereka di *Telecommunication Tower Sites* yang dibangun (baik melalui pihak ketiga ataupun tidak melalui pihak ketiga) untuk kolokasi.

Selain itu, prospek usaha Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang telekomunikasi adalah membuka peluang dan memperluas investasi di sektor telekomunikasi khususnya bisnis menara telekomunikasi.

D. Strategi Usaha

Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan *Telecommunication Tower Sites* yang luas milik Perseroan, disain dan lokasi *Telecommunication Tower Sites*, basis pelanggan yang beragam dan arus kas yang kuat merupakan faktor-faktor yang memperkuat posisi Perseroan di industri menara Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan memiliki posisi dan kapasitas yang kuat untuk menampung penyewa kolokasi dalam jumlah yang besar. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk melakukan beberapa strategi usaha untuk memperkuat posisi Perseroan di dalam industri dan memperluas jaringan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan melalui pembangunan dan akuisisi.

1. Memaksimalkan sewa kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat mengembangkan bisnisnya secara substansial melalui konsep sewa kolokasi, yang berarti penyewaan ruang pada menara pada beberapa penyewa. Sebagian besar biaya pengoperasian sebuah menara merupakan biaya tetap dan Perseroan hanya mengeluarkan biaya yang relatif kecil dari adanya penambahan penyewa. Strategi untuk meminimalisir jumlah aset (*asset light strategy*) yang diterapkan oleh para operator telekomunikasi juga mendukung peningkatan jumlah sewa kolokasi. Dengan demikian, penyewaan ruang pada menara kepada operator telekomunikasi lainnya akan meningkatkan margin operasional dan tingkat pengembalian atas investasi yang signifikan bagi Perseroan. Perseroan secara aktif terus memasarkan sewa kolokasi dan memberikan edukasi terkait manfaat dari sewa kolokasi kepada para operator telekomunikasi.

2. Pertumbuhan melalui pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru.

Pada masa lalu, operator-operator telekomunikasi telah membangun sebagian besar menara untuk dipergunakan sendiri oleh mereka dan hanya melakukan *outsourcing* pada aspek-aspek tertentu, seperti akuisisi lahan dan konstruksi. Namun demikian, sejak tahun 2010, operator-operator telekomunikasi Indonesia mulai cenderung untuk menerapkan strategi untuk meminimalkan jumlah aset, dimana mereka secara terus menerus bekerja sama dengan operator-operator menara independen seperti Perseroan untuk membangun dan memiliki menara dan pada saat yang sama menyewa ruang pada menara-menara tersebut melalui perjanjian sewa jangka panjang, dibandingkan dengan melakukan pembangunan dan pengoperasian portofolio menaranya sendiri. Perjanjian tersebut dikenal dengan kontrak *Build-to-Suit*. Sejak tanggal 31 Maret 2007 hingga 30 Juni 2016, Perseroan telah membangun 6.416 *Telecommunication Tower Sites* melalui kontrak *Build-to-Suit*. Perseroan berkeyakinan bahwa salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan Perseroan hingga dengan saat ini adalah dengan kemampuan Perseroan yang handal dalam membangun *Telecommunication Tower Sites*.

Perseroan telah mengembangkan bisnisnya dengan fokus pada aktivitas konstruksi seperti proyek-proyek *Build-to-Suit* yang memenuhi kriteria tingkat pengembalian minimum Perseroan. Perseroan pada umumnya bekerjasama dengan operator-operator telekomunikasi untuk membangun dan memiliki jaringan *Telecommunication Tower Sites* yang dibangun pada lokasi yang diinginkan oleh para operator tersebut dan berdasarkan spesifikasi disain jaringan mereka. Selanjutnya, operator-operator telekomunikasi akan menjadi penyewa utama untuk menara-menara tersebut melalui kontrak sewa

menara jangka panjang dan Perseroan akan terus memasarkan *Telecommunication Tower Sites* tersebut kepada operator lainnya untuk memperoleh pendapatan dari jasa sewa kolokasi. Pada umumnya Perseroan tidak melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* dan/atau infrastruktur pendukungnya sebelum diperolehnya kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites* dengan penyewa utama.

Perseroan terus melakukan pembangunan atas sebagian besar *Telecommunication Tower Sites*nya berdasarkan sistem tersebut. Perseroan telah membuktikan bahwa Perseroan memiliki sistem dan proses yang diperlukan untuk membangun ratusan *Telecommunication Tower Sites* setiap bulannya. Dengan menyediakan layanan tersebut, portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan akan meningkat dan akan menghasilkan arus pendapatan, baik dari penyewa utama maupun penyewa kolokasi.

3. Pertumbuhan melalui akuisisi aset penunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau perusahaan pemilik aset penunjang menara.

Perseroan telah berhasil mencapai posisi sebagai salah satu pionir di dalam industrinya terutama melalui akuisisi aset penunjang kegiatan usaha dan/atau perusahaan pemilik aset penunjang menara dan Perseroan berencana untuk menjadikan akuisisi *Telecommunication Tower Sites* sebagai salah satu strategi pertumbuhan yang utama. Perseroan berencana untuk terus mencari peluang akuisisi strategis yang memenuhi tingkat pengembalian minimum yang diinginkan oleh Perseroan, termasuk transaksi dengan operator-operator telekomunikasi berskala besar dan perusahaan-perusahaan penyedia menara independen berskala kecil yang bermaksud untuk menjual *Telecommunication Tower Sites* yang mereka miliki. Dengan adanya penerapan strategi untuk meminimalkan jumlah aset yang diterapkan oleh para operator telekomunikasi, cenderung terus menciptakan peluang akuisisi oleh Perseroan.

Perseroan melakukan evaluasi atas potensi akuisisi dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti tingkat pengembalian atas investasi, potensi permintaan atas sewa kolokasi, adanya tumpang tindih (*overlap*) dengan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang telah ada, lokasi *Telecommunication Tower Sites*, disain *Telecommunication Tower Sites*, tingkat utilisasi atas kapasitas yang telah ada, kepadatan dan potensi pertumbuhan populasi pada *Telecommunication Tower Sites* dan peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait pembangunan menara baru. Perseroan akan terus berusaha untuk mencari pendanaan yang berbiaya rendah termasuk mengelola struktur permodalan Perseroan secara efektif dan efisien.

4. Fokus terhadap kualitas layanan.

Perseroan menerapkan teknik penjualan dan pemasaran yang spesifik untuk meningkatkan sewa kolokasi pada menara-menara Perseroan, dimana sebagian besar menara tersebut dapat disewakan kepada empat penyewa atau lebih serta tambahan sewa dari tambahan perlengkapan milik operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa kunci kesuksesan strategi ini adalah kemampuan Perseroan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan para operator telekomunikasi dan dapat secara konsisten memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Perseroan bermaksud untuk menjadi perusahaan yang memiliki komitmen terhadap para pelanggannya dan dapat memenuhi komitmen tersebut secara tepat waktu. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan Perseroan untuk membantu para operator telekomunikasi untuk memasuki sebuah wilayah secara cepat dan memperluas cakupan dan kapasitas jaringan mereka akan membantu meningkatkan tingkat penyewaan menara Perseroan. Dengan demikian, Perseroan memiliki fokus terhadap operator telekomunikasi yang sedang melakukan ekspansi dan peningkatan infrastruktur jaringan mereka serta operator telekomunikasi yang sedang menerapkan teknologi baru dan melakukan ekspansi secara geografis. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki jumlah *Telecommunication Tower Sites* dan tersebar dengan baik yang cukup untuk mendukung target pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang melalui sewa kolokasi.

5. Penerapan kebijakan keuangan yang cermat.

Perseroan berencana untuk terus menekankan pentingnya penerapan kebijakan keuangan secara cermat dengan mengelola tingkat utang yang dimiliki oleh Perseroan pada tingkat yang wajar dan menerapkan disiplin permodalan. Perseroan berencana untuk terus menerapkan struktur permodalan yang paling efektif dan efisien dalam menggunakan utang untuk melakukan akuisisi *Telecommunication Tower Sites*. Perseroan juga berencana untuk terus melakukan manajemen atas biaya operasional Perseroan, mengelola modal kerja Perseroan dan meningkatkan marjin dan profitabilitas Perseroan.

E. Portofolio Telecommunication Tower Sites

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dalam lima tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									
	2016		2015 (tidak diaudit)		2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
- Sewa Menara	2.343.383	96,7	2.141.131	100	4.419.689	98,9	4.104.806	100	3.195.372	99,9	2.257.717	99,7	1.642.860	99,5
- Sewa VSAT (sewa operasi)	52.399	2,2	-	-	24.211	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sewa MWIFO (sewa operasi)	27.352	1,1	-	-	25.884	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sewa Pemancar	-	-	-	-	-	-	1.369	0,0	1.767	0,1	7.543	0,3	8.046	0,5
Total	2.423.134	100	2.141.131	100	4.469.784	100	4.106.175	100	3.197.139	100	2.265.260	100	1.650.906	100

Sumber : Perseroan, Desember 2011 – Juni 2016

1. Jenis Menara

Sebuah menara telekomunikasi dapat berupa *Self-supporting* atau ditopang oleh *guy wires*. Ada dua macam menara *Self-supporting* yaitu *Lattice* dan *Monopole*. Menara *Lattice* biasanya meruncing dari bawah ke atas dan mempunyai tiga atau empat kaki. Menara *Monopole* adalah struktur silinder yang biasanya digunakan di tempat-tempat dengan lahan yang terbatas atau untuk memenuhi pertimbangan estetika. Pada umumnya, sebuah *telecommunication tower sites* terdiri dari lahan yang di atasnya terdapat menara dan *shelter* peralatan. Menara telekomunikasi yang berada di atap (*Rooftop*) atau bagian atas bangunan lain umumnya berada di daerah perkotaan dimana banyak terdapat bangunan tinggi dan tingginya jalur komunikasi yang padat sehingga membutuhkan beberapa menara. Salah satu keuntungan menara *rooftop* adalah pada umumnya peraturan tata ruang mengizinkan instalasi antena tanpa proses perizinan dan pengesahan yang panjang. Selain itu, pendirian struktur menara yang memiliki fondasi dan lahan *greenfield* tersendiri di daerah perkotaan seringkali tidak memungkinkan karena keterbatasan tata ruang, ketersediaan lahan dan tingginya biaya perolehan lahan.

Lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari sebuah *telecommunication tower sites* menentukan kebutuhan operator telekomunikasi nirkabel dan jumlah antena yang dapat ditampung oleh menara tersebut. Ketinggian antena di menara dan *Telecommunication Tower Sites* tersebut menentukan garis pandang antena secara horizontal dan pada akhirnya mempengaruhi jarak sinyal yang dapat dipancarkan. Peralatan yang digunakan oleh operator telekomunikasi nirkabel juga menentukan ketinggian yang diperlukan oleh sebuah menara. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Telecommunication Tower Sites* merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kebutuhan dan fungsionalitas operator telekomunikasi.

Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan struktur umum dari menara *greenfield* dan menara *rooftop* beserta komponen-komponen pentingnya.

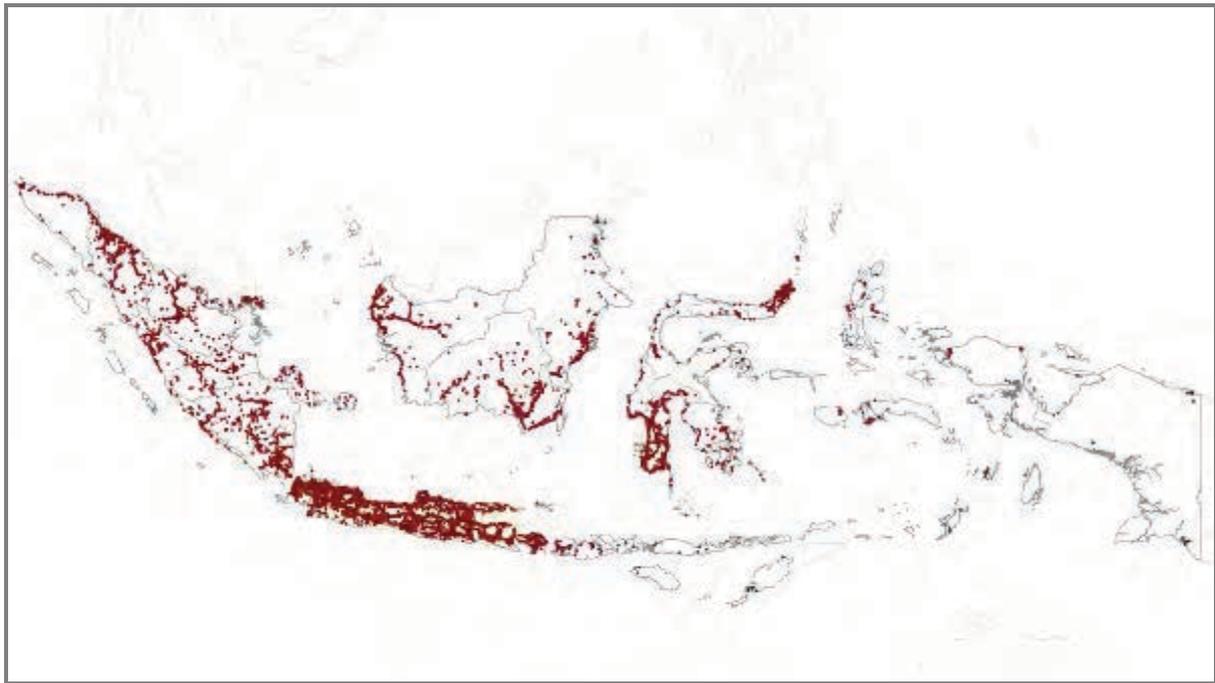


Sumber: Perseroan, (Juni 2016)

Per tanggal 30 Juni 2016, portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak dan aset-aset terkait menara lainnya terdiri dari 12.317 menara *greenfield* dan 2.458 menara *rooftop*.

2. Lokasi *Telecommunication Tower Sites*

Faktor terpenting yang dapat mempengaruhi permintaan atas ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak adalah lokasi *Telecommunication Tower Sites*. Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak merupakan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang terbesar, terbaru dan terluas dibandingkan dengan pemilik dan operator menara independen manapun di Indonesia. Sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak tidak terletak berdekatan dengan *Telecommunication Tower Sites* lainnya. Persaingan antar *Telecommunication Tower Sites* dipengaruhi oleh lokasi *Telecommunication Tower Sites*, apakah terletak di wilayah perkotaan yang padat, perkotaan, pinggir kota atau pedesaan. Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 14.775 *Telecommunication Tower Sites* di Indonesia dan Belanda, termasuk 7.826 *Telecommunication Tower Sites* di pulau Jawa, Indonesia yang merupakan pulau dengan jumlah penduduk yang terbesar dan merupakan pulau tempat ibukota Indonesia, yakni Jakarta. Gambar di bawah ini menunjukkan lokasi geografis dan penyebaran *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan dan Entitas Anak di wilayah-wilayah utama di Indonesia dan Belanda pada tanggal 30 Juni 2016:



Sumber : Perseroan, Juni 2016



Sumber : Perseroan, Juni 2016

Wilayah	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Jawa	7.826
Sumatera	2.324
Kalimantan	1.410
Nusa Tenggara	216
Kepulauan Riau	588
Sulawesi	1.464

Wilayah	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Bali	452
Bangka Belitung	108
Belanda	260
Lainnya	127
Jumlah	14.775

Sumber : Perseroan, Juni 2016

3. Umur *Telecommunication Tower Sites*

Per tanggal 30 Juni 2016, umur rata-rata dari *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak masih relatif rendah, sedangkan umur *Telecommunication Tower Sites* yang umumnya dapat diterima di industri adalah sekitar 20 tahun atau lebih apabila dipelihara dengan baik. Dengan demikian, Perseroan tidak perlu melakukan pergantian *Telecommunication Tower Sites* dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Perseroan memiliki potensi kolokasi yang besar karena sedikitnya tingkat tumpang tindih jaringan Perseroan dengan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh operator menara lainnya. Sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan dibangun untuk dapat disewakan kepada beberapa penyewa dan dapat menampung peralatan dengan kapasitas menengah hingga berat sehingga dapat disewakan kepada empat penyewa atau lebih serta pada umumnya dapat mengakomodasi penambahan penyewa dengan biaya yang rendah.

4. Ukuran Portofolio *Telecommunication Tower Sites*

Perseroan dan Entitas Anak telah berkembang secara signifikan dalam jumlah *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki dan dioperasikan sejak tim manajemen senior Perseroan mengendalikan kegiatan operasional Perseroan pada bulan Maret 2007. Sejak tahun 2007, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap beberapa portofolio *Telecommunication Tower Sites* kecil dari penyedia menara independen berskala kecil. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembelian 4.932 *Telecommunication Tower Sites* dari Hutchison sejak bulan Maret 2008 berdasarkan dua perjanjian pengalihan menara. Perjanjian pengalihan menara yang pertama ditandatangani antara Perseroan dan Hutchison pada bulan Maret 2008 untuk mengakuisisi sebanyak-banyaknya 3.692 *Telecommunication Tower Sites* dalam jangka waktu 2 tahun dan selama jangka waktu tersebut Perseroan telah mengakuisisi sebanyak 3.603 *Telecommunication Tower Sites*. Perjanjian pengalihan menara yang kedua ditandatangani pada bulan Desember 2010 yang diubah dengan amandemen tanggal 17 Desember 2012, dimana Perseroan setuju untuk membeli sampai dengan 1.500 *Telecommunication Tower Sites* dalam jangka waktu 2,5 tahun (sampai dengan 30 Juni 2013), yang hingga tanggal 27 Desember 2013, Perseroan telah menyelesaikan pembelian menara sebanyak 1.482 *Telecommunication Tower Sites*. Perjanjian pengalihan menara yang pertama merupakan transaksi jual beli menara terbesar di wilayah Asia Tenggara. Pada tanggal 28 Maret 2016, Perseroan dan XL menandatangani perjanjian pembelian aset menara milik XL sebanyak 2.500 menara, dan XL telah setuju untuk menyewa kembali sebanyak 2.432 menara. Transaksi pembelian ini diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2016.

Selain daripada itu, pada bulan Juli 2015, Perseroan berhasil mengakuisisi saham baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 99,99% di Iforte dan yang secara langsung juga memperoleh anak perusahaan dari Iforte yaitu IGI. Dari hasil akuisisi Iforte tersebut, Perseroan juga memperoleh lebih dari 450 menara *micro-cell* dan 7 hotel BTS dalam operasi, lebih dari 700 kilometer jaringan *fiber optic* dengan lebih dari 180 Points-of-Presence ("PoP") di kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya.

Selain *Telecommunication Tower Sites* yang telah diakuisisi oleh Perseroan, per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak juga telah membangun sebanyak 6.416 *Telecommunication Tower Sites* sejak bulan Maret 2007. Tabel berikut ini memperlihatkan jumlah *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak (RFI) sejak tanggal 31 Maret 2007 hingga 30 Juni 2016:

Keterangan	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Per tanggal 31 Maret 2007	232
Akuisisi <i>Telecommunication Tower Sites</i> dari penyedia menara berskala kecil	565
Akuisisi <i>Telecommunication Tower Sites</i> dari Hutchison	5.062
Pembangunan <i>Telecommunication Tower Sites</i> untuk operator-operator telekomunikasi, seperti Telkomsel, Smartfren, XL, Indosat dan Hutchison	6.416
Akuisisi <i>Telecommunication Tower Sites</i> dari XL	2.500
Per tanggal 30 Juni 2016	14.775

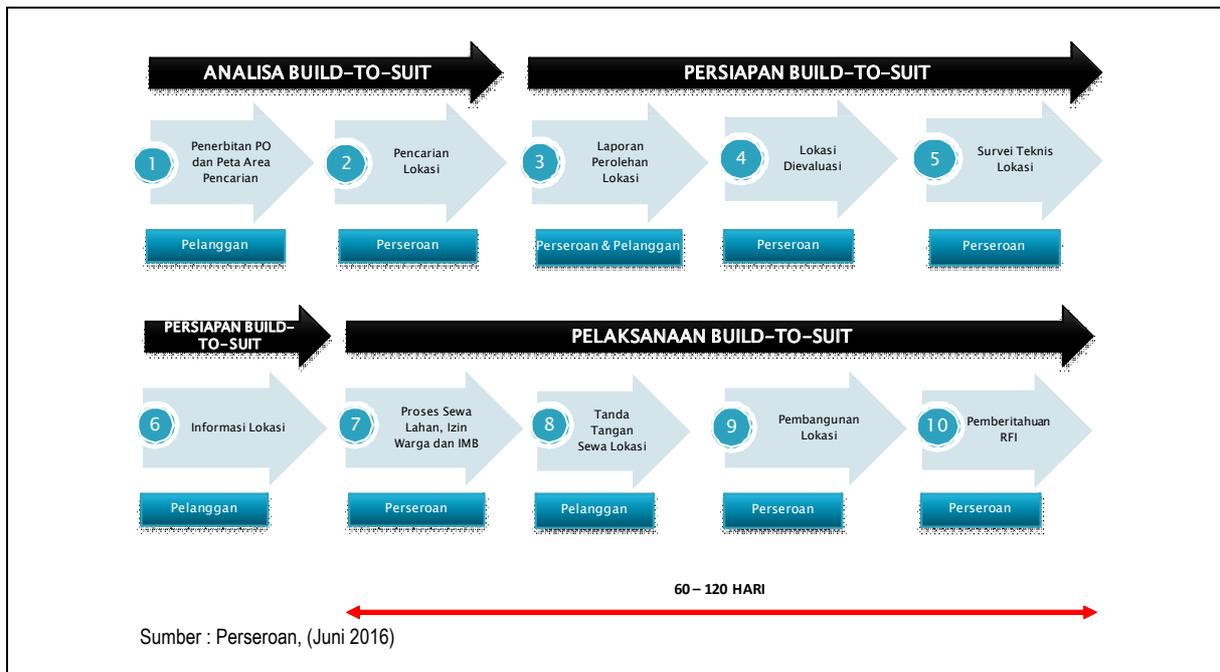
Sumber : Perseroan, (disajikan secara neto)

F. Layanan dan Jasa

Pengalaman yang dimiliki oleh Perseroan dalam industry menara telah membantu Perseroan dalam menyediakan layanan-layanan untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi.

Program Build-to-Suit

Berikut ini merupakan alur proses layanan *build-to-suit* oleh Perseroan pada pelanggannya:



Perseroan secara aktif mengembangkan portofolionya melalui pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru berdasarkan program *build-to-suit*. Berdasarkan pra-negosiasi perjanjian-perjanjian *build-to-suit* dengan para operator besar, Perseroan menerima order konstruksi untuk membangun menara-menara baru untuk setiap operator. Menara-menara yang sudah selesai dibangun dimiliki oleh Perseroan dan kemudian disewakan kembali kepada penyewa utama *build-to-suit* setelah tahap penyelesaian. Walaupun lokasi menara dan parameter pencakupan secara umum ditentukan oleh penyewa utama, Perseroan mempunyai hak untuk melakukan kolokasi untuk penyewa tambahan pada setiap menara *build-to-suit* atas kehendak Perseroan.

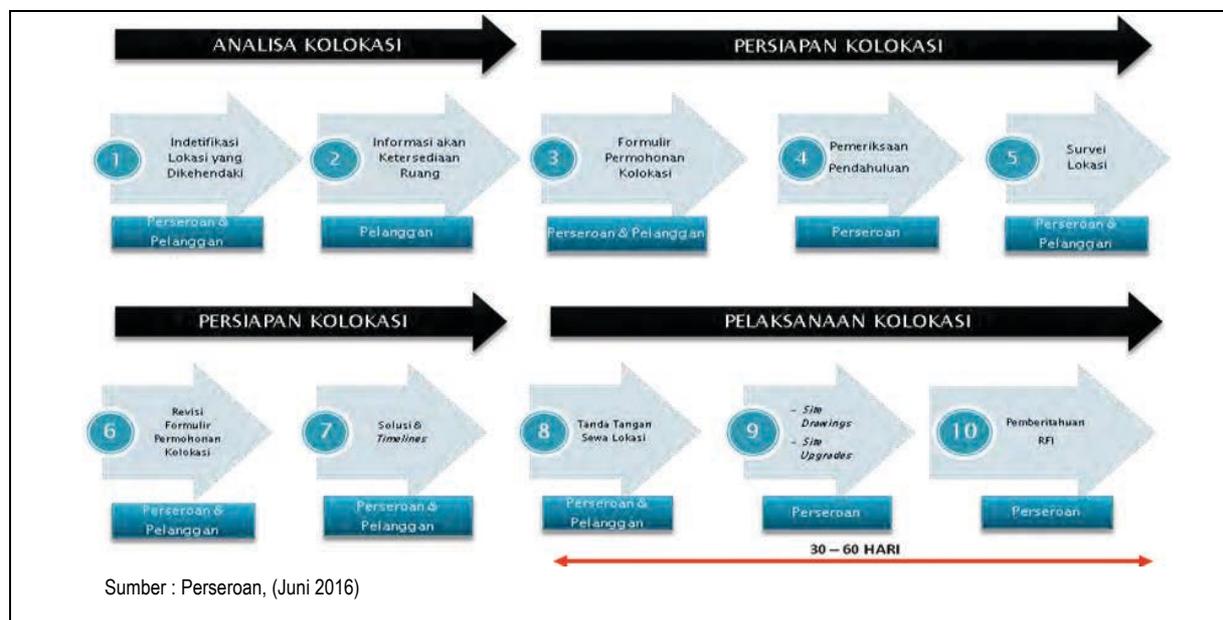
Proses *build-to-suit* dimulai dengan mengeluarkan suatu *purchase order* atau pesanan pekerjaan yang serupa oleh penyewa utama yang mencakup data mengenai lokasi yang diusulkan, tinggi antena, tujuan cakupan, dan rincian mengenai jenis antena dan perangkat yang akan dipasang. Setelah Perseroan menerima pemesanan atau *order*, para pihak akan menyetujui jadwal penyelesaian yang dapat bervariasi tergantung dari lokasi geografis menara, prioritas pelanggan, akuisisi lokasi setempat dan kompleksitas pembangunan, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan perizinan bangunan. Setelah terjadi kesepakatan, Perseroan melakukan identifikasi lokasi dan sewa lokasi dengan mencari beberapa kandidat dan menyerahkannya kepada penyewa utama. Penyewa utama mengevaluasi laporan perolehan lokasi tersebut dan secara resmi menyetujui pilihan mereka dan menyelesaikan konfigurasi antena. Perseroan melakukan evaluasi, survey teknis, dan mencari informasi lebih lanjut sehubungan dengan lokasi tersebut sebelum melakukan proses pelaksanaan *build-to-suit*.

Pelaksanaan *build-to-suit* dimulai dengan proses sewa lahan, izin warga dan IMB. Setelah penandatanganan sewa lokasi oleh penyewa utama, Perseroan mengkonfirmasi kepemilikan dari pemilik properti dan menandatangani sewa lahan untuk lokasi menara tersebut. Kemudian Perseroan mengajukan dan menerima semua izin dari masyarakat setempat dan izin bangunan yang diperlukan. Dalam proses pembangunan lokasi, Perseroan akan menyelesaikan konstruksi dari *compound*, pondasi menara, pagar, meteran listrik, akses jalan, pendirian menara, dan alas untuk perangkat (*equipment pad*). Setelah penyelesaian seluruh kegiatan pembangunan, Perseroan akan mengeluarkan suatu sertifikat *Ready For Installation* ("RFI") yang menyatakan bahwa lokasi tersebut telah siap untuk pemasangan perangkat dari penyewa utama. Mulainya sewa dari penyewa utama tersebut terkait dengan penerbitan sertifikat RFI dimana setelahnya penyewa utama akan mengirim, memasang, dan mengaktifkan perangkatnya di menara milik Perseroan.

Penyewaan Pada Telecommunication Tower Sites

Perseroan menyewakan ruang pada menara-menara yang dimilikinya kepada para operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia. Menara-menara yang dimiliki Perseroan disewakan bersama dengan ruang di permukaan *Telecommunication Tower Sites* untuk menampung *shelter* sebagai tempat berbagai peralatan elektronik dan pasokan listrik. Entitas Anak Perseroan yang berlokasi di Belanda melakukan penyewaan ruang pada menara kepada 3 operator telekomunikasi. Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki kontrak sewa lokasi sebanyak 24.726 dengan para pelanggannya. Karena Perseroan hanya melakukan pembangunan atau akuisisi *Telecommunication Tower Sites* apabila Perseroan telah memiliki penyewa utama, hampir seluruh kegiatan operasional *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan/atau infrastruktur penunjangnya pada saat ini memiliki 1 atau lebih penyewa yang memberikan pendapatan bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan memiliki prioritas untuk memperoleh tambahan pendapatan dari setiap *Telecommunication Tower Sites* dan/atau infrastruktur penunjangnya dengan disewakannya ruang vertikal yang tersedia pada penyewa lainnya. Strategi tersebut telah dijalankan lebih dari 20 tahun terakhir di beberapa negara oleh manajemen senior Perseroan yang berpengalaman.

Berikut ini adalah alur proses penyewaan *Telecommunication Tower Sites* atau yang dikenal dengan kolokasi bagi pelanggan Perseroan:



Perjanjian Sewa Induk atau *Master Lease Agreement* ("MLA") merupakan perjanjian payung yang mengatur mengenai hubungan antara Perseroan dan penyewa di setiap kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan. Perjanjian penyewaan induk tersebut mengatur kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites* dengan para pelanggannya terkait dengan pemasangan peralatan di *Telecommunication Tower Sites*. Kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites* Perseroan pada umumnya memiliki syarat dan kondisi awal yang tidak dapat dibatalkan selama 10 atau 12 tahun yang dapat diperpanjang sesuai dengan opsi perpanjangan dalam kontrak. Para pelanggan melakukan pembayaran atas biaya sewa dimuka secara lima tahunan, kuartalan atau bulanan tergantung pada syarat dan kondisi yang ada pada perjanjian penyewaan induk. Perseroan berharap agar para pelanggannya dapat memperpanjang kontrak sewa menara mereka dengan Perseroan karena alternatif *Telecommunication Tower Sites* mungkin tidak tersedia dan pemindahan peralatan oleh para pelanggan dapat menimbulkan biaya yang besar dan pada umumnya memerlukan pengaturan ulang dengan *Telecommunication Tower Sites* lainnya di jaringan mereka. Pemindahan *Telecommunication Tower Sites* dapat menimbulkan akibat yang negatif terhadap kualitas jaringan dan cakupan operator telekomunikasi yang disebabkan oleh adanya celah dalam cakupan jaringan, gangguan dalam jaringan dan mungkin memerlukan izin tambahan dari instansi pemerintah yang berwenang. Jumlah dan denominasi mata uang atas biaya sewa dijabarkan dalam perjanjian penyewaan induk dengan masing-masing pelanggan. Sebagian besar perjanjian penyewaan induk dan kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites* Perseroan mencakup adanya ketentuan peningkatan biaya sewa yang berasal dari peningkatan tarif sewa secara berkala yang pada umumnya bersifat tahunan dan dikaitkan pada tingkat inflasi di Indonesia yang diukur berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen.

Proses kolokasi dimulai dengan analisis kolokasi dengan melakukan identifikasi lokasi yang dikehendaki oleh Pelanggan dan ketersediaan ruang pada *Telecommunication Tower Sites*. Selanjutnya, pelanggan mengirimkan formulir permohonan kolokasi dan dievaluasi oleh Perseroan. Permohonan Kolokasi berisi rincian teknis dan sewa lokasi yang berisi pra-negosiasi komersial untuk setiap lokasi yang disewa. Setelah Perseroan memeriksa formulir tersebut, Perseroan dan

pelanggan akan melakukan survei lokasi. Dalam survei tersebut, tim teknis Perseroan akan mengevaluasi persyaratan-persyaratan untuk melakukan instalasi untuk memenuhi permintaan dari penyewa dalam berbagai aspek yang diperlukan, mulai dari mendapatkan hak sewa lahan hingga mendapatkan izin, termasuk juga melakukan peningkatan rancangan untuk menambah kapasitas dari *Telecommunication Tower Sites* sebagaimana yang diperlukan, baik yang berada di tanah, kekuatan menara ataupun menambah ketinggian menara. Dengan rancangan solusi yang terbaik, perbaikan-perbaikan (*upgrade*) yang diperlukan dengan cepat dapat dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari rekanan kontraktor-kontraktor terbaik yang tersedia di pasar dalam rangka melaksanakan persiapan kolokasi. Pada saat pelaksanaan kolokasi, sebuah sertipikat RFI akan dikeluarkan oleh Perseroan, dan pelanggan kemudian sesegera mungkin diizinkan untuk memulai pemasangan dan pengaktifan perangkat telekomunikasinya. Penagihan akan segera dilakukan pada saat penerbitan sertifikat RFI sebagai permulaan sewa, dengan mengacu dengan tahap-tahap yang diatur dalam MLA.

Disain Jaringan dan Pengembangan Lahan

Perseroan merancang, membangun (dengan didampingi oleh kontraktor Perseroan), memiliki dan mengoperasikan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan. Perseroan telah berhasil mengembangkan keahlian internal dalam menyediakan layanan-layanan yang memberikan nilai tambah kepada industri telekomunikasi nirkabel. Layanan-layanan tersebut meliputi disain jaringan dan pemilihan, akuisisi, pengembangan dan konstruksi lahan. Karena Perseroan menyediakan sistem infrastruktur dengan disain “*end-to-end*” dan keahlian pembangunan dan pengoperasian *Telecommunication Tower Sites*, Perseroan menawarkan fleksibilitas kepada para pelanggannya untuk memilih antara infrastruktur jaringan yang lengkap dan dapat segera digunakan atau hanya berupa komponen layanan lainnya yang diperlukan. Tim manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman yang mendalam untuk mendampingi para operator telekomunikasi dalam merancang dan membangun jaringan mereka untuk memastikan kesesuaian jaringan tersebut dengan portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan. Perseroan menyediakan layanan disain jaringan yang mutakhir yang terutama ditujukan untuk menunjang pemilihan lahan dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites*.

Akuisisi Lahan

Perseroan melakukan akuisisi lahan untuk mengembangkan bisnis menara Perseroan. Berdasarkan data yang diperoleh dari proses disain jaringan dan pemilihan lahan, departemen akuisisi lahan memperoleh data mengenai batas wilayah pencarian yang digunakan untuk memverifikasi kandidat lahan yang diakuisisi dalam batas wilayah pencarian. Sebagian besar tanah dimana *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dibangun diperoleh melalui sewa tanah jangka panjang dengan pemilik tanah. Dalam setiap batas wilayah pencarian, pakar sistem informasi geografis melakukan pemilihan lokasi yang sesuai berdasarkan lahan yang tersedia, kondisi demografis, pola arus lalu lintas dan karakteristik sinyal dari teknologi yang digunakan. Apabila lokasi telah dipilih serta persyaratan dan kondisi dalam perjanjian sewa tanah telah dinegosiasikan dan disetujui, Perseroan akan melakukan survei dan membuat sebuah rencana lokasi. Setelah itu, Perseroan akan mengajukan permohonan perizinan yang diperlukan kepada instansi-instansi yang berwenang dan apabila perizinan tersebut telah diperoleh, kontraktor yang telah ditunjuk oleh Perseroan akan memulai pembangunan *Telecommunication Tower Sites*.

Pengembangan Lahan dan Konstruksi

Dalam jangka waktu 20 tahun terakhir, tim manajemen senior Perseroan telah menyediakan layanan pengembangan dan pembangunan lahan pada industri telekomunikasi nirkabel di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, Brazil dan Indonesia. Oleh sebab itu, Perseroan memiliki pengalaman yang mendalam mengenai pengembangan dan pembangunan lokasi dan portofolio *Telecommunication Tower Sites*. Layanan pengembangan dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan meliputi pembebasan lahan, pemasangan fondasi dan saluran telekomunikasi dan listrik serta pembangunan *shelter* untuk peralatan dan menara melalui kontraktor pihak ketiga. Perseroan mampu menyelesaikan proyek konstruksi dengan biaya yang efektif dan tepat waktu oleh karena Perseroan memiliki petugas-petugas pengembangan lahan yang berpengalaman di seluruh aspek mengenai pengembangan dan pembangunan lahan serta Perseroan memiliki kontraktor yang secara bersama-sama dengan Perseroan melakukan uji tuntas terhadap aspek teknis, keuangan dan hukum serta melakukan evaluasi secara berkala. Pada umumnya, Perseroan memerlukan waktu antara 30 hingga 60 hari untuk proses layanan sewa kolokasi dan antara 60 hingga 120 hari untuk melaksanakan *Build-to-Suit*.

G. Kapasitas Menara

Sebagian besar pendapatan Perseroan pada saat ini dan di masa depan akan bergantung pada peningkatan permintaan atas ruang pada menara Perseroan dari penyewa kolokasi, selain dari penyewa utama dari menara-menara tersebut. Perseroan secara aktif memasarkan ruang pada menara Perseroan kepada operator-operator telekomunikasi, dimana permintaan atas ruang pada menara dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Cakupan jaringan yang ada pada saat ini dan rencana ekspansi jaringan;

- Kecepatan para operator telekomunikasi dalam memperluas cakupan jaringannya dan meningkatkan kapasitasnya di lokasi tertentu, karena kolokasi pada menara yang telah ada yang dimiliki oleh operator menara independen membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru;
- Peningkatan permintaan pelanggan untuk layanan nirkabel mengakibatkan permintaan dan kebutuhan untuk memperluas kapasitas jaringan;
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas jaringannya;
- Keadaan keuangan dari para operator telekomunikasi dan preferensi mereka untuk melakukan penyewaan *Telecommunication Tower Sites* dibandingkan memiliki ruang pada *Telecommunication Tower Sites* sendiri karena sewa kolokasi pada sebuah *Telecommunication Tower Sites* akan membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan membangun, memiliki dan mengoperasikan menara-menara baru;
- Peraturan-peraturan yang berlaku;
- Kondisi ekonomi dan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel, konsolidasi industri dan ketersediaan pendanaan;
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk membagi menara atau peralatannya dengan operator telekomunikasi lainnya; dan
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk melakukan kolokasi peralatan pada menara yang dimiliki oleh operator telekomunikasi lainnya.

Jumlah penyewa yang dapat diakomodir oleh menara-menara Perseroan bermacam-macam tergantung pada lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari sebuah *Telecommunication Tower Sites*.

Sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan memiliki kapasitas untuk memasang tambahan peralatan dan tidak memerlukan investasi pada peningkatan struktur menara. Dengan adanya keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh tim insinyur Perseroan, hampir seluruh *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dapat diperbaharui untuk mengakomodir tambahan penyewa. Rendahnya biaya untuk memperbaharui *Telecommunication Tower Sites* akan menyebabkan *payback period* terhadap investasi modal awal Perseroan menjadi cepat.

H. Pelanggan Perseroan

Pelanggan-pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia, yakni Hutchison, XL, Telkomsel dan Indosat.

Sebanyak 89,8% dari total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 diperoleh dari 5 pelanggan, di mana di antaranya adalah Hutchison 3 Indonesia ("Hutchison") yang memiliki kontribusi sebesar 39,4%. Pada masa lalu, Hutchison telah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan konsolidasian. Namun demikian, kontribusi operator-operator telekomunikasi lainnya terhadap pendapatan konsolidasian telah mengalami peningkatan. Pada bulan Juni 2016, kontribusi dari XL, Telkomsel, Smartfren Telecom dan Indosat terhadap total pendapatan konsolidasian telah melebihi kontribusi pendapatan dari Hutchison. Perseroan dan Entitas Anak memperkirakan bahwa proporsi pendapatan konsolidasian dari Hutchison akan mengalami penurunan di masa yang akan datang dengan semakin terdiversifikasinya profil penyewa menara Perseroan, terutama pada 6.660 *Telecommunication Tower Sites* dimana Hutchison menjadi penyewa utama.

Berikut ini adalah tabel pertumbuhan pelanggan terbesar Perseroan yang dilihat berdasarkan jumlah sewa lokasi selama tiga tahun terakhir:

Pelanggan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
Hutchison	8.571	7.738	7.675	6.969	6.037	5.206
XL	6.591	4.163	3.994	3.046	2.448	1.525
Telkomsel	4.925	4.581	4.227	2.529	1.585	727
Indosat	1.094	1.033	919	728	643	453

Sumber: Perseroan, Desember 2011 – Juni 2016

Profitabilitas dan arus kas Perseroan sangat bergantung kepada performa dan kegiatan usaha pelanggan penting Perseroan antara lain Hutchison, Telkomsel, Indosat dan XL. Akibatnya, risiko yang mempengaruhi pelanggan penting Perseroan, terutama risiko yang mempengaruhi kemampuan pelanggan penting Perseroan untuk membayar uang sewa, dapat berdampak negatif kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pendapatan dari operasional Perseroan. Apabila pelanggan penting Perseroan mengalami kesulitan finansial, hal tersebut akan berdampak negatif material terhadap usaha

Perseroan. Walaupun Perseroan secara bersamaan berusaha untuk mendiversifikasi basis pelanggannya dan memperoleh sumber pendapatan lain, Perseroan tidak dapat memberi jaminan kepada calon investor bahwa Perseroan akan berhasil mendiversifikasi sumber pendapatan. Setiap risiko yang mempengaruhi pelanggan penting Perseroan atau renggangnya hubungan Perseroan dengan pelanggan penting Perseroan, dengan alasan apapun dapat mengakibatkan dampak negatif material kepada kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan dan pendapatan operasional Perseroan. Adapun besaran pendapatan usaha Perseroan yang berasal dari pelanggan penting Perseroan selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Hutchison	39,4	39,5	38,3	38,8	36,4	39,0	43,3
Telkomsel	19,6	20,5	20,1	18,8	15,3	11,9	5,9
XL	18,8	20,5	19,9	20,1	16,8	17,5	15,4
Total	77,8	80,5	78,3	77,7	68,5	68,4	64,6

Sumber: Perseroan, Desember 2011 – Juni 2016.

Ketergantungan Perseroan yang signifikan ada pada semua pelanggan penting Perseroan yang memiliki kegiatan operasional yang besar dan kontrak yang besar atas menara-menara Perseroan di Indonesia. Dengan demikian Perseroan memiliki ketergantungan terhadap Hutchison, Telkomsel dan XL di Indonesia karena pendapatan Perseroan dari nilai sewa kurang lebih 80%.

Perseroan mempertahankan pelanggan penting tersebut terutama dengan memberikan layanan yang baik dan kinerja operasional yang membantu ekspansi dan kestabilan operasional pelanggan. Peluang Perseroan mendapatkan pelanggan baru adalah dengan secara agresif berusaha mendapatkan kontrak-kontrak dari pelanggan lainnya di Indonesia.

I. Penjualan dan Pemasaran

Perseroan memasarkan sewa kolokasi pada ruang pada menara Perseroan kepada pelanggan-pelanggan potensial Perseroan yang utama seperti Hutchison, Telkomsel, Indosat dan XL yang mencakup pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah pelanggan yang menyewa sebuah *Telecommunication Tower Sites* dan memperoleh tambahan pendapatan. Perseroan memiliki lebih dari 80% pendapatan dari pelanggan/operator besar yang memiliki dukungan yang kuat dari operator kelas dunia dengan internasional *rating* yang kuat (Hutchison, Telkomsel, XL dan Indosat). Sekalipun demikian, dengan kinerja serta hubungan baik dengan pelanggan yang sudah terjaga selama ini, Perseroan tidak memiliki ketergantungan hanya pada satu pelanggan. Disamping itu, selama ini juga terjadi diversifikasi atas sumber pendapatan Perseroan sehingga tidak ada ketergantungan pada pelanggan tertentu.

Perseroan mengumpulkan data rencana pengembangan jaringan dari setiap operator telekomunikasi dan menggunakan perangkat lunak Perseroan untuk mengidentifikasi *Telecommunication Tower Sites* Perseroan yang terletak dekat dengan rencana pengembangan jaringan setiap operator telekomunikasi tersebut dan selanjutnya menyediakan informasi kepada operator-operator tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa *database* dan kemampuan yang dimiliki Perseroan untuk menyediakan layanan pemetaan dan disain jaringan memberikan keuntungan strategis bagi Perseroan dalam mencari potensi kolokasi terhadap menara-menara Perseroan.

Perseroan mengembangkan strategi pemasaran yang spesifik pada setiap operator telekomunikasi dan melakukan pertemuan secara berkala dengan tim disain jaringan setiap operator telekomunikasi untuk memahami kebutuhan mereka dan memasarkan ruang pada menara yang tersedia kepada mereka karena perkembangan pemasaran Perseroan mengikuti perkembangan jaringan operator telekomunikasi.

Perseroan memberikan jadwal implementasi kolokasi dan pemasangan peralatan kepada setiap operator telekomunikasi. Perseroan akan terus berusaha untuk memenuhi jadwal tersebut dan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya. Perseroan bertujuan untuk menyediakan ruang pada menara yang sesuai berdasarkan permintaan yang diterima dari operator telekomunikasi.

Perseroan memberikan pelatihan dalam aspek penjualan dan pemetaan kepada 53 staf pemasaran yang dimiliki oleh Perseroan untuk memaksimalkan peluang kolokasi pada menara-menara Perseroan.

Hambatan kegiatan pemasaran dan penjualan Perseroan dan Entitas Anak antara lain yaitu keadaan makro ekonomi Indonesia dan global, hal ini dialami Perseroan di tahun 2010 yang merupakan dampak berkepanjangan dari krisis di tahun 2008.

J. Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dengan penyedia menara independen, seperti Tower Bersama Grup, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk., serta PT Retower Asia (Retower) (termasuk penyedia menara independen berskala kecil lainnya) dan operator-operator telekomunikasi beserta Entitas Anak miliknya yang memiliki dan mengoperasikan menaranya sendiri. Beberapa operator telekomunikasi di Indonesia, seperti Telkomsel Dayamitra Telekomunikasi (anak perusahaan Telkom), Indosat, dan XL, telah mulai menyewakan ruang pada menara yang dimilikinya kepada operator-operator telekomunikasi lainnya.

Karena industri menara bersifat padat modal, memerlukan kemampuan operasional yang baik dan memerlukan hubungan yang kuat dengan para operator telekomunikasi, terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemain-pemain baru untuk memasuki bisnis dan kegiatan operasional Perseroan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi persaingan tersebut adalah Perseroan tetap menjaga tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, membangun hubungan jangka panjang dengan para operator telekomunikasi dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Dengan jumlah portofolio menara terbesar serta lokasi menara Perseroan yang tersebar di seluruh Nusantara, maka Perseroan juga membantu para operator telekomunikasi untuk memasuki sebuah wilayah secara cepat dan memperluas cakupan dan kapasitas jaringan mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri menara terutama dipengaruhi oleh ketersediaan *Telecommunication Tower Sites* untuk memenuhi kebutuhan kapasitas jaringan, cakupan dan keperluan ekspansi para operator telekomunikasi. Oleh karena itu, Perseroan memiliki strategi untuk memahami cakupan jaringan dan kebutuhan kapasitas para operator telekomunikasi dan menawarkan ruang pada menara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka.

K. Kontraktor

Perseroan menyewa sejumlah kontraktor untuk melakukan pembangunan, konsultasi, pemasangan koneksi listrik, akuisisi lahan, *engineering*, fondasi menara, *shelter*, pemeliharaan dan layanan keamanan. Kontraktor-kontraktor tersebut berada di seluruh Indonesia dan Perseroan berkeyakinan bahwa hubungan yang dimiliki oleh Perseroan dengan mereka akan memberikan Perseroan akses terhadap pekerja-pekerja yang kompeten di Indonesia. Setiap kontraktor yang dimiliki oleh Perseroan akan melewati tahap seleksi yang ketat yang mencakup evaluasi teknis, keuangan dan hukum sebelum mereka dipilih dan setelah itu akan dilakukan evaluasi secara berkala. Berdasarkan pengalaman Perseroan yang mendalam pada bisnis menara, Perseroan telah menciptakan sebuah lingkup pekerjaan dan prosedur pengawasan kualitas yang harus dipatuhi oleh setiap kontraktor. Setiap kontraktor akan menandatangani sebuah kontrak induk yang mengatur mengenai tugas yang diberikan dan harga yang disepakati untuk setiap pemesanan.

L. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Secara umum, izin material yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi guna menunjang kegiatan usaha Perseroan dalam menyediakan atau menyewakan *Telecommunication Tower Sites* miliknya, adalah Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (“Peraturan No. 5/2012”), kegiatan usaha Perseroan yang merupakan perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya sehingga tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi juga tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (“Peraturan Menteri No. 3/2013”).

Dalam rangka memenuhi ketentuan pemerintah daerah yang berlaku, untuk memperoleh IMB atas *Telecommunication Tower Sites* Perseroan, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tercatat memiliki dokumen-dokumen UKL-UPL atas sebagian *Telecommunication Tower Sites* Perseroan yaitu sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tahun	Judul
1.	Bali	2016	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Denpasar No. 660.1/223/BLH tanggal 3 Februari 2016
2.	Bali	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karangasem No.660.1/442/Bidwas/BLH tanggal 16 November 2010
3.	Lampung	2010	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 660/007/AMDAL/IV.8/2010 tanggal 12 April 2010

No.	Lokasi	Tahun	Judul
4.	Papua Barat	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 660.1/04/RekUKL-UPL/IV/2011 tanggal 28 April 2011
5.	Kepulauan Riau	2012	Rekomendasi UKL/UPL dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan No. 660.1/BLHKP.LH/XII/702/2012 tanggal 18 Desember 2012
6.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/35.73.123/2006 tanggal 22 September 2006
7.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL dari Sekretariat Daerah Kota Malang No.660/35.73.123/2006 tanggal Oktober 2006
8.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/2431/35.73.123/2006 tanggal 7 Desember 2006, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
9.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/2006/35.73.123/2006 tanggal 18 Oktober 2006, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
10.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/1713/35.73.123/2006 tanggal 5 September 2006, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
11.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/1303/35.73.123/2006 tanggal 19 Juli 2006, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
12.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/2411/35.73.123/2006 tanggal 5 Desember 2006, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
13.	Jawa Timur	2007	Persetujuan UKL-UPL dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 660/869/414.08/2007 tanggal 8 Juni 2007
14.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/704/35.73.123/2007 tanggal 2/4/2007, melaporkan setiap 6 bulan sekali
15.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/054/35.73.123/2007 tanggal 12 Januari 2007
16.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/274/35.73.123/2007 tanggal 16 Februari 2007
17.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/276/35.73.123/2007 tanggal 16 Februari 2007, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
18.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/277/35.73.123/2007 tanggal 16 Februari 2007, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
19.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kabupaten Bojonegoro No.660/52/421.19/2007
20.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kabupaten Bojonegoro No.660/25/421.19/2007
21.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/2415/35.73.123/2007 tanggal 6 November 2007, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
22.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/2148/35.73.123/2007 tanggal 10 Oktober 2007, melaporkan setiap 6 bulan sekali.
23.	Jawa Tengah	2013	Rekomendasi UKL/UPL oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonogiri No. 660.1/UKLUP-054/2013 tanggal 16 Juli 2013
24.	Jawa Tengah	2013	Rekomendasi UKL/UPL oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonogiri No. 660.1/UKLUP-054/2013 tanggal 16 Juli 2013 No. 660.1/UKLUPKL.039/2013 tanggal 2 Mei 2013
25.	Jawa Tengah	2014	Rekomendasi UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pati No. 660.1/033/UKL-UPL/2014 tanggal 19 Mei 2014
26.	Kalimantan Timur	2010	Rekomendasi UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang Nomor 660.1/015/BLH tanggal 22 Juni 2010
27.	Kalimantan Timur	2010	Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang No.660.1/015/BLH tanggal 22 Juni 2010
28.	Kalimantan Barat	2008	Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (Kal-Bar) No.660.30/BPDL/WSDL-IV/010.B/2008 tanggal 27 Mei 2008 Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali
29.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa No.660/BLH/143/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 3 bulan sekali dan BLH melakukan pengawasan setiap 6 bulan sekali. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun selama usaha tetap dilaksanakan
30.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Pemerintah Kota Minahasa Tenggara No.555.1/123/BLHKP/MT/IX/2009 tanggal September 2009
31.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara No.555.1/123/BLHKP/MT/IX/2009 tanggal September 2009
32.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara No.555.1/123/BLHKP/MT/IX/2009 tanggal September 2009
33.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.660/KPLH/040/2009 tanggal 10 Juli 2009. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan.
34.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.555.1/123/BLHKP/MT/IX-2009 tanggal September 2009
35.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.183/BLH/REKOM/X-2009 tanggal 12 Oktober 2009. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan
36.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.660/KPLH/047/2009 tanggal Juli 2009. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan
37.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.103/BLH/REKOM/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan
38.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/207/BPLH/IX/09 tanggal 4 November 2009 berlaku selama 3 tahun.

No.	Lokasi	Tahun	Judul
39.	Kalimantan Barat	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/209/BPLH/IX/09 tanggal 4 November 2009 berlaku selama 3 tahun.
40.	Kalimantan Barat	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/46/BPLH/2010 tanggal Februari 2010 rekomendasi ini berlaku selama 3 sejak dikeluarkan
41.	Kalimantan Barat	2010	Rekomendasi UKL dan UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No. 660/KLH/REKOM/51/2010 tanggal 15 November 2010. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan
42.	Kalimantan Barat	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.660/KLH/REKOM/46/2010 tanggal 21 Oktober 2010. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan.
43.	Kalimantan Barat	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/169/BPLH/ X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 berlaku selama 2 tahun.
44.	Kalimantan Barat	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/189/BPLH/IX/09 tanggal 19 Oktober 2010. Rekomendasi ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal dikeluarkan.
45.	Kalimantan Barat	2010	Rekomendasi UKL-UPL Kabupaten Minahasa No.660/BLH/84.b/VII-2010 tanggal 13 Juli 2010
46.	Kalimantan Barat	2011	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/313/BLH-A tanggal 28 November 2011. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali.
47.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/347/BLH-A tanggal 30 Desember 2013
48.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/343/BLH-A tanggal 30 Desember 2013.
49.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/347/BLH-A tanggal 30 Desember 2013
50.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/344/BLH-A tanggal 30 Desember 2013. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali.
51.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/345/BLH-A tanggal 30 Desember 2013. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali.
52.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/349/BLH-A tanggal 30 Desember 2013. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali.
53.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/343/BLH-A tanggal 30 Desember 2013. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali.
54.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/342/BLH-A tanggal 30 Desember 2013. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali.
55.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/342/BLH-A tanggal 30 Desember 2013. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan sekali.
56.	Kalimantan Tengah	2014	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palangka Raya No. 349/BLH/Bid.I/III/2014 tanggal 18 Maret 2014
57.	Sumatra Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/152/Bapedalda/2010 tanggal 23 Desember 2010
58.	Sumatra Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/157/Bapedalda/2010 tanggal 27 Desember 2010
59.	Sumatra Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/160/Bapedalda/2010 tanggal 27 Desember 2010
60.	Sumatra Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/153/Bapedalda/2010 tanggal 23 Desember 2010
61.	Sumatra Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/158/Bapedalda/2010 tanggal 27 Desember 2010
62.	Sumatra Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/155/Bapedalda/2010 tanggal 23 Desember 2010
63.	Sumatra Selatan	2010	Persetujuan UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin Nomor 660/06/Bapedalda/2012 tanggal 27 Desember 2010
64.	Sumatra Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/155/Bapedalda/2010 tanggal 23 Desember 2010
65.	Sulawesi Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Nomor 97/XII/BLDH/2010 tanggal 8 Desember 2010
66.	Sumatra Selatan	2011	Persetujuan UKL-UPL Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin Nomor 660/167/Bapedalda/2011 tanggal 07 Februari 2011
67.	Sumatra Selatan	2012	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lubuklinggau No.660/12/KLH/V/2012 tanggal 19 Mei 2012
68.	Sumatra Selatan	2012	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lubuklinggau No.660/10/KLH/V/2012 tanggal 19 Mei 2012
69.	Sumatra Selatan	2012	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lubuklinggau No.660/09/KLH/V/2012 tanggal 19 Mei 2012
70.	Sumatra Selatan	2012	Surat Keterangan dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lubuklinggau No.660/76/KLH-LLG/2012 tanggal 3 Mei 2012 Bahwa dokumen UKL-UPL sedang dalam proses penyusunan, surat ini telah habis masa

No.	Lokasi	Tahun	Judul
			berlakunya.
71.	Sumatra Selatan	2012	Surat Keterangan dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lubuklinggau No.660/76/KLH-LLG/2012 tanggal 3 Mei 2012 Bahwa dokumen UKL-UPL sedang dalam proses penyusunan, surat ini telah habis masa berlakunya.
72.	Sumatera Selatan	2013	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lahat No. 660.1/365/BLH-4/2013 tanggal 10 Mei 2013 berakhir tanggal 10 Mei 2013
73.	Sulawesi Barat	2011	Rekomendasi dari BAPEDALDA Pemerintah Kabupaten Mamuju No. 660.1/34/UKL-UPL/V/2011/BPDL tanggal 18 Mei 2011
74.	Sulawesi Barat	2011	Rekomendasi UKL UPL dari BAPEDALDA Pemerintah Kabupaten Mamuju No. 660.1/34/UKL-UPL/V/2011/BPDL tanggal 11 Mei 2011
75.	Sulawesi Barat	2012	Rekomendasi UKL UPL dari BAPEDALDA Pemerintah Kabupaten Mamuju No. 660/BLH-BB/RK.02/006/VI/2012 tanggal 5 Mei 2012
76.	Sulawesi Barat	2013	Surat Pertimbangan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup No.660.1/152/BLH tanggal 16 Desember 2010 berakhir tanggal 16 Desember 2013
77.	Sulawesi Barat	2014	Rekomendasi UKL-UPL oleh BAPEDALDA Pemerintah Kabupaten Mamuju No. 660.1/05/UKL-IPL/II/2014/BPDL tanggal 17 Januari 2014
78.	Sulawesi Barat	2014	Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Majene No. 48/A.II/BLHP/II/2014 tanggal 26 Februari 2014
79.	Sulawesi Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng No. 660.1/179.d/UKL-UPL/IX/2010 tanggal 16 September 2010
80.	Sulawesi Selatan	2010	Persetujuan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Barru No. 660.1/55A/DPLH-TR/III/2010 tanggal 13 Maret 2010
81.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone No. 04/II/BLDH/2011 tanggal 7 Januari 2011
82.	Sulawesi Selatan	2011	Keterangan dari Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Talakar No. 563/LHPM/VI.2011 tanggal 20 Juni 2011
83.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone No. 666/2/170/UKL-UPL/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011
84.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pinrang No. 660.1/Z/Rek.UKL-UPL/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011
85.	Sulawesi Selatan	2011	Keterangan dari Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Talakar No. 56c/LHPM/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011
86.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 660.2/217/BLH tanggal Juli 2011
87.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone No. 666.2/168/UKL-UPL/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011
88.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone No. 666.2/166/UKL-UPL/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011
89.	Sulawesi Selatan	2011	.Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone No. 666.2/162/UKL-UPL/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011
90.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur No. 660/403/BAPEDALDA/2011 tanggal 19 November 2011
91.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo No. 660/503/BLHD tanggal 27 Juni 2011
92.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone No. 666.2/155/UKL-UPL/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011
93.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi UKL-UPL Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 660.2/340/BLH tanggal 19 September 2012
94.	Sulawesi Selatan	2013	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pinrang No. 660.1/62/Rek.UKL-UPL/IV/2013 tanggal 8 April 2013
95.	Sulawesi Selatan	2013	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru No. 02/KLH-BR/III/2013 tanggal 23 Maret 2013
96.	Sulawesi Tengah	2008	Pengesahan Dokumen UKL-UPL No.660/34/KLH/2008 tanggal 25 November 2008
97.	Sulawesi Utara	2007	Rekomendasi UKL-UPL dari Bapedalda Bolaang Mongondow No.161 tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007
98.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No. 660.1/197/BPLH/X/09 tanggal 7 Oktober 2009 rekomendasi ini berlaku selama 3 tahun.
99.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa No.660/BLH117/VIII-2009 tanggal 20 Agustus 2009, Perseroan wajib melaporkan hasil UPL-UKL 3 bulan sekali dan pemantauan oleh instansi terkait 6 bulan sekali. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun selama usaha tetap dilaksanakan.
100.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Manado No. 164/BPLH/REKOM/VII/2008 tanggal 24 September 2009. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun selama usaha tetap dilaksanakan.
101.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No. 660.1/208/BPLH/IX/09 tanggal 14 Oktober 2009
102.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL kota Bitung No. 660/REK/BLH/ 13/2010 tanggal 22 Juli 2010 wajib lapor setiap 6 bulan sekali.
103.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bitung No. 660 REK/BLH/10/2010 tanggal 24 Mei 2010
104.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tomohon No. 660.1/13/REKOM/BLH/VI/2010 tanggal 11 Mei 2010
105.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No. 024/BLH/REKOM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 berlaku selama jangka waktu 1 tahun.

No.	Lokasi	Tahun	Judul
106.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No.180/BLH/REKOM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010
107.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No.177/BLH/REKOM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan.
108.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Manado No.174/BLH/REKOM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun selama usaha tetap dilaksanakan.
109.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No. 29/BLH/REKOM/II/2010 tanggal 25 Februari 2010. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan.
110.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No. 64/BLH/REKOM/IV/2011 tanggal 7 April 2011
111.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No.83/BLH/REKOM/IV/2011 tanggal 7 April 2011
112.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL-UPL Kota Manado No. 63/BLH/REKOM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 berlaku selama jangka waktu 1 tahun.
113.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL-UPL kota Manado No.62/BLH/REKOM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 berlaku selama jangka waktu 1 tahun.
114.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL dan UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No. 61/BLH/REKOM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui apabila memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan
115.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No.148/BLH/REKOM/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011
116.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa No. 666/BLH/846/VII-2010 tanggal 13 Juli 2010
117.	Sulawesi Utara	2012	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No. 42/BLH/REKOM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012
118.	Sulawesi Utara	2012	Rekomendasi UKI-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bitung No. 660/REK/BLH/III/220/2012 tanggal 13 Agustus 2012
119.	Sulawesi Utara	2015	Rekomendasi UKL-UPL oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No. 660.1/100/BPLH/IV/2015 tanggal 27 April 2015

Dalam rangka pencegahan dampak lingkungan hidup, Perseroan melarang para penyewa *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan untuk memakai atau menyimpan bahan berbahaya di *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan. Selain itu masing-masing penyewa diwajibkan oleh Perseroan untuk melakukan pemberitahuan kepada Perseroan apabila terdapat dampak lingkungan tertentu yang mungkin disebabkan olehnya.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta laporan auditor independen tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012*	2011*
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	3.598.156	2.986.279	2.005.669	1.501.784	1.124.113	644.256
Piutang usaha pihak ketiga, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	569.259	470.519	571.914	673.753	261.601	194.602
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	4.370	804	1.045	48	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	17.153	12.893
Persediaan	-	11.076	-	508	508	937
Beban dibayar dimuka	21.955	22.346	23.604	16.468	12.085	7.238
Uang muka	17.988	17.101	16.096	14.475	12.851	5.262
Pajak dibayar dimuka	345.695	24.497	19.044	-	28.502	41.952
Total Aset Lancar	4.557.423	3.532.622	2.637.372	2.207.036	1.456.813	907.140
Aset Tidak Lancar						
Investasi sewa pembiayaan neto	-	-	-	125	372	1.092
Properti investasi	17.952.636	14.683.352	12.367.983	11.126.846	10.361.842	6.975.578
Aset tetap	175.445	157.179	70.030	75.432	70.043	37.360
Goodwill	333.737	363.150	186.883	207.730	158.190	-
Estimasi pengembalian pajak	2.700	3.919	80.380	80.380	-	-
Aset tak berwujud	1.220.382	1.186.775	602.680	721.585	590.253	-
Sewa lokasi jangka panjang	1.839.283	1.297.608	1.268.441	1.009.732	823.796	541.785
Aset pajak tangguhan	13.345	18.293	18.241	-	8.041	-
Piutang lain-lain pihak berelasi	135.775	139.494	4.257	3.062	-	-
Aset tidak lancar lainnya	32.722	30.565	38.059	146.016	180.181	165.134
Total Aset Tidak Lancar	21.706.025	17.880.335	14.636.954	13.370.908	12.192.718	7.720.949
TOTAL ASET	26.263.448	21.412.957	17.274.326	15.577.944	13.649.531	8.628.089
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang pembangunan menara dan lainnya						
Pihak ketiga	145.884	216.607	468.813	484.822	386.636	165.117
Pihak berelasi	29.515	31.630	19.057	5.782	-	-
Utang lain-lain – pihak ketiga	7.228	20.167	39.773	49.774	40.638	33.294
Utang pajak	141.724	60.933	334.484	23.931	32.107	16.922
Pendapatan diterima dimuka	1.789.794	820.858	632.944	481.691	351.717	264.105
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22.443	48.398	49.300	43.956	25.976	28.368
Beban akrual	268.656	355.270	301.416	244.390	264.903	170.524
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Pihak ketiga	750.800	446.139	203.002	1.086.355	100.529	494.901
Utang obligasi	994.813	-	-	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	4.150.857	2.000.002	2.048.789	2.420.701	1.202.506	1.173.231

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012*	2011*
Liabilitas Jangka Panjang						
Pendapatan diterima dimuka	85.024	113.000	150.687	177.428	25.386	26.557
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Pihak ketiga	9.078.123	6.741.254	6.512.960	8.221.252	7.946.558	5.090.722
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	312.830
Utang obligasi	1.725.406	2.715.146	2.638.020	-	-	-
Utang swap valuta asing	131.252	227.954	87.795	-	-	-
Utang swap tingkat bunga	-	-	-	-	-	51.232
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	76.713	58.301	49.352	36.926	23.341	12.971
Liabilitas pajak tangguhan, neto	1.782.815	1.690.027	910.852	880.515	844.682	307.552
Provisi jangka panjang	251.867	208.638	171.222	150.025	126.073	72.207
Total Liabilitas Jangka Panjang	13.131.200	11.754.320	10.520.888	9.466.146	8.966.040	5.874.071
TOTAL LIABILITAS	17.282.057	13.754.322	12.569.677	11.886.847	10.168.546	7.047.302
Ekuitas						
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	332.262	332.262	332.262	332.262	332.262	332.262
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya	300	200	100	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	8.661.696	7.340.286	4.389.886	3.299.052	3.145.267	1.286.949
Penghasilan (rugi) lainnya	(14.452)	(12.494)	(9.643)	64.760	1.809	(38.424)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.979.806	7.660.254	4.712.605	3.696.074	3.479.338	1.580.787
Kepentingan non-pengendali	1.585	(1.619)	(7.956)	(4.977)	1.647	-
TOTAL EKUITAS	8.981.391	7.658.635	4.704.649	3.691.097	3.480.985	1.580.787
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26.263.448	21.412.957	17.274.326	15.577.944	13.649.531	8.628.089

*) Disajikan kembali berdasarkan perhitungan manajemen. Laporan keuangan tahun 2012 dan 2011 sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013	2012*	2011*
Pendapatan	2.423.134	2.141.131	4.469.784	4.106.175	3.197.139	2.265.260	1.650.906
Depresiasi dan amortisasi	(218.589)	(170.909)	(389.058)	(337.134)	(261.180)	(150.381)	(114.847)
Beban pokok pendapatan lainnya	(98.117)	(99.793)	(181.682)	(238.271)	(207.156)	(137.454)	(90.017)
LABA BRUTO	2.106.428	1.870.429	3.899.044	3.530.770	2.728.803	1.977.425	1.446.042
Beban penjualan dan pemasaran	(27.188)	(27.699)	(60.811)	(50.932)	(36.157)	(29.060)	(22.630)
Beban umum dan administrasi	(193.539)	(227.166)	(463.636)	(411.555)	(319.205)	(205.523)	(151.718)
Kenaikan/(penurunan) nilai wajar properti investasi	109.730	531.428	1.631.663	(408.220)	(670.674)	1.580.710	(371.913)
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, neto	40.314	(313.825)	(509.580)	(266.209)	(947.177)	(324.770)	(79.002)
LABA USAHA	2.035.745	1.833.167	4.496.680	2.393.854	755.590	2.998.782	820.779
Pendapatan keuangan, neto	31.179	7.204	12.358	6.926	4.001	11.873	1.056
Biaya keuangan	(284.642)	(266.784)	(562.512)	(855.586)	(551.345)	(534.213)	(443.388)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.782.282	1.573.587	3.946.526	1.545.194	208.246	2.476.442	378.447
Beban pajak penghasilan	(457.508)	(399.112)	(989.776)	(455.510)	(58.316)	(618.679)	(96.836)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.324.774	1.174.475	2.956.750	1.089.684	149.930	1.857.763	281.611
Pendapatan komprehensif lain:							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	(9.973)	7.369	13.752	-	-	-	-
Pajak tangguhan terkait	2.493	(1.842)	(3.438)	-	-	-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	3.572	(822)	(4.736)	(41.912)	83.640	2.425	-
Keuntungan/(kerugian) bersih dari lindung nilai arus kas	3.711	6.574	(12.707)	(59.597)	-	51.232	16.663
Pajak tangguhan terkait	(1.821)	(1.438)	4.361	25.377	(20.910)	(13.414)	(4.166)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain, sesudah pajak	(2.018)	9.841	(2.768)	(76.132)	62.730	40.243	12.497

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013	2012*	2011*
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN SESUDAH PAJAK	1.322.756	1.184.316	2.953.982	1.013.552	212.660	1.898.006
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	1.321.510	1.172.982	2.950.500	1.090.934	153.785	1.858.318	281.611
Keperluan non-pengendali	3.264	1.493	6.250	(1.250)	(3.855)	(555)	-
	1.324.774	1.174.475	2.956.750	1.089.684	149.930	1.857.763	281.611
Total laba/(rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	1.319.552	1.182.724	2.947.649	1.016.531	216.735	1.898.551	294.108
Keperluan non-pengendali	3.204	1.592	6.333	(2.979)	(4.075)	(545)	-
	1.322.756	1.184.316	2.953.982	1.013.552	212.660	1.898.006	294.108
Laba neto per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	398	353	888	328	46	559	85

*) Disajikan kembali berdasarkan perhitungan manajemen. Laporan keuangan tahun 2012 dan 2011 sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja

Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Uraian	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013	2012	2011
	Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾						
Pendapatan	13,2%	12,1%	8,9%	28,4%	41,1%	37,2%	21,8%
Laba periode/tahun berjalan	12,8%	103,6%	171,3%	626,8%	(91,9%)	559,7%	146,0%
Total aset	33,9%	12,4%	24,0%	10,9%	14,1%	58,2%	15,4%
Total liabilitas	26,0%	4,1%	9,4%	5,7%	16,9%	44,3%	13,9%
Total ekuitas	52,5%	38,3%	62,8%	27,5%	6,0%	120,2%	22,6%
Rasio Aktivitas							
Receivable turn over ratio	9,3	7,8	8,6	6,6	6,8	9,9	10,8
Receivable days	39,2	46,8	42,6	55,4	53,4	36,8	33,9
Rasio Usaha							
Laba bruto/Pendapatan ⁽²⁾	86,9%	87,4%	87,2%	86,0%	85,4%	87,3%	87,6%
Laba periode/tahun berjalan/Pendapatan ⁽³⁾	54,7%	54,9%	66,1%	26,5%	4,7%	82,0%	17,1%
Laba periode/tahun berjalan/Total ekuitas ⁽⁴⁾	29,5%	39,9%	38,6%	23,2%	4,1%	53,4%	17,8%
Laba periode/tahun berjalan/Total aset ⁽⁵⁾	10,1%	12,0%	13,8%	6,3%	1,0%	13,6%	3,3%
Rasio Keuangan							
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽⁶⁾	86,7%	118,7%	149,3%	97,9%	62,0%	93,5%	54,9%
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽⁷⁾	109,8%	140,6%	176,6%	128,7%	94,5%	121,1%	77,3%
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽⁸⁾	192,4%	233,0%	179,6%	267,2%	322,0%	292,1%	445,8%
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽⁹⁾	65,8%	70,0%	64,2%	72,8%	76,3%	74,5%	81,7%
Rasio Perjanjian Pinjaman							
Debt service coverage ratio	3,53	4,38	4,22	4,80	4,25	2,21	2,56
Net debt to running EBITDA	2,23	1,89	1,74	2,58	2,86	3,45	3,69

Keterangan:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- Dihitung dengan membagi laba bruto dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- Dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- Dihitung dengan membagi laba (rugi) disetahunkan untuk periode terkait, dengan jumlah ekuitas pada akhir periode tersebut.
- Dihitung dengan membagi laba (rugi) disetahunkan untuk periode terkait, dengan jumlah aset pada akhir periode tersebut.
- Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
- Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
- Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait.
- Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode terkait.

Perseroan telah memenuhi persyaratan dan rasio sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta laporan auditor independen tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Ekuitas				
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	332.262	332.262	332.262	332.262
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	300	200	100	-
Belum ditentukan penggunaannya	8.661.696	7.340.286	4.389.886	3.299.052
Penghasilan (rugi) komprehensif Lainnya	(14.452)	(12.494)	(9.643)	64.760
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.979.806	7.660.254	4.712.605	3.696.074
Kepentingan non-pengendali	1.585	(1.619)	(7.956)	(4.977)
TOTAL EKUITAS	8.981.391	7.658.635	4.704.649	3.691.097

Tidak terdapat penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

KEWAJIBAN PAJAK PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2015 sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak.

XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi yang menjamin Emisi secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Seri (dalam miliar Rupiah)			Porsi Penjaminan (dalam miliar Rupiah)		Porsi (%)
		A	B	C			
1.	PT Bahana Securities	98	-	75	173	21,63	
2.	PT BCA Sekuritas	353	15	10	378	47,25	
3.	PT DBS Vickers Securities Indonesia	210	21	18	249	31,13	
Jumlah		661	36	103	800	100,00	

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Bahana Securities.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan dan PT BCA Sekuritas memiliki hubungan Afiliasi berupa kesamaan pemegang saham utama.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : **MAKES & PARTNERS LAW FIRM**

Menara Batavia, 7th Floor
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta, Indonesia
Telepon: (021) 574 7181
Faksimili: (021) 574 7180
Email: makes@makeslaw.com
Website: www.makeslaw.com

Nama Partner	: Irfan Ghazali, S.H., M.H.
Nomor STTD	: 135/BL/STTD-KH/2012
Tanggal STTD	: 21 Desember 2012
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM)
Pedoman Kerja	: No. KEP.01/HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan surat No. 116/CS-MAKES/PTI/VIII/16 tertanggal 30 Agustus 2016

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : **PT Bank Permata Tbk**

WTC II, Lt. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon: (021) 5237788
Faksimili: (021) 2500529
www.permatabank.com

STTD No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* Surat Badan Pengawas Pasar Modal No. S-2418/PM/2002 Hal Merger Bank Bali
Keanggotaan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI): AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan surat No. 142/CS-PERMATA/PTI/IX/16 tanggal 14 September 2016.

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Notaris : **Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi**
Jl. KH. Zainul Arifin No.2
Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5
Jakarta 11140
Telepon: (021) 6301511
Faksimili: (021) 6337851

STTD No. 31/STTD-N/PM/1996 tertanggal 4 Juli 1996
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia No. 060.2.021.150152

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan surat No. 115/CS-IS/PTI/VIII/16 tertanggal 30 Agustus 2016.

Tugas Pokok:

Pejabat umum yang membuat akta-akta perjanjian antara Perseroan dengan Wali Amanat dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang diperlukan dalam Emisi Obligasi.

Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara II, Lantai 5-7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 52895000
Faksimili: (021) 52894600

STTD No. 259/PM/STTD-AP /2000 tanggal 20 April 2000 atas nama Feniwati Chendana
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No. 11.D6427
Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Perseroan menunjuk Akuntan Publik berdasarkan surat No. 0082/PSS/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan. Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

Sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4, PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat dilarang:

1. memiliki hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah obligasi yang diwalianamanati;
2. merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;
3. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
4. mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3;



5. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang;
6. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Makes & Partners.

No. Ref.: 0452/PSH/MP/IG/RD/nf/11/16

Jakarta, 9 November 2016

Kepada:

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Jl. PHH. Mustopa Komp. Surapati Core
Blok AB (Angrek Boulevard) No.16

U.p.: Yth. Direksi

Hal : Pendapat Segi Hukum Atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") sekarang fungsinya dilaksanakan oleh "**Otoritas Jasa Keuangan**" atau "**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993, 227/PM/STTD-KH/1998, dan 135/BL/STTD-KH/2012 telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. 116/CS-MAKES/PTI/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum Perseroan termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**") sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005 (sebagaimana diubah) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dengan cara penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar Rupiah), yang untuk Tahap I Tahun 2016 ("**Obligasi Tahap I**") akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri obligasi, yaitu Obligasi Seri A sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi, Obligasi Seri B sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi dan Obligasi Seri C sebesar Rp103.000.000.000,- (seratus tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal emisi ("**Penawaran Umum Obligasi Tahap I**") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian penjaminan emisi obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan para penjamin emisi obligasi sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 119 tanggal 15 September 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 8 tanggal

3 Oktober 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 62 tanggal 8 November 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (perjanjian penjaminan emisi obligasi beserta segala tambahan dan pengubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak-hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang ditandatangani oleh Perseroan selaku Emiten, PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat dan masing-masing, PT BCA Sekuritas (terafiliasi), PT Bahana Securities dan PT DBS Vickers Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") Penawaran Umum Obligasi Tahap I ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan bagian penjaminan masing-masing sebagai berikut:

- a. PT Bahana Securities, sejumlah Rp173.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah);
- b. PT BCA Sekuritas (terafiliasi), sejumlah Rp378.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah); dan
- c. PT DBS Vickers Securities Indonesia, sejumlah Rp249.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah).

Seluruh Obligasi akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I, dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, menurut rencana seluruhnya akan digunakan untuk akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain, untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan menara dan pengoperasian menara.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Tahap I yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas sebagaimana tercantum dalam surat-surat Makes: (i) No. Ref.: 0367/LUT/MP/IG/RD/nf/10/16 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Laporan Uji Tuntas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 10 Oktober 2016 Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016, dan (ii) No. Ref.: 0451/L/MP/IG/RD/nf/11/16 tanggal 9 November 2016 perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 9 November 2016 Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016

(laporan uji tuntas beserta lampiran, tambahan maupun perubahannya tersebut selanjutnya disebut “**Laporan Uji Tuntas**” atau “**LUT**”), yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I dan ditembuskan kepada OJK serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan seluruhnya pendapat segi hukum yang telah Makes berikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami No. Ref.: 0368/PSH/MP/IG/RD/nf/10/16 tanggal 10 Oktober 2016.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan LUT yang Makes lakukan terhadap Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LUT yang memuat penjelasan secara terperinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya.
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini.
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum, Pendapat Segi Hukum diberikan hanya meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak dilakukannya penerbitan Obligasi I Protelindo Tahun 2014 dengan Tingkat Bunga Tetap oleh Perseroan yang telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-95/D.04/2014 pada tanggal 20 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran (“**Tanggal Penawaran Umum Obligasi I Perseroan Tahun 2014**”) sampai dengan tanggal 9 November 2016 (“**Tanggal Pemeriksaan**”) dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Tahap I adalah tanggal 30 Juni 2016.
6. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajiban komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Tahap I, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang obligasi Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pula dalam bab mengenai Risiko Usaha dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I, serta (iv) harga penawaran Obligasi Tahap I dalam Penawaran Umum Obligasi Tahap I ini.

7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya "**UU Jabatan Notaris**") dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, tidak ada kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), maka sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam dan LK.

B. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LUT yang Makesiapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Tahap I dan dengan memperhatikan bagian (A) dan (C) Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Bandung, didirikan dengan nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau disingkat "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003, tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UUWDP**") dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 025/BH.10.11./I/2003, tanggal 15 Januari 2003 serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003 Tambahan No. 2095.

2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang sebagaimana dimuat dalam Akta Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 33, tanggal 24 Juli 2008, dibuat di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60604.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 10 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0081889.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 101115209017 di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung di bawah No. 023/BH.10.11/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tanggal 10 Februari 2012, Tambahan No. 154 (“Akta No. 33/2008”). Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Bahan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Sisminbakum”) berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-00228258 tanggal 12 Februari 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0019094.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, yang isinya sehubungan dengan persetujuan atas perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan kewenangan Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan (“Akta No. 32/2016”).

Anggaran Dasar Perseroan dan pengubahannya telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 32/2016.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya Akta No. 32/2016 dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1)
Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- Pasal 25 ayat (1)
Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang ini wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.
- Pasal 32 ayat (1)

Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 70, tanggal 18 Nopember 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-59266.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0080968.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009 (“**Akta No. 70/2009**”), yaitu berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

-Menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. pembangunan, penyediaan, pembelian dan pengelolaan sarana telekomunikasi;
- b. menyewakan menara untuk kepentingan khusus sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya, telah sesuai dengan izin usaha pokok dan material yang dimiliki Perseroan yang sebagaimana termaktub dalam Izin Usaha yang dikeluarkan BKPM berdasarkan Surat Keputusan No. 2/1/IU/II/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri yang dikeluarkan BKPM berdasarkan Surat Keputusan No. 14/1/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dimana antara lain menyebutkan bahwa bidang usaha Perseroan adalah bergerak di bidang Jasa Penunjang Telekomunikasi.

4. Sejak Tanggal Penawaran Umum Obligasi I Perseroan Tahun 2014 sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan, yang mana struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 23 Maret 2010, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah),
terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar)
saham masing-masing saham bernilai nominal
Rp100,00 (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh
dua miliar dua ratus enam puluh dua juta
delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) terbagi

atas 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham; dan

Modal Disetor : Rp332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan sejak Tanggal Penawaran Umum Obligasi I Perseroan Tahun 2014 sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini tidak mengalami perubahan.

5. Bahwa pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi kepemilikan atas saham-saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalam Angka 4 di atas, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp100,00	%
Modal Dasar		10.000.000.000	1.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Sarana Menara Nusantara	3.322.600.187	332.260.018.700	99,9994
2.	PT Tricipta Mandhala Gumilang	10.000	1.000.000	0,0003
3.	PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Disetor		3.322.620.187	332.262.018.700	100
Jumlah Saham dalam Portepel		6.677.379.813	667.737.981.300	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas adalah benar, sah, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 259 tanggal 30 September 2016, dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, S.H., pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0085318 tanggal 30 September 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0115228.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 ("Akta No. 259/2016"), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ario Wibisono
 Komisaris : Kenny Harjo
 Komisaris Independen : Bacelius Ruru

Direksi

Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss
Direktur : Rinaldy Santosa
Direktur : Onggo Wijaya
Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen : Indra Gunawan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan atas Akta No. 259/2016.

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1)

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- Pasal 25 ayat 1

Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang ini wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.

- Pasal 32 ayat (1)

Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Pengangkatan Direktur Independen dalam Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Juni 2014, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Bacelius Ruru
Anggota : Anang Yudiansyah Setiawan

Anggota : Patricia Marina Sugondo

Sehubungan dengan kewajiban memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yang dijalankan oleh Aditya Masno berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 7 Mei 2015 tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yaitu berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal Perseroan tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan, Perseroan telah mengangkat Johannes Edwin sebagai Kepala Departemen Audit Internal Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 April 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Bacelius Ruru
Anggota : Ario Wibisono
Anggota : Doni Kusuma

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin atau persetujuan pokok dan material yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang sebagaimana dijalankan Perseroan saat ini sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IU/II/PMDN/TELKOMUNIKASI/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Izin Perluasan dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri BKPM No. 14/1/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Oktober 2014, yang menyebutkan antara lain bidang usaha Perseroan adalah bergerak di bidang Jasa Penunjang Telekomunikasi, serta Izin Mendirikan Bangunan atas menara-menara telekomunikasi material milik Perseroan. Kecuali sebagaimana diungkapkan dalam butir 7 Pendapat Segi Hukum ini, izin atau persetujuan pokok dan material tersebut, masih berlaku.

Sehubungan dengan kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan ("**Permendagri No. 32/2010**") mengatur sebagai berikut:

Pasal 16 Permendagri No. 32/2010

- (1) *Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.*
- (2) *Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.*
- (3) *Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud*

pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.

Pasal 17 Permendagri No. 32/2010

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan.

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan berdasarkan matriks daftar menara telekomunikasi yang disediakan Perseroan dan pemeriksaan secara *sampling* atas menara telekomunikasi yang kami lakukan terhadap kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) menara telekomunikasi atau mewakili kurang lebih 51,67% (lima puluh satu koma enam tujuh persen) dari keseluruhan menara telekomunikasi milik Perseroan di Indonesia yang berjumlah 14.515 (empat belas ribu lima ratus lima belas), terdapat 55 (lima puluh lima) menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB. Sehubungan dengan tidak dimilikinya IMB atas 55 (lima puluh lima) menara-menara tersebut, sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak material terhadap operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan. Sebagaimana diperkuat dengan pernyataan Perseroan, Perseroan secara internal telah memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi menara-menara telekomunikasi Perseroan yang belum memiliki IMB untuk kemudian melakukan pengurusan IMB tersebut kepada lembaga terkait yang berwenang. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh IMB atas menara-menara telekomunikasi tersebut, maka lembaga pemerintah yang berwenang, dapat memberlakukan sanksi-sanksi tersebut di atas kepada Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan atas Perseroan serta sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan, tidak terdapat menara telekomunikasi milik Perseroan yang telah disegel ataupun dirubuhkan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan tidak dimilikinya IMB.

8. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material yang dimiliki Perseroan secara sah berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain, berupa menara telekomunikasi, kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor, serta hak atas kekayaan intelektual dan atas harta kekayaan material tersebut di atas, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga manapun serta tidak sedang disita atau terlibat dalam suatu sengketa hukum di pengadilan di Indonesia. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan material Perseroan berdasarkan masing-masing asuransi yang telah ditutup Perseroan dengan PT AIG Insurance Indonesia dan PT Asuransi Umum BCA, yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini masih berlaku. Lebih lanjut, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, nilai pertanggungan atas asuransi-asuransi yang dimiliki oleh Perseroan tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, seluruh Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dalam angka 10 Pendapat

Segi Hukum ini) memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah dan atas harta kekayaan material tersebut, tidak sedang dalam sengketa atau tuntutan hukum. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak dijaminan kepada pihak ketiga. Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas juga telah mengasuransikan harta kekayaan material yang dimilikinya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini masih berlaku.

9. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah membayarkan tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum masing-masing untuk kantor Perseroan di Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan untuk kantor Perseroan di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2016, mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan untuk kantor Perseroan di kantor Perseroan di Jakarta dan kantor Perseroan di Bandung.

Perseroan juga telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.936/PHIJSK-PK/PP/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang antara lain memutuskan bahwa Peraturan Perusahaan Perseroan mulai berlaku terhitung tanggal 29 April 2015 sampai dengan 28 April 2017.

10. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Iforte Solusi Infotek ("**Iforte**") yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung sebanyak 33.999 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp33.999.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Iforte; dan
 - b. PT Iforte Global Internet ("**IGI**") yang dilakukan melalui penyertaan saham secara tidak langsung melalui Iforte sebanyak 42.619 (empat puluh dua ribu enam ratus sembilan belas) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp42.619.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta Rupiah), yang merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IGI.

Masing-masing penyertaan saham Perseroan tersebut, berdasarkan pemeriksaan

yang dilakukan serta sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan, tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.

Masing-masing anak-anak perusahaan Perseroan tersebut di atas (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anak Perusahaan**") merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya yang sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing. Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku atas Anak Perusahaan tersebut serta peraturan perundang-undangan, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh: (i) Iforte atas (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 193 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta; (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Iforte No. 3 tanggal 20 Desember 2010, dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta; (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Iforte No. 7 tanggal 20 Desember 2012, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Tangerang; (d) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 145 tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, dan (ii) IGI atas (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 211 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta; (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Infostruktur Nusantara No. 298 tanggal 25 Maret 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta; (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas IGI No. 234 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta; (d) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas IGI No. 20 tanggal 19 Juli 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta; dan (e) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 257 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan belum didaftarkanya perubahan dalam masing-masing akta Anggaran Dasar Anak Perusahaan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- **Pasal 5 ayat (1)**
Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- **Pasal 11 ayat (1) huruf g**
Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
 - i. modal dasar;*
 - ii. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;*
 - iii. besarnya modal yang ditempatkan;*

iv. besarnya modal yang disetor.

- **Pasal 32 ayat (1)**

Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, struktur permodalan Anak Perusahaan Perseroan berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya masing-masing, kecuali atas:

Iforte

- a) Pengalihan saham-saham Iforte berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 12 November 2002 yang dibuat di bawah tangan, sehubungan dengan penjualan 180 saham milik Padmasari Martini Sondhi kepada Lukas Djuanda yang sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Iforte berdasarkan Risalah RUPS Luar Biasa tanggal 12 November 2002, hal mana dinyatakan dalam Perjanjian Jual beli tanggal 12 November 2002 tersebut. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Makes tidak menerima dokumen mengenai Risalah RUPS Luar Biasa tanggal 12 November 2002 tersebut berikut dengan pelaporan perubahan ketentuan anggaran dasar Iforte kepada Menteri Kehakiman sehubungan dengan pengalihan saham-saham Iforte tersebut.

Sehubungan dengan tidak dilaporkannya perubahan anggaran dasar tersebut, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 17 ayat (2)

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 21 ayat (1)

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:

- a. ...
- b. ...
- c. *Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).*

Pasal 21 ayat (2)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 22 ayat (1)

Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 22 ayat (2)

Permohonan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.

Pasal 23

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan

- b) Pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh Iforte atas (a) Akta Berita Acara RUPSLB No. 90 tanggal 21 Februari 2001, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta; (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 161 tanggal 25 Maret 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta; (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 193 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta; (d) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Iforte No. 18 tanggal 22 Juni 2009, dibuat di hadapan Henny Kurnia Tjahja, S.H., Notaris di Jakarta; (e) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Iforte No. 3 tanggal 20 Desember 2010, dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta; (f) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Iforte No. 7 tanggal 20 Desember 2012, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Tangerang; (g) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Iforte Sebagai Pengganti RUPSLB No. 5 tanggal 1 Juli 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta; dan (h) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 10 November 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan struktur permodalan dalam masing-masing akta Anggaran Dasar Anak Perusahaan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- **Pasal 5 ayat (1)**

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- **Pasal 11 ayat (1) huruf c dan g**

Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha Perseroan.
2. izin-izin usaha yang dimiliki.
- g. 1. modal dasar;

2. *banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;*
3. *besarnya modal yang ditempatkan;*
4. *besarnya modal yang disetor;*

- **Pasal 32 ayat (1)**

Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

- c) Pengumuman rencana pengambilalihan sehubungan dengan perubahan pengendalian dalam Iforte oleh PT Intan Tata Buana Persada yang wajib diumumkan dalam 2 surat kabar harian nasional yang belum dilakukan oleh Iforte berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 90 tanggal 21 Februari 2001, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan pengumuman tersebut di atas, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

- **Pasal 105 ayat (2)**

Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

- **Pasal 108 ayat (1)**

Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan, atau peleburan selesai dilakukan.

- **Pasal 108 ayat (2)**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur lebih lanjut mengenai perihal tidak diumumkannya rencana maupun hasil pengambilalihan dalam 2 (dua) surat kabar.

- d) Pengumuman akuisisi sehubungan dengan pengambilalihan Iforte oleh PT Grahatama Kreasibaru yang wajib diumumkan dalam surat kabar harian nasional yang belum dilakukan oleh Iforte berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Iforte No. 18 tanggal 22 Juni 2009, dibuat di hadapan Henny Kurnia Tjahja, S.H., Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan belum dilakukannya kewajiban pengumuman akuisisi kepada karyawan dan dalam surat kabar, UUPT mengatur

sebagai berikut:

Pasal 127 ayat (2)

“Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.”

UUPT tidak mengatur lebih lanjut mengenai perihal belum dilakukannya pengumuman tersebut.

IGI

a)

Pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh IGI atas: (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 358 tanggal 23 Oktober 2002, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, Notaris di Jakarta; dan (b) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Solusi Infstruktur Nusantara No. 4 tanggal 1 Juli 2010.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan struktur permodalan dalam masing-masing akta Anggaran Dasar Anak Perusahaan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- **Pasal 5 ayat (1)**

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- **Pasal 11 ayat (1) huruf c dan g**

Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- c. 1. *kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha Perseroan.*
- 2. *izin-izin usaha yang dimiliki.*
- g. 1. *modal dasar;*
- 2. *banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;*
- 3. *besarnya modal yang ditempatkan;*
- 4. *besarnya modal yang disetor;*

- **Pasal 32 ayat (1)**

Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

b)

Pengumuman rencana pengambilalihan sehubungan dengan perubahan pengendalian dalam IGI oleh Iforte yang wajib diumumkan dalam 2 surat kabar harian nasional yang belum dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 358 tanggal 23 Oktober 2002, dibuat dihadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan pengumuman tersebut di atas, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

- **Pasal 105 ayat (2)**
Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- **Pasal 108 ayat (1)**
Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan, atau peleburan selesai dilakukan.
- **Pasal 108 ayat (2)**
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur lebih lanjut mengenai perihal tidak diumumkannya rencana maupun hasil pengambilalihan dalam 2 (dua) surat kabar

Anak Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, telah memiliki izin-izin material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatannya, termasuk: Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup oleh Iforte dan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet. Seluruh perizinan serta persetujuan dari instansi terkait yang dimiliki oleh Anak Perusahaan yang disebutkan di atas masih berlaku.

Anak Perusahaan tersebut di atas, telah melakukan kewajiban-kewajiban yang diprasyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk juga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh perizinan yang dimiliki antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan.

11. Bahwa Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak bank atau lembaga finansial yang sebagaimana diungkapkan dalam LUT, dimana atas perjanjian kredit/fasilitas pinjaman yang telah ditandatangani Perseroan tersebut, masih berlaku dan dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, serta tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Tahap I Perseroan, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Tahap I, maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang obligasi serta masing-masing perjanjian kredit/fasilitas pinjaman yang telah ditandatangani Perseroan tersebut tidak bertentangan satu dengan lainnya.
12. Pada tanggal diterbitkannya Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) guna menjamin kewajiban Iforte, berdasarkan *IDR350,000,000,000 Revolving Loan Facility Agreement* tanggal 11 Agustus 2015, sebagaimana telah diamandemen berdasarkan *Amendment*

Agreement tanggal 1 Juli 2016, dan *Second Amendment Agreement* tanggal 1 Oktober 2016 dengan PT Bank DBS Indonesia (“**Perjanjian Pinjaman DBS**”), sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tanggal 11 Agustus 2015. Berdasarkan jaminan perusahaan tersebut, Perseroan akan menjadi penjamin atas pelaksanaan kewajiban Iforte terhadap Perjanjian Pinjaman DBS. Dalam hal Iforte tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman DBS tersebut, Perseroan memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang Iforte berdasarkan Perjanjian Pinjaman DBS, dimana sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan, hal tersebut tidak memiliki dampak material terhadap operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan. Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

13. Perseroan dan Anak Perusahaan juga menandatangani perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan material terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam LUT dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan, perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan material yang telah ditandatangani tersebut masih berlaku dan dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan, dan sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan tersebut, sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang berdampak material terhadap operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan dan secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan tersebut yang telah dibuat dan ditandatangani Perseroan dan Anak Perusahaan.

Atas perjanjian material terkait dengan kegiatan usaha masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Tahap I, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Tahap I, maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang obligasi.

14. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan atas masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan serta sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan, maupun Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berdampak material terhadap operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan dan Perseroan dan Anak Perusahaan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak

sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang berdampak material terhadap operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan.

15. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Tahap I, Perseroan telah menandatangani perjanjian-pejanjian terkait Penawaran Umum Obligasi Tahap I Perseroan yaitu:
- a. Perjanjian Perwaliananatan Obligasi sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 117 tanggal 15 September 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 7 tanggal 3 Oktober 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 60 tanggal 8 November 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 119 tanggal 15 September 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 8 tanggal 3 Oktober 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 62 tanggal 8 November 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - c. Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 120 tanggal 15 September 2016, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi dengan BEI No. SP-009/BEI.PP2/09-2016 tanggal 15 September 2016; dan
 - e. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0057/PO/KSEI/0916 tanggal 15 September 2016.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan, dan terkait dengan Perjanjian Perwaliananatan sebagaimana disebutkan dalam butir (a) di atas, telah sesuai dengan ketentuan Angka 4 huruf (b) peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan VI.C.4"), dan antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk. yang akan bertindak selaku wali amanat dalam Penawaran Umum Obligasi Tahap I ini, tidak terdapat hubungan kredit dan penjaminan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan

Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sebagaimana juga diperkuat dengan surat pernyataan Wali Amanat No. Ref. 1046/SK/SAS/TB/WB/09/2016 tertanggal 14 September 2016 serta tidak terdapat hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Angka 3 huruf a Peraturan VI.C.4, hal mana diperkuat dengan konfirmasi Wali Amanat berdasarkan surat pernyataan Wali Amanat No. Ref. 1045/SK/SAS/TB/WB/09/2016 tertanggal 14 September 2016.

16. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Tahap I, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam masing-masing Keputusan Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris dan Keputusan Direksi tertanggal 1 September 2016, yang semuanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
17. Sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak pernah dinyatakan sebagai pihak yang pernah mengalami gagal bayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK 36/2014") dan merupakan pihak yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan POJK 36/2014.
18. Informasi atas aspek hukum yang disajikan dalam Prospektus telah sesuai dengan hasil pemeriksaan segi hukum sebagaimana tercantum dalam LUT.

C. Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I mengenai Risiko Usaha.
- c. Pemeriksaan atas menara-menara telekomunikasi milik Perseroan dilakukan dengan metode *sampling* atas menara-menara telekomunikasi yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan berjumlah kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) menara atau sebanyak 51,67% (lima puluh satu koma enam tujuh persen) dari seluruh menara di Indonesia yang dimiliki Perseroan saat ini sebanyak kurang lebih 14.515 (empat belas ribu lima ratus lima belas) menara, dimana menara-menara telekomunikasi yang diperiksa adalah menara-menara telekomunikasi yang memenuhi kriteria: (i) mewakili seluruh wilayah persebaran menara Perseroan di wilayah Republik Indonesia, dan (ii) memberikan pendapatan yang material bagi Perseroan.

- d. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada Makes adalah asli dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Pendapat Segi Hukum yang kami sampaikan antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan Perseroan dan wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
- g. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam butir 14 diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. KEP.04/HKHPM/XI/2012, tanggal 6 Desember 2012, tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang antara lain memutuskan untuk menghapus ketentuan No.341 huruf j.j.2 Standar Profesi HKHPM yang merupakan Lampiran dari Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005, tanggal 31 Maret 2005. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam butir 14 tersebut disampaikan dengan digantungkan/didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Direksi Perseroan kepada kami.
- h. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan diberlakukannya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan terbatas antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam LUT, seluruh akta Perseroan dibuat

setelah berlakunya UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sedang dalam proses didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

- i. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LUT dan (ii) pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LUT dan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- j. Dengan tidak mengesampingkan huruf (i) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Makes untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke OJK.
- k. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “izin material” dan “harta kekayaan material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- l. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin kepada, melakukan atau menerima pendaftaran, atau melakukan pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan dimaksud dan secara sah mengikat; (ii) telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan menara telekomunikasi: (a) setiap dan seluruh perizinan, persetujuan, rekomendasi dan instrumen sejenis lainnya yang disyaratkan; dan (b) sesuai dengan rencana tata ruang daerah (termasuk rencana rinci dan peta) sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dimana menara tersebut berada yang saat itu berlaku.
- m. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dimana Perseroan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

- n. Makes bukan konsultan hukum pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- o. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Segi Hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- p. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- q. Pendapat Segi Hukum, Makes buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan.
- r. Makes bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Irfan Ghazali, S.H., M.H.
Partner

Lampiran:

- Laporan Uji Tuntas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 10 Oktober 2016 Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 0367/LUT/MP/IG/RD/nf/10/16 tanggal 10 Oktober 2016.
- Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 9 November 2016 Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. Ref.: 0451/L/MP/IG/RD/nf/11/16 tanggal 9 November 2016.

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN PERNYATAAN MANAJEMEN



PROTELINDO

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013,
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2016
DAN 2015 (TIDAK DIAUDIT) DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JUNE 30, 2016 AND
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013,
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2016 AND 2015 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile
Address according to KTP or other Identity Card

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Position
2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile
Address according to KTP or other Identity Card

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Position

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") dan entitas anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

We, the undersigned below:

- : Ferdinandus Aming Santoso
: Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1
: Jakarta 10310, Indonesia
: Jl. Karet Belakang No. 55, RT.002/RW.007,
: Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi,
: Jakarta Selatan
: 021 - 2358 5500
: Direktur Utama/President Director
- : Rinaldy Santosa, CPA
: Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1
: Jakarta 10310, Indonesia
: Jl. Haji Samali Ujung no.17, RT. 009/RW. 004,
: Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
: Jakarta Selatan
: 021 - 2358 5500
: Direktur/Director

confirm that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("the Company") and its subsidiaries;
2. The consolidated financial statements as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 (unaudited) and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries has been fully disclosed in a complete and truthful manner;
b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;
5. We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiaries.

We certify the accuracy of this statement

3 Oktober/October 3, 2016

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors

(Ferdinandus Aming Santoso)
Direktur Utama/President Director

(Rinaldy Santosa, CPA)
Direktur/Director



Direktori Jenderal Pajak

METERAI TERAPAN
Rp000000
03
00033072
NT200751

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-2610/PSS/2016

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-2610/PSS/2016

*The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-2610/PSS/2016 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-2610/PSS/2016 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and their consolidated financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-2610/PSS/2016 (lanjutan)

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai suatu informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-2610/PSS/2016 (continued)

Other matters

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (parent entity), which comprises the statements of financial position as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-2610/PSS/2016 (lanjutan)

Report No. RPC-2610/PSS/2016 (continued)

Hal-hal lain (lanjutan)

Other matters (continued)

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-2443/PSS/2016 bertanggal 31 Agustus 2016 atas laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sebelum dilakukan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terlampir oleh Perseroan dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. RPC-2443/PSS/2016 dated August 31, 2016 on the consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and for the six-month period ended June 30, 2016, and the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, prior to the reissuance by the Company of the accompanying consolidated financial statements with several changes and additional disclosures.

Laporan ini telah diterbitkan kembali dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perseroan di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been reissued solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed public offering of debt securities of the Company on Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Feniwati Chendana, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0694/*Public Accountant Registration No. AP.0694*

3 Oktober 2016/*October 3, 2016*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

Laporan No. RPC-2609/PSS/2016

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Pendahuluan

Kami telah mereviu informasi keuangan konsolidasian interim PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Report on Review of Interim Financial Information

Report No. RPC-2609/PSS/2016

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Introduction

We have reviewed the accompanying interim consolidated financial information of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2015, and a summary of significant accounting policies and other explanatory informations. Management is responsible for the preparation and fair presentation of this interim consolidated financial information in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on this interim consolidated financial information based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. RPC-2609/PSS/2016 (lanjutan)

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Reviu kami atas informasi laporan keuangan konsolidasian interim PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan interim PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai suatu informasi tambahan terhadap informasi keuangan konsolidasian interim terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari informasi keuangan konsolidasian interim terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun informasi keuangan konsolidasian interim terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur reviu yang diterapkan dalam reviu atas informasi keuangan konsolidasian interim.

Report on Review of Interim Financial Information (continued)

Report No. RPC-2609/PSS/2016 (continued)

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial information does not present fairly, in all material respects, the consolidated financial performance and cash flows of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2015, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our review of the accompanying interim consolidated financial information of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2015 was performed for the purpose of forming a conclusion on such interim consolidated financial information taken as a whole. The accompanying interim financial information of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (parent entity), which comprises the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2015, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying interim consolidated financial information, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying interim consolidated financial information under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Consolidated Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying interim consolidated financial information. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the review procedures applied in the review of interim consolidated financial information.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. RPC-2609/PSS/2016 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

terlampir berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Entitas Induk tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan informasi keuangan konsolidasian interim terlampir secara keseluruhan.

Kami telah menerbitkan Laporan Reviu Akuntan Independen No. RPC-1321/PSS/2015/DAU dan No. RPC-2442/PSS/2016 masing-masing bertanggal 27 Juli 2015 dan 31 Agustus 2016 atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian interim PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, sebelum dilakukan penerbitan kembali informasi keuangan konsolidasian interim terlampir oleh Perseroan.

Laporan ini telah diterbitkan kembali dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perseroan di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Report on Review of Interim Financial Information (continued)

Report No. RPC-2609/PSS/2016 (continued)

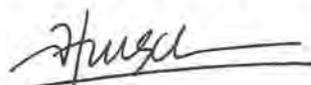
Other matters (continued)

in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" ("SRE 2410"), established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Parent Entity Financial Information is not fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying interim consolidated financial information taken as a whole.

We have previously issued Independent Accountants' Review Reports No. RPC-1321/PSS/2015/DAU and No. RPC-2442/PSS/2016 dated July 27, 2015 and August 31, 2016, respectively, on interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2015, prior to the reissuance by the Company of accompanying interim consolidated financial information.

This report has been reissued solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company on Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Feniwati Chendana, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0694/Public Accountant Registration No. AP.0694

3 Oktober 2016/October 3, 2016

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
			2015	2014	2013	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2e,2r,4,37 39,40,41	3.598.156	2.986.279	2.005.669	1.501.784	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2r,5,39,40,41	569.259	470.519	571.914	673.753	Trade receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2r,41	4.370	804	1.045	48	Other receivables - third parties
Persediaan	2f,6	-	11.076	-	508	Inventories
Beban dibayar dimuka	7	21.955	22.346	23.604	16.468	Prepaid expenses
Uang muka	39	17.988	17.101	16.096	14.475	Advances
Pajak dibayar dimuka	2n,20a	345.695	24.497	19.044	-	Prepaid taxes
TOTAL ASET LANCAR		4.557.423	3.532.622	2.637.372	2.207.036	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Investasi sewa pembiayaan neto	2g,8	-	-	-	125	Net investment in finance lease
Properti investasi	2i,10	17.952.636	14.683.352	12.367.983	11.126.846	Investment properties
Aset tetap	2h,9	175.445	157.179	70.030	75.432	Fixed assets
Goodwill	2c,2t,11	333.737	363.150	186.883	207.730	Goodwill
Estimasi pengembalian pajak	2n,20a	2.700	3.919	80.380	80.380	Refundable taxes
Aset takberwujud	2u,12	1.220.382	1.186.775	602.680	721.585	Intangible assets
Sewa lokasi jangka panjang	2g,13	1.839.283	1.297.608	1.268.441	1.009.732	Long-term site rentals
Aset pajak tangguhan	2n,20e,20f	13.345	18.293	18.241	-	Deferred tax assets
Piutang lain-lain - pihak berelasi	2r,37,39,41	135.775	139.494	4.257	3.062	Other receivables - related parties
Aset tidak lancar lainnya	2r,14,39,41	32.722	30.565	38.059	146.016	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		21.706.025	17.880.335	14.636.954	13.370.908	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		26.263.448	21.412.957	17.274.326	15.577.944	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
			2015	2014	2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang pembangunan menara dan lainnya						Tower construction and other payables
Pihak ketiga	2r,15,39,40,41	145.884	216.607	468.813	484.822	Third parties
Pihak berelasi	37,40,41	29.515	31.630	19.057	5.782	Related parties
Utang lain-lain	2r,21,39,40,41	7.228	20.167	39.773	49.774	Other payables
Utang pajak	2n,20b	141.724	60.933	334.484	23.931	Taxes payable
Pendapatan diterima dimuka	23	1.789.794	820.858	632.944	481.691	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2k,2r,40,41	22.443	48.398	49.300	43.956	Short-term employee benefit liability
Beban akrual	2r,16,39,40,41	268.656	355.270	301.416	244.390	Accrued expenses
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2r,17,39,40,41	750.800	446.139	203.002	1.086.355	Current portion of long-term loans
Utang obligasi	2r,18,39,40,41	994.813	-	-	-	Bonds payable
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		4.150.857	2.000.002	2.048.789	2.420.701	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Pendapatan diterima dimuka	23	85.024	113.000	150.687	177.428	Unearned revenue
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2r,17,39,40,41	9.078.123	6.741.254	6.512.960	8.221.252	Long-term loans, net of current portion
Utang obligasi	2r,18,39,40,41	1.725.406	2.715.146	2.638.020	-	Bonds payable
Utang swap valuta asing	2p,2r,35,40,41	131.252	227.954	87.795	-	Cross currency swap payable
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2k,3,22	76.713	58.301	49.352	36.926	Long-term employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan, neto	2n,20e,20f	1.782.815	1.690.027	910.852	880.515	Deferred tax liabilities, net
Provisi jangka panjang	2s,3,19	251.867	208.638	171.222	150.025	Long-term provision
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		13.131.200	11.754.320	10.520.888	9.466.146	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		17.282.057	13.754.322	12.569.677	11.886.847	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to the owners of the parent entity
Modal saham						Share capital
Nilai nominal - Rp100 (angka penuh) per saham						Par value - Rp100 (full amount) per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham						Authorized - 10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh						Issued and fully paid -
3.322.620.187 saham	25	332.262	332.262	332.262	332.262	3,322,620,187 shares
Saldo laba						Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	27	300	200	100	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		8.661.696	7.340.286	4.389.886	3.299.052	Unappropriated
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	26	(14.452)	(12.494)	(9.643)	64.760	Other comprehensive income (loss)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		8.979.806	7.660.254	4.712.605	3.696.074	Total equity attributable to the owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	24	1.585	(1.619)	(7.956)	(4.977)	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		8.981.391	7.658.635	4.704.649	3.691.097	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		26.263.448	21.412.957	17.274.326	15.577.944	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN**
**Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015
(Tidak Diaudit)**
**dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
**For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)**
**and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
		2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013 Disajikan kembali (Catatan 44)/ As restated (Note 44)	
PENDAPATAN	2g,2m,28	2.423.134	2.141.131	4.469.784	4.106.175	3.197.139	REVENUES
DEPRESIASI DAN AMORTISASI	2h,2m,29	(218.589)	(170.909)	(389.058)	(337.134)	(261.180)	DEPRECIATION AND AMORTIZATION
BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA	2m,30	(98.117)	(99.793)	(181.682)	(238.271)	(207.156)	OTHER COST OF REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN		(316.706)	(270.702)	(570.740)	(575.405)	(468.336)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		2.106.428	1.870.429	3.899.044	3.530.770	2.728.803	GROSS INCOME
BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN	2m,31	(27.188)	(27.699)	(60.811)	(50.932)	(36.157)	SELLING AND MARKETING EXPENSES
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2m,32	(193.539)	(227.166)	(463.636)	(411.555)	(319.205)	GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI WAJAR PROPERTI INVESTASI	2m,10	109.730	531.428	1.631.663	(408.220)	(670.674)	INCREASE (DECREASE) IN FAIR VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) LAIN-LAIN, NETO	2m,34	40.314	(313.825)	(509.580)	(266.209)	(947.177)	OTHER GAINS (LOSSES), NET
LABA USAHA		2.035.745	1.833.167	4.496.680	2.393.854	755.590	OPERATING INCOME
PENDAPATAN KEUANGAN, BRUTO		38.974	9.005	15.368	8.652	5.002	FINANCE INCOME, GROSS
PAJAK FINAL ATAS PENDAPATAN KEUANGAN		(7.795)	(1.801)	(3.010)	(1.726)	(1.001)	FINAL TAX ON FINANCE INCOME
PENDAPATAN KEUANGAN, NETO		31.179	7.204	12.358	6.926	4.001	FINANCE INCOME, NET
BIAYA KEUANGAN	33	(284.642)	(266.784)	(562.512)	(855.586)	(551.345)	FINANCE CHARGES
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		1.782.282	1.573.587	3.946.526	1.545.194	208.246	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2n,20c,20d	(457.508)	(399.112)	(989.776)	(455.510)	(58.316)	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN		1.324.774	1.174.475	2.956.750	1.089.684	149.930	INCOME FOR THE YEAR/PERIOD

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015
(Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
		2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013 Disajikan kembali (Catatan 44)/ As restated (Note 44)	
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN		1.324.774	1.174.475	2.956.750	1.089.684	149.930	INCOME FOR THE YEAR/PERIOD
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:							Other comprehensive income (loss):
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not be reclassified to profit and loss:
Keuntungan (kerugian) aktuarial		(9.973)	7.369	13.752	-	-	Actuarial gain (loss)
Pajak penghasilan tangguhan terkait		2.493	(1.842)	(3.438)	-	-	Related deferred income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that may be reclassified to profit and loss:
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan		3.572	(822)	(4.736)	(41.912)	83.640	Exchange rate difference from translation of financial statements
Keuntungan (kerugian) bersih dari lindung nilai arus kas		3.711	6.574	(12.707)	(59.597)	-	Net gains (loss) on cash flow hedges
Pajak penghasilan tangguhan terkait		(1.821)	(1.438)	4.361	25.377	(20.910)	Related deferred income tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN, SESUDAH PAJAK		(2.018)	9.841	(2.768)	(76.132)	62.730	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS), NET OF TAX
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN/PERIODE BERJALAN, SESUDAH PAJAK		1.322.756	1.184.316	2.953.982	1.013.552	212.660	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR/PERIOD, NET OF TAX
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							Income (loss) for the year attributable to:
Pemilik entitas induk 42		1.321.510	1.172.982	2.950.500	1.090.934	153.785	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali 24		3.264	1.493	6.250	(1.250)	(3.855)	Non-controlling interests
		1.324.774	1.174.475	2.956.750	1.089.684	149.930	
Total penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							Total comprehensive income (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk		1.319.552	1.182.724	2.947.649	1.016.531	216.735	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali 24		3.204	1.592	6.333	(2.979)	(4.075)	Non-controlling interests
		1.322.756	1.184.316	2.953.982	1.013.552	212.660	
Laba per saham (angka penuh)	2q,42	398	353	888	328	46	Earnings per share (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
**(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the parent entity		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)				Total ekuitas/ Total equity	Balance, December 31, 2012 Income (loss) for the year
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/Issued and fully paid share capital	Saldo Laba/Retained Earnings	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange rate difference from translation of financial statements	Kerugian bersih dari lindung nilai arus kas/ Net loss on cash flow hedges	Keuntungan aktuarial kumulatif/ Cumulative actuarial gains	Keperluan non-pengendali/ Non-controlling Interests		
Saldo 31 Desember 2012	332.262	3.145.267	1.809	-	-	3.479.338	3.480.985	
Total laba (rugi) tahun berjalan	-	153.785	-	-	-	153.785	149.930	
Pendapatan (rugi) komprehensif lain	-	-	62.951	-	-	62.951	62.730	
Pembayaran deviden oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	(2.548)	
Saldo 31 Desember 2013	332.262	3.299.052	64.760	-	-	3.696.074	3.691.097	
Total laba (rugi) tahun berjalan	-	1.090.934	-	-	-	1.090.934	1.089.684	
Rugi komprehensif lain	-	-	(29.705)	(44.698)	-	(74.403)	(76.132)	
Pembentukan cadangan wajib (Catatan 27)	-	(100)	-	-	-	-	-	
Saldo 31 Desember 2014, disajikan kembali (Catatan 44)	332.262	4.389.886	35.055	(44.698)	-	4.712.605	4.704.649	
Total laba (rugi) tahun berjalan	-	2.950.500	-	-	-	2.950.500	2.956.750	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-	(3.635)	(9.530)	10.314	(2.851)	(2.768)	
Akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	4	
Pembentukan cadangan wajib (Catatan 27)	-	(100)	-	-	-	-	-	
Saldo 31 Desember 2015	332.262	7.340.286	31.420	(54.228)	10.314	7.660.254	7.658.635	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
**(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the parent entity		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)		Keuntungan non-kependirian/ Non-controlling Interests	Total ekuitas/ Total equity			
	Saldo Laba/Retained Earnings	Saldo Laba/Retained Earnings	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange rate difference translation of financial statements	Kerugian bersih dari indikator nilai Net loss or cash flow hedges					
Saldo 31 Desember 2014, dijasikan kembali (Catatan 44)	100	4.389.886	3.055	(44.698)	-	4.712.605	(7.956)	4.704.649	Balance, December 31, 2014, as restated (Note 44)
Total laba periode berjalan	-	1.172.982	-	-	-	1.172.982	1.493	1.174.475	Income for the period
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-	(715)	4.931	5.526	9.742	99	9.841	Other comprehensive income (loss)
Pembentukan cadangan wajib (Catatan 27)	-	-	-	-	-	-	-	-	Retained earning appropriation (Note 27)
Saldo 30 Juni 2015, dijasikan kembali (Catatan 44)	100	5.562.768	3.340	(39.767)	5.526	5.895.329	(6.364)	5.888.965	Balance, June 30, 2015, as restated (Note 44)
Saldo 31 Desember 2015	200	7.340.286	3.1420	(54.228)	10.314	7.660.254	(1.619)	7.658.635	Balance, December 31, 2015
Total laba periode berjalan	-	1.321.510	-	-	-	1.321.510	3.264	1.324.774	Income for the period
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-	2.739	2.793	(7.480)	(1.956)	(60)	(2.018)	Other comprehensive income (loss)
Pembentukan cadangan wajib (Catatan 27)	-	-	-	-	-	-	-	-	Retained earning appropriation (Note 27)
Saldo tanggal 30 Juni 2016	300	8.661.696	3.4159	(51.445)	2.834	8.979.806	1.585	8.981.391	Balance, June 30, 2016

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015
(Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan	3.480.710	3.557.629	5.125.955	4.614.773	3.420.684	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(308.313)	(313.223)	(662.325)	(799.415)	(668.463)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(123.847)	(100.831)	(198.699)	(166.827)	(132.702)	Cash paid to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	3.048.550	3.143.575	4.264.931	3.648.531	2.619.519	Cash flows from operations
Penghasilan bunga yang diterima	27.651	7.084	11.966	6.832	3.806	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(623.183)	(709.573)	(933.996)	(361.642)	(298.610)	Income taxes and other taxes paid
Pengembalian pajak	1.831	-	76.754	40.225	105.107	Tax refund
Lain-lain	8.555	997	936	2.720	2.154	Others
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.463.404	2.442.083	3.420.591	3.336.666	2.431.976	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Pembelian properti investasi	10 (3.599.752)	(521.540)	(660.137)	(1.606.043)	(1.412.649)	Acquisition of investment properties
Pembayaran sewa tanah jangka panjang	13 (736.638)	(133.657)	(286.231)	(519.470)	(340.223)	Payments for long-term site rentals
Pembelian aset tetap	9 (24.373)	(12.700)	(29.881)	(22.554)	(21.068)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan investasi sewa pembiayaan	-	-	-	125	246	Receipt from investment in finance lease
Hasil dari penjualan aset tetap	-	-	-	450	-	Proceeds from sale of fixed assets
Piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	(136.000)	-	-	Other receivables - related party
Pembayaran deviden oleh entitas anak ke KNP	-	-	-	-	(2.716)	Dividend payment by a subsidiary to NCI
Pembayaran untuk akuisisi bisnis, setelah dikurangi kas dan setara kas	-	(397.914)	(848.712)	-	-	Payment for business acquisition, net of cash and cash equivalents
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4.360.763)	(1.065.811)	(1.960.961)	(2.147.492)	(1.776.410)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Penerimaan utang jangka panjang	17 3.015.308	-	181.000	4.754.538	5.160.365	Proceeds of long-term loans
Pembayaran utang jangka panjang	17 (134.219)	(103.012)	(379.261)	(7.580.735)	(5.303.315)	Payments of long-term loans
Penarikan <i>share premium</i>	-	-	-	(2.764)	-	Share premium redemption
Pembayaran biaya pinjaman	(28.950)	(680)	(2.634)	(68.166)	(56.653)	Payments of borrowing costs
Penerimaan dari penerbitan obligasi	-	-	-	2.687.379	-	Proceeds from bonds issuance
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	-	-	-	(42.308)	-	Payments of bonds issuance costs
Pembayaran bunga obligasi	(95.033)	(85.245)	(187.803)	(86.325)	-	Payments of bonds interest
Pembayaran beban bunga	(157.194)	(149.240)	(318.080)	(453.800)	(438.001)	Interest paid
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.599.912	(338.177)	(706.778)	(792.181)	(637.604)	Net cash provided by (used in) financing activities
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(90.676)	157.236	227.758	106.892	359.709	Effects from changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalents
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	611.877	1.195.331	980.610	503.885	377.671	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/PERIODE	2.986.279	2.005.669	2.005.669	1.501.784	1.124.113	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR/PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/PERIODE	4 3.598.156	3.201.000	2.986.279	2.005.669	1.501.784	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR/PERIOD

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As of June 30, 2016 and December 31, 2015,
2014 and 2013, and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095 ("Anggaran Dasar"). Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32 tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan kewenangan Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0022828 tanggal 12 Februari 2016.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi di Indonesia. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tanggal 4 Juni 2003.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN").

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 2 dated November 8, 2002 drawn up in the presence of Hildayanti, S.H., Notary in Bandung. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights through Letter No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 dated January 3, 2003 and was published in State Gazette No. 21 dated March 14, 2003. Supplement No. 2095 ("Articles of Association"). The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 32 dated February 4, 2016, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notary in Jakarta, regarding amendment the authority of the Board of Directors of the Company to act on behalf of the Company. This amendment was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0022828 dated February 12, 2016.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities involves telecommunication supporting services in Indonesia. The Company started commercial operations on June 4, 2003.

The Company's head office is located at Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and its branch office is located at Menara BCA 53rd and 55th floors, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

The Company's ultimate parent entity is PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN").

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and December 31, 2015,
2014 and 2013, and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/ December 31, 2015
Komisaris Utama	Ario Wibisono	Ario Wibisono
Komisaris	Kenny Harjo	Kenny Harjo
Komisaris Independen	Bacellius Ruru	Bacellius Ruru
Direktur Utama	Ferdinandus Aming Santoso	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	Adam Gifari	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	Stephen Duffus Weiss	Stephen Duffus Weiss
Direktur	Rinaldy Santosa	Rinaldy Santosa
Direktur	Onggo Wijaya	Onggo Wijaya
Direktur	Carmen Birgitta Soedarmawan	Carmen Birgitta Soedarmawan
Direktur	Eko Santoso Hadiprodo	Eko Santoso Hadiprodo
Direktur Independen	Indra Gunawan	Indra Gunawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tanggal 20 November 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 7 Mei 2015, Perseroan menunjuk Aditya Masno sebagai Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tanggal 28 Februari 2014. Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/ December 31, 2015
Ketua	Bacellius Ruru	Bacellius Ruru
Anggota	Anang Yudiansyah Setiawan	Anang Yudiansyah Setiawan
Anggota	Patricia Marina Sugondo	Patricia Marina Sugondo

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 31 Mei 2013, Direksi memutuskan pengangkatan Johannes Edwin sebagai Kepala Departemen Audit Internal.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan entitas anaknya memiliki 753 karyawan tetap dan 150 karyawan kontrak (tidak diaudit) (31 Desember 2015: 742 karyawan tetap dan 199 karyawan kontrak-tidak diaudit) (31 Desember 2014: 593 karyawan tetap dan 141 karyawan kontrak-tidak diaudit) (31 Desember 2013: 533 karyawan tetap dan 158 karyawan kontrak-tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 was as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Ario Wibisono	Ario Wibisono	Kenny Harjo	President Commissioner
Kenny Harjo	Kenny Harjo	Ario Wibisono	Commissioner
Bacellius Ruru	Bacellius Ruru	Bacellius Ruru	Independent Commissioner
Adam Gifari	Adam Gifari	Adam Gifari	President Director
-	-	-	Vice President Director
-	-	-	Vice President Director
Rinaldy Santosa	Rinaldy Santosa	Steven James Mudder	Director
Onggo Wijaya	Onggo Wijaya	Rinaldy Santosa	Director
Carmen Birgitta Soedarmawan	Carmen Birgitta Soedarmawan	Onggo Wijaya	Director
-	-	-	Director
Indra Gunawan	Indra Gunawan	Indra Gunawan	Independent Director

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of June 30, 2016 is based on Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 125 dated November 20, 2015, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notary in Jakarta.

Based on the Directors' Resolutions dated May 7, 2015, the Company appointed Aditya Masno as the Company's Corporate Secretary.

The Company's Audit Committee was established on February 28, 2014. The composition of the Audit Committee was as follow:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Bacellius Ruru	Bacellius Ruru	Bacellius Ruru	Chairman
Anang Yudiansyah Setiawan	Anang Yudiansyah Setiawan	Anang Yudiansyah Setiawan	Member
Patricia Marina Sugondo	Patricia Marina Sugondo	Patricia Maeni	Member

Based on the Directors' Resolutions dated May 31, 2013, the Boards of Directors approved the appointment of Johannes Edwin as the Head of Internal Audit Department.

As of June 30, 2016, the Company and its subsidiaries employed 753 permanent employees and 150 contract employees (unaudited) (December 31, 2015: 742 permanent employees and 199 contract employees-unaudited) (December 31, 2014: 593 permanent employees and 141 contract employees-unaudited) (December 31, 2013: 533 permanent employees and 158 contract employees-unaudited).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 30 Juni 2016 dan Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Entitas anak

Kepemilikan saham Perseroan pada entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

The Company's share ownerships, directly or indirectly, in its consolidated subsidiaries are as follows:

Entitas anak/Subsidiaries	Domicile	Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership				Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations			
			30 Juni/ June 30,	31 Des./ Dec. 31,	31 Des./ Dec. 31,	2013		30 Juni/ June 30,	31 Des./ Dec. 31,	31 Des./ Dec. 31,	2013
Pemilikan langsung/Direct ownerships											
Protelindo Luxembourg S.à r.l. 100% dimiliki oleh Perseroan/100% owned by the Company	Luxembourg	Perusahaan Investasi/ Investment Company	100%	100%	100%	27 November/ November 27, 2012	1.081.727	278.404	284.182	389.129	
PT Forte Solusi Intolek 99,99% dimiliki oleh Perseroan/99,99% owned by the Company	Jakarta	Penyelenggara jaringan telap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik/Closed fixed network provider with VSAT and fiber optic	99,99%	99,99%	-	2001	588.727	546.683	-	-	
Pemilikan tidak langsung/Indirect ownerships											
Protelindo Finance B.V., 100% dimiliki oleh Protelindo Luxembourg S.à r.l./100% owned by Protelindo Luxembourg S.à r.l.	Amsterdam	Perusahaan Induk Keuangan/ Financial Holding Company	100%	100%	100%	28 November/ November 28, 2012	4.255.975	6.847.163	6.227.838	5.530.280	
Protelindo Netherlands B.V., 56% dimiliki oleh Protelindo Luxembourg S.à r.l./56% owned by Protelindo Luxembourg S.à r.l.	Amsterdam	Perusahaan Induk Keuangan/ Financial Holding Company	56%	56%	56%	28 November/ November 28, 2012	391.294	6.037.579	5.859.070	5.736.285	
Protelindo Towers B.V., 100% dimiliki oleh Protelindo Netherlands B.V./100% owned by Protelindo Netherlands B.V.	Gravenhage	Perusahaan Induk Keuangan/ Financial Holding Company	56%	56%	56%	29 November/ November 29, 2012	1.034.348	7.458.818	6.829.785	6.321.962	
PT Forte Global Internet 99,98% dimiliki oleh PT Forte Solusi Intolek/ 99,98% owned by PT Forte Solusi Intolek	Jakarta	Jasa Telekomunikasi/ Telecommunication services	99,98%	99,98%	-	1 Januari/ January 1, 2002	141.591	101.739	-	-	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

tanggal 30 Juni 2016 dan Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As of June 30, 2016 and December 31, 2015,
2014 and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Untuk memperluas bisnis sewa menara, pada bulan Desember 2012, Perseroan secara tidak langsung mendirikan dan mengakuisisi beberapa entitas anak di Luxembourg dan Belanda yaitu Protelindo Luxembourg S.à r.l., Protelindo Netherlands B.V., Protelindo Finance B.V., Protelindo Towers B.V., Antenna Mast Company (I) B.V., Antenna Mast Company (II) B.V., Antenna Mast Company (III) B.V. dan Antenna Mast Company (IV) B.V.

i. Protelindo Luxembourg S.à r.l. (sebelumnya dikenal sebagai Aither S.à r.l.) didirikan menurut hukum Grand Duchy of Luxembourg pada tanggal 4 Juni 2012 sebagai sebuah perusahaan swasta dengan kewajiban terbatas, dengan nomor registrasi B169.262. Kantor terdaftar dari Protelindo Luxembourg S.à r.l. terletak di 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Pada tanggal 27 November 2012, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Protelindo Luxembourg S.à r.l. dimana pada akhirnya Protelindo Luxembourg S.à r.l. menjadi entitas anak yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan.

ii. Protelindo Finance B.V. didirikan menurut hukum Belanda pada tanggal 28 November 2012 sebagai sebuah perusahaan swasta dengan kewajiban terbatas dan nomor registrasi dagangnya adalah 56564996. Kantor terdaftar dari Protelindo Finance B.V. terletak di Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam. Protelindo Finance B.V. dimiliki sepenuhnya oleh Protelindo Luxembourg S.à r.l.

iii. Protelindo Netherlands B.V. didirikan menurut hukum Belanda pada tanggal 28 November 2012 sebagai perusahaan swasta dengan kewajiban terbatas dan nomor registrasi dagangnya adalah 56564767. Kantor terdaftar dari Protelindo Netherlands B.V. terletak di Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam. Perseroan memiliki 56% kepemilikan saham dan hak suara secara tidak langsung di Protelindo Netherlands B.V.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

To expand its business of tower leasing, in December 2012, the Company indirectly established and acquired several subsidiaries in Luxembourg and the Netherlands, namely Protelindo Luxembourg S.à r.l., Protelindo Netherlands B.V., Protelindo Finance B.V., Protelindo Towers B.V., Antenna Mast Company (I) B.V., Antenna Mast Company (II) B.V., Antenna Mast Company (III) B.V. and Antenna Mast Company (IV) B.V.

i. Protelindo Luxembourg S.à r.l. (formerly known as Aither S.à r.l.) was incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on June 4, 2012 as a private company with limited liability and its registration number is B169.262. The registered office of Protelindo Luxembourg S.à r.l. is located at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. On November 27, 2012, the Company acquired all shares of Protelindo Luxembourg S.à r.l. as a result of which Protelindo Luxembourg S.à r.l. became a wholly owned subsidiary of the Company.

ii. Protelindo Finance B.V. was incorporated under the laws of the Netherlands on November 28, 2012 as a private company with limited liability and its trade register registration number is 56564996. The registered office of Protelindo Finance B.V. is located at Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam. Protelindo Finance B.V. is a wholly owned subsidiary of Protelindo Luxembourg S.à r.l.

iii. Protelindo Netherlands B.V. was incorporated under the laws of the Netherlands on November 28, 2012 as a private company with limited liability and its trade register registration number is 56564767. The registered office of Protelindo Netherlands B.V. is located at Teleportboulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam. The Company has an indirect capital and voting interest of 56% in Protelindo Netherlands B.V.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

- iv. Protelindo Towers B.V. didirikan menurut hukum Belanda pada tanggal 29 November 2012 sebagai sebuah perusahaan swasta dengan kewajiban terbatas dan nomor registrasi dagangnya adalah 56575890. Kantor terdaftar dari Protelindo Towers B.V. terletak di Dr. Lelykade 22, 2583 CM's-Gravenhage. Perseroan memiliki 56% kepemilikan saham dan hak suara secara tidak langsung di Protelindo Towers B.V.

Pada tanggal 19 Desember 2012, Protelindo Towers B.V. menyelesaikan akuisisi 261 menara dari KPN B.V. ("KPN"), penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Belanda dengan membeli seluruh saham Antenna Mast Company (I) B.V., Antenna Mast Company (II) B.V., Antenna Mast Company (III) B.V., dan Antenna Mast Company (IV) B.V., ("Mast Companies"). Besarnya pembayaran untuk pembelian menara adalah €75.000.000 (ditambah pajak-pajak transfer). Perseroan memiliki 56% kepemilikan saham dan hak suara secara tidak langsung terhadap setiap Mast Companies. Mast Companies didirikan menurut hukum Belanda pada tanggal 19 Desember 2012 sebagai hasil dari pengambilalihan menara melalui proses *demerger* dari KPN.

Pada tanggal 11 Februari 2013, Protelindo Towers B.V. dan Mast Companies menandatangani Akta Merger dihadapan deputy B.J. Kuck, *civil law notary* di Amsterdam. Berdasarkan Akta Merger tersebut, Mast Companies melebur dengan dan menjadi Protelindo Towers B.V., yang berlaku efektif pada tanggal 12 Februari 2013.

Berdasarkan berita acara rapat *managing board* dari Protelindo Netherlands B.V. tanggal 26 November 2014, para pemegang saham Protelindo Netherlands B.V. telah menyetujui perseroan untuk melakukan pembagian distribusi interim sebesar AS\$3.405.111 (setara Rp41.388) kepada Management Tower Europe S.à r.l. dan sebesar AS\$4.324.889 (setara Rp52.567) kepada Protelindo Luxembourg S.à r.l. yang berasal keuntungan yang bertambah dari dan sampai dengan pembagian dari distribusi interim dan/atau bagian share premium 1 dan 2, berturut-turut.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

- iv. Protelindo Towers B.V. was incorporated under the laws of the Netherlands on November 29, 2012 as a private company with limited liability and its trade register registration number is 56575890. The registered office of Protelindo Towers B.V. is located at Dr. Lelykade 22, 2583 CM's-Gravenhage. The Company has an indirect capital and voting interest of 56% in Protelindo Towers B.V.

On December 19, 2012, Protelindo Towers B.V. completed the acquisition of 261 towers from KPN B.V. ("KPN"), a leading telecommunications service provider in the Netherlands, by purchasing all of the shares of Antenna Mast Company (I) B.V., Antenna Mast Company (II) B.V., Antenna Mast Company (III) B.V., and Antenna Mast Company (IV) B.V. (the "Mast Companies"). The consideration paid for the purchase of the towers was €75,000,000 (plus transfer taxes). The Company has an indirect capital and voting interest of 56% in each of the Mast Companies. The Mast Companies were incorporated under the laws of the Netherlands on December 19, 2012 as a result of, and acquired the towers by means of, a legal *demerger* of KPN.

On February 11, 2013, Protelindo Towers B.V. and the Mast Companies executed a Deed of Merger before a deputy of B.J. Kuck, *civil law notary* in Amsterdam. Pursuant to the Deed of Merger, the Mast Companies merged with and into Protelindo Towers B.V., which became effective on February 12, 2013.

Based on minutes of the meeting of the managing board of Protelindo Netherlands B.V. on November 26, 2014, the shareholders of Protelindo Netherlands B.V. have approved the company to distribute an interim distribution in the form of cash in the amount of US\$3,405,111 (equivalent to Rp41,388) to Management Tower Europe S.à r.l. and US\$4,324,889 (equivalent to Rp52,567) to Protelindo Luxembourg S.à r.l. at the expense of profits accrued from and up to the distribution of the interim distribution and/or the share premium share 1 and 2, respectively.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Berdasarkan berita acara rapat *managing board* dari Protelindo Towers B.V. tanggal 26 November 2014, pemegang saham tunggal Protelindo Towers B.V. telah menyetujui perseroan tersebut untuk melakukan pembagian distribusi interim dalam bentuk tunai sebesar EUR596.954 (setara Rp9.052) dan AS\$7.730.000 (setara Rp93.955) kepada Protelindo Netherlands B.V. yang berasal dari cadangan *share premium* umum.

Berdasarkan keputusan manajer dari Protelindo Luxembourg S.à r.l. tanggal 11 Desember 2014, manajer Protelindo Luxembourg S.à r.l. telah menyetujui perseroan tersebut untuk melakukan pembagian distribusi interim dalam bentuk tunai sebesar AS\$4.324.888,62 (setara Rp53.478) kepada Perseroan yang berasal dari rekening *share premium*.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi strategis bagi Perseroan, pada tanggal 1 Juli 2015, Perseroan mengakuisisi 100% saham PT Iforte Solusi Infotek ("iForte") dan secara tidak langsung mengakuisisi entitas anak iForte yaitu PT Iforte Global Internet ("IGI").

Pada tanggal 10 November 2015, SMN membeli 0,01% saham iForte dari Perseroan, sehingga kepemilikan saham Perseroan dalam iForte menurun menjadi 99,99%.

iForte adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., sebagai pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997 tanggal 30 Juli 1997 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12 tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889 ("Anggaran Dasar").

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Based on minutes of the meeting of the managing board of Protelindo Towers B.V. on November 26, 2014, the sole shareholder of Protelindo Towers B.V. has approved the company to distribute an interim distribution in the form of cash in the amount of EUR596,954 (equivalent to Rp9,052) and US\$7,730,000 (equivalent to Rp93,955) to Protelindo Netherlands B.V. at the expense of general share premium reserve.

Based on written resolutions of the manager of Protelindo Luxembourg S.à r.l. on December 11, 2014, the manager of Protelindo Luxembourg S.à r.l. has approved the company to distribute an interim distribution in the form of cash in the amount of US\$4,324,888.62 (equivalent to Rp53,478) to the Company at the expense of share premium account.

To support strategic vision and mission achievement of the Company, on July 1, 2015, the Company acquired 100% ownership interest in PT Iforte Solusi Infotek ("iForte") and indirectly acquired a subsidiary of iForte namely PT Iforte Global Internet ("IGI").

On November 10, 2015, SMN purchased 0.01% iForte's shares from the Company, so that the shares ownership of the Company in iForte decreased to 99.99%.

iForte is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 174, dated May 16, 1997 drawn up in the presence of Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., as substitute of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. iForte's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997 dated July 30, 1997 and was published in State Gazette No. 12 dated February 10, 1998, Supplement No. 889 ("Articles of Association").

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM(lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Anggaran Dasar iForte telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145, tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan dan/atau penambahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Anggaran Dasar iForte, dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar iForte. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0007671.AH.01.02.TAHUN 2006 tanggal 21 April 2016 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0042299 tanggal 21 April 2016.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar iForte, ruang lingkup usaha iForte adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Obligasi Konversi

Pada tanggal 28 Juli 2010, iForte dan Karya Investment Pte. Ltd. ("Karya") menandatangani Perjanjian Pesanan Obligasi sejumlah AS\$10.000.000. Berdasarkan perjanjian tersebut, iForte akan menerbitkan obligasi dengan jumlah sebesar AS\$10.000.000 secara bertahap dengan nilai tukar sebesar Rp9.129,179 per 1 AS\$ kepada Karya.

Pada tanggal 25 Januari 2011, iForte menerbitkan obligasi konversi tanpa bunga sebesar AS\$4.500.000 (setara dengan Rp41.081) kepada Karya yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2016. Atas transaksi ini, iForte menerima pembayaran kas sebesar AS\$3.500.000 (setara dengan Rp31.952), sedangkan sisanya sebesar AS\$1.000.000 (setara dengan Rp9.129) berasal dari pelunasan dari obligasi konversi yang sudah beredar.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

iForte's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 145, dated March 28, 2016, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notary in Jakarta, regarding amendment and/or additional provisions of Article 1, Article 4, Article 5, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 14, Article 15 and Article 17 of Articles of Association of iForte, and restatement the entire Articles of Association of iForte. This amendment of the Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0007671.AH.01.02.TAHUN 2006 dated April 21, 2016, and notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-AH.01.03-0042299 dated April 21, 2016.

In accordance with Article 3 of iForte's Articles of Association, the scope of its activities involves development, trade, industry, land transportation, agriculture, printing, workshop, services except services in the field of law and taxes.

Convertible Bonds

On July 28, 2010, iForte and Karya Investment Pte. Ltd. ("Karya") entered into a Bond Subscription Agreement in the amount of US\$10,000,000. Based on this agreement, iForte will issue bonds with a total amount of US\$10,000,000 in stages with a fixed exchange rate of IDR9,129.179 for 1 US\$ to Karya.

On January 25, 2011, iForte issued US\$4,500,000 (equivalent to IDR41,081) non-interest bearing convertible bonds to Karya with maturity date on January 25, 2016. On this transaction, iForte received a payment of US\$3,500,000 (equivalent to IDR31,952), whereby the remaining balance of US\$1,000,000 (equivalent to IDR9,129) was from the redemption of the outstanding convertible bonds.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Obligasi Konversi (lanjutan)

Pada tanggal 19 Juli 2011, Karya dan Iris Venture Pte Ltd ("Iris") menandatangani Perjanjian Pengalihan. Berdasarkan perjanjian ini, Karya menjual obligasi konversi dengan jumlah sebesar AS\$10.000.000 (setara dengan Rp91.291) kepada Iris.

Pada tanggal 28 Juli 2011, iForte menerbitkan obligasi konversi tanpa bunga sebesar AS\$2.000.000 (setara dengan Rp18.258) kepada Iris yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2016.

Pada tanggal 12 Agustus 2011, iForte menerbitkan obligasi konversi tanpa bunga sebesar AS\$3.500.000 (setara dengan Rp31.952) kepada Iris yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2016.

Pada tanggal 1 Mei 2012, Iris dan Trifecta Investments Ltd ("Trifecta") menandatangani Perjanjian Pengalihan. Berdasarkan perjanjian ini, Iris menjual obligasi konversi dengan jumlah sebesar AS\$10.000.000 (setara dengan Rp91.291) kepada Trifecta.

Pada tanggal 12 Mei 2015, Trifecta dan Perseroan menandatangani Perjanjian Pengalihan sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 1 Juli 2015 ("Perjanjian"). Berdasarkan Perjanjian tersebut, Trifecta menjual obligasi konversi dengan jumlah sebesar AS\$10.000.000 (setara dengan Rp91.291) kepada Perseroan.

Pada tanggal 26 Agustus 2016, Perseroan dan iForte sudah memperpanjang tanggal jatuh tempo obligasi konversi sampai dengan 31 Juli 2017.

Waran Konversi

Pada tanggal 28 Juli 2010, iForte dan Karya menandatangani Perjanjian Penerbitan Waran sejumlah 41.556. Berdasarkan perjanjian tersebut, iForte akan menerbitkan 41.556 waran dengan jumlah sebesar AS\$540,83 (setara dengan Rp4) (nilai tukar Rp9.129.179 per 1 AS\$) kepada Karya.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Convertible Bonds (continued)

On July 19, 2011, Karya and Iris Venture Pte Ltd ("Iris") entered into an Assignment Agreement. Based on this agreement, Karya sold convertible bonds with a total amount of US\$10,000,000 (equivalent to IDR91,291) to Iris.

On July 28, 2011, iForte issued US\$2,000,000 (equivalent to IDR18,258) non-interest bearing convertible bonds to Iris with maturity date on July 27, 2016.

On August 12, 2011, iForte issued US\$3,500,000 (equivalent to IDR31,952) non-interest bearing convertible bonds to Iris with maturity date on August 11, 2016.

On May 1, 2012, Iris and Trifecta Investments Ltd ("Trifecta") entered into an Assignment Agreement. Based on this agreement, Iris sold convertible bonds with a total amount of US\$10,000,000 (equivalent to IDR91,291) to Trifecta.

On May 12, 2015, Trifecta and the Company entered into an Assignment Agreement as amended by an Amendment Agreement dated July 1, 2015 ("Agreement"). Based on the Agreement, Trifecta sold convertible bonds with a total amount of US\$10,000,000 (equivalent to IDR91,291) to the Company.

On August 26, 2016, the Company and iForte extended the new maturity date of the convertible bonds until July 31, 2017.

Convertible Warrants

On July 28, 2010, iForte and Karya entered into a Warrant Issuance Agreement. Based on this agreement, iForte will issue 41,556 warrants with a total amount of AS\$540.83 (equivalent to IDR4) (with a fixed exchange rate of IDR9,129,179 per 1 US\$) to Karya.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Waran Konversi (lanjutan)

Pada tanggal 25 Januari 2011, iForte menerbitkan 12.897 waran konversi dengan jumlah sebesar AS\$348,92 (setara dengan Rp3) kepada Karya.

Pada tanggal 19 Juli 2011, Karya dan Iris menandatangani Perjanjian Pengalihan. Berdasarkan perjanjian ini, Karya menjual 41.556 waran konversi dengan jumlah sebesar AS\$540,83 (setara dengan Rp4) kepada Iris.

Pada tanggal 25 Juli 2011, iForte menerbitkan 28.659 waran konversi dengan jumlah sebesar AS\$191,91 (setara dengan Rp1) kepada Karya.

Pada tanggal 1 Mei 2012, Iris dan Trifecta menandatangani Perjanjian Pengalihan. Berdasarkan perjanjian ini, Iris menjual 41.556 waran konversi dengan jumlah sebesar AS\$540,83 (setara dengan Rp4) kepada Trifecta.

Pada tanggal 12 Mei 2015, Trifecta dan Perseroan menandatangani Perjanjian Pengalihan sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 1 Juli 2015 ("Perjanjian"). Berdasarkan Perjanjian, Trifecta menjual 41.556 waran konversi dengan jumlah sebesar AS\$540,83 (setara dengan Rp4) kepada Perseroan.

Kantor iForte berlokasi di Menara BCA lantai 41, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Convertible Warrants (continued)

On January 25, 2011, iForte issued 12,897 convertible warrants with a total amount of US\$348.92 (equivalent to IDR3) to Karya.

On July 19, 2011, Karya and Iris entered into an Assignment Agreement. Based on this agreement, Karya sold 41,556 convertible warrants with a total amount of US\$540.83 (equivalent to IDR4) to Iris.

On July 25, 2011, iForte issued 28,659 convertible warrants with a total amount of US\$191.91 (equivalent to IDR1) to Karya.

On May 1, 2012, Iris and Trifecta entered into an Assignment Agreement. Based on this agreement, Iris sold 41,556 convertible warrants with a total amount of US\$540.83 (equivalent to IDR4) to Trifecta.

On May 12, 2015, Trifecta and the Company entered into an Assignment Agreement as amended by an Amendment Agreement dated July 1, 2015 ("Agreement"). Based on the Agreement, Trifecta sold 41,556 convertible warrants with a total amount of US\$540.83 (equivalent to IDR4) to the Company.

iForte's office is located at Menara BCA 41st floor Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

IGI adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 276, tanggal 21 November 1997, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Surat Keputusan No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 tanggal 13 Maret 2000 ("Anggaran Dasar"). Anggaran Dasar IGI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 234 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-0000425.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 12 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0001829.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 12 Januari 2015.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar IGI, ruang lingkup usaha IGI adalah berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi di Indonesia.

Kantor IGI berlokasi di Menara BCA lantai 41, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

IGI is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 276, dated November 21, 1997 drawn up in the presence of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. IGI's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Legislation through Letter No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 dated March 13, 2000 ("Articles of Association"). IGI's Articles of Association have been amended several times; the latest amendment was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolutions, No. 234 dated December 18, 2014, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta, regarding the increase of authorized, issued and paid-up capital. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0000425.AH.01.02.TAHUN 2015 dated January 12, 2015 and notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0001829.AH.01.03.TAHUN 2015 dated January 12, 2015.

In accordance with Article 3 of IGI's Articles of Association, the scope of its activities involves telecommunication services in Indonesia.

IGI's office is located at Menara BCA 41st floor, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta pedoman dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012.

Selain itu, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas menara telekomunikasi (Catatan 44).

Nilai wajar properti investasi dinilai dengan mempertimbangkan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK revisi ini mengatur pengelompokan pos-pos yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Pos-pos dalam Penghasilan komprehensif lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK") comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the regulations and the guidelines on financial statements and disclosures issued by BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012.

In addition, the Company and its subsidiaries comply with Indonesia Financial Service Authority (OJK) Circular concerning telecommunication asset towers (Note 44).

The fair values of investment properties were appraised taking into consideration the regulation of Bapepam-LK No. VIII.C.4 regarding the guidelines of appraisal and presentation of property appraisal report to capitals market.

The significant accounting policies were applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 and December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The Company and its subsidiaries adopted PSAK No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements". The revised PSAK prescribes of items presented in Other Comprehensive Income (OCI). Items under OCI should be presented separately between items to be reclassified to profit or loss and items not to be reclassified to profit or loss. The adoption of this revised PSAK has no significant impact on the financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada setiap entitas Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2016, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK baru dan revisi yang efektif pada tahun 2016. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya telah diterapkan seperti yang disyaratkan dan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for the consolidated statements of cash flows and certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the financial statements of each of the Company's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

Changes in accounting policies

As of January 1 2016, the Company and its subsidiaries have applied the new and revised PSAK which are effective in 2016. The changes in the Company and its subsidiaries' accounting policies have been applied as required and according to the transition policy on each standard and interpretation.

The following are new standard, changes of standard and interpretation of standard issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") and effective for period starting on or after January 1, 2016.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19, "Aset Takberwujud", bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan Aset Tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.
- Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. Amandemen ini meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi. Penyesuaian ini mengklarifikasi: Entitas mengungkapkan pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK No. 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat mengenai segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi, dan pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

**Changes in accounting policies
(continued)**

- Amendment to PSAK No. 16: Property, Plant and Equipment on the Clarification of the Acceptable Methods of Depreciation and Amortization. The amendment clarifies the principle in PSAK No. 16 and PSAK No. 19, "Intangible Asset", that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue based method cannot be used to depreciate the Property, Plant and Equipment.
- Amendment to PSAK No. 24: Employee Benefits on Defined Benefit Plans: Employee Contributions. The amendment requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, they should be attributed to periods of service as a negative benefit. This amendment clarifies that, if the amount of the contributions is independent of the number of years of service, an entity is permitted to recognize such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.
- PSAK No. 5 (2015 Improvement): Operating Segments. The improvement clarifies that: An entity must disclose the judgements made by management in applying the aggregation criteria in paragraph 12 of PSAK No. 5 including a brief description of operating segments that have been aggregated and the economic characteristics, and disclose the reconciliation of segment assets to total assets if the reconciliation is reported to the chief operating decision maker, similar to the required disclosure for segment liabilities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): Properti Investasi. PSAK ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK No. 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Selanjutnya apabila entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Selanjutnya apabila entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

**Changes in accounting policies
(continued)**

- PSAK No. 13 (Adjustment 2015): Investment Property. The PSAK provides clarification that PSAK No. 13 and PSAK No. 22 are interrelated. An entity may refer to PSAK No. 13 to determine whether or not property is investment property or owner-occupied property. Entity may also refer to PSAK No. 22 to determine whether or not the acquisition of investment property is a business combination.
- PSAK No. 16 (2015 Improvement): Property, Plant and Equipment. The improvement clarifies that in PSAK No. 16 and PSAK No. 19, the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, when an entity uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated to its revalued amount.
- PSAK No. 19 (2015 Improvement): Intangible Assets. The improvement clarifies that in PSAK No. 16 and PSAK No. 19, the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, when an entity uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated to its revalued amount.
- PSAK No. 25 (2015 Improvement): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. The improvement provides editorial correction for paragraph 27 of PSAK No. 25.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK No. 68 dapat diterapkan tidak hanya pada kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Standar akuntansi tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan dan entitas anaknya, kecuali dinyatakan lain.

Pengendalian didapat ketika Perseroan terekspos atau memiliki hal atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Perseroan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*)
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee*
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor

Ketika Perseroan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Perseroan dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

- PSAK No. 68 (2015 Improvement): Fair Value Measurement. The improvement clarifies that the portfolio exception in PSAK No. 68 can be applied not only to financial assets and financial liabilities, but also to other contracts within the scope of PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Those accounting standards have no significant impact to the consolidated financial statements of the Company.

b. Principles of consolidation

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Company and its subsidiaries, unless otherwise stated.

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*.

Specifically, the Company controls an *investee* if and only if the Company has:

- Power over the *investee* (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the *investee*)
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*, and
- The ability to use its power over the *investee* to affect its returns

When the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an *investee*, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain
- Hak suara dan hak suara potensial Perseroan

Perseroan menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perseroan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dari tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perseroan dan pada kepentingan non pengendali, walaupun hasil di kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perseroan akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perseroan dan entitas anaknya:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

- The contractual arrangement with the other vote holders of the investee
- Rights arising from other contractual arrangements
- The Company's voting rights and potential voting rights

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the interim consolidated statement of comprehensive income from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relating to transactions between members of the Company are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. In case of loss of control over a subsidiary, the Company and its subsidiaries:

- derecognize the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
- derecognize the carrying amount of any NCI;
- derecognize the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Perseroan akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar maupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan dan entitas anaknya mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

- recognize the fair value of the consideration received;
- recognize the fair value of any investment retained;
- recognize any surplus or deficit in profit or loss; and
- reclassify the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities.

c. Business Combination

Business combination is recorded by using the acquisition method. Cost from acquisition is measured at the sum value of the consideration transferred, measured at fair value at the acquisition date, and the amount of each NCI on acquired parties. For each business combination, the acquirer measures the NCI on the acquired entity either at fair value or the proportion of NCI's ownership of net identifiable assets of the acquired entity. Costs incurred in respect of acquisition charged directly and included in administrative expenses.

When the Company and its subsidiaries acquire a business, it assesses the financial assets and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

Contingent consideration transferred by the acquirer is recognized at fair value on the acquisition date.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perseroan dan entitas anaknya yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Business Combination (continued)

Change in fair value of contingent consideration after the acquisition date, which is classified as an asset or liability, will be recognized in profit or loss or other comprehensive income in accordance with PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement". If classified as equity, contingent consideration is not measured again until the next settlement accounted in equity.

At the date of acquisition, goodwill is initially measured at cost which represents the excess of the sum value of the consideration transferred and the amount of any difference in the number of NCI on the acquired identifiable assets and liabilities acquired. If the compensations are less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired from a business combination, since the date of the acquisition is allocated to each Cash Generating Unit ("CGU") of the Company and its subsidiaries which is expected to benefit from the synergy of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired CGU is set up.

If goodwill has been allocated to CGU and specific operation on CGU is discontinued, the goodwill associated with discontinued operations are included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. The goodwill disposal is measured based on the relative value of discontinued operations and the portion retained CGU.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with related parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint venture of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan memperoleh jasa personil manajemen kunci dari perusahaan profesional. Jumlah yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk penyediaan jasa personil manajemen kunci oleh perusahaan profesional dan jumlah saldo diungkapkan dalam Catatan 37.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan atau pembelian dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first-in, first-out* (FIFO). Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anaknya menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

g. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Transactions with related parties
(continued)**

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

The Company obtains key management personnel services from professional firms. The amounts incurred by the Company for the provision of key management personnel services that are provided by those professional firms and any outstanding balances are disclosed in Note 37.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placement and not restricted as to use.

f. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined based on first-in, first-out (FIFO) method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries provide a provision for inventory obsolescence based on a review of the usability of inventories at the end of the year.

g. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Sewa (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai lessee

- i) Dalam sewa pembiayaan, Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa. Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Biaya keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset sewa pembiayaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa pembiayaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan dan entitas anaknya akan mendapatkan hak kepemilikan aset pada akhir masa sewa.
- ii) Dalam sewa operasi, Perseroan dan entitas anaknya mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as lessee

- i) Under a finance lease, the Company and its subsidiaries are required to recognize assets and liabilities in its consolidated statements of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are required to be apportioned between finance charges and the reduction of the outstanding liability. The finance charges are required to be allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are required to be charged as expenses in the periods in which they are incurred. Finance charges are reflected in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Capitalized leased assets (presented as part of fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership of the asset by the end of the lease term.
- ii) Under an operating lease, the Company and its subsidiaries recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Sewa (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai lessor

- i) Dalam sewa pembiayaan Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan sewa pembiayaan. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih Perseroan dan entitas anaknya sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.
- ii) Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi (Catatan 2m). Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as lessors

- i) Under finance lease, the Company and its subsidiaries are required to recognize assets held under a finance lease in its consolidated statement of financial position and present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as repayments of principal and finance lease income. The recognition of finance lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company and its subsidiaries net investments in the finance lease.
- ii) The Company and its subsidiaries are required to present assets subject to operating leases in its consolidated statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as operating rental income (Note 2m). Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the periods in which they are earned. Lease income from operating leases is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Aset tetap dan penyusutan

Perseroan dan entitas anaknya telah memilih model biaya untuk aset tetap.

Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ Years	
Mesin	8	<i>Machinery</i>
Peralatan kantor	4-8	<i>Office equipment</i>
Kendaraan bermotor	8	<i>Motor vehicles</i>
Peralatan proyek	4-25	<i>Field equipment</i>
Perabotan kantor	3-5	<i>Furniture and fixtures</i>

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Fixed assets and depreciation

The Company and its subsidiaries have chosen the cost model for fixed assets.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are satisfied. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in consolidated profit or loss as incurred.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

Land is stated at cost and is not depreciated.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial period.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah siap dipakai.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

i. Properti investasi

Properti investasi awalnya diukur pada harga perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi dinyatakan sebesar nilai wajar, yang mencerminkan kondisi pasar pada tanggal pelaporan. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi termasuk dalam laporan laba rugi pada periode di mana mereka muncul, termasuk pengaruh pajak. Nilai wajar ditentukan berdasarkan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui dan didukung oleh bukti pasar.

Properti investasi adalah tanah atau bangunan (termasuk menara) atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perseroan dan entitas anak untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Fixed assets and depreciation (continued)

Construction in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs up to the date when the asset is complete and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been made ready for use.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price and value in use.

i. Investments properties

Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at fair value, which reflects market conditions at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in profit or loss in the period in which they arise, including the corresponding tax effect. Fair values are determined based on an annual evaluation performed by a qualified and authorized independent appraiser and supported by the market evidence.

Investment property is land or buildings (including towers) or part of a building or both which is controlled by the Company and subsidiaries to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use or sale in the ordinary course of business.

The investment property shall be derecognized in the consolidated statements of financial position on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from their disposal. Gains or losses from investment property withdrawals or disposals are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Properti investasi (lanjutan)

Transfer ke (atau dari) properti investasi hanya ketika ada perubahan penggunaan. Untuk transfer dari properti investasi ke pemilik-properti yang dimiliki, biaya perolehan berikutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang dimiliki menjadi properti investasi, Perseroan dan entitas anak mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan tanggal perubahan penggunaan.

Nilai kini dari biaya yang diharapkan untuk pembongkaran suatu aset setelah penggunaannya termasuk dalam biaya aset yang bersangkutan jika kriteria pengakuan untuk ketentuan terpenuhi. Jika efek dari nilai waktu dari uang material, provisi untuk pembongkaran didiskontokan menggunakan tarif sebelum pajak saat ini yang mencerminkan, jika sesuai, risiko spesifik untuk liabilitas. Ketika diskonto digunakan, peningkatan penyisihan pembongkaran karena berlalunya waktu diakui sebagai bagian dari biaya keuangan. Estimasi biaya masa depan atas pembongkaran ditinjau setiap tahun dan disesuaikan sewajarnya. Perubahan estimasi biaya masa depan, atau di tingkat diskonto yang diterapkan, ditambahkan atau dikurangi dari biaya aset.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu, aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perseroan dan entitas anaknya membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Investments properties (continued)

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Company and its subsidiaries accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

The present value of the expected cost for the dismantling of an asset after its use is included in the cost of the respective asset if the recognition criteria for a provision are met. If the effect of the time value of money is material, provisions for dismantling are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision for dismantling due to the passage of time is recognized as part of finance cost. The estimated future costs of dismantling are reviewed annually and adjusted as appropriate. Changes in the estimated future costs, or in the discount rate applied, are added to or deducted from the cost of the asset.

j. Impairment of non-financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each end of reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and its subsidiaries make formal estimate of the asset's recoverable amount.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**j. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya, kecuali menara yang sebelumnya direvaluasi diakui pada penghasilan komprehensif lainnya. Dalam kasus ini, penurunan ini juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai dengan jumlah revaluasi sebelumnya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika keadaan yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai tercatat. Penurunan nilai *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat setiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Ketika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**j. Impairment of non-financial assets
(continued)**

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations are recognized in consolidated statement of comprehensive income as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset, except for tower revalued when the revaluation was taken to other comprehensive income. In this case, the impairment is also recognised in other comprehensive income up to the amount of any previous revaluation.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognised. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Liabilitas imbalan kerja

Perseroan dan entitas anaknya mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Liabilitas tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial dengan metode "Projected Unit Credit".

Sebelum 1 Januari 2015, Perseroan dan entitas anaknya mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial tersebut diakui menggunakan metode garis lurus selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan (*corridor method*).

Efektif 1 Januari 2015, Perseroan telah menerapkan secara prospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

PSAK ini menetapkan antara lain, (i) menghapuskan "corridor approach" yang digunakan dalam PSAK sebelumnya dan (ii) perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca-kerja yang antara lain sebagai berikut:

- Keuntungan dan kerugian aktuarial saat ini diharuskan untuk diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan secara permanen dari laba atau rugi.
- Keuntungan yang diharapkan atas plan assets tidak lagi diakui dalam laba atau rugi. Keuntungan yang diharapkan digantikan dengan mengakui pendapatan bunga (atau beban) atas program manfaat pasti bersih (atau liabilitas) dalam laba atau rugi, yang dihitung menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pensiun.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Employee benefits liabilities

The Company and its subsidiaries made long-term employee benefits liabilities in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The liabilities are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Prior to January 1, 2015, the Company and its subsidiaries recognized actuarial gains and losses as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% the greater of the defined benefit obligation and plan assets at that date. These gains or losses are recognized on a straight line basis over the expected average remaining working lives of the employees (*corridor method*).

Effective January 1, 2015, the Company has prospectively adopted PSAK No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits".

This PSAK provides, among others, (i) the elimination of the "corridor approach" permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:

- Actuarial gains and losses are now required to be recognized in other comprehensive income and excluded permanently from profit or loss.
- Expected return on plan assets will no longer be recognized in profit or loss. Expected returns are replaced by recognizing interest income (or expense) on the net defined benefit asset (or liability) in profit or loss, which is calculated using the discount rate used to measure the pension obligation.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

- Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan tidak bisa lagi ditangguhkan dan diakui periode mendatang. Semua biaya jasa lalu akan diakui lebih awal ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi atau biaya pemutusan terkait.

Penerapan PSAK ini tidak dilakukan secara retrospektif dikarenakan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

l. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional entitas induk. Setiap entitas anak menentukan mata uang fungsional dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada setiap entitas diukur dengan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing yang pada awal pengakuan dicatat oleh Perseroan dan entitas anaknya dengan mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode kini.

Transaksi-transaksi non-moneter dalam mata uang asing yang diukur dengan metode biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Transaksi-transaksi non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal penentuan nilai wajar tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Employee benefits liabilities (continued)

- *Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs or when the Company recognizes related restructuring or termination costs.*

The adoption of this PSAK was not applied retrospectively, since the effect to consolidated financial statements is not material.

l. Foreign currency transactions and balances

The Company's consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is also the parent company's functional currency. Each subsidiary determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Company and its subsidiaries at their respective functional currency rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**l. Transaksi dan saldo dalam mata uang
asing (lanjutan)**

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laba rugi periode berjalan, kecuali keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari aset keuangan dalam mata uang asing yang merupakan lindung nilai atas komitmen pengeluaran modal. Keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui dalam ekuitas hingga pengakuan atas aset tersebut, pada saat itu keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset.

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas operasi luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan dan akun-akun laba rugi dijabarkan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Selisih kurs yang timbul atas penjabaran tersebut diakui pada penghasilan komprehensif lainnya.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016 (angka penuh)/ (full amount)	31 Desember/December 31,		
		2015 (angka penuh)/ (full amount)	2014 (angka penuh)/ (full amount)	2013 (angka penuh)/ (full amount)
Rupiah/1 Dolar AS	13.180	13.795	12.440	12.189
Rupiah/1 EUR	14.651	15.070	15.133	16.821
Rupiah/1 SGD	9.771	9.751	9.422	9.628

m. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari sewa operasi diakui pada saat diperoleh.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**l. Foreign currency transactions and
balances (continued)**

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period's profit or loss, with the exception of exchange differences on foreign currency financial assets that provide a hedge against capital expenditure commitment. These are recognized directly to equity until the recognition of the assets, at which time they are recognized as part of the assets acquisition costs.

For consolidation purpose, the assets and liabilities of foreign operations are translated into Rupiah at the rate of exchange prevailing at the reporting date and their income statements are translated at exchange rates prevailing at the dates of the transactions. The exchange differences arising on the translation are recognized in other comprehensive income.

The exchange rates used as of June 30, 2016, and December 31, 2015, 2014 and 2013 were as follows:

m. Revenue and expense recognition

Rental income is recognized when earned.

Expenses are recognized as incurred.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

Pendapatan bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset dan liabilitas keuangan.

n. Perpajakan

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Amandemen terhadap PSAK No. 46 (Revisi 2014) menghapuskan referensi terhadap pajak final yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup standar, dan menetapkan praduga perdebatan bahwa jumlah tercatat properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK No. 13, Properti Investasi, akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan tanah, penghasilan sewa tanah dan jasa rekayasa dan konstruksi sebagai pos tersendiri.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Revenue and expense recognition
(continued)**

Interest income

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

n. Taxation

The Company and its subsidiaries applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes". The revised PSAK prescribes the accounting treatment for income taxes.

The amendments to PSAK No. 46 (Revised 2014) remove references to final tax which was previously scoped in the standard and establish a rebuttable presumption that the carrying amount of an investment property measured using the fair value model in PSAK No. 13, Investment Property, will be recovered entirely through sale.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Company and its subsidiaries have decided to present all of the final tax arising from sales of land, land rent revenue and engineering and construction services as separate line item.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Perpajakan (lanjutan)

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Perseroan dan entitas anaknya juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Taxation (continued)

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Company and its subsidiaries also presented interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal *goodwill* (untuk liabilitas pajak tangguhan) atau aset atau kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan, pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba komersial maupun laba atau rugi fiskal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries reassess unrecognized deferred tax assets. The Company and its subsidiaries recognize a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except when the deferred tax asset and liability arises from the initial recognition of goodwill (for deferred tax liability) or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan entitas anaknya yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan entitas anaknya dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

p. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap atas perubahan kurs untuk melindungi risiko atas fluktuasi kurs.

Instrumen keuangan derivatif diakui baik sebagai aset maupun liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dicatat pada nilai wajar.

Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif itu terjadi dan setelah itu diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif diakui sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif sedangkan jika negatif diakui sebagai liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama periode berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif harus dibebankan dalam laba rugi.

Nilai wajar atas kontrak swap perubahan kurs ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar atas instrumen sejenis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Operating segments

A segment is a distinguishable component of the Company and its subsidiaries that is engaged either in providing certain products and services (business segment) or in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subjected to risks and rewards that are different from those in other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intra-company and its subsidiaries balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

p. Derivative financial instruments and hedge accounting

The Company and its subsidiaries use derivative financial instruments such as cross currency swaps to hedge its currency risks.

Derivative financial instruments are recognized as either assets or liabilities in the consolidated statements of financial position and are carried at fair value.

Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives during the period that do not qualify for hedge accounting and the ineffective portion of an effective hedge are recognized directly in profit or loss.

The fair value of cross currency swap contracts is determined by reference to market values for similar instruments.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**p. Instrumen keuangan derivatif dan
akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Pada saat dimulainya lindung nilai, Peseroan dan entitas anaknya melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

Lindung nilai atas arus kas

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas, sementara itu bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laba rugi.

Jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke laba rugi Perseroan dan entitas anaknya ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laba rugi, misalnya pada saat pendapatan atau beban keuangan lindung nilai tersebut diakui atau pada saat prakiraan penjualan terjadi. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non keuangan atau liabilitas non keuangan, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau liabilitas non keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

At the inception of a hedge relationship, the Company and its subsidiaries formally designate and document the hedge relationship to which the Company and its subsidiaries wish to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess the hedging instrument's effectiveness in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieve offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that they actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which they were designated.

Cash flow hedges

The effective portion of gains or losses on hedging instrument is recognized directly in equity, while any ineffective portion is recognized immediately in profit or loss.

Amounts recognized in equity are transferred to the Company and its subsidiaries' profit or loss when the hedged transaction affects profit or loss, such as when the hedged financial income or financial expense is recognized or when a forecast sale occurs. Where the hedged item is the cost of a non-financial asset or a non-financial liability, the amounts recognized in equity are transferred to the initial carrying amount of the non-financial asset or liability.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**p. Instrumen keuangan derivatif dan
akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus dipindahkan ke dalam laba rugi. Jika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai untuk dibatalkan maka jumlah yang diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut terjadi.

q. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing berjumlah 3.322.620.187 saham.

r. Instrumen keuangan

i. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar dalam laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

If the forecast transaction or firm commitment is no longer expected to occur, amounts previously recognized in equity are transferred to profit or loss. If the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or roll-over, or if its designation as a hedge is revoked, amounts previously recognized in equity remain in equity until the forecast transaction or firm commitment affects profit or loss.

q. Earning per share

Net income per share is computed by dividing net income for the year/period attributable to the owner of the company by the weighted average number of shares outstanding during the period. The weighted average number of shares outstanding for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015, and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 was 3,322,620,187 shares, respectively.

r. Financial instruments

i. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company and its subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition.

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan seperti contohnya tanggal pada saat Perseroan dan entitas anaknya berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan Perseroan dan entitas anaknya terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan yang termasuk dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

*Initial recognition and measurement
(continued)*

All regular way purchases and sales of financial assets are recognized or derecognized on the trade date, i.e., the date that the Company and its subsidiaries commit to purchase or sell the asset. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market place concerned.

The Company and its subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate this designation at each end of financial period.

The Company and its subsidiaries' financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and other non-current assets - deposits which fall under the loans and receivables category.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (2) Perseroan dan entitas anaknya memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Perseroan dan entitas anaknya secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Perseroan dan entitas anaknya secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat awal atas aset dan jumlah maksimum pertimbangan yang dapat diperlukan oleh Perseroan dan entitas anaknya untuk membayar.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company and its subsidiaries have transferred its rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Company and its subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company and its subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company and its subsidiaries could be required to repay.

Impairment of financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan dan entitas anaknya terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan dan entitas anaknya menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company and its subsidiaries first assess whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company and its subsidiaries determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perseroan dan entitas anaknya. Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba atau rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company and its subsidiaries. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company and its subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya terdiri dari utang pembangunan menara dan lainnya, utang lain-lain - pihak ketiga, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, beban akrual, utang obligasi dan utang jangka panjang yang termasuk dalam kategori liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas juga terdiri dari utang swap valuta asing diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

Utang swap valuta asing selanjutnya diukur dengan nilai wajar (Catatan 2p).

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

*Initial recognition and measurement
(continued)*

The Company and its subsidiaries' financial liabilities include tower construction and other payables, other payables, short-term employee benefit liabilities, accrued expenses, bonds payable and long-term loans which falls under financial liabilities measured at amortized cost category.

The Company and its subsidiaries' financial liabilities also include cross currency swap payable which is classified under financial liabilities of fair value through profit or loss category.

Subsequent measurement

Subsequent to initial recognition, all financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized as well as through the effective interest method amortization process. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or transaction costs that are an integral part of the effective interest rate amortization.

Cross currency swaps payables are subsequently measured at fair value (Note 2p).

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

iii. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv. Fair value of financial instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**iv. Nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)**

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perseroan dan entitas anaknya harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**iv. Fair value of financial instruments
(continued)**

- *In the principal market for the asset or liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company and its subsidiaries.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**iv. Nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)**

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
- Level 2 - input selain harga kuotasian uang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
- Level 3 - input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Perseroan dan entitas anaknya menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir tahun pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

s. Provisi

Provisi diakui jika Perseroan dan entitas anaknya memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**iv. Fair value of financial instruments
(continued)**

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company and its subsidiaries determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company and its subsidiaries have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

s. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Provisi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

t. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. *Goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan. Keuntungan dan kerugian pelepasan entitas mencakup jumlah tercatat *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

Goodwill dialokasikan pada unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana *goodwill* tersebut timbul.

u. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari hubungan pelanggan yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 2 sampai 15 tahun.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Provisions (continued)

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

t. Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Company's share of the net identifiable assets of the acquired subsidiary at the date of acquisition. Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose.

u. Intangible assets

Intangible assets consisting of customer relationship acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Customer relationship have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of customer relationship over their estimated useful lives of 2 to 15 years.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 2r.

Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan dan entitas anaknya mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan dan entitas anaknya.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.

3. JUDGMENTS AND ESTIMATION

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company and its subsidiaries accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and its subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2r.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company and its subsidiaries evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company and its subsidiaries use judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company and its subsidiaries expected to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of accounts receivable. Further details are shown in Note 5.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anaknya merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Perseroan dan entitas anaknya, mata uang fungsional Perseroan adalah dalam Rupiah, Protelindo Finance B.V. mata uang fungsionalnya adalah Dolar AS sedangkan entitas anak lainnya yang berdomisili di Belanda dan Luxembourg mata uang fungsionalnya adalah Euro.

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai Goodwill

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perseroan dan entitas anaknya menimbulkan *goodwill*. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Nilai tercatat *goodwill* Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp333.737 (31 Desember 2015 adalah Rp363.150, 31 Desember 2014: Rp186.883, 31 Desember 2013: Rp207.730). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. *Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Sewa

Perseroan dan entitas anaknya menyewakan menara berdasarkan perjanjian sewa operasi, dengan sewa yang dinegosiasikan dalam jangka waktu tertentu. Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari syarat dan ketentuan dari perjanjian, bahwa tidak terjadi perpindahan atas semua risiko yang signifikan dan hak kepemilikan menara yang disewakan atas sewa operasi.

3. JUDGMENTS AND ESTIMATION (continued)

Judgments (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Company and its subsidiaries are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company and its subsidiaries management assessment, Protelindo's functional currency is in Rupiah, Functional currency for Protelindo Finance B.V. is US Dollar while functional currency for other subsidiaries domiciled in Netherland and Luxembourg are Euro.

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Company and its subsidiaries have resulted in goodwill. Under PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' goodwill as of June 30, 2016 is Rp333,737 (December 31, 2015 was Rp363,150, December 31, 2014: Rp186,883, December 31, 2013: Rp207,730). Further details are disclosed in Note 11.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill, such assets are subjected to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired, management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

Leases

The Company and its subsidiaries lease their towers under an operating lease arrangement, with the lease negotiated for a specific terms. The Company and its subsidiaries have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of the towers which are leased out on operating leases.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan entitas anaknya mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2k. Sementara Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal-tanggal pelaporan telah diungkapkan dalam Catatan 22.

3. JUDGMENTS AND ESTIMATION (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company and its subsidiaries based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Employee Benefits

The determination of the Company and its subsidiaries' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2k. While the Company and its subsidiaries' believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and its subsidiaries' actual experiences or significant changes in the Company and its subsidiaries' assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the Company and its subsidiaries' estimated employee benefits liability at reporting dates are disclosed in Note 22.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan dan entitas anaknya menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20.

Instrumen Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan dari pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan dan entitas anaknya menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perseroan dan entitas anaknya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 41.

3. JUDGMENTS AND ESTIMATION (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 25 years. These are common life expectations applied in the industries where the Company and its subsidiaries conduct its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 9.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 20.

Financial Instruments

The Company and its subsidiaries carry certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair value would differ if the Company and its subsidiaries utilized different valuation methodology. Any changes in a fair value of these financial assets and liabilities would directly affect the Company and its subsidiaries' profit or loss. Further details are disclosed in Note 41.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20e.

Nilai Wajar Properti Investasi

Perseroan menerima penilaian yang dilakukan oleh penilai independen untuk menetapkan nilai wajar properti investasi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan asumsi yang mencakup pendapatan sewa di masa depan, biaya pemeliharaan yang diantisipasi, biaya pengembangan di masa depan, dan tingkat suku bunga diskon yang sesuai. Penilai juga membuat referensi terhadap bukti pasar harga transaksi properti yang serupa.

Nilai properti investasi - menara Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai dan perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material nilai properti investasi - menara yang direvaluasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

3. JUDGMENTS AND ESTIMATION (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 20e.

Fair Value of Investment Property

The Company obtains valuations performed by an independent appraiser in order to determine the fair value of its investment property. These valuations are based upon assumptions including future rental income, anticipated maintenance costs, future development costs and the appropriate discount rate. The valuers also make reference to market evidence of transaction prices for similar properties.

The value of Company's investment property-towers revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Company's assumptions may materially affect the valuation of its investment property - towers. Further details are disclosed in Note 10.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi biaya pembongkaran properti investasi

Perseroan dan entitas anak melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran properti investasi pada akhir periode laporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

4. KAS DAN SETARA KAS

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Kas	2.908	2.381	2.222	2.081
Rekening giro				
Bank - pihak ketiga				
Rupiah:				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	30.957	9.900	20.657	21.288
PT Bank UOB Indonesia	22.989	200.242	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	4.950	15.116	-	-
PT Bank DBS Indonesia	4.308	1.487	-	-
PT Bank Rabobank	2.216	-	-	-
PT Bank DKI	399	694	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	391	282	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	382	802	4.376	9.089
PT Bank Bukopin Tbk.	230	17	-	-
PT Bank Mega Syariah	185	42	-	-
Standard Chartered Bank, Indonesia	93	94	97	98
PT Bank Sinarmas	52	18	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	10	-	-	-
PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	10	-	-	-
PT BRI Syariah	5	5	-	-
PT Bank Danamon Tbk.	4	-	-	-
PT Bank CIMB Niaga	2	67	-	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	2	2	-	-
PT Bank MNC Internasional Tbk.	1	1	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	-	103
	67.186	228.769	25.130	30.578

3. JUDGMENTS AND ESTIMATION (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated cost of dismantling of investment property

The Company and its subsidiaries assess their estimated cost of dismantling of investment property at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost as there are numerous factors that will affect the ultimate liability payable. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases as compared to the inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimation cost at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future dismantling costs required. Further details are disclosed in Note 19.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand	
Current accounts	
Cash in banks - third parties	
Rupiah:	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	21.288
PT Bank UOB Indonesia	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-
PT Bank DBS Indonesia	-
PT Bank Rabobank	-
PT Bank DKI	-
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	9.089
PT Bank Bukopin Tbk.	-
PT Bank Mega Syariah	-
Standard Chartered Bank, Indonesia	98
PT Bank Sinarmas	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	-
PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	-
PT BRI Syariah	-
PT Bank Danamon Tbk.	-
PT Bank CIMB Niaga	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	-
PT Bank MNC Internasional Tbk.	-
PT Bank Syariah Mandiri	103

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Dolar AS:					US Dollar:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	711.652	17.320	23.952	67.094	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
DBS Bank Ltd, Singapura	625.294	633.305	550.366	516.552	DBS Bank Ltd, Singapura
OCBC Bank, Singapura	597.517	527.442	373.501	-	OCBC Bank, Singapura
JPMorgan Chase, N.A., Singapura	201.720	241.072	521.847	609.720	JPMorgan Chase, N.A., Singapura
ING Bank N.V.	55.363	8.981	22.492	8.221	ING Bank N.V.
Bank of America, Singapura	5.006	5.232	4.745	-	Bank of America, Singapura
PT Bank Danamon Tbk.	1.086	-	-	-	PT Bank Danamon Tbk.
PT Bank OCBC NISP Tbk.	707	240	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	609	638	567	1.415	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rabobank	443	-	-	-	PT Bank Rabobank
Standard Chartered Bank, Indonesia	133	127	119	120	Standard Chartered Bank, Indonesia
CIMB Berhad, Singapura	131	137	124	-	CIMB Berhad, Singapura
PT Bank UOB Indonesia	110	-	-	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	30	32	-	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
PT Bank of Tokyo Mitshubisi UFJ	13	-	-	-	PT Bank of Tokyo Mitshubisi UFJ
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	7	8	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
	2.199.821	1.434.534	1.497.713	1.203.122	
Dolar Singapura:					Singapore Dollar:
ING Bank N.V.	41	41	-	-	ING Bank N.V.
JPMorgan Chase, N.A., Singapura	11	20	-	-	JPMorgan Chase, N.A., Singapura
DBS Bank Ltd, Singapura	10	13	-	-	DBS Bank Ltd, Singapura
	62	74	-	-	
Euro:					Euro:
ING Bank N.V.	132.858	27.876	72.217	97.813	ING Bank N.V.
JPMorgan Chase, N.A., Singapura	563	67.228	-	-	JPMorgan Chase, N.A., Singapura
	133.421	95.104	72.217	97.813	
	2.400.490	1.758.481	1.595.060	1.331.513	
Bank - pihak berelasi (Catatan 37)					Cash in banks - related party (Note 37)
PT Bank Central Asia Tbk.					PT Bank Central Asia Tbk.
Rupiah	18.359	155.315	159.575	168.190	Rupiah
Dolar AS	1.372	1.435	12	-	US Dollar
Dolar SGD	7	7	-	-	SGD Dollar
	19.738	156.757	159.587	168.190	
Total rekening giro	2.420.228	1.915.238	1.754.647	1.501.784	Total current accounts
Deposito berjangka					Time deposits
Pihak ketiga					Third parties
Rupiah:					Rupiah:
PT Bank Rabobank	514.020	-	-	-	PT Bank Rabobank
PT Bank UOB Indonesia	131.800	-	-	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mega Syariah	2.000	6.500	-	-	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	400.000	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Dolar AS:					US Dollar:
PT Bank Danamon Tbk.	527.200	-	-	-	PT Bank Danamon Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	662.160	248.800	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
	1.175.020	1.068.660	248.800	-	
Total deposito berjangka	1.175.020	1.068.660	248.800	-	Total time deposits
	3.598.156	2.986.279	2.005.669	1.501.784	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, tingkat bunga untuk rekening giro Rupiah adalah sebesar 2,25% per tahun (tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar 2,25% per tahun, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar 2,00% per tahun, dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 sebesar 2,05% per tahun), 0,50% per tahun untuk rekening Dolar AS (tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar 0,50% per tahun, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar 0,10% per tahun, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 sebesar 0,25% per tahun) dan 0,40% per untuk rekening Euro (tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 sebesar 0,40%).

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, tingkat bunga untuk deposito berjangka Rupiah dan Dolar AS masing-masing berkisar antara 8,00% sampai dengan 9,00% dan 1,25% per tahun (tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 masing-masing berkisar antara 8,00% sampai dengan 9,00% dan 0,75%, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 1,5%).

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Pihak ketiga:				
Rupiah	500.957	662.134	753.995	553.366
Dolar AS	90.291	42.831	61.381	125.124
Euro	12.739	36.113	26.235	39.270
	603.987	741.078	841.611	717.760
Dikurangi:				
Cadangan penurunan nilai	(34.728)	(270.559)	(269.697)	(44.007)
	569.259	470.519	571.914	673.753

Third parties:
Rupiah
US Dollar
Euro

Less:
Allowance for impairment

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

For the six-month period ended June 30, 2016, current account in banks earned interest at the rates of 2.25% per annum for Rupiah (year ended December 31, 2015 was 2.25%, year ended December 31, 2014 was 2.00%, year ended December 31, 2013 was 2.05%), 0.50% per annum for US Dollars (year ended December 31, 2015 was 0.50%, year ended December 31, 2014 was 0.10%, year ended December 31, 2013 was 0.25%) and 0.40% per annum for Euro (year ended December 31, 2015, 2014 and 2013 is 0.40%).

For the six-month period ended June 30, 2016, time deposits interest rates for Rupiah and US Dollar ranged from 8.00% to 9.00% and 1.25% per annum, respectively (year ended December 31, 2015 ranged from 8.00% to 9.00% and 0.75%, respectively, and year ended December 31, 2014 was 1.5% for US Dollars).

5. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables per currency are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
PT Internux	189.147	81.725	5.231	7.524
PT Telekomunikasi Selular	122.136	94.627	288.855	164.624
PT Hutchison 3 Indonesia	90.716	45.830	63.713	143.023
PT XL Axiata Tbk.	75.043	21.015	49.679	9.983
PT Smartfren Telecom Tbk.	55.110	53.555	28.536	2.229
PT Indosat Tbk.	13.029	18.003	23.672	19.223
KPN B.V.	8.734	28.743	14.295	1.978
PT Sampoerna Telecom Indonesia	4.282	3.580	-	1.732
T-Mobile, Netherlands B.V.	3.954	4.034	4.615	19.479
PT Berca Global Access	1.499	1.606	464	-
PT Smart Telecom	81	250	1.670	526
Vodafone Libertel N.V.	51	3.335	7.325	17.813
PT Bakrie Telecom Tbk.	-	339.196	339.204	200.717
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	-	37.021	14.352	23.523
PT Axis Telecom Indonesia	-	-	-	105.386
Lainnya	40.205	8.558	-	-
	603.987	741.078	841.611	717.760
Dikurangi: Cadangan penurunan nilai	(34.728)	(270.559)	(269.697)	(44.007)
	569.259	470.519	571.914	673.753

PT Internux
PT Telekomunikasi Selular
PT Hutchison 3 Indonesia
PT XL Axiata Tbk.
PT Smartfren Telecom Tbk.
PT Indosat Tbk.
KPN B.V.
PT Sampoerna Telecom Indonesia
T-Mobile, Netherlands B.V.
PT Berca Global Access
PT Smart Telecom
Vodafone Libertel N.V.
PT Bakrie Telecom Tbk.
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
PT Axis Telecom Indonesia
Others

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The details of trade receivables per customer are as follows:

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Belum jatuh tempo	385.041	250.579	438.495	431.025
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	22.952	13.223	29.829	44.879
31 - 60 hari	11.955	10.598	22.620	66.220
61 - 90 hari	3.184	3.851	18.839	3.030
Lebih dari 90 hari	180.855	462.827	331.828	172.606
	603.987	741.078	841.611	717.760
Dikurangi: Cadangan penurunan nilai	(34.728)	(270.559)	(269.697)	(44.007)
	569.259	470.519	571.914	673.753

Less: Allowance for impairment

The aging of trade receivables is as follows:

Piutang usaha tidak dijamin, tidak berbunga dan dilunasi dalam jangka waktu normal selama 30 - 60 hari.

Trade receivables are unsecured, interest free and normally settled on terms between 30 to 60 days.

Mutasi cadangan penurunan nilai yang didasarkan pada penilaian kolektif adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment, which are based on collective assessment, are as follows:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Saldo awal	270.559	269.697	44.007	7.537
Penambahan cadangan penurunan nilai (Catatan 34)	103.381	862	225.690	36.470
Penghapusan cadangan penurunan nilai	(17)	-	-	-
Reklasifikasi ke aset tidak lancar (Catatan 14)	(339.195)	-	-	-
Saldo akhir	34.728	270.559	269.697	44.007

Beginning balance
Additional allowance for impairment (Note 34)
Write off of allowance for impairment
Reclassification to non-current assets (Note 14)
Ending balance

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

6. PERSEDIAAN

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2013, manajemen berkeyakinan bahwa semua persediaan dapat digunakan dan penyisihan persediaan usang tidak diperlukan.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.

6. INVENTORIES

As of December 31, 2015 and 2013, management believes that inventories can be used and a provision for obsolete inventories was not considered necessary.

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
MBTS, MWIFO, VSAT dan lainnya	-	11.076	-	508	MBTS, MWIFO, VSAT and others

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Asuransi dibayar dimuka
Biaya jaminan dibayar dimuka
Sewa kantor
Lainnya

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
	7.971	9.784	10.409	13.299
	6.871	6.916	6.144	-
	5.604	5.043	5.030	3.169
	1.509	603	2.021	-
	<u>21.955</u>	<u>22.346</u>	<u>23.604</u>	<u>16.468</u>

Prepaid insurance
Prepaid guarantee fee
Prepaid office rental
Others

8. INVESTASI SEWA PEMBIAYAAN NETO

Berdasarkan perjanjian No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004 tanggal 12 Februari 2004, Perseroan menyewakan beberapa sistem pemancar dan jaringan indoor base transceiver station repeaters kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. untuk jangka waktu sewa selama 9 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Uji Fungsi. Sistem pemancar tersebut telah diserahkan ke PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. pada akhir masa sewa yaitu pada November 2014.

7. PREPAID EXPENSES

8. NET INVESTMENT IN FINANCE LEASE

Based on agreement No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004 dated February 12, 2004, the Company leases repeater systems and indoor base transceiver station networks (repeaters) to PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. with lease terms of 9 years starting from various commencement dates based on the results of acceptance of operation ("Berita Acara Uji Fungsi"). The repeaters have been transferred to PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. at the end of the lease period in November 2014.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**8. INVESTASI SEWA PEMBIAYAAN NETO
(lanjutan)**

Pemancar-pemancar tersebut telah diasuransikan kepada PT AIG Insurance Indonesia (dahulu PT Chartis Insurance Indonesia) dan PT Asuransi Bintang Tbk. terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan di tahun 2016 sebesar Rp nihil (2015 dan 2014 sebesar Rp nihil, 2013 sebesar Rp125). Nilai pertanggungan tahun 2016, 2015 dan 2014 nihil karena masa sewa yang telah berakhir sehingga asuransi tidak diperlukan lagi.

**8. NET INVESTMENT IN FINANCE LEASE
(continued)**

The repeaters are insured with PT AIG Insurance Indonesia (formerly PT Chartis Insurance Indonesia) and PT Asuransi Bintang Tbk. against fire, theft and other possible risks in 2016 for Rp nil (2015 and 2014 is Rp nil, and 2013 is Rp125). Sum insured in 2016, 2015 and 2014 were nil because the rental period has ended so that the insurance is no longer required.

9. ASET TETAP

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

	Saldo 31 Desember/ Balance December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan transfer/ Reclassification and transfer	Selisih kurs/ Foreign Exchange	Saldo 30 Juni/ Balance June 30 2016	
Biaya:							Cost:
Tanah	21.927	-	-	-	(504)	21.423	Land
Mesin	4.689	-	-	539	-	5.228	Machinery
Peralatan kantor	76.483	3.555	(1.633)	1.720	(4)	80.121	Office equipment
Kendaraan bermotor	6.266	-	-	-	-	6.266	Motor vehicles
Peralatan proyek	133.689	2.867	-	473	-	137.029	Field equipment
Perabotan kantor	43.160	-	-	37	-	43.197	Furniture and fixtures
	286.214	6.422	(1.633)	2.769	(508)	293.264	
Aset dalam penyelesaian	23.021	27.438	-	(2.769)	-	47.690	Construction in progress
	309.235	33.860	(1.633)	-	(508)	340.954	
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Mesin	427	327	-	-	-	754	Machinery
Peralatan kantor	51.326	6.669	(1.389)	-	(3)	56.603	Office equipment
Kendaraan bermotor	3.736	290	-	-	-	4.026	Motor vehicles
Peralatan proyek	56.852	5.756	-	-	-	62.608	Field equipment
Perabotan kantor	39.715	1.803	-	-	-	41.518	Furniture and fixtures
	152.056	14.845	(1.389)	-	(3)	165.509	
Nilai buku neto	157.179					175.445	Net book value

Aset dalam penyelesaian terdiri dari berbagai peralatan proyek dan peralatan kantor dengan jumlah akumulasi biaya penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp47.690. Pada tanggal 30 Juni 2016, persentase penyelesaian atas aset dalam penyelesaian berkisar dari 25% sampai 75% dan diperkirakan selesai pada bulan Juli sampai September 2016.

9. FIXED ASSETS

Six-month period ended June 30, 2016

	Saldo 30 Juni/ Balance June 30 2016	
		Cost:
	21.423	Land
	5.228	Machinery
	80.121	Office equipment
	6.266	Motor vehicles
	137.029	Field equipment
	43.197	Furniture and fixtures
	293.264	
	47.690	Construction in progress
	340.954	
		Accumulated depreciation:
	754	Machinery
	56.603	Office equipment
	4.026	Motor vehicles
	62.608	Field equipment
	41.518	Furniture and fixtures
	165.509	
	175.445	Net book value

Construction in progress consists of various field equipments and office equipments with total accumulated construction costs as of June 30, 2016 of Rp47,690. As of June 30, 2016, the percentages of completion of the constructions in progress vary from 25% to 75% and are estimated to be completed in July to September 2016.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. ASET TETAP (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

	Saldo 31 Desember/ Balance December 31, 2014	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan transfer/ Reclassifi- cations and transfer	Selisih kurs/ Foreign exchange	Saldo 31 Desember/ Balance December 31, 2015	
Biaya:								Cost:
Tanah	17.821	-	4.153	-	-	(47)	21.927	Land
Mesin	70	-	-	-	4.619	-	4.689	Machinery
Peralatan kantor	61.805	8.810	6.147	(1.574)	1.296	(1)	76.483	Office equipment
Kendaraan bermotor	4.068	2.198	-	-	-	-	6.266	Motor vehicles
Peralatan proyek	19.621	104.614	4.634	-	4.820	-	133.689	Field equipment
Perabotan kantor	42.474	-	10	-	676	-	43.160	Furniture and fixtures
	145.859	115.622	14.944	(1.574)	11.411	(48)	286.214	
Aset dalam penyelesaian	1.980	17.204	15.291	-	(11.411)	(43)	23.021	Construction in progress
	147.839	132.826	30.235	(1.574)	-	(91)	309.235	
Akumulasi penyusutan:								Accumulated depreciation:
Mesin	34	-	393	-	-	-	427	Machinery
Peralatan kantor	34.125	5.752	13.476	(1.389)	(638)	-	51.326	Office equipment
Kendaraan bermotor	1.067	2.161	508	-	-	-	3.736	Motor vehicles
Peralatan proyek	8.484	42.078	6.076	-	214	-	56.852	Field equipment
Perabotan kantor	34.099	-	5.192	-	424	-	39.715	Furniture and fixtures
	77.809	49.991	25.645	(1.389)	-	-	152.056	
Nilai buku neto	70.030						157.179	Net book value

Aset dalam penyelesaian terdiri dari berbagai peralatan proyek dan peralatan kantor dengan akumulasi biaya penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp23.021. Pada tanggal 31 Desember 2015, persentase penyelesaian atas aset dalam penyelesaian berkisar dari 25% sampai 75% dan diselesaikan pada bulan Januari sampai Maret 2016.

Construction in progress consisted of various field equipments and office equipments with accumulated construction cost as of December 31, 2015 of Rp23,021. As of December 31, 2015, the percentages of completion of the construction in progress vary from 25% - 75% and were completed in January to March 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Year ended December 31, 2014

	Saldo 31 Desember/ Balance December 31, 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan transfer/ Reclassification and transfer	Selisih kurs/ Foreign Exchange	Saldo 31 Desember/ Balance December 31, 2014	
Biaya:							Cost:
Tanah	19.732	-	-	-	(1.911)	17.821	Land
Mesin	70	-	-	-	-	70	Machinery
Peralatan kantor	50.262	11.474	(597)	675	(9)	61.805	Office equipment
Kendaraan bermotor	3.547	1.272	(751)	-	-	4.068	Motor vehicles
Peralatan proyek	18.097	1.524	(1)	1	-	19.621	Field equipment
Perabotan kantor	37.932	363	-	4.179	-	42.474	Furniture and fixtures
	129.640	14.633	(1.349)	4.855	(1.920)	145.859	
Aset dalam penyelesaian	678	6.159	-	(4.855)	(2)	1.980	Construction in progress
	130.318	20.792	(1.349)	-	(1.922)	147.839	
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Mesin	25	9	-	-	-	34	Machinery
Peralatan kantor	22.532	12.167	(571)	-	(3)	34.125	Office equipment
Kendaraan bermotor	1.169	523	(625)	-	-	1.067	Motor vehicles
Peralatan proyek	6.069	2.416	(1)	-	-	8.484	Field equipment
Perabotan kantor	25.091	9.008	-	-	-	34.099	Furniture and fixtures
	54.886	24.123	(1.197)	-	(3)	77.809	
Nilai buku neto	75.432					70.030	Net book value

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. ASET TETAP (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

	Saldo 31 Desember/ Balance December 31, 2012	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan transfer/ Reclassification and transfer	Selisih kurs/ Foreign Exchange	Saldo 31 Desember/ Balance December 31 2013	
Biaya:							Cost:
Tanah	15.031	160	-	-	4.541	19.732	Land
Mesin	70	-	-	-	-	70	Machinery
Peralatan kantor	27.622	12.333	(86)	10.364	29	50.262	Office equipment
Kendaraan bermotor	3.801	-	(254)	-	-	3.547	Motor vehicles
Peralatan proyek	18.097	-	-	-	-	18.097	Field equipment
Perabotan kantor	33.190	1.384	-	3.358	-	37.932	Furniture and fixtures
	97.811	13.877	(340)	13.722	4.570	129.640	
Aset dalam penyelesaian	8.298	6.102	-	(13.722)	-	678	Construction in progress
	106.109	19.979	(340)	-	4.570	130.318	
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Mesin	16	9	-	-	-	25	Machinery
Peralatan kantor	13.799	8.741	(10)	-	2	22.532	Office equipment
Kendaraan bermotor	969	451	(251)	-	-	1.169	Motor vehicles
Peralatan proyek	3.803	2.266	-	-	-	6.069	Field equipment
Perabotan kantor	17.478	7.613	-	-	-	25.091	Furniture and fixtures
	36.065	19.080	(261)	-	2	54.886	
Nilai buku neto	70.044					75.432	Net book value

Penyusutan yang dibebankan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp14.845 (tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015: Rp25.645, 2014: Rp24.123, 2013: Rp19.080) (Catatan 29).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 30 Juni 2016, seluruh aset tetap telah diasuransikan kepada PT AIG Insurance Indonesia (dahulu PT Chartis Insurance Indonesia), PT Asuransi ASEI Indonesia, FPG Insurance (dahulu PT Asuransi Indrapura) terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp94.818 (31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp91.959, Rp69.884 dan Rp87.040). Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut

9. FIXED ASSETS (continued)

Year ended December 31, 2013

Depreciation expense charged for the six-month period June 30, 2016 amounted to Rp14,845 (years ended December 31, 2015: Rp25,645, 2014: Rp24,123, and 2013: Rp19,080) (Note 29).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, management believes that there was no indication of impairment in the value of fixed assets.

As of June 30, 2016, all of fixed assets are insured with PT AIG Insurance Indonesia (formerly PT Chartis Insurance Indonesia), PT Asuransi ASEI Indonesia, FPG Insurance (formerly PT Asuransi Indrapura) and against fire, theft and other possible risks for Rp94,818 (December 31, 2015, 2014 and 2013 are Rp91,959, Rp69,884 and Rp87,040, respectively). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. PROPERTI INVESTASI

10. INVESTMENT PROPERTIES

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2016

Six-month period ended June 30, 2016

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Selisih kurs/ <i>Foreign Exchange</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Properti investasi dalam penyelesaian	157.349	73.237	-	(54.141)	-	176.445	Investment properties construction in progress
Menara - menara	12.409.991	3.107.572	(13.680)	54.141	(9.143)	15.548.881	Towers (cost)
Akumulasi kenaikan nilai wajar	2.116.012	109.730			1.568	2.227.310	Accumulated increase in fair value
Nilai wajar	14.526.003					17.776.191	Fair value
Jumlah	14.683.352					17.952.636	Total

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Year ended December 31, 2015

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Akuisisi entitas anak/ <i>Acquisition of subsidiaries</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifi- cations</i>	Selisih kurs/ <i>Foreign exchange</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Properti investasi dalam penyelesaian	145.365	23.708	375.217	-	(386.941)	-	157.349	Investment properties construction in progress
Menara - menara	11.807.269	165.768	69.049	(50.762)	386.941	31.726	12.409.991	Towers (cost)
Akumulasi kenaikan nilai wajar	415.349	102.194	1.631.663			(33.194)	2.116.012	Accumulated increase in fair value
Nilai wajar	12.222.618						14.526.003	Fair value
Total	12.367.983						14.683.352	Total

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Year ended December 31, 2014

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Selisih kurs/ <i>Foreign Exchange</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Properti investasi dalam penyelesaian	108.463	1.599.201	-	(1.562.299)	-	145.365	Investment properties construction in progress
Menara - menara	10.230.637	109.824	(25.392)	1.562.299	(70.099)	11.807.269	Towers(cost)
Akumulasi kenaikan nilai wajar	787.746		(408.220)		35.823	415.349	Accumulated increase in fair value
Nilai wajar	11.018.383					12.222.618	Fair value
Jumlah	11.126.846					12.367.983	Total

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

10. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Year ended December 31, 2013

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs/ Foreign Exchange	Saldo akhir/ Ending balance	
Properti investasi dalam penyelesaian	108.855	1.127.773	-	(1.128.165)	-	108.463	Investment properties construction in progress
Menara - menara	8.790.707	231.299	(7.877)	1.128.165	88.343	10.230.637	Towers(cost)
Akumulasi kenaikan nilai wajar	1.462.279		(670.674)		(3.859)	787.746	Accumulated increase in fair value
Nilai wajar	10.252.986					11.018.383	Fair value
Jumlah	10.361.841					11.126.846	Total

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan merevaluasi menara berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan, penilai independen tertanggal 24 Agustus 2016 dan 9 Februari 2016. Nilai wajar menara dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari pendekatan arus kas yang didiskontokan dan biaya pengganti yang disusutkan. Berikut ini asumsi-asumsi yang dipakai oleh penilai dalam menghitung nilai wajar atas menara:

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company revalued its towers based on valuations performed by KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan, an independent appraiser dated August 24, 2016 and February 9, 2016. The fair value of the towers was determined using weighted average of discounted cash flows and depreciated replacement cost approach. The following assumptions have been used to determine the fair value of the towers:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Tingkat diskonto (per tahun)	17,32%	18,08%	17,69%	15,10%	Discount rate (per annum)
Tingkat inflasi (per tahun)	4,3% - 4,5%	4,4% - 6%	5,0% - 6,7%	6,3% - 7,7%	Inflation rate (per annum)
Umur manfaat menara	20 tahun/years	20 tahun/years	20 tahun/years	20 tahun/years	Useful lives of towers

Pada tanggal 30 Juni 2016, seluruh aset menara telah diasuransikan kepada PT AIG Insurance Indonesia (dahulu PT Chartis Insurance Indonesia), PT Asuransi ASEI Indonesia, Allianz Nederland Corporate, FPG Insurance (dahulu PT Asuransi Indrapura) dan Amlin Europe terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp9.582.558 (31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp7.884.391, Rp7.495.466 dan Rp7.076.538). Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of June 30, 2016, all of towers are insured with PT AIG Insurance Indonesia (formerly PT Chartis Insurance Indonesia), PT Asuransi ASEI Indonesia, Allianz Nederland Corporate, FPG Insurance (formerly PT Asuransi Indrapura) and Amlin Europe against fire, theft and other possible risks for Rp9,582,558 (December 31, 2015, 2014 and 2013 are Rp7,884,391, Rp7,495,466 and Rp7,076,538, respectively). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Rincian aset dalam penyelesaian beserta persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak yang berlokasi di Jawa, Sumatera dan pulau lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

30 Juni 2016:

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Menara-menara	75%	173.608	Juli/ July 2016	Towers
Menara-menara	50%	1.448	Agustus/ August 2016	Towers
Menara-menara	25%	1.389	September/ September 2016	Towers
		176.445		

31 Desember 2015:

Menara-menara	75%	100.255	Januari/ January 2016	Towers
Menara-menara	50%	9.004	Februari/ February 2016	Towers
Menara-menara	25%	48.090	Maret/ March 2016	Towers
		157.349		

31 Desember 2014:

Menara-menara	50%	46.904	Februari/ February 2015	Towers
Menara-menara	25%	98.461	Maret/ March 2015	Towers
		145.365		

31 Desember 2013:

Menara-menara	75%	51.640	Januari/ January 2014	Towers
Menara-menara	50%	33.616	Februari/ February 2014	Towers
Menara-menara	25%	23.207	Maret/ March 2014	Towers
		108.463		

10. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

The details of the construction in progress with the percentage of completion of the contract value which are located in Java, Sumatra and other island in Indonesia are as follows:

June 30, 2016:

	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
	Juli/ July 2016	Towers
	Agustus/ August 2016	Towers
	September/ September 2016	Towers

December 31, 2015:

	Januari/ January 2016	Towers
	Februari/ February 2016	Towers
	Maret/ March 2016	Towers

December 31, 2014:

	Februari/ February 2015	Towers
	Maret/ March 2015	Towers

December 31, 2013:

	Januari/ January 2014	Towers
	Februari/ February 2014	Towers
	Maret/ March 2014	Towers

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

	Perubahan tingkat diskonto/ Change in discount rate	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on income before tax expenses
30 Juni 2016		
	1%	(418.037)
	-1%	469.632
31 Desember 2015		
	1%	(412.537)
	-1%	458.515

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai properti investasi.

10. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on income before tax expenses
30 Juni 2016	
	(418.037)
	469.632
31 Desember 2015	
	(412.537)
	458.515

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, management believes that there was no indication of impairment in the value of investment properties.

11. GOODWILL

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

	31 Desember/ December 31, 2015	Pengurangan/ Deductions	Selisih kurs/ Foreign exchange	30 Juni/ June 30, 2016
Harga perolehan: Goodwill	363.150	(24.241)	(5.172)	333.737

Acquisition cost:
Goodwill

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

	31 Desember/ December 31, 2014	Penambahan/ Additions	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2015
Harga perolehan: Goodwill	186.883	177.053	(786)	363.150

Acquisition cost:
Goodwill

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

	31 Desember/ December 31, 2013	Penambahan/ Additions	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2014
Harga perolehan: Goodwill	207.730	-	(20.847)	186.883

Acquisition cost:
Goodwill

11. GOODWILL

Six-month period ended June 30, 2016

	Selisih kurs/ Foreign exchange	30 Juni/ June 30, 2016
30 Juni 2016		
	(5.172)	333.737

Year ended December 31, 2015

	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2015
31 Desember 2015		
	(786)	363.150

Year ended December 31, 2014

	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2014
31 Desember 2014		
	(20.847)	186.883

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. GOODWILL (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

	31 Desember/ December 31, 2012	Penambahan/ Additions	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2013	
Harga perolehan: Goodwill	158.190	-	49.540	207.730	Acquisition cost: Goodwill

Goodwill berasal dari transaksi akuisisi entitas anak Perseroan, *Mast Companies* pada tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp157.155 dan PT Iforte Solusi Infotek pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp177.053 yang merupakan selisih atas harga beli dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi (Catatan 1c).

Perseroan dan entitas anaknya melakukan pengujian penurunan setiap tahun untuk unit penghasil kas tersebut berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan. Pengujian penurunan nilai menggunakan proyeksi arus kas yang telah disetujui manajemen dan asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
<i>Mast Companies</i>					<i>Mast Companies</i>
Tingkat diskonto	6.1%	7.4%	7.4%	8.3%	Discount rate
Tingkat pertumbuhan berkelanjutan	1.3%-3%	3%	3%-7%	3%-7.5%	Perpetuity growth rate
PT iForte Solusi Infotek					PT iForte Solusi Infotek
Tingkat diskonto	13.7%	13.7%	-	-	Discount rate
Tingkat pertumbuhan berkelanjutan	4.4%-6%	5%-10%	-	-	Perpetuity growth rate

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai goodwill.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah mengakui kerugian penurunan nilai goodwill yang timbul dari PT Iforte Solusi Infotek sebesar Rp24.241 dicatat sebagai bagian dari keuntungan (kerugian) lainnya bersih pada laporan laba rugi. Penurunan yang dihasilkan dari perubahan tingkat pertumbuhan yang mempengaruhi proyeksi arus kas (Catatan 34).

11. GOODWILL (continued)

Year ended December 31, 2013

Goodwill resulted from acquisition of the Company's subsidiaries, the *Mast Companies*, on December 19, 2012 of Rp157,155 and PT Iforte Solusi Infotek, on July 1, 2015 of Rp177,053, which was derived from the difference between the purchase price consideration and the fair value of identifiable net assets (Note 1c).

The Company and its subsidiaries performed its annual impairment tests on this cash generating unit based on fair value less cost to sell using discounted cash flow projections. The impairment tests use cash flows projections which have been approved by management and the key assumptions are as follows:

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the management believes that there was no impairment in the value of goodwill.

As of June 30, 2016, the Company has recognized impairment loss on the goodwill arising from PT Iforte Solusi Infotek amounting to Rp24,241 recorded as part of other gain (losses), net in the statements of profit or loss. The impairment resulted from the change in perpetuity growth rate which affects the projected cash flows (Note 34).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET TAKBERWUJUD

12. INTANGIBLE ASSETS

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2016

Six-month period ended June 30, 2016

	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Selisih kurs/ Foreign exchange	30 Juni/ June 30, 2016	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Hubungan pelanggan	1.360.610	104.813	(19.298)	1.446.125	Customers relationship
Amortisasi:					Acquisition cost:
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(173.835)	(56.316)	4.408	(225.743)	Accumulated amortization of customers relationship
	<u>1.186.775</u>			<u>1.220.382</u>	

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Year ended December 31, 2015

	31 Desember/ December 31, 2014	Penambahan/ Additions	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2015	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Hubungan pelanggan	697.310	666.231	(2.931)	1.360.610	Customers relationship
Amortisasi:					Acquisition cost:
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(94.630)	(78.979)	(226)	(173.835)	Accumulated amortization of customers relationship
	<u>602.680</u>			<u>1.186.775</u>	

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Year ended December 31, 2014

	31 Desember/ December 31, 2013	Penambahan/ Additions	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2014	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Hubungan pelanggan	775.098	-	(77.788)	697.310	Customers relationship
Amortisasi:					Acquisition cost:
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(53.513)	(48.416)	7.299	(94.630)	Accumulated amortization of customers relationship
	<u>721.585</u>			<u>602.680</u>	

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Year ended December 31, 2013

	31 Desember/ December 31, 2012	Penambahan/ Additions	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2013	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Hubungan pelanggan	590.253	-	184.845	775.098	Customers relationship
Amortisasi:					Acquisition cost:
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	-	(44.207)	(9.306)	(53.513)	Accumulated amortization of customers relationship
	<u>590.253</u>			<u>721.585</u>	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Hubungan pelanggan berasal dari transaksi akuisisi entitas anak Perseroan, *Mast Companies* pada tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp586.376 dan PT Iforte Solusi Infotek pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp666.231 dan menara tertentu pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp104.813.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 alokasi jumlah amortisasi ke dalam laporan laba rugi adalah Rp56.316 (31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing sebesar Rp78.979, Rp48.416 dan Rp44.207) (Catatan 29).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai aset takberwujud.

13. SEWA LOKASI JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan beban sewa dibayar dimuka atas tanah atau bangunan untuk menara dan pemancar yang berlokasi di Jawa, Sumatera, pulau lainnya di Indonesia dan Belanda. Masa sewa lokasi adalah 3 tahun sampai 10 tahun.

Sewa lokasi jangka panjang ini diamortisasi secara garis lurus selama masa sewa.

12. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Customer relationship resulted from acquisition of the Company's subsidiaries, namely the *Mast Companies*, on December 19, 2012 of Rp586,376 and *PT Iforte Solusi Infotek*, on July 1, 2015 of Rp666,231 and certain towers on June 30, 2016 of Rp104,813.

For the six-month period ended June 30, 2016, the allocation of amortization to profit or loss amounted to Rp56,316 (December 31, 2015, 2014 and 2013 are Rp78,979, Rp48,416 and Rp44,207, respectively) (Note 29).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, the management believes that there was no impairment in the value of intangible assets.

13. LONG-TERM SITE RENTALS

This account represents land or building rental prepayments for towers and repeaters which are located in Java, Sumatera, other islands in Indonesia and Netherlands. The rental periods range from 3 years to 10 years.

These long-term site rentals are amortized on a straight-line basis over the rental period.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/
Six-month period ended June 30, 2016

	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additional	Amortisasi/ Amortization	Selisih kurs/ Foreign Exchange	30 Juni/ June 30, 2016	
Sewa tanah di lokasi menara	1.297.608	685.584	(143.800)	(109)	1.839.283	Tower site rentals

Tahun yang berakhir pada 31 Desember/
Year ended December 31, 2015

	31 Desember/ December 31, 2014	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiary	Penambahan/ Additional	Amortisasi/ Amortization	Selisih kurs/ Foreign Exchange	31 Desember/ December 31 2015	
Sewa tanah di lokasi menara	1.268.441	20.053	283.302	(274.113)	(75)	1.297.608	Tower site rentals

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. SEWA LOKASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

13. LONG-TERM SITE RENTALS (continued)

Tahun yang berakhir pada 31 Desember/ Year ended December 31, 2014						
	31 Desember/ December 31, 2013	Penambahan/ Additional	Amortisasi/ Amortization	Selisih kurs/ Foreign Exchange	31 Desember/ December 31, 2014	
Sewa tanah di lokasi menara	1.009.493	513.292	(254.063)	(281)	1.268.441	Tower site rentals
Sewa lokasi pemancar	239	-	(239)	-	-	Repeater site rentals
	1.009.732	513.292	(254.302)	(281)	1.268.441	

Tahun yang berakhir pada 31 Desember/ Year ended December 31, 2013						
	31 Desember/ December 31, 2012	Penambahan/ Additional	Amortisasi/ Amortization	Selisih kurs/ Foreign Exchange	31 Desember/ December 31, 2013	
Sewa tanah di lokasi menara	823.176	372.503	(186.614)	428	1.009.493	Tower site rentals
Sewa lokasi pemancar	620	355	(736)	-	239	Repeater site rentals
	823.796	372.858	(187.350)	428	1.009.732	

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Uang muka pembelian aset tetap dan property investasi	18.126	10.450	29.878	81.970	Advances for purchase of fixed assets and investment properties
Uang jaminan	7.690	15.622	5.325	4.291	Deposits
Klaim restitusi pajak penghasilan Pasal 4(2) (Catatan 20g)	2.856	2.856	2.856	44.897	Claims for refundable income tax - Article 4(2) (Note 20g)
Piutang tidak lancar lainnya	339.195	-	-	-	Other non-current receivables
Cadangan penurunan nilai	(339.195)	-	-	-	Allowance for impairment loss
Lainnya	4.050	1.637	-	14.858	Others
	32.722	30.565	38.059	146.016	

Pada tanggal 10 November 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Bakrie Telecom Tbk. dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat antara PT Bakrie Telecom Tbk. dengan para kreditur terkait, termasuk Perseroan ("Perjanjian Perdamaian"), dimana hutang sewa PT Bakrie Telecom Tbk. kepada Perseroan akan dibayarkan melalui mekanisme *Cash Waterfall*, tunai bertahap dan/atau diselesaikan dengan menggunakan obligasi konversi wajib/mandatory convertible bonds.

On November 10, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Bakrie Telecom Tbk. a Temporary Suspension of Payment (the "SOP") based on SOP case No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On December 9, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated December 8, 2014, made by PT Bakrie Telecom Tbk. and the respective creditors, including the Company (the "Settlement Agreement"), which the lease debt of PT Bakrie Telecom Tbk. to the Company will be paid through Cash Waterfall mechanism, cash installments and/or settled by mandatory convertible bonds.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Piutang usaha - pihak ketiga merupakan piutang usaha yang berasal dari PT Bakrie Telecom Tbk. sebesar Rp339.195 sebelum dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp339.195. Pada tanggal 30 Juni 2016, manajemen memutuskan untuk memindahkan ini dari piutang usaha ke aset tidak lancar lainnya sebagai hasil dari penilaian penurunan nilai.

Uang muka pembelian aset tetap dan properti investasi merupakan pembayaran dimuka yang dilakukan oleh Perseroan kepada kontraktor untuk pembangunan menara dan rumah panel dengan perincian sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
PT Tirta Kusuma	3.436	295	54	-
PT Citramas Heavy Industries	2.946	4.185	4.185	36.000
PT Bach Multi Global	509	755	3.272	5.297
PT Bukaka Teknik Utama	-	-	4.496	3.927
PT Danusari Mitra Sejahtera	-	-	4	3.387
Lain-lain (kurang dari Rp3.000)	11.235	5.215	17.867	33.359
	18.126	10.450	29.878	81.970

Other non-current receivables related to receivable from PT Bakrie Telecom Tbk. amounting to Rp339,195 which full allowance for impairment of Rp339,195 has been provided. As of June 30, 2016, management decided to reclassify this receivable from trade to other non-current asset as a result to impairment assessment.

Advances for purchase of fixed assets and investment properties represents payments in advance made by the Company to contractors to construct towers and shelters with details as follows:

PT Tirta Kusuma
PT Citramas Heavy Industries
PT Bach Multi Global
PT Bukaka Teknik Utama
PT Danusari Mitra Sejahtera
Others (below Rp3,000)

15. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN LAINNYA

15. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER PAYABLES

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Rincian per mata uang:				
Rupiah	143.500	209.534	461.127	271.378
Euro	176	7.057	7.169	2.270
Dolar Singapura	-	16	-	-
Dolar AS	2.208	-	517	211.174
	145.884	216.607	468.813	484.822

Detail per currency:
Rupiah
Euro
SGD Dollar
US Dollar

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**15. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN
LAINNYA (lanjutan)**

**15. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER
PAYABLES (continued)**

	31 Desember/December 31,				
	30 Juni 2016/ June 30, 2016	2015	2014	2013	
Rincian per pemasok:					Detail per vendor:
PT Smart Telecom	11.638	11.858	14.858	19.620	PT Smart Telecom
PT Tata Bersama	11.558	13.397	765	-	PT Tata Bersama
PT Ciptakomunindo Pradipta	9.045	10.103	7.870	123	PT Ciptakomunindo Pradipta
Tn. Novan Soekarno	8.847	6.057	7.791	5.139	Mr. Novan Soekarno
PT Central Investindo	5.846	10.277	3.253	4.232	PT Central Investindo
PT Bahana Sandisat Global	5.209	5.687	3.953	2.664	PT Bahana Sandisat Global
CV Lintas Reka Cipta	4.616	3.913	3.299	7.393	CV Lintas Reka Cipta
PT Bach Multi Global	4.081	14.880	52.939	29.669	PT Bach Multi Global
PT Mitra Iswara & Rorimpandey	3.979	-	-	-	PT Mitra Iswara & Rorimpandey
PT Dwijaya Cipta Persada	3.855	2.741	10.557	-	PT Dwijaya Cipta Persada
PT Advanced Net Indonesia	3.691	131	-	-	PT Advanced Net Indonesia
PT Mitraselaras Inti Prima	3.616	4.589	10.303	643	PT Mitraselaras Inti Prima
Tn. Harsa Tanaya Rully	3.497	6.646	8.772	7.799	Mr. Harsa Tanaya Rully
PT Dwi Pilar Pratama	2.410	2.541	14.045	2.341	PT Dwi Pilar Pratama
PT. Grentech Indonesia	2.170	4.576	-	-	PT Grentech Indonesia
PT Serang Berkah Mandiri	2.036	3.032	15.269	10.487	PT Serang Berkah Mandiri
Tn. Banindria Nigroho	1.567	2.086	3.526	2.152	Tn. Banindria Nigroho
PT Sarana Artha Lestari	1.467	2.372	12.275	6.490	PT Sarana Artha Lestari
PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa	1.393	2.820	5.593	859	PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa
PT Marsa Kanina Bestari	1.303	5.221	18.132	5.485	PT Marsa Kanina Bestari
CV Karunia Pertiwi	942	1.115	3.621	143	CV Karunia Pertiwi
CV Tirta Kusuma	756	9.437	17.438	-	CV Tirta Kusuma
PT Handal Karya Abadi	666	596	6.363	2.059	PT Handal Karya Abadi
PT Pilar Gapura Nusa	629	1.013	6.494	2.410	PT Pilar Gapura Nusa
PT Protech Mitra Perkasa	519	1.125	4.781	343	PT Protech Mitra Perkasa
PT A Dua Sakti	483	777	7.360	15.233	PT A Dua Sakti
CV Buana Pilar Mandiri	468	1.063	7.519	2.175	CV Buana Pilar Mandiri
PT Trikarya Mulla Perkasa	367	946	5.657	2.899	PT Trikarya Mulla Perkasa
PT Delvin Mitra Persada	335	862	5.541	2.230	PT Delvin Mitra Persada
PT Insani Daya Kreasi	227	496	1.790	3.944	PT Insani Daya Kreasi
PT Puncak Monterado	210	564	3.835	1.511	PT Puncak Monterado
PT Kartika Asri Prima	204	356	3.559	1.854	PT Kartika Asri Prima
PT Amala	192	475	10.186	2.348	PT Amala
PT Hutchison 3 Indonesia	190	190	215	211.571	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Cakra Hexa Swadaya	169	607	2.142	4.247	PT Cakra Hexa Swadaya
PT Maxima Arta	167	350	5.376	2.416	PT Maxima Arta
PT Sanjiwani Karya Mandiri	163	163	4.098	121	PT Sanjiwani Karya Mandiri
CV Multi Engineering	157	665	3.061	242	CV Multi Engineering
PT Citicon Adinugraha	156	254	702	5.492	PT Citicon Adinugraha
PT Pas Perkasa	138	601	5.748	2.527	PT Pas Perkasa
PT Hwl Construction	133	188	2.913	3.704	PT Hwl Construction
PT Sempurna Delapan	130	849	4.211	3.090	PT Sempurna Delapan
PT Danusari Mitra Sejahtera	79	81	390	10.674	PT Danusari Mitra Sejahtera
CV Bhuztan Teknik Sandhika	27	169	3.644	873	CV Bhuztan Teknik Sandhika
PT Danakar	25	376	4.898	2.928	PT Danakar
KPN B.V.	-	7.050	7.079	-	KPN B.V.
PT Jardine Lloyd Thompson	-	3.624	5.404	-	PT Jardine Lloyd Thompson
PT Bukaka Teknik Utama	-	-	5.817	10.624	PT Bukaka Teknik Utama
Lain-lain (kurang dari Rp3.000)	46.528	69.688	135.771	84.068	Others (below Rp3,000)
	145.884	216.607	468.813	484.822	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**15. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN
LAINNYA (lanjutan)**

Umur utang pembangunan menara adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Belum jatuh tempo	139.937	197.720	458.315	476.267
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	1.153	3.002	176	1.999
31 - 60 hari	21	168	1	373
61 - 90 hari	69	12	1.246	1.816
Lebih dari 90 hari	4.704	15.705	9.075	4.367
	145.884	216.607	468.813	484.822

Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga tidak dijamin, tidak berbunga dan dilunasi dalam jangka waktu normal selama 30 - 60 hari.

**15. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER
PAYABLES (continued)**

The aging of tower construction and other payables is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	2013
Belum jatuh tempo	197.720	458.315	476.267
Lewat jatuh tempo:			
1 - 30 hari	3.002	176	1.999
31 - 60 hari	168	1	373
61 - 90 hari	12	1.246	1.816
Lebih dari 90 hari	15.705	9.075	4.367
	216.607	468.813	484.822

Tower construction and other payable - third parties are unsecured, interest free and normally settled on terms between 30 to 60 days.

16. BEBAN AKRUAL

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Pihak ketiga:				
Perizinan dan lisensi	91.017	83.948	66.270	51.811
Pemeliharaan	35.797	41.080	17.222	8.778
Bunga pinjaman dan biaya bank	29.919	33.233	29.485	38.664
Jasa profesional	18.226	23.613	59.117	17.868
Penalti	11.296	9.778	16.685	36.749
Bunga obligasi	9.625	9.625	9.625	-
Sewa lahan	8.616	8.793	10.578	6.546
Biaya pembangunan menara	806	372	8.349	-
Pajak pengalihan aset	-	75.592	73.137	75.696
Lainnya (kurang dari Rp3.000)	49.177	46.429	7.589	8.278
	254.479	332.463	298.057	244.390
Pihak berelasi:				
Jasa konsultasi manajemen kunci	14.177	22.807	3.359	-
	268.656	355.270	301.416	244.390

Third parties:
Permits and licenses
Maintenance
Loan interest and bank fees
Professional fees
Penalties
Bonds interest
Ground lease
Tower construction costs
Tax for assets transfer
Others (below Rp3,000)

Related parties:
Key management consultation services

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG

17. LONG-TERM LOANS

30 Juni 2016	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current Portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current Portion</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	June 30, 2016
Utang jangka panjang				Long-term loans
Fasilitas Pinjaman:				<i>Loans Facility:</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura (AS\$100.000.000 dan EUR20.000.000)	-	1.611.018	1.611.018	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore branch (US\$100,000,000 and EUR20,000,000)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura (AS\$100.000.000)	-	1.318.000	1.318.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore branch (US\$100,000,000)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta (AS\$53.000.000 dan Rp500.000)	-	1.198.540	1.198.540	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch (US\$53,000,000 and Rp500,000)
DBS Bank Ltd., cabang Singapura (AS\$50.000.000)	-	659.000	659.000	DBS Bank Ltd., Singapore branch US\$50,000,000)
ING Bank N.V., cabang Singapura (EUR20.000.000)	-	293.018	293.018	ING Bank N.V., Singapore branch (EUR20,000,000)
BNP Paribas, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	197.700	197.700	BNP Paribas, Singapore branch (US\$15,000,000)
Credit Suisse AG, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	197.700	197.700	Credit Suisse AG, Singapore branch (US\$15,000,000)
CIMB Bank Berhad, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	197.700	197.700	CIMB Bank Berhad, Singapore branch (US\$15,000,000)
Standard Chartered Bank, cabang Dubai (AS\$15.000.000)	-	197.700	197.700	Standard Chartered Bank, Dubai branch (US\$15,000,000)
JPMorgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta (AS\$15.000.000)	-	197.700	197.700	JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta branch (US\$15,000,000)
Management Tower Europe S.à r.l. (EUR14.670.462)	214.935	-	214.935	Management Tower Europe S.à r.l. (EUR14,670,462)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta (Rp2.504.456)	343.393	2.161.063	2.504.456	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta branch (Rp2,504,456)
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, cabang Jakarta (Rp1.000.000)	-	1.000.000	1.000.000	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Jakarta branch (Rp1,000,000)
PT Bank DBS Indonesia cabang Jakarta (Rp196.000)	196.000	-	196.000	PT Bank DBS Indonesia Jakarta branch (Rp196,000)
	754.328	9.229.139	9.983.467	
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3.528)	(151.016)	(154.544)	<i>Less: Unamortized costs of loans</i>
	750.800	9.078.123	9.828.923	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

17. LONG-TERM LOANS (continued)

31 Desember 2015	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current Portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current Portion</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2015
Utang jangka panjang				Long-term loans
Fasilitas pinjaman:				<i>Loan facilities:</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura (AS\$100.000.000 dan EUR20.000.000)	-	1.680.894	1.680.894	<i>Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore branch (US\$100,000,000 and EUR20,000,000)</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura (AS\$100.000.000)	-	1.379.500	1.379.500	<i>Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore branch (US\$100,000,000)</i>
DBS Bank Ltd., cabang Singapura (AS\$50.000.000)	-	689.750	689.750	<i>DBS Bank Ltd., Singapore branch (US\$50,000,000)</i>
ING Bank N.V., cabang Singapura (EUR20.000.000)	-	301.394	301.394	<i>ING Bank N.V., Singapore branch (EUR20,000,000)</i>
BNP Paribas, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	206.925	206.925	<i>BNP Paribas, Singapore branch (US\$15,000,000)</i>
Credit Suisse AG, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	206.925	206.925	<i>Credit Suisse AG, Singapore branch (US\$15,000,000)</i>
CIMB Bank Berhad, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	206.925	206.925	<i>CIMB Bank Berhad, Singapore branch (US\$15,000,000)</i>
Standard Chartered Bank, cabang Dubai (AS\$15.000.000)	-	206.925	206.925	<i>Standard Chartered Bank, Dubai branch (US\$15,000,000)</i>
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta (AS\$15.000.000)	-	206.925	206.925	<i>The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch (US\$15,000,000)</i>
JPMorgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta (AS\$15.000.000)	-	206.925	206.925	<i>JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta branch (US\$15,000,000)</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta (Rp1.638.676)	268.439	1.370.237	1.638.676	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta branch (Rp1,638,676)</i>
Management Tower Europe S.à r.l. (EUR14.670.462)	-	221.080	221.080	<i>Management Tower Europe S.à r.l. (EUR14,670,462)</i>
PT Bank DBS Indonesia (Rp181.000)	181.000	-	181.000	<i>PT Bank DBS Indonesia (Rp181,000)</i>
	449.439	6.884.405	7.333.844	
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3.300)	(143.151)	(146.451)	<i>Less: Unamortized costs of loans</i>
	446.139	6.741.254	7.187.393	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

17. LONG-TERM LOANS (continued)

31 Desember 2014	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current Portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current Portion</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2014
Utang jangka panjang				Long-term loans
Pinjaman Fasilitas: Pihak ketiga:				Facility loans: Third parties:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta (Rp1.844.700)	206.024	1.638.676	1.844.700	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta branch (Rp1,844,700)
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura (AS\$100.000.000 dan EUR20.000.000)	-	1.546.665	1.546.665	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore branch (US\$100,000,000 and EUR20,000,000)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura (AS\$100.000.000)	-	1.244.000	1.244.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore branch (US\$100,000,000)
DBS Bank Ltd., cabang Singapura (AS\$50.000.000)	-	622.000	622.000	DBS Bank Ltd., Singapore branch (US\$50,000,000)
ING Bank N.V., cabang Singapura (EUR20.000.000)	-	302.665	302.665	ING Bank N.V., Singapore branch (EUR20,000,000)
BNP Paribas, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	186.600	186.600	BNP Paribas, Singapore branch (US\$15,000,000)
Credit Suisse AG, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	186.600	186.600	Credit Suisse AG, Singapore branch (US\$15,000,000)
CIMB Bank Berhad, cabang Singapura (AS\$15.000.000)	-	186.600	186.600	CIMB Bank Berhad, Singapore branch (US\$15,000,000)
Standard Chartered Bank, cabang Dubai (AS\$15.000.000)	-	186.600	186.600	Standard Chartered Bank, Dubai branch (US\$15,000,000)
The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta (AS\$15.000.000)	-	186.600	186.600	The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch (US\$15,000,000)
JPMorgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta (AS\$15.000.000)	-	186.600	186.600	JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta branch (US\$15,000,000)
Management Tower Europe S.à r.l. (EUR14.670.462)	-	222.013	222.013	Management Tower Europe S.à r.l. (EUR14,670,462)
	206.024	6.695.619	6.901.643	
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3.022)	(182.659)	(185.681)	Less: Unamortized costs of loans
	203.002	6.512.960	6.715.962	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

17. LONG-TERM LOANS (continued)

31 Desember 2013	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current Portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current Portion</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2013
Utang jangka panjang				Long-term loans
Pinjaman Fasilitas:				<i>Facility loans:</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
International Finance Corporation cabang Netherland (AS\$50.000.000)	-	609.450	609.450	<i>International Finance Corporation Netherland branch (US\$50,000,000)</i>
DBS Bank Ltd., cabang Singapura (AS\$25.385.842 and EUR10.000.000)	48.968	428.674	477.642	<i>DBS Bank Ltd., Singapore branch (US\$25,385,842 and EUR10,000,000)</i>
ING Bank N.V., cabang Singapura (AS\$25.385.842 dan EUR10.000.000)	48.968	428.674	477.642	<i>ING Bank N.V., Singapore branch (US\$25,385,842 and EUR10,000,000)</i>
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura (AS\$23.371.653 dan EUR10.000.000)	62.139	390.952	453.091	<i>Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Singapore branch (US\$23,371,653 and EUR10,000,000)</i>
PT Indonesia Infrastructure Finance, cabang Jakarta (AS\$36.883.434)	119.058	330.514	449.572	<i>PT Indonesia Infrastructure Finance, Jakarta branch (US\$36,883,434)</i>
Standard Chartered Bank, cabang Inggris (AS\$14.881.356 dan EUR10.000.000)	28.706	320.898	349.604	<i>Standard Chartered Bank, UK Branch (US\$14,881,356 and EUR10,000,000)</i>
BNP Paribas, cabang Singapura (AS\$21.709.272)	41.876	222.738	264.614	<i>BNP Paribas, Singapore branch (US\$21,709,272)</i>
Bank of America, N.A., cabang Singapura (AS\$21.709.272)	41.876	222.738	264.614	<i>Bank of America, N.A., Singapore branch (US\$21,709,272)</i>
CIMB Bank Berhad, cabang Singapura (AS\$21.709.272)	41.876	222.738	264.614	<i>CIMB Bank Berhad, Singapore branch (US\$21,709,272)</i>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura (AS\$21.709.272)	41.876	222.738	264.614	<i>Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore branch (US\$21,709,272)</i>
Aozora Asia Pasific Finance Limited, cabang Hong Kong (AS\$16.982.253)	32.758	174.239	206.997	<i>Aozora Asia Pasific Finance Limited, Hong Kong branch (US\$16,982,253)</i>
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., cabang Malaysia (AS\$16.457.029)	31.745	168.850	200.595	<i>Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Malaysia branch (US\$16,457,029)</i>
The Korea Development Bank, cabang Korea (AS\$15.756.730)	30.394	161.665	192.059	<i>The Korea Development Bank, Korea branch (US\$15,756,730)</i>
JP Morgan Chase Bank, N.A., cabang Singapura (AS\$10.942.174)	21.107	112.267	133.374	<i>JP Morgan Chase Bank, N.A., Singapore branch (US\$10,942,174)</i>
The Bank of East Asia, Limited, cabang Singapura (AS\$12.255.234)	23.640	125.739	149.379	<i>The Bank of East Asia, Limited, Singapore branch (US\$12,255,234)</i>
PT Bank Chinatrust Indonesia, cabang Jakarta (AS\$12.000.000)	38.492	107.776	146.268	<i>PT Bank Chinatrust Indonesia, Jakarta branch (US\$12,000,000)</i>
Saldo dipindahkan	653.479	4.250.650	4.904.129	<i>Balance carried forward</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

17. LONG-TERM LOANS (continued)

31 Desember 2013	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current Portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current Portion</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2013
Utang jangka panjang				Long-term loans
Pinjaman Fasilitas:				Facility loans:
Pihak ketiga:				Third parties:
Saldo pindahan	653.479	4.250.650	4.904.129	Balance brought forward
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura (AS\$10.504.487)	20.263	107.776	128.039	Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Singapore branch (US\$10,504,487)
Bank of the Philippine Islands, cabang Filipina (AS\$10.504.487)	20.263	107.776	128.039	Bank of the Philippine Islands, Philippines branch (US\$10,504,487)
BDO Unibank, Inc., cabang Hong Kong (AS\$10.504.487)	20.263	107.776	128.039	BDO Unibank, Inc., Hong Kong branch (US\$10,504,487)
The Royal Bank of Scotland N.V., cabang Jakarta (AS\$10.000.000)	32.076	89.814	121.890	The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta branch (US\$10,000,000)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta (AS\$9.000.000)	28.869	80.832	109.701	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch (US\$9,000,000)
PT Bank ICBC Indonesia, cabang Jakarta (AS\$8.842.105)	-	107.776	107.776	PT Bank ICBC Indonesia, Jakarta branch (US\$8,842,105)
First Commercial Bank, cabang Singapura (AS\$7.878.365)	15.197	80.832	96.029	First Commercial Bank, Singapore branch (US\$7,878,365)
Taiwan Cooperative Bank, cabang Taiwan (AS\$7.878.365)	15.197	80.832	96.029	Taiwan Cooperative Bank, Taiwan branch (US\$7,878,365)
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura (AS\$7.440.678)	14.353	76.342	90.695	Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore branch (US\$7,440,678)
Bank of China Limited, cabang Jakarta (AS\$6.000.000)	19.246	53.888	73.134	Bank of China Limited, Jakarta branch (US\$6,000,000)
PT Bank Commonwealth, cabang Jakarta (AS\$6.000.000)	19.246	53.888	73.134	PT Bank Commonwealth, Jakarta branch (US\$6,000,000)
Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A., cabang Hong Kong (AS\$5.252.243)	10.131	53.888	64.019	Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A., Hong Kong branch (US\$5,252,243)
Bank of Taiwan, cabang Singapura (AS\$5.252.243)	10.131	53.888	64.019	Bank of Taiwan, Singapore branch (US\$5,252,243)
Land Bank of Taiwan, cabang Singapura (AS\$5.252.243)	10.131	53.888	64.019	Land Bank of Taiwan, Singapore branch (US\$5,252,243)
PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk., cabang New York (AS\$5.252.243)	10.131	53.888	64.019	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., New York branch (US\$5,252,243)
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., cabang Taiwan (AS\$5.252.243)	10.131	53.888	64.019	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan branch (US\$5,252,243)
Taichung Commercial Bank Co., Ltd., cabang Taiwan (AS\$4.421.053)	-	53.888	53.888	Taichung Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan branch (US\$4,421,053)
Saldo dipindahkan	909.107	5.521.510	6.430.617	Balance carried forward

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

17. LONG-TERM LOANS (continued)

31 Desember 2013	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current Portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current Portion</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2013
Utang jangka panjang				Long-term loans
Pinjaman Fasilitas:				Facility loans:
Pihak ketiga:				Third parties:
Saldo pindahan	909.107	5.521.510	6.430.617	Balance brought forward
E.Sun Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura (AS\$2.626.123)	5.068	26.948	32.016	E.Sun Commercial Bank, Ltd., Singapore branch (US\$2,626,123)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta (Rp2.972.500)	244.000	2.728.500	2.972.500	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta branch (Rp2,972,500)
Management Tower Europe S.à.r.l. (EUR17.227.723)	-	289.795	289.795	Management Tower Europe S.à.r.l. (EUR17,227,723)
	1.158.175	8.566.753	9.724.928	
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(71.820)	(345.501)	(417.321)	Less: Unamortized costs of loans
	1.086.355	8.221.252	9.307.607	

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Cost of loans represents deferred charges arising from commitment fees, upfront fees and provision fees in relation to obtaining loans and is amortized over the respective loan periods.

Amortisasi atas biaya pinjaman yang diakui pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp26.685 (31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp53.212, Rp309.730 dan Rp94.268) (Catatan 33). Jumlah ini termasuk penghapusan biaya pinjaman sebesar Rp nihil (31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp nihil, Rp215.859 dan Rp22.897).

Amortization of the cost of loans recognized for the six-month period ended June 30, 2016 was Rp26,685 (December 31, 2015, 2014 and 2013 were Rp53,212, Rp309,730 and Rp94,268, respectively) (Note 33). These amounts included cost of loans written off amounting to Rp nil (December 31, 2015, 2014 and 2013, are Rp nil, Rp215,859 and Rp22,897, respectively).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2016

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp500.000 dan AS\$38.000.000 dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, LTD., Cabang Jakarta ("BTMU") ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp500.000 ("Fasilitas Pinjaman A") dan dan AS\$38.000.000 ("Fasilitas Pinjaman B") ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BTMU"). iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk. Perseroan dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman A adalah satu bulan, dan untuk Fasilitas Pinjaman B adalah tiga bulan. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BTMU jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2021.

Fasilitas Pinjaman A dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman B dikenakan tingkat presentase per tahun sebagaimana disetujui oleh BTMU dan Perseroan dalam Konfirmasi. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BTMU telah dicairkan pada tanggal 29 Juni 2016.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara iForte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BTMU sebagai pemberi pinjaman.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman rupiah dan dolar amerika serikat tersebut masing-masing adalah 8,93% dan 2,68% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 40).

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2016 Loan Facilities

On June 24, 2016, the Company entered into a IDR500,000 and US\$38,000,000 Term Loan Facilities Agreement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, LTD., Jakarta Branch ("BTMU") (the "BTMU Facilities Agreement"). In connection with the BTMU Facilities Agreement, the Company obtained a loan facility in the amount of IDR500,000 (the "Loan A Facility") and US\$38,000,000 (the "Loan B Facility") (the "BTMU Loan Facilities"). iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for these facilities. The purpose of the BTMU Facilities Agreement is for the payment of the purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata, Tbk. The Company may select an interest period of one or three months for the Loan A Facility and the Loan B Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the Loan A Facility is one month, and for the Loan B Facility is three months. The BTMU Loan Facilities is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on June 24, 2021.

The Loan A Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.50% per annum. The Loan B Facility is subject to interest rate in the percentage of rate per annum as agreed by BTMU and the Company in the Confirmation. The BTMU Loan Facilities were fully drawn on June 29, 2016.

In connection with the provision of the BTMU Facilities Agreement, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated June 24, 2016 has also been signed by and between iForte as a company guarantor and BTMU as lender.

The effective interest rates of the BTMU IDR and US dollar loans are 8.93% and 2.68% per annum, respectively, for the six-month period ended June 30, 2016. The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 40).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan iForte telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp1.000.000 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") ("Perjanjian Fasilitas BNI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BNI tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp1.000.000 ("Fasilitas Pinjaman BNI") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BNI adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman BNI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman BNI adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman BNI jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2023.

Fasilitas Pinjaman BNI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman BNI telah dicairkan pada tanggal 29 Juni 2016.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BNI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara iForte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BNI sebagai agen fasilitas.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut berkisar antara 8,52% sampai 10,85% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 40).

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan iForte telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2016 Loan Facilities (continued)

As of June 30, 2016, the Company and iForte were in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On June 24, 2016, the Company entered into a IDR1,000,000 Term Loan Facility Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (the "BNI Facility Agreement"). In connection with the BNI Facility Agreement, the Company obtained a loan facility in the amount of IDR1,000,000 (the "BNI Loan Facility"), whereby iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The purpose of the BNI Facility Agreement is for the payment of purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk. The Company may select an interest period of one, three or six months for the BNI Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the BNI Loan Facility is one month. The BNI Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on June 24, 2023.

The BNI Loan Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.50% per annum. The BNI Loan Facility was fully drawn on June 29, 2016.

In connection with the provision of the BNI Facility Agreement, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated June 24, 2016 has also been signed by and between iForte as a company guarantor and BNI as facility agent.

The effective interest rate of the BNI Facility loan ranges from 8.52% to 10.85% per annum for the six-month period ended June 30, 2016. The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 40).

As of June 30, 2016, the Company and iForte were in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp1.000.000 dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI") ("Perjanjian Fasilitas BSMI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BSMI tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp1.000.000 ("Fasilitas Pinjaman BSMI") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BSMI adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk. Perseroan dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman BSMI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman BSMI adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman BSMI jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2021.

Fasilitas Pinjaman BSMI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman BSMI telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 29 Juni 2016.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BSMI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara iForte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BSMI sebagai pemberi pinjaman.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut adalah 9,06% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 40).

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan iForte telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2016 Loan Facilities (continued)

On June 24, 2016, the Company entered into a IDR1,000,000 Term Loan Facility Agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI") (the "BSMI Facility Agreement"). In connection with the BSMI Facility Agreement, the Company obtained a loan facility in the amount of IDR1,000,000 (the "BSMI Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The purpose of the BSMI Facility Agreement is for the payment of purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk. The Company may select an interest period of one or three months for the BSMI Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the BSMI Loan Facility is one month. The BSMI Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on June 24, 2021.

The BSMI Loan Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.50% per annum. The BSMI Loan Facility was fully drawn on June 29, 2016.

In connection with the provision of the BSMI Facility Agreement, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated June 24, 2016 has also been signed by and between iForte as a company guarantor and BSMI as lender.

The effective interest rate of the loan is 9.06% per annum for the six-month period ended June 30, 2016. The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 40).

As of June 30, 2016, the Company and iForte were in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2015

Pada tanggal 11 Agustus 2015, iForte dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp350.000 dengan PT Bank DBS Indonesia ("BDI") ("Perjanjian Fasilitas BDI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BDI tersebut, iForte menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp350.000 ("Fasilitas Pinjaman BDI") dan Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban iForte atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BDI ini adalah untuk (i) melunasi fasilitas pinjaman yang dimiliki iForte berdasarkan perjanjian fasilitas tertanggal 22 Februari 2013 beserta amandemennya yang dibuat oleh dan antara iForte dan BDI, dan (ii) keperluan korporasi yang bersifat umum dari iForte. iForte dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman BDI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman DBS adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman Berulang BDI jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 11 Agustus 2016.

Fasilitas Pinjaman BDI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 2,15% per tahun. Fasilitas Pinjaman BDI telah dicairkan sebagian pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp150.000, tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp13.000, tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp5.000, tanggal 21 Desember sebesar Rp13.000 dan tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp5.000.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BDI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Pergantian Kerugian Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2015 oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BDI sebagai agen fasilitas.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut berkisar antara 8,22% sampai 8,47% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 9,04% sampai 10,39% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 40.) Selain itu, entitas anak juga diwajibkan untuk memenuhi ketentuan *running EBITDA to interest expenses* dengan nilai rasio

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2015 Loan Facilities

On August 11, 2015, iForte and the Company entered into a IDR350,000 Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank DBS Indonesia ("BDI") (the "BDI Facility Agreement"). In connection with the BDI Facility Agreement, iForte obtained a loan facility in the amount of IDR350,000 (the "BDI Loan Facility"), whereby the Company provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of iForte's liabilities for this facility. The purposes of the BDI Facility Agreement are for (1) repayment of the loan facility of iForte under the facility agreement dated February 22, 2013 along with its amendment made by and between iForte and BDI, and (ii) general corporate purposes of iForte. iForte may select an interest period of one or three months for the BDI Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the DBS Revolving Loan Facility is one month. The BDI Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on August 11, 2016.

The BDI Loan Facility is subjected to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.15% per annum. The BDI Loan Facility was partially drawn on August 14, 2015 in the amount of IDR150,000, on October 6, 2015 in the amount of IDR13,000, on October 13, 2015 in the amount of IDR5,000, on December 21, 2015 in the amount of IDR13,000 and on May 23, 2016 in the amount of IDR5,000.

In connection with the provision of the BDI Facility Agreement, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated August 11, 2015 has also been signed by and between the Company as a company guarantor and BDI as a facility agent.

The effective interest rate of the loan range from 8.22% to 8.47% per annum for the six-month period ended June 30, 2016 and 9.04% to 10.39% per annum for the year ended December 31, 2015. The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 40). Beside these certain ratios, its subsidiaries are also required to comply with *running EBITDA to interest expenses* which ratio is to be greater than 1.30.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2015 (lanjutan)

yang disyaratkan lebih besar dari 1.30. Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014

Pada tanggal 19 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka EUR20.000.000 dan Kredit Berulang AS\$100.000.000 dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC tersebut, Protelindo Finance B.V. menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah EUR20.000.000 ("Fasilitas Pinjaman A") dan AS\$100.000.000 ("Fasilitas Pinjaman B") ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC") dan Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Protelindo Finance B.V. atas fasilitas-fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Protelindo Finance B.V. dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman A akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2019. Fasilitas Pinjaman B akan jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

Fasilitas Pinjaman A akan dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan EURIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman B akan dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2015 Loan Facilities (continued)

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, the Company and its subsidiaries were in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

The 2014 Loan Facilities

On November 19, 2014, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a EUR20,000,000 Term Loan and a US\$100,000,000 Revolving Credit Facilities Agreement with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (the "OCBC Facilities Agreement"). In connection with the OCBC Facilities Agreement, Protelindo Finance B.V. obtained loan facilities in amounts of EUR20,000,000 (the "Loan A Facility"), and US\$100,000,000 (the "Loan B Facility") (the "OCBC Loan Facilities"), whereby the Company provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of Protelindo Finance B.V.'s liabilities for these facilities. The purpose of the OCBC Facilities Agreement is for prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility. Protelindo Finance B.V. may select an interest period of one, three, or six months for the Loan A Facility and Loan B Facility ("Interest Period"). The first Interest Periods for the Loan A Facility and Loan B Facility are three months. The Loan A Facility is due on November 19, 2019. The Loan B Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on November 19, 2019.

The Loan A Facility is subjected to an interest rate equal to EURIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The Loan B Facility is subjected to an interest rate equal to LIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The OCBC Loan Facilities were fully drawn on November 28, 2014.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Dolar AS dan Euro tersebut masing-masing berkisar antara 2,36% sampai 2,40% dan 1,95% sampai 1,95% per tahun (31 Desember 2015: masing-masing sebesar 2,18% sampai 2,36% dan 1,95% sampai 2,03% per tahun, 31 Desember 2014: 2,18% dan 2,03% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 40).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 20 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang AS\$100.000.000 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura ("Perjanjian Fasilitas SMBC"), sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 30 Juni 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah AS\$100.000.000 mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas SMBC kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman SMBC") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Tujuan Perjanjian Fasilitas SMBC ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman SMBC ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman SMBC adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman SMBC jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

The effective interest rates for the six-month period ended June 30, 2016 for the US dollar and Euro loan ranged from 2.36% to 2.40% and 1.95% to 1.95% per annum, respectively (December 31, 2015: ranged from 2.18% to 2.36% and 1.95% to 2.03% per annum, respectively, December 31, 2014: were 2.18% and 2.03% per annum, respectively). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 40).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On November 20, 2014, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a US\$100,000,000 Revolving Loan Facility Agreement with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (the "SMBC Facility Agreement"), as amended by Novation and Amendment Agreement dated June 30, 2016 (the "SMBC Novation and Amendment Agreement"). In connection with the SMBC Novation and Amendment Agreement, Protelindo Finance B.V. which has obtained a loan facility in an amount US\$100,000,000 assign its rights and obligations under the SMBC Facility Agreement to the Company (the "SMBC Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The underlying considerations and reasons on the SMBC Novation and Amendment Agreement are as follows: (i) using the opportunity to conduct the sale of shares of a subsidiary in the Netherlands with substantial capital gains, (ii) to reduce the burden of debt, and (iii) to simplify the structure of loan/financing. The purpose of the SMBC Facility Agreement is for prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility. The Company may select an interest period of one, three, or six months for the SMBC Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the SMBC Loan Facility is three months. The SMBC Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on November 19, 2019.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman SMBC dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman SMBC telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Dolar AS tersebut berkisar antara 2,36% sampai 2,40% per tahun (31 Desember 2015: 2,18% sampai 2,36% per tahun, 31 Desember 2014: 2,18% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu debt service coverage ratio dan net debt to running EBITDA (Catatan 40).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 19 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang AS\$50.000.000 dengan DBS Bank Ltd. ("Perjanjian Fasilitas DBS") sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 30 Juni 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah AS\$50.000.000 mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas DBS kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman DBS") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (capital gain) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Tujuan Perjanjian Fasilitas DBS ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman DBS ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman DBS adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman DBS jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

The SMBC Loan Facility is subjected to an interest rate equal to LIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The SMBC Loan Facility was fully drawn on November 28, 2014.

The effective interest rates for the six-month period ended June 30, 2016 for the US dollar loan ranged from 2.36% to 2.40% per annum (December 31, 2015: ranged from 2.18% to 2.36% per annum, December 31, 2014: was 2.18% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 40).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On November 19, 2014, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a US\$50,000,000 Revolving Loan Facility Agreement with DBS Bank Ltd. (the "DBS Facility Agreement"), as amended by Novation and Amendment Agreement dated June 30, 2016 (the "DBS Novation and Amendment Agreement"). In connection with the DBS Novation and Amendment Agreement, Protelindo Finance B.V. which has obtained a loan facility in an amount US\$50,000,000 assign its rights and obligations under the DBS Facility Agreement to the Company, (the "DBS Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The underlying considerations and reasons on the DBS Novation and Amendment Agreement are as follows: (i) using the opportunity to conduct the sale of shares of a subsidiary in the Netherlands with substantial capital gains, (ii) to reduce the burden of debt, and (iii) to simplify the structure of loan/financing. The purpose of the DBS Facility Agreement is for prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility. The Company may select an interest period of one, three, or six months for the DBS Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the DBS Loan Facility is three months. The DBS Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on November 19, 2019.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman DBS dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman DBS telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Dolar AS tersebut berkisar antara 2,35% sampai 2,40% per tahun (31 Desember 2015: 2,19% sampai 2,36% per tahun, 31 Desember 2014: 2,19% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. (Catatan 40).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 19 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka EUR20.000.000 dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura ("Perjanjian Fasilitas ING"), sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 30 Juni 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan ING"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan ING tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah EUR20.000.000 mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas ING kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman ING") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan ING adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Tujuan Perjanjian Fasilitas ING ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman ING ("Periode Bunga").

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

The DBS Loan Facility is subjected to an interest rate equal to LIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The DBS Loan Facility was fully drawn on November 28, 2014.

The effective interest rates for the six-month period ended June 30, 2016 for the US dollar loan ranged from 2.35% to 2.40% per annum (December 31, 2015: ranged from 2.19% to 2.36% per annum, December 31, 2014: was 2.19% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 40).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On November 19, 2014, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a EUR20,000,000 Term Loan Facility Agreement with ING Bank N.V., Singapore Branch (the "ING Facility Agreement"), as amended by Novation and Amendment Agreement dated June 30, 2016 (the "ING Novation and Amendment Agreement"). In connection with the ING Novation and Amendment Agreement, Protelindo Finance B.V. which has obtained a loan facility in an amount EUR20,000,000 assigns its rights and obligations under the ING Novation and Amendment Agreement to the Company (the "ING Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The underlying considerations and reasons on the ING Novation and Amendment Agreement are as follows: (i) using the opportunity to conduct the sale of shares of a subsidiary in the Netherlands with substantial capital gains, (ii) to reduce the burden of debt, and (iii) to simplify the structure of loan/financing. The purpose of ING Facility Agreement is for prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility. The Company may select an interest period of one, three, or six months for the ING Loan Facility ("Interest Period").

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman ING adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman ING jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

Fasilitas Pinjaman ING dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan EURIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman ING telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Euro tersebut berkisar antara 1,95% per tahun (31 Desember 2015: 1,95% sampai 2,03% per tahun, 31 Desember 2014: 2,03% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 40).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 20 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Kredit Berulang AS\$90.000.000 dengan grup kreditur yang terdiri BNP Paribas, bertindak melalui cabangnya di Singapura, Credit Suisse AG, Cabang Singapura, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Pusat Keuangan Internasional Dubai, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta, dan JPMorgan Chase Bank, N.A, Cabang Jakarta ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi tersebut, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah AS\$90.000.000 ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi"). Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Protelindo Finance B.V. dan Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

The first Interest Period for the ING Loan Facility is three months. The ING Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on November 19, 2019.

The ING Loan Facility is subjected to an interest rate equal to EURIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The ING Loan Facility was fully drawn on November 28, 2014.

The effective interest rate for the six-month period ended June 30, 2016 for the Euro loan was 1.95% per annum (December 31, 2015: ranged from 1.95% to 2.03% per annum, December 31, 2014: was 2.03% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 40).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On November 20, 2014, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a US\$90,000,000 Revolving Loan Facilities Agreement (the "Syndicated Facilities Agreement") with a lender group consisting of BNP Paribas, acting through its Singapore Branch, Credit Suisse AG, Singapore Branch, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Standard Chartered Bank, Dubai International Financial Centre Branch, regulated by the Dubai Financial Services Authority, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, and JPMorgan Chase Bank, N.A, Jakarta Branch. In connection with the Syndicated Facilities Agreement, Protelindo Finance B.V. and the Company obtained a loan facility in an amount US\$90,000,000 (the "Syndicated Loan Facilities"). The Company provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of liabilities of Protelindo Finance B.V. for these facilities. The purpose of Syndicated Facilities Agreement is for prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Protelindo Finance B.V. atau Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi adalah tiga bulan. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi jatuh tempo pada Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 26 November 2014.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 untuk pinjaman dalam Dolar AS tersebut berkisar antara 2,36% sampai 2,40% per tahun (31 Desember 2015: 2,18% sampai 2,36% per tahun, 31 Desember 2014: 2,18% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. (Catatan 40).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas Pinjaman Desember 2012

Pada tanggal 20 Desember 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas sampai dengan Rp1.100.000 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama tanggal 20 Mei 2013, Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 25 Februari 2014, Perjanjian Perubahan tanggal 30 Juni 2015 dan Perjanjian Perubahan terakhir tanggal 30 Juni 2016 ("Fasilitas Pinjaman Desember 2012") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Seluruh dana dari Fasilitas Pinjaman Desember 2012 telah digunakan untuk membayar Pinjaman Antar Perusahaan kepada Protelindo Towers B.V. Protelindo Towers B.V., selanjutnya, telah mendistribusikan dana yang diterima kepada Protelindo Netherlands B.V. yang selanjutnya telah digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman dari Protelindo Finance B.V.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

Protelindo Finance B.V. or the Company may select an interest period of one, three, or six months for the Syndicated Loan Facilities ("Interest Period"). The first Interest Period for the Syndicated Loan Facilities are three months. The Syndicated Loan Facilities are due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on November 19, 2019.

The Syndicated Loan Facilities are subjected to an interest rate equal to LIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The Syndicated Loan Facilities was fully drawn on November 26, 2014.

The effective interest rate for the six-month period ended June 30, 2016 for the US dollar loan ranged from 2.36% to 2.40% per annum (December 31, 2015: ranged from 2.18% to 2.36% per annum, December 31, 2014: was 2.18% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 40).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

The December 2012 Loan Facility

On December 20, 2012, the Company entered into the Up To Rp1,100,000 Facility Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. as amended by the First Amendment Agreement dated May 20, 2013, the Second Amendment Agreement dated February 25, 2014, the Amendment Agreement dated June 30, 2015 and by the latest Amendment Agreement dated June 30, 2016 (the "December 2012 Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. All funds from the December 2012 Loan Facility were used to repay a portion of the Intercompany Loan for Protelindo Towers B.V.. Protelindo Towers B.V., which, in turn, distributed the funds received to Protelindo Netherlands B.V. which, in turn, used the funds received to repay a portion of the loan from Protelindo Finance B.V.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2012 (lanjutan)

Selanjutnya Protelindo Finance B.V. menggunakan dana yang diterima untuk membayar sebagian Fasilitas Pinjaman *Bridge* yang diterimanya.

Fasilitas Pinjaman Desember 2012 ini akan dibayar secara kuartalan mulai 31 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2019 dan dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 2,95% per tahun. Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 berkisar antara 8,53% sampai 10,85% per tahun (31 Desember 2015 berkisar antara 9,17% sampai per 10,85% per tahun, 31 Desember 2014 berkisar antara 9,55% sampai dengan 10,90% per tahun, 31 Desember 2013 berkisar antara 7,50% sampai dengan 10,45% per tahun).

Perseroan diminta untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 40). Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan telah melunasi cicilan pinjaman masing-masing sebesar Rp55.000, Rp110.000, Rp44.000, dan Rp27.500. Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 jumlah sisa pinjaman dari Fasilitas Pinjaman Desember 2012 masing-masing sebesar Rp863.500, Rp918.500, Rp1.028.500 dan Rp1.072.500.

Fasilitas Pinjaman Desember 2011

Pada tanggal 23 Desember 2011, Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai maksimum sampai dengan sebesar Rp2.000.000 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 10 Desember 2012, Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 20 Desember 2012, Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 20 Mei 2013, Perjanjian Perubahan Keempat tertanggal 25 Februari 2014, Perjanjian Perubahan tanggal 30 Juni 2015 dan Perjanjian Perubahan terakhir tanggal 30 Juni 2016 ("Fasilitas Pinjaman Desember 2011") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2012 Loan Facilities (continued)

Subsequently, Protelindo Finance B.V. used the funds received to repay a portion of the Bridge Loan Facility.

The December 2012 Loan Facility is payable in quarterly installments starting on December 31, 2012 through December 19, 2019 and is subjected to interest at JIBOR plus an applicable margin of 2.95% per annum. The effective interest rates for the six-month period ended June 30, 2016 ranged from 8.53% to 10.85% per annum (December 31, 2015 ranged from 9.17% to 10.85% per annum, December 31, 2014 ranged from 9.55% to 10.90% per annum, and December 31, 2013 ranged from 7.50% to 10.45% per annum).

The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 40). As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

For six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company has paid the loan installment amounting to Rp55,000, Rp110,000, Rp44,000 and Rp27,500, respectively. As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, the outstanding amount of the December 2012 Loan Facility amounted to Rp863,500, Rp918,500, Rp1,028,500 and Rp1,072,500, respectively.

The December 2011 Loan Facility

On December 23, 2011, the Company obtained a Loan Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. for a maximum amount of up to Rp2,000,000, as amended by an Amendment Agreement dated December 10, 2012 and by a Second Amendment Agreement dated December 20, 2012 and by a Third Amendment Agreement dated May 20, 2013, by the Fourth Amendment Agreement dated February 25, 2014, the Amendment Agreement dated June 30, 2015 and by the latest Amendment Agreement dated June 30, 2016 (the "December 2011 Loan Facility") whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2011 (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman ini digunakan untuk (i) membayar biaya-biaya dan beban-beban yang terkait, (ii) untuk membiayai akuisisi menara, akuisisi kepemilikan saham perusahaan-perusahaan menara telekomunikasi, membiayai pembangunan *build to suit* untuk lokasi menara yang baru, dan (iii) untuk melunasi fasilitas yang ada sebatas diijinkan berdasarkan Fasilitas Pinjaman Mei 2010, Fasilitas Pinjaman Mei 2011 dan Fasilitas Pinjaman Desember 2010. Pinjaman ini telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 2 November 2012.

Fasilitas Pinjaman Desember 2011 ini dibayar secara kuartalan mulai 31 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2018. Fasilitas Pinjaman Desember 2011 ini dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 2,95% per tahun. Terhitung sejak 7 Juli 2015, margin yang berlaku adalah sebesar 2,50% per tahun. Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 berkisar antara 8,53% sampai 10,85% per tahun (31 Desember 2015 berkisar antara 9,17% sampai per 10,85% per tahun, 31 Desember 2014 berkisar antara 9,55% sampai dengan 10,90% per tahun, 31 Desember 2013 berkisar antara 7,50% sampai dengan 10,45% per tahun).

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian Perubahan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ("Perjanjian Perubahan") yang merupakan perubahan perjanjian Fasilitas Pinjaman Desember 2011. Perjanjian Perubahan mengubah ketentuan, diantaranya, mengenai jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dimana seluruh jaminan sebelumnya yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah dilepaskan.

Perseroan diminta untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 40).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2011 Loan Facilities (continued)

The purposes of this loan were (i) to pay any transaction fees and expenses, (ii) to fund acquisition of towers, acquisition of ownership interests in tower companies, and the build to suit construction of new tower sites, and (iii) to repay the existing facilities to the extent permitted under the May 2010 Loan Facility, the May 2011 Loan Facility and the December 2010 Loan Facility. The loan was fully drawn on November 2, 2012.

The December 2011 Loan Facility was payable in quarterly installments starting on December 31, 2012 through December 22, 2018. The December 2011 Loan Facility was subject to interest at JIBOR plus an applicable margin of 2.95% per annum. Starting from July 7, 2015 the applicable margin is 2.50% per annum. The effective interest rate for the six-month period ended June 30, 2016 ranged from 8.53% to 10.85% per annum (December 31, 2015 ranged from 9.17% to 10.85% per annum, December 31, 2014 ranged from 9.55% to 10.90% per annum, and December 31, 2013 ranged from 7.50% to 10.45% per annum).

On December 10, 2012, the Company signed an Amendment Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (the "Amendment Agreement") as an amendment to the December 2011 Loan Facility Agreement. The Amendment Agreement amended, among others, the provision regarding security granted by the Company to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. whereby all previous security granted by the Company to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. had been released.

The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 40).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman Desember 2011 (lanjutan)

Untuk periode enam bulan pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan telah melunasi cicilan pinjaman masing-masing sebesar Rp79.219, Rp96.024, Rp96.024, dan Rp80.000. Pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 jumlah sisa pinjaman dari Fasilitas Pinjaman Desember 2012 masing-masing sebesar Rp640.957, Rp720.176, Rp816.200 dan Rp912.223.

Pinjaman Management Tower Europe

Pada tanggal 19 Desember 2012, Management Tower Europe S.à r.l. memberikan pinjaman sebesar €17.227.723 kepada Protelindo Netherlands B.V., yang akan jatuh tempo pada bulan November 2022 dengan suku bunga 8% per tahun dan dibayar setiap tahun ("Fasilitas Pinjaman MTE"). Berdasarkan *Set-off Agreement* yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2015, antara Management Tower Europe S.à r.l. dan Protelindo Netherlands B.V., jumlah terutang berdasarkan Fasilitas Pinjaman MTE berkurang menjadi €14.670.462 sejak tanggal 15 Desember 2014, sebagai akibat dari pembagian distribusi interim yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat *managing board* dari Protelindo Netherlands B.V. tanggal 26 November 2014, yang melebihi cadangan yang dapat dibagikan dari Protelindo Netherlands B.V. kepada Management Tower Europe S.à r.l. untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BCA

Pada tanggal 13 November 2012, iForte menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") yang mana iForte mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.300 ("Fasilitas Pinjaman BCA 2012"). Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan renovasi ruko. Fasilitas Pinjaman BCA 2012 tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2022 dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,25% per tahun. Fasilitas Pinjaman BCA 2012 dijamin dengan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2406/Kebon Kelapa dan 2411/Kebon Kelapa, Jakarta Selatan atas nama iForte.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

The December 2011 Loan Facility (continued)

For six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company has paid the loan installments amounting to Rp79,219, Rp96,024, Rp96,024 and Rp80,000, respectively. As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, the outstanding amount of the December 2012 Loan Facility amounted to Rp640,957, Rp720,176, Rp816,200 and Rp912,223, respectively.

The Management Tower Europe Loan Facility

On December 19, 2012 Management Tower Europe S.à r.l. loaned €17,227,723 to Protelindo Netherlands B.V., which is due to be repaid in full in November 2022 and is subject to an interest rate of 8% per annum and paid annually (the "MTE Loan Facility"). Based on *Set-off Agreement* entered into on March 19, 2015, between Management Tower Europe S.à r.l. and Protelindo Netherlands B.V., the outstanding amount under the MTE Loan Facility was reduced to €14,670,462 as per December 15, 2014, as a result of the interim distribution effected as stated by minutes of meeting of the managing board of Protelindo Netherlands B.V. on November 26, 2014 which exceeded the freely distributable reserves that can be made by Protelindo Netherlands B.V. to Management Tower Europe S.à r.l. for the financial year ended on December 31, 2014.

BCA Loan Facilities

On November 13, 2012, iForte entered into a Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") in which iForte obtained a loan facility with a total amount of Rp1,300 (the "BCA 2012 Loan Facility"). This loan facility was used to finance building renovation. The BCA 2012 Loan Facility will be due on November 13, 2022 and is subject to a fixed interest rate of 12.25% per annum. The BCA 2012 Loan Facility is secured by plots of land with Right to Build Certificates No. 2406/Kebon Kelapa and 2411/Kebon Kelapa, South Jakarta, registered under the name of iForte.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BCA (lanjutan)

Pada tanggal 8 Maret 2013, iForte menandatangani Perjanjian Kredit dengan BCA yang mana iForte mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.750 ("Fasilitas Pinjaman BCA 2013"). Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan renovasi ruko. Fasilitas Pinjaman BCA 2013 akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2022 dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,25% per tahun. Fasilitas Pinjaman BCA 2013 dijamin dengan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1664/Bintaro, Jakarta Selatan atas nama iForte.

Pada tanggal 6 Januari 2015, iForte menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit dengan BCA yang mana iForte mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.500 ("Fasilitas Pinjaman BCA 2015"). Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membayar kembali pembelian tanah serta pembangunan kantor dan warehouse. Fasilitas Pinjaman BCA 2015 tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,25% per tahun. Fasilitas Pinjaman BCA 2015 dijamin dengan beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2406/Kebon Kelapa, No. 2411/Kebon Kelapa dan No.1664/Bintaro, Jakarta Selatan atas nama iForte.

Pada tanggal 21 Januari 2015, iForte menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit dengan BCA mengenai penambahan jaminan dalam Fasilitas Pinjaman BCA 2012, Fasilitas Pinjaman BCA 2013 dan Fasilitas Pinjaman BCA 2015 berupa beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2406, No. 2411/ Kebon Kelapa, Jakarta Selatan, No. 1664/ Bintaro, dan No. 579/ Cadas Ngampar, Jawa Barat atas nama iForte. Pada tanggal 23 Desember 2015, iForte telah melunasi seluruh Fasilitas Pinjaman BCA 2012, Fasilitas Pinjaman BCA 2013 dan Fasilitas Pinjaman BCA 2015.

17. LONG-TERM LOANS (continued)

BCA Loan Facilities (continued)

On March 8, 2013, iForte entered into a Credit Agreement with BCA in which iForte obtained a loan facility with a total amount of Rp1,750 (the "BCA 2013 Loan Facility"). This loan facility was used to finance building renovation. The BCA 2013 Loan Facility will be due on November 13, 2022 and is subject to a fixed interest rate of 12.25% per annum. The BCA 2013 Loan Facility is secured by a plot of land with Right to Build Certificate No. 1664/Bintaro, South Jakarta, registered under the name of iForte.

On January 6, 2015, iForte entered into an Amendment of Credit Agreement with BCA in which iForte obtained a loan facility with a total amount of Rp3,500 (the "BCA 2015 Loan Facility"). This loan facility was used to pay the purchase of plots of land, construction of office and warehouse. The BCA 2015 Loan Facility will be due on January 6, 2016 and is subject to a fixed interest rate of 12.25% per annum. The BCA 2015 Loan Facility is secured by plots of land with Right to Build Certificates No. 2406/Kebon Kelapa, 2411/Kebon Kelapa and No.1664/Bintaro, South Jakarta, registered under the name of iForte.

On January 21, 2015, iForte entered into an Amendment of Credit Agreement with BCA regarding additional securities for the BCA 2012 Loan Facility and the BCA 2013 Loan Facility and the BCA 2015 Loan Facility in the form of several plots of land with Right to Build Certificate No. 2406, No. 2411/Kebon Kelapa, South Jakarta, No. 1664/Bintaro, and No. 579/Cadas Ngampar, West Java registered under the name of iForte. On December 23, 2015, iForte fully paid the BCA 2012 Loan Facilities, the BCA 2013 Loan Facilities, and the BCA 2015 Loan Facilities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Protelindo I Tahun 2014

Pada tanggal 20 Februari 2014, Protelindo telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-95/D.04/2014 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014 ("Obligasi") dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Maret 2014. Obligasi ini dikeluarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017. Wali amanat sehubungan dengan penawaran umum ini adalah PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Protelindo. Pada tanggal 13 Mei 2015, Obligasi Protelindo I Tahun 2014 mendapat peringkat AA+ (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Pada tanggal 13 Mei 2016, peringkat Obligasi Protelindo I Tahun 2014 telah ditingkatkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia menjadi AAA (idn).

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi telah dipergunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian saldo utang Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bunga dari Obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2014 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok Obligasi. Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

18. BONDS PAYABLE (continued)

Protelindo Bonds I Year 2014

On February 20, 2014, Protelindo received an effective statement from OJK based on its letter No. S-95/D.04/2014 in conjunction with the Public Offering of Protelindo Bonds I Year 2014 (the "Bonds") with a nominal value of Rp1,000,000 which were listed on the Indonesia Stock Exchange on March 3, 2014. The Bonds were issued with a fixed interest rate of 10.5% per annum and a term of three years, and will be due on February 28, 2017. PT Bank Permata Tbk. is the trustee in connection with this public offering. PT Bank Permata Tbk. is not an affiliated party nor a lender of Protelindo. On May 13, 2015, Protelindo Bonds I Year 2014 were rated AA+ (idn) by PT Fitch Ratings Indonesia. On May 13, 2016, the rating of Protelindo Bonds I Year 2014 was upgraded by PT Fitch Ratings Indonesia to AAA (idn).

The proceeds from the Bond issuance has been used for early repayment of part of the Company's outstanding loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Interest on the Bonds will be paid on a quarterly basis with the first payment being due on May 28, 2014 and the last payment will be made along with the repayment principal. The trustee agreement provides for several covenants of the Company, including, without limitation:

- a. A prohibition to provide loans to any party, including to Company's Affiliates, in an amount more than 20% of the equity of the Company except for, among others, loans related to the business activities of the Company;
- b. To maintain a ratio of the total Net Debt to *Running EBITDA* ("Debt Ratio") of not more than 5:1, except in certain conditions, the Company is allowed to have a Debt Ratio up to 7:1; and
- c. To maintain a ratio of *Running EBITDA* to Cash Interest Expense of not less than 1.5:1.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Protelindo I Tahun 2014 (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang terakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar 10,565%.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance B.V. menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar S\$180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang akan jatuh tempo di 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran dari Protelindo Finance B.V. sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh *Credit Guarantee and Investment Facility* ("CGIF"), sebuah dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF. Sehubungan dengan Obligasi Senior, Perseroan, Protelindo Finance B.V., dan CGIF telah menandatangani suatu perjanjian pembayaran kembali dan ganti rugi yang mana, antara lain, mengatur tentang pembayaran biaya penjaminan dan lainnya sehubungan Jaminan CGIF dan dasar dari biaya yang dibayarkan oleh CGIF berdasarkan Jaminan CGIF akan diganti dan dijamin oleh Protelindo Finance B.V. dan Perseroan.

DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Senior. Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT") pada tanggal 28 November 2014.

18. BONDS PAYABLE (continued)

Protelindo Bonds I Year 2014 (continued)

As of June 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014, the Company is in compliance with the aforementioned covenants.

The effective interest rate for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015 and 2014 was 10.565%.

The Company may buy back the Bonds in part or in whole at any time after the first anniversary of the allotment date.

These Bonds are not secured by any specific collateral.

The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024

On November 27, 2014, Protelindo Finance B.V. issued the 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds amounting to S\$180,000,000 which is due in 2024 (the "Senior Bonds"). The payment obligations of Protelindo Finance B.V. in respect of the Senior Bonds will be unconditionally and irrevocably guaranteed by *Credit Guarantee and Investment Facility* ("CGIF"), a trust fund of the Asian Development Bank, subject to the terms of the CGIF Guarantee. In relation to the Senior Bonds, the Company, Protelindo Finance B.V., and CGIF have entered in a reimbursement and indemnity agreement which, among other things, specifies the payment of guarantee fees and other amounts in respect of the CGIF Guarantee and the basis on which amounts paid by the CGIF under the CGIF Guarantee are to be reimbursed and indemnified by Protelindo Finance B.V. and the Company.

DB Trustees (Hong Kong) Limited acts as a trustee in respect to the issuance of the Senior Bonds. The Senior Bonds were listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT") on November 28, 2014.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

**Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo
2024 (lanjutan)**

Obligasi Senior tersebut dikenakan bunga sejak 27 November 2014 pada tingkat suku bunga sebesar 3,25 % per tahun, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November, setiap tahunnya, dimulai sejak 27 Mei 2015. Dibawah ini adalah beberapa ketentuan sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut:

- a) Baik Perseroan, Protelindo Finance B.V. ataupun para entitas anaknya akan membuat atau mengizinkan untuk menjamin seluruh atau sebagian dari properti, aset ataupun pendapatan (termasuk saham yang belum dibayarkan) yang ada atau yang akan ada.
- b) Protelindo Finance B.V. akan tetap menjadi entitas anak dari Perseroan.

Tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang terakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 3,27%, 3,27% dan 3,29%.

Pada tanggal 13 November 2014, Standard dan Poor's Ratings Services memberikan peringkat 'AA' untuk Obligasi Senior tersebut. Protelindo Finance B.V. mempergunakan dana dari penerbitan Obligasi Senior, setelah dipotong biaya manajemen, komisi dan biaya lainnya sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut, untuk melunasi sebagian dari pinjamannya yang ada.

19. PROVISI JANGKA PANJANG

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

	Saldo 31 Des./ Balance Dec 31, 2015	Provisi tambahan/ Additional provision	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ Amount realized and expense	Kenaikan selama periode/ Increase during the period	Selisih kurs/ Foreign exchange	Saldo 30 Juni/ Balance June 30, 2016
Estimasi biaya pembongkaran properti investasi	208.638	39.675	(2.185)	6.749	(1.010)	251.867

*Estimated cost of dismantling
of investment properties*

18. BONDS PAYABLE (continued)

**The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due
2024 (continued)**

The Senior Bonds bear interest starting from November 27, 2014 at the rate of 3.25 % per annum, payable semi-annually in arrears on May 27 and November 27 each year, commencing on May 27, 2015. Below are several covenants in relation to the Senior Bonds:

- a) Neither the Company, Protelindo Finance B.V., nor their subsidiaries shall create or permit to exist any security interest on the whole or any part of its present or future property, assets or revenues (including uncalled share capital).
- b) Protelindo Finance B.V. shall remain a subsidiary of the Company.

The effective interest rates for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015 and 2014 are 3.27%, 3.27% and 3.29%, respectively.

On November 13, 2014, Standard and Poor's Ratings Services rated the Senior Bonds with 'AA'. Protelindo Finance B.V. used the proceeds from the issuance of the Senior Bonds, after deducting management fees, commissions and other expenses associated with the Senior Bonds, to settle a portion of its existing debt.

19. LONG-TERM PROVISION

Six-month period ended June 30, 2016

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PROVISI JANGKA PANJANG (lanjutan)

Asumsi signifikan pada tanggal 30 Juni 2016 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing sebesar 8,76% dan 15,76 tahun.

19. LONG-TERM PROVISION (continued)

The significant assumptions as of June 30, 2016 consist of discount rate and remaining periods before dismantling are 8.76% and 15.76 years, respectively.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Year ended December 31, 2015

	Saldo 31 Des./ Balance Dec 31, 2014	Provisi tambahan/ Additional provision	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ Amount realized and expense	Kenaikan selama tahun/ Increase during the year	Selisih kurs/ Foreign exchange	Saldo 31 Des./ Balance Dec. 31, 2015	
Estimasi biaya pembongkaran properti investasi	171.222	37.219	(727)	1.065	(141)	208.638	Estimated cost of dismantling of investment properties

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Year ended December 31, 2014

	Saldo 31 Des./ Balance Dec 31, 2013	Provisi tambahan/ Additional provision	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ Amount realized and expense	Kenaikan selama tahun/ Increase during the year	Selisih kurs/ Foreign exchange	Saldo 31 Des./ Balance Dec. 31, 2014	
Estimasi biaya pembongkaran properti investasi	150.025	24.897	(762)	1.135	(4.073)	171.222	Estimated cost of dismantling of investment properties

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Year ended December 31, 2013

	Saldo 31 Des./ Balance Dec 31, 2012	Provisi tambahan/ Additional provision	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ Amount realized and expense	Kenaikan selama tahun/ Increase during the year	Selisih kurs/ Foreign exchange	Saldo 31 Des./ Balance Dec. 31, 2013	
Estimasi biaya pembongkaran properti investasi	126.073	16.587	(389)	-	7.754	150.025	Estimated cost of dismantling of investment properties

Pembongkaran properti investasi akan dilakukan pada saat selesainya masa sewa lahan terkait properti investasi tersebut.

Dismantling of investment properties will be realized at the end of land rent period of the related investment properties.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN

20. TAXATION

**a. Pajak dibayar
pengembalian pajak dimuka/Estimasi**

a. Prepaid taxes/Refundable taxes

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
<u>Aset lancar</u>					<u>Current assets</u>
Perseroan:					The Company:
Pajak pertambahan nilai	344.648	22.231	19.044	-	Value added tax
Entitas anak:					The subsidiaries:
Pajak pertambahan nilai	1.047	2.266	-	-	Value added tax
Konsolidasi:	345.695	24.497	19.044	-	Consolidations:
<u>Aset tidak lancar</u>					<u>Non-current assets</u>
Perseroan:					The Company:
Lebih bayar					Refundable corporate
pajak penghasilan badan - 2013	-	-	80.380	80.380	income tax - 2013
Entitas anak:					The subsidiaries:
Lebih bayar					Refundable corporate
pajak penghasilan badan - 2014	-	1.744	-	-	income tax - 2014
Lebih bayar					Refundable corporate
pajak penghasilan badan - 2015	2.175	2.175	-	-	income tax - 2015
Lebih bayar					Refundable corporate
pajak penghasilan badan - 2016	525	-	-	-	income tax - 2016
	2.700	3.919	80.380	80.380	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
<u>Perseroan:</u>					<u>The Company:</u>
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	14.061	Value added tax
Pajak penghasilan					Employee income tax -
karyawan - Pasal 21	6	1.230	1.339	1.097	Article 21
Pemotongan pajak					Withholding income tax -
penghasilan - Pasal 23/26	-	589	1.033	707	Articles 23/26
Pemotongan pajak					Withholding income tax -
penghasilan - Pasal 4(2)	-	2.371	5.130	3.626	Article 4(2)
Pajak penghasilan - 2013	-	-	-	1.687	Corporate income tax - 2013
Pajak penghasilan - 2014	-	-	324.861	-	Corporate income tax - 2014
Pajak penghasilan - 2015	-	51.083	-	-	Corporate income tax - 2015
Pajak penghasilan - 2016	133.264	-	-	-	Corporate income tax - 2016
	133.270	55.273	332.363	21.178	
<u>Entitas anak:</u>					<u>The subsidiaries:</u>
Pajak pertambahan nilai	106	1.672	1.931	2.436	Value added tax
Pajak penghasilan karyawan	488	167	164	113	Employee income tax
Pemotongan pajak					Withholding income tax -
penghasilan - Pasal 23/26	264	377	-	-	Articles 23/26
Pemotongan pajak					Withholding income tax -
penghasilan - Pasal 4(2)	36	43	-	-	Article 4(2)
Pajak penghasilan - 2012	-	-	-	5	Corporate income tax - 2012
Pajak penghasilan - 2013	-	-	-	199	Corporate income tax - 2013
Pajak penghasilan - 2014	-	-	26	-	Corporate income tax - 2014
Pajak penghasilan - 2015	83	3.401	-	-	Corporate income tax - 2015
Pajak penghasilan - 2016	7.477	-	-	-	Corporate income tax - 2016
	8.454	5.660	2.121	2.753	
	141.724	60.933	334.484	23.931	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak (lanjutan)

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	1.782.282	1.573.587	3.946.526	1.545.194	208.246	Consolidated income before corporate income tax
Laba (rugi) entitas anak sebelum pajak penghasilan	5.353	4.858	31.004	(3.513)	(9.178)	Subsidiaries income (losses) before corporate income tax
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	1.787.635	1.568.729	3.915.522	1.548.707	217.424	Income before corporate income tax - the Company
Ditambah (dikurangi):						Add (less):
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Provisi imbalan kerja	14.278	(1.270)	863	12.427	13.585	Provision for employee benefits
Akrual bonus karyawan	(19.002)	(16.027)	(3.066)	4.890	13.490	Accrued employee bonuses
Biaya pinjaman	(2.265)	29.160	53.241	188.174	(164.494)	Cost of loans
Provisi biaya perijinan dan lisensi	7.070	6.285	17.678	14.459	(36.880)	Provision for permits and licenses
Depresiasi aset tetap	(435)	1.379	2.611	4.935	3.027	Fixed assets depreciation
Depresiasi properti investasi	(379.404)	(378.239)	(737.133)	(743.275)	(633.762)	Investment properties depreciation
(Kenaikan) penurunan nilai wajar properti investasi	(122.146)	(539.327)	(1.631.663)	408.220	654.007	(Increase) decrease of fair value investment properties
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	132.591	-	453	225.690	36.471	Allowance for impairment of trade receivables
Provisi untuk potongan harga	(12.703)	486	(1)	5.769	5.701	Provision for discount
Provisi untuk perawatan umum	-	-	-	-	(9.837)	Provision of general maintenance
Perbedaan permanen:						Permanent differences:
Pendapatan bunga telah dikenakan pajak penghasilan final - disajikan bersih	(27.765)	(7.201)	(14.737)	(6.905)	(3.739)	Interest income subject to final income tax, reported on a net of tax basis
Pendapatan lainnya yang tidak dikenakan pajak, neto	-	-	(22.119)	-	-	Non-taxable income, net
Beban yang tidak dapat dikreditkan, neto	24.363	29.529	-	14.851	28.917	Non-deductible expenses, net
Penghasilan kena pajak	1.402.217	693.504	1.581.649	1.677.942	123.910	Taxable income
Beban pajak kini perseroan atas laba kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku	350.554	173.376	395.412	419.485	30.978	Current corporate income tax expense on income subject to tax at statutory rate
Kekurangan provisi atas beban pajak kini sebelumnya	-	-	3.626	-	-	Under provision from previous corporate income tax
Beban pajak kini entitas anak	8.764	127	4.150	77	236	Current corporate income tax subsidiaries
	359.318	173.503	403.188	419.562	31.214	
Dikurangi pembayaran pajak dimuka - Perseroan:						Less prepaid taxes- the Company:
Pasal 23	56.853	63.117	91.188	81.963	65.776	Article 23
Pasal 25	160.437	84.380	253.141	12.661	45.582	Article 25
Pajak dibayar dimuka - entitas anak	1.812	44	749	51	37	Prepaid taxes - subsidiaries
	219.102	147.541	345.078	94.675	111.395	
Utang pajak penghasilan badan (Pengembalian lebih bayar pajak):						Corporate income tax payable (Refundable income tax):
Perseroan	133.264	25.879	51.083	324.861	(80.380)	The Company
Entitas anak	6.952	83	1.226	26	199	The subsidiaries
	140.216	25.962	52.309	324.887	(80.181)	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak (lanjutan)

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perseroan dan masing-masing entitas anaknya sebagai entitas hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan).

Taksiran penghasilan kena pajak menjadi dasar dalam SPT Tahunan pajak penghasilan badan tahun 2015, 2014 dan 2013.

c. Analisa beban pajak penghasilan

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
Perseroan						The Company
Beban pajak kini	350.553	173.376	395.412	419.485	30.978	Current tax expense
Kekurangan provisi atas beban pajak kini sebelumnya	-	-	3.626	-	-	Under provision from previous corporate income tax
Beban pajak tangguhan	95.504	224.479	574.254	37.104	29.673	Deferred tax expense
	446.057	397.855	973.292	456.589	60.651	
Entitas anak						The subsidiaries
Beban pajak kini	8.764	127	4.150	77	236	Current tax expense
Beban (manfaat) pajak tangguhan	2.687	1.130	12.334	(1.156)	(2.571)	Deferred tax expense (benefit)
	11.451	1.257	16.484	(1.079)	(2.335)	
Konsolidasian						Consolidated
Beban pajak kini	359.317	173.503	399.562	419.562	31.214	Current tax expense
Kekurangan provisi atas beban pajak kini sebelumnya	-	-	3.626	-	-	Under provision from previous corporate income tax
Beban pajak tangguhan	98.191	225.609	586.588	35.948	27.102	Deferred tax expense
	457.508	399.112	989.776	455.510	58.316	

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan Perseroan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

20. TAXATION (continued)

b. Taxes payable (continued)

In accordance with Indonesia Taxation Law, corporate income tax is calculated for the Company and each of its subsidiaries in the understanding that they are separate legal entities (consolidated financial statements are not permitted for computing corporate income tax) on an annual basis.

The estimated taxable income is used for the basis of the 2015, 2014 and 2013 annual corporate income tax return.

c. Analysis of corporate income tax expense

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
Perseroan						The Company
Beban pajak kini	350.553	173.376	395.412	419.485	30.978	Current tax expense
Kekurangan provisi atas beban pajak kini sebelumnya	-	-	3.626	-	-	Under provision from previous corporate income tax
Beban pajak tangguhan	95.504	224.479	574.254	37.104	29.673	Deferred tax expense
	446.057	397.855	973.292	456.589	60.651	
Entitas anak						The subsidiaries
Beban pajak kini	8.764	127	4.150	77	236	Current tax expense
Beban (manfaat) pajak tangguhan	2.687	1.130	12.334	(1.156)	(2.571)	Deferred tax expense (benefit)
	11.451	1.257	16.484	(1.079)	(2.335)	
Konsolidasian						Consolidated
Beban pajak kini	359.317	173.503	399.562	419.562	31.214	Current tax expense
Kekurangan provisi atas beban pajak kini sebelumnya	-	-	3.626	-	-	Under provision from previous corporate income tax
Beban pajak tangguhan	98.191	225.609	586.588	35.948	27.102	Deferred tax expense
	457.508	399.112	989.776	455.510	58.316	

d. Reconciliation of corporate income tax expense

Reconciliations between income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and income tax expense calculated using prevailing tax rates on the consolidated income before corporate income tax are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

**d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan
(lanjutan)**

**d. Reconciliation of corporate income tax
expense (continued)**

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	1.782.282	1.573.587	3.946.526	1.545.194	208.246	Consolidated income before corporate income tax
Beban pajak dihitung dengan tarif 25% yang berlaku umum	445.571	393.397	986.632	386.299	52.062	Tax expense calculated at statutory rates of 25% Tax effect of permanent differences:
Efek pajak atas perbedaan permanen: Pendapatan lainnya telah dikenakan pajak penghasilan final	(6.943)	(1.710)	(9.214)	(1.726)	(935)	Other income subject to final income tax
Kekurangan provisi atas beban pajak kini sebelumnya	-	-	3.626	-	-	Under provision from previous corporate income tax
Beban yang tidak dapat dikreditkan	18.880	7.425	8.732	3.513	7.189	Non-deductible expenses
Penyisihan nilai	-	-	-	67.424	-	Valuation allowance
Total beban pajak penghasilan konsolidasian	457.508	399.112	989.776	455.510	58.316	Total consolidated income tax expense

e. Aset (liabilitas) pajak tangguhan, neto

e. Deferred tax assets (liabilities), net

Analisa saldo (liabilitas) aset pajak tangguhan,
neto adalah sebagai berikut:

An analysis of the deferred tax (liabilities)
assets, net is as follows:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Perseroan:					The Company:
Aset pajak tangguhan:					Deferred tax assets:
Provisi biaya perijinan dan lisensi	22.754	20.987	16.567	12.953	Provision for permits and licenses
Provisi imbalan kerja	14.823	9.424	12.281	9.174	Provision for employee benefits
Akrual bonus karyawan	3.906	8.656	9.423	8.200	Accrued employee bonuses
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	33.261	114	-	11.002	Impairment allowance of trade receivables
	74.744	39.181	38.271	41.329	
Liabilitas pajak tangguhan:					Deferred tax liabilities
Aset tetap	5.279	5.388	4.735	3.501	Fixed assets
Properti investasi	(1.613.311)	(1.487.924)	(895.725)	(811.960)	Investment properties
Provisi potongan harga	(308)	2.867	2.868	1.425	Provision for discount
Aset takberwujud	(162.394)	(164.476)	-	-	Intangible assets
Biaya pinjaman	(48.257)	(47.691)	(61.001)	(108.044)	Cost of loans
	(1.818.991)	(1.691.836)	(949.123)	(915.078)	
Liabilitas pajak tangguhan Perseroan, neto	(1.744.247)	(1.652.655)	(910.852)	(873.749)	Deferred tax liabilities the Company, net

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

**e. Aset (liabilitas) pajak tangguhan, neto
(lanjutan)**

**e. Deferred tax assets (liabilities), net
(continued)**

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Entitas anak:					The subsidiaries:
Aset pajak tangguhan:					Deferred tax assets:
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	205	16	-	-	Impairment allowance of trade receivables
Penyisihan biaya perijinan	66	-	-	-	Provision for permits and license
Kewajiban imbalan kerja	3.054	1.482	-	-	Provision for employee benefits
Rugi fiskal	-	256	-	9.154	Fiscal loss
Aset tetap	-	-	-	9.072	Fixed assets
	3.325	1.754	-	18.226	
Liabilitas pajak tangguhan:					Deferred tax liabilities:
Aset tetap	(6.333)	(3.785)	-	-	Fixed assets
Properti investasi	(35.560)	(35.341)	-	-	Investment properties
Selisih penjabaran transaksi mata uang	-	-	-	(21.516)	Exchange difference from translation of financial statements
Aset takberwujud	-	-	-	(3.476)	Intangible assets
	(41.893)	(39.126)	-	(24.992)	
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak	(38.568)	(37.372)	-	(6.766)	Deferred tax liabilities subsidiaries
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	(1.782.815)	(1.690.027)	(910.852)	(880.515)	Consolidated deferred tax liabilities, net
Entitas anak:					The subsidiaries:
Aset pajak tangguhan:					Deferred tax assets:
Aset tetap	5.795	6.882	7.629	-	Fixed assets
Kewajiban imbalan kerja	-	542	-	-	Provision for employee benefits
Kompensasi rugi fiskal	11.716	11.965	12.905	-	Tax loss carried forward
Revaluasi lindung nilai arus kas	17.148	18.076	14.899	-	Revaluation of cash flow hedge
	34.659	37.465	35.433	-	
Liabilitas pajak tangguhan:					Deferred tax liabilities:
Selisih penjabaran transaksi mata uang	(10.748)	(9.855)	(11.038)	-	Exchange difference from translation of financial statements
Aset takberwujud	(10.566)	(9.317)	(6.154)	-	Intangible assets
	(21.314)	(19.172)	(17.192)	-	
Aset pajak tangguhan konsolidasi, neto	13.345	18.293	18.241	-	Consolidated Deferred tax assets, net

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan dimasa mendatang.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized. The Company and its subsidiaries management believe that the deferred tax assets can be utilized in the future.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

**f. Analisa perubahan aset (liabilitas) pajak
tanggungan**

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Entitas anak				
Saldo awal aset				
pajak tanggungan	18.293	18.241	-	-
Akuisisi entitas anak	-	507	-	-
(Beban) manfaat pajak tanggungan pada periode berjalan	(3.127)	(4.776)	18.241	-
Efek aset pajak tanggungan atas ekuitas	(1.821)	4.321	-	-
Saldo akhir aset pajak tanggungan - konsolidasian	13.345	18.293	18.241	-
Perseroan				
Saldo awal liabilitas				
pajak tanggungan	(1.652.655)	(910.852)	(873.749)	(844.076)
Beban pajak tanggungan pada periode berjalan	(95.504)	(574.254)	(37.103)	(29.673)
Pajak tanggungan terkait aset takberwujud	2.083	-	-	-
Pajak tanggungan terkait akuisisi	-	(164.476)	-	-
Beban pajak tanggungan atas ekuitas	1.829	(3.073)	-	-
Saldo akhir liabilitas pajak tanggungan - Perseroan	(1.744.247)	(1.652.655)	(910.852)	(873.749)
Entitas anak				
Saldo awal liabilitas				
pajak tanggungan	(37.372)	-	(6.766)	(606)
Akuisisi entitas anak	-	(27.282)	-	-
Efek liabilitas pajak tanggungan atas ekuitas	664	(325)	25.377	606
Beban pajak tanggungan pada periode berjalan	(1.860)	(9.765)	(18.611)	(6.766)
Saldo akhir liabilitas pajak tanggungan - entitas anak	(38.568)	(37.372)	-	(6.766)
Saldo akhir liabilitas pajak tanggungan - konsolidasian	(1.782.815)	(1.690.027)	(910.852)	(880.515)

The subsidiaries
Deferred tax assets -
beginning balance
Acquisition of subsidiaries
Deferred tax (expense) benefit
for the period
Deferred tax assets effect
on equity

**Consolidated deferred tax
assets - ending balance**

The Company
Deferred tax liabilities -
beginning balance
Deferred tax expense
for the period
Deferred tax related to
intangible assets
Deferred tax related to acquisition
Deferred tax expense
on equity

**Deferred tax liabilities
ending balance - the Company**

The subsidiaries
Deferred tax liabilities -
beginning balance
Acquisition of subsidiaries
Deferred tax liabilities effect
on equity
Deferred tax expense
for the period

**Deferred tax liabilities
ending balance - the subsidiaries**

**Consolidated deferred tax liabilities
- ending balance**

g. Lain-lain

Pada tanggal 18 Juni 2013, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan final pasal 4(2) yang seharusnya tidak terutang untuk tahun pajak 2007 dan 2008 dengan jumlah sebesar Rp105.130. Jumlah tersebut berbeda sebesar Rp7.739 dari jumlah yang sudah dibukukan Perseroan. Pada tanggal 15 Juli 2013 Perseroan menerima pembayaran atas SKPLB tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2013 Perseroan mengajukan keberatan sehubungan dengan perbedaan jumlah SKPLB dengan jumlah yang sudah dibukukan oleh Perseroan.

20. TAXATION (continued)

**f. Analysis of changes in deferred tax assets
(liabilities)**

g. Others

On June 18, 2013, the Company received overpayment tax assessment letters ("SKPLB") reflecting final income tax article 4(2) suppose not to be underpaid for fiscal year 2007 and 2008 totaling of Rp105,130. The amount was difference of Rp7,739 compared with the amount as recorded by the Company. On July 15, 2013, the Company received the payment of such SKPLB. On August 20, 2013, the Company has applied objection letter on the difference between SKPLB and the Company's record.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

Pada tanggal 11 Februari 2014, Perseroan menerima SKPLB atas pajak penghasilan final pasal 4(2) yang seharusnya tidak terutang untuk tahun pajak 2009 dengan jumlah sebesar Rp34.286. Perseroan menerima hasil SKPLB tersebut dan menerima pembayaran pada tanggal 12 Maret 2014.

Pada tanggal 18 Agustus 2014, Perseroan menerima Surat Keputusan DJP yang mengabulkan sebagian keberatan PPh 4(2) untuk tahun pajak 2007 yaitu sebesar Rp4.936 sedangkan untuk tahun pajak 2008 DJP menolaknya. Pada tanggal 29 Oktober 2014 Perseroan mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan tersebut.

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan mengajukan permohonan pengembalian pajak penghasilan final pasal 4(2) sebesar Rp54, sehubungan dengan lebih bayar pajak atas sewa lahan.

Pada tanggal 21 Agustus 2015, Perseroan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2013 dengan jumlah pajak penghasilan yang lebih bayar sebesar Rp76.754. Perseroan menerima hasil SKPLB tersebut dan menerima pembayarannya pada tanggal 18 September 2015.

h. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

20. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

On February 11, 2014, the Company received SKPLB reflecting final income tax article 4(2) supposed not to be underpaid for fiscal year 2009 totaling of Rp34,286. The Company accepted the SKPLB and received the payment on March 12, 2014.

On August 18, 2014, the Company received Decision Letter from DGT which accepted a portion of the Company's objection for fiscal year 2007 amounting to Rp4,936 and the objection for fiscal year 2008 has been rejected by DGT. On October 29, 2014 the Company submitted an appeal letter against the Decision Letter.

On June 25, 2014, the Company has applied claims to refund final income tax article 4(2) totaling Rp54, in connection with ground lease tax over payment.

On August 21, 2015, the Company received SKPLB reflecting refundable corporate income tax for fiscal year 2013 totaling Rp76,754. The Company accepted the SKPLB and received the payment on September 18, 2015.

h. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. Consolidated SPT are not allowed by the local taxation regulation. Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, DGT may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini sebagian besar merupakan provisi Perseroan atas pengurangan utang sewa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Smartfren Telecom Tbk. sebesar 5% sampai 35% karena adanya penambahan penyewa menara (sebagai penyewa kedua dan ketiga) oleh PT Telekomunikasi Selular, PT Bakrie Telecom Tbk., PT XL Axiata Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications), PT Smartfren Telecom Tbk., PT Berca Global-Access, PT Axis Telekom Indonesia, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT First Media Tbk., dan PT Indosat Tbk.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Perseroan memberikan imbalan kerja manfaat pasti untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Provisi imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berdasarkan proyeksi perhitungan aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dalam laporannya tanggal 20 Juli 2016, 25 Januari 2016, 14 Januari 2015 dan 9 Januari 2014.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui iForte dan IGI pada tanggal 31 Desember 2015 aktuaris independen, PT Kompujasa Aktuaria Indonesia dalam laporannya tanggal 18 Januari 2016.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016		31 Desember/December 31,		
	2015	2014	2013	2015	
Tingkat diskonto	8% per annum	9% - 9,25% per annum	8,5% per annum	8,75% per annum	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7% - 10% per annum	7% - 10% per annum	10% per annum	10% per annum	Wages and salary increase
Usia pensiun	55 years of age	55 years of age	55 years of age	55 years of age	Retirement age
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	Mortality rate
Metode	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit	Method

21. OTHER PAYABLES

This account mostly represents Company's provision for discounts to PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. and PT Smartfren Telecom Tbk. in relation to the reduction of tower rental rates of between 5% to 35% due to additional lessees for the towers (as second and third tenants) involving PT Telekomunikasi Selular, PT Bakrie Telecom Tbk., PT XL Axiata Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia (formerly PT Hutchison CP Telecommunications), PT Smartfren Telecom Tbk., PT Berca Global-Access, PT Axis Telekom Indonesia, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT First Media Tbk. and PT Indosat Tbk.

22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Company provides defined benefit plan for its employees who achieve the retirement age of 55 based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The provision for employee service entitlements is unfunded.

Long-term employee benefits liabilities recognized as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 are based on actuarial calculations prepared by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per reports dated July 20, 2016, January 25, 2016, January 14, 2015 and January 9, 2014, respectively.

Long-term employee benefits liabilities recognized by iForte dan IGI as of December 31, 2015 are based on actuarial calculations prepared by PT Kompujasa Aktuaria Indonesia, independent actuary, as per its reports dated January 18, 2016.

The assumptions used in determining the long-term employee benefits liabilities for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

Perincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Catatan 32) adalah sebagai berikut:

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
Biaya jasa kini	5.786	4.849	10.528	9.709	10.931	Current service cost
Biaya bunga	2.678	1.951	4.319	3.114	2.331	Interest cost
Amortisasi biaya jasa lalu yang tidak diakui-belum menjadi hak	-	-	-	(4)	(4)	Amortization of unrecognized past services cost-non vested
Amortisasi keuntungan aktuarial yang belum diakui	-	-	-	(50)	342	Amortization of unrecognized actuarial gain
Pengaruh kurtailmen dan penyelesaian	-	-	53	-	-	Effect of curtailment and settlement
Kelebihan pembayaran oleh Perseroan	3.487	-	-	-	-	Excess benefit paid directly by the Company
	11.951	6.800	14.900	12.769	13.600	

Perincian liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Nilai kini liabilitas	76.713	58.301	45.978	32.801	Present value of obligation
Biaya jasa lalu yang tidak diakui - belum menjadi hak	-	-	40	44	Unrecognized past service cost - non vested
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	-	-	3.334	4.081	Unrecognized actuarial gains
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	76.713	58.301	49.352	36.926	Long-term employee benefits liability

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto pada tanggal 30 Juni 2016 akan memiliki efek sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	(9.397)	11.105	Effect on present value of obligation

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat gaji akan memiliki efek pada tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	11.083	(9.575)	Effect on present value of obligation

**22. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
(continued)**

The details of the employee benefits expense recognized for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015, and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (Note 32) are as follows:

The details of long-term employee benefits liability as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects as of June 30, 2016:

A one percentage point change in the assumed salary rate would have the following effects as of June 30, 2016:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/December 31, For the Years Ended		
		2015	2014	2013
Pada awal tahun	58.301	45.978	32.801	36.636
Akuisisi entitas anak	-	8.594	-	-
Biaya jasa kini	5.786	10.528	9.709	10.931
Biaya bunga	2.678	4.319	3.114	2.331
Pengaruh kurtailmen	-	53	-	-
Imbalan yang dibayarkan	(24)	(848)	(110)	(76)
Pengukuran ulang atas nilai kini liabilitas				
(Keuntungan) kerugian dari perubahan asumsi keuangan	10.616	(4.590)	-	-
(Keuntungan) kerugian dari penyesuaian berjalan	(644)	(5.733)	464	(17.021)
Saldo akhir	76.713	58.301	45.978	32.801

The movement of present value of obligation is as follows:

Perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Saldo awal	58.301	49.352	36.926	23.341
Akuisisi entitas anak	-	8.594	-	-
Penambahan di periode berjalan	11.951	14.900	12.769	13.600
Pembayaran imbalan kerja	(3.512)	(793)	(343)	(15)
Akumulasi (laba) rugi dampak keuntungan aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya PSAK 24 (revisi 2013)	9.973	(10.323)	-	-
Akumulasi (laba) rugi dampak keuntungan aktuarial dari awal periode	-	(3.429)	-	-
Saldo akhir	76.713	58.301	49.352	36.926

The changes in the long-term employee benefits liability for the six-month periods ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

Tahun 1	6.628	1st year
Tahun 2 - 5	4.401	2nd - 5th years
Tahun 6 -10	36.503	6 - 10th years
Tahun 11 -15	81.453	11 - 15th years
Tahun 16 -20	115.646	16 - 20th years
Tahun 21 dan selanjutnya	216.410	21st years and beyond

The following payments are expected contributions to present value of benefit obligation in future years:

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini liabilitas tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 15,67 tahun, 16,92 tahun dan 17,66 tahun.

The weighted average duration of present value of obligation as of June 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014 are 15.67 years, 16.92 years and 17.66 years, respectively.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

23. UNEARNED REVENUE

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
PT Hutchison 3 Indonesia	1.379.379	488.082	513.217	467.778	PT Hutchison 3 Indonesia
PT XL Axiata Tbk.	373.356	33.830	2.593	1.883	PT XL Axiata Tbk.
KPN B.V.	42.884	56	-	-	KPN B.V.
PT Telekomunikasi Selular	33.476	387.992	244.561	163.995	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk.	23.211	20.317	15.596	11.384	PT Indosat Tbk.
PT Internux	19.054	532	356	12.731	PT Internux
PT Smartfren Telecom Tbk.	2.224	2.545	6.419	532	PT Smartfren Telecom Tbk.
PT Smart Telecom	99	83	74	65	PT Smart Telecom
PT Bakrie Telecom Tbk.	93	129	112	73	PT Bakrie Telecom Tbk.
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	68	68	67	68	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	49	49	73	116	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
T-Mobile, Netherlands B.V.	-	-	563	-	T-Mobile, Netherlands B.V.
PT Axis Telekom Indonesia	-	-	-	494	PT Axis Telekom Indonesia
Lainnya	925	175	-	-	Others
	1.874.818	933.858	783.631	659.119	
Bagian jangka pendek	(1.789.794)	(820.858)	(632.944)	(481.691)	Current portion
Bagian jangka panjang	85.024	113.000	150.687	177.428	Non-current portion

Periode penagihan Grup untuk PT Hutchison 3 Indonesia dilakukan setiap bulan Januari dan April, untuk PT XL Axiata Tbk., dilakukan setiap bulan Januari (satu tahun sekali), untuk PT Telekomunikasi Selular dan KPN B.V. dilakukan secara tahunan, untuk PT Indosat Tbk., dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus (enam bulan sekali), untuk PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., dilakukan secara bulanan, dan untuk PT Smart Telecom dilakukan setiap tiga bulan sekali di depan.

Pada tahun 2014 Perseroan juga menerima pembayaran dimuka untuk jangka waktu 5 tahun dari PT Hutchison 3 Indonesia atas sewa operasi menara.

The Group's billing period for PT Hutchison 3 Indonesia is every January and April, for PT XL Axiata Tbk. is every January (once a year), for PT Telekomunikasi Selular and KPN B.V. are on yearly basis, for PT Indosat Tbk. is every February and August (once every six months), for PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. is monthly, and for PT Smart Telecom is every three months in advance.

In 2014, the Company also received payments in advance for 5 years from PT Hutchison 3 Indonesia for leases of towers under operating lease arrangements.

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

24. NON-CONTROLLING INTERESTS

a. Kepentingan non-pengendali atas ekuitas entitas anak

a. Non-controlling interests in equity of subsidiaries

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Protelindo Netherlands B.V.					Protelindo Netherlands B.V.
Nilai tercatat - awal	(1.623)	(7.956)	(4.977)	1.647	Carrying amount - beginning
Bagian laba (rugi) neto	3.264	6.250	(1.250)	(3.855)	Equity in net income (loss)
Pembayaran deviden	-	-	-	(2.548)	Payment of dividend
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	(60)	83	(1.729)	(221)	Exchange difference from translation of financial statements
	1.581	(1.623)	(7.956)	(4.977)	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

24. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
PT iForte Solusi Infotek Nilai tercatat - awal	4	4	-	-	PT iForte Solusi Infotek Carrying amount - beginning
	<u>1.585</u>	<u>(1.619)</u>	<u>(7.956)</u>	<u>(4.977)</u>	

b. Bagian penghasilan (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali

b. Total comprehensive income (loss) attributable to non-controlling interests

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	30 Juni 2015/ June 30, 2015	31 Desember/December 31,			
			2015	2014	2013	
Protelindo Netherlands B.V. Bagian laba (rugi) neto	3.264	1.493	6.250	(1.250)	(3.855)	Protelindo Netherlands B.V. Equity in net income (loss)
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	(60)	99	83	(1.729)	(220)	Exchange difference from translation of financial statements
	<u>3.204</u>	<u>1.592</u>	<u>6.333</u>	<u>(2.979)</u>	<u>(4.075)</u>	

25. MODAL SAHAM

25. SHARE CAPITAL

Komposisi pemegang saham Perseroan, jumlah dan nilai saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders, the number of issued and paid-up shares and the related value as at Juni 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, were as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham (angka penuh)/ Number of shares issued (full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Modal disetor/ Issued and paid-up capital	Shareholders
- PT Sarana Menara Nusantara Tbk	3.322.600.187	99,9994%	332.260	- PT Sarana Menara Nusantara Tbk
- PT Tricipta Mandhala Gumilang	10.000	0,0003%	1	- PT Tricipta Mandhala Gumilang
- PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	0,0003%	1	- PT Caturguwiratna Sumapala
	<u>3.322.620.187</u>	<u>100,0000%</u>	<u>332.262</u>	

26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

26. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas Perseroan dan entitas anaknya yang terdiri dari selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan, keuntungan (kerugian) bersih dari lindung nilai arus kas, keuntungan aktuarial kumulatif atas liabilitas imbalan kerja, sesudah pajak.

This account represents differences arising from transactions resulting in changes in equity of the Company and its subsidiaries which consist of the exchange difference from translation of financial statements, net loss on cash flow hedges, and cumulative actuarial gains on on employee benefits liability, net of tax.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(lanjutan)**

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	34.159	31.420	35.055	64.760
Kerugian bersih dari lindung nilai arus kas	(51.445)	(54.228)	(44.698)	-
Keuntungan aktuarial kumulatif atas liabilitas imbalan kerja	2.834	10.314	-	-
Saldo akhir	(14.452)	(12.494)	(9.643)	64.760

Exchange difference from translation of financial statements
Net loss on cash flow hedges
Cumulative actuarial gains on employee benefits liability

Ending balance

27. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menyisihkan Rp100 sebagai cadangan dari laba bersih tahun buku 2013 melalui Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 27 Juni 2014.

Pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menyisihkan Rp100 sebagai cadangan dari laba bersih tahun buku 2014 melalui Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 26 Juni 2015.

Pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menyisihkan Rp100 sebagai cadangan dari laba bersih tahun buku 2015 melalui Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 21 Juni 2016.

Saldo laba dicadangkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp300, Rp200, Rp100 dan Rp nihil.

26. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)

27. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Based on Law No.40 year 2007 on Limited Liability Companies, the Company is required to allocate a specific amount from its net profit every financial year as a reserve fund. The reserve fund reaches at least 20% of the issued and paid-up capital.

The Company's shareholders approved the appropriation of statutory reserve amounting Rp100 from net income of 2013 through a Shareholders' Resolutions of the Company In Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated June 27, 2014.

The Company's shareholders approved the appropriation of statutory reserve amounting Rp100 from net income of 2014 through a Shareholders' Resolutions of the Company In Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated June 26, 2015.

The Company's shareholders approved the appropriation of statutory reserve amounting Rp100 from net income of 2015 through a Shareholders' Resolutions of the Company In Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated June 21, 2016.

Appropriated retained earnings as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp300, Rp200, Rp100 and Rp nil, respectively.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. PENDAPATAN

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,	
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)
Pihak ketiga:		
Sewa menara (sewa operasi)	2.343.383	2.141.131
Sewa VSAT (sewa operasi)	52.399	-
Sewa MWIFO (sewa operasi)	27.352	-
Sewa pemancar (sewa pembiayaan)	-	-
	2.423.134	2.141.131

28. REVENUES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,		
	2015	2014	2013
	4.419.689	4.104.806	3.195.372
	24.211	-	-
	25.884	-	-
	-	1.369	1.767
	4.469.784	4.106.175	3.197.139

*Third parties:
Tower rentals (operating leases)
VSAT rentals (operating leases)
MWIFO rentals (operating leases)
Repeater rentals (finance lease)*

Very Small Aperture Terminal (VSAT) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan teknologi satelit sehingga dapat menjangkau daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi lainnya.

Very Small Aperture Terminal (VSAT) is a telecommunication service using satellite technology to cover remote locations without other type of telecommunications network.

Metropolitan Wireless Fiber Optic (MWIFO) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan jaringan serat optik dan nirkabel untuk layanan internet broadband dan Virtual Private Network.

Metropolitan Wireless Fiber Optic (MWIFO) is a telecommunication service using fiber optic and wireless network to provide internet broadband and Virtual Private Network.

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers which represent more than 10% of the total revenues are as follows:

	Pendapatan/Revenue		Persentase dari jumlah penjualan/ Percentage of total revenue	
	30 Juni/June 30,		30 Juni/June 30,	
	2016	2015	2016	2015
<u>Pelanggan</u>				
PT Hutchison 3 Indonesia	955.440	845.808	39%	40%
PT Telekomunikasi Selular	475.481	438.366	20%	20%
PT XL Axiata Tbk.	456.756	439.574	19%	21%
	1.887.677	1.723.748	78%	81%

*Customers
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular
PT XL Axiata Tbk.*

	Pendapatan/Revenue			Persentase dari jumlah penjualan/ Percentage of total revenue		
	31 Desember/December 31,			31 Desember/December 31,		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
<u>Pelanggan</u>						
PT Hutchison 3 Indonesia	1.714.136	1.593.608	1.162.466	38%	39%	36%
PT Telekomunikasi Selular	899.369	770.242	490.184	20%	19%	15%
PT XL Axiata Tbk.	889.787	825.602	537.751	20%	20%	17%
	3.503.292	3.189.452	2.190.401	78%	78%	68%

*Customers
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular
PT XL Axiata Tbk.*

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. DEPRESIASI DAN AMORTISASI

29. DEPRECIATION AND AMORTIZATION

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
Amortisasi sewa tanah (Catatan 13)	143.800	132.827	274.113	254.302	187.350	Amortization of site rentals (Note 13)
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 12)	56.316	22.226	78.979	48.416	44.207	Amortization of intangible assets (Note 12)
Depresiasi aset tetap (Catatan 9)	14.845	11.002	25.645	24.123	19.080	Depreciation of fixed assets (Note 9)
Amortisasi asuransi	3.431	4.406	9.514	9.742	10.092	Amortization of insurance
Lain-lain	197	448	807	551	451	Others
	218.589	170.909	389.058	337.134	261.180	

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA

30. OTHER COST OF REVENUES

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
Perawatan lokasi	64.006	93.863	150.639	190.055	152.833	Site maintenance
Perjalanan dinas	9.030	5.780	12.728	11.174	10.204	Business trip
Listrik	3.439	-	3.164	36.397	44.118	Electricity
Lain-lain (kurang dari Rp1.000)	21.642	150	15.151	645	1	Others (below Rp1,000)
	98.117	99.793	181.682	238.271	207.156	

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan usaha konsolidasian.

For the six-month period ended June 30, 2016 and 2015 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, there were no purchases made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the consolidated revenues.

Seluruh beban pokok pendapatan lainnya, sewa tanah dan asuransi merupakan beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan pendapatan rental.

All other cost of revenues, site rental and insurance represent direct operating expenses arising from investment properties that generated rental income.

31. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

31. SELLING AND MARKETING EXPENSES

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	17.759	10.882	26.388	17.649	12.967	Salaries and employee welfare
Perjalanan dan transportasi	4.664	6.894	14.989	15.255	10.311	Travel and transportation
Jamuan dan representasi	4.563	9.923	19.240	18.028	12.830	Entertainment and representation
Lainnya	202	-	194	-	49	Others
	27.188	27.699	60.811	50.932	36.157	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,	
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)
Gaji dan kesejahteraan karyawan	84.545	73.490
Jasa profesional	65.105	112.966
Perizinan dan lisensi	17.060	22.326
Keperluan kantor	12.412	10.132
Imbalan kerja (Catatan 22)	11.951	6.800
Biaya perbankan	248	410
Lain-lain (kurang Rp1.000)	2.218	1.042
	193.539	227.166

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,		
	2015	2014	2013
Salaries and employee welfare	153.777	135.884	101.336
Professional fees	224.938	202.986	188.123
Permits and licenses	44.970	37.312	1.630
Office supplies	22.222	19.797	11.170
Employee benefits (Note 22)	14.900	12.769	13.600
Bank charges	635	1.111	751
Others (below Rp1,000)	2.194	1.696	2.595
	463.636	411.555	319.205

33. BIAYA KEUANGAN

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,	
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)
Beban bunga bank	153.798	149.301
Beban bunga obligasi	95.562	88.024
Amortisasi biaya pinjaman (Catatan 17)	26.685	26.845
Beban keuangan lainnya	8.597	2.614
	284.642	266.784

33. FINANCE CHARGES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,		
	2015	2014	2013
Bank interest expense	310.293	443.760	447.474
Bond interest expense	193.206	94.846	-
Amortization of cost of loans (Note 17)	53.212	309.730	94.268
Other finance charges	5.801	7.250	9.603
	562.512	855.586	551.345

34. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) LAIN-LAIN, NETO

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,	
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs, neto	195.405	(273.465)
Kerugian penjualan aset tetap	(5.524)	(24.361)
Beban penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	(103.381)	-
Beban penurunan nilai goodwill (Catatan 11)	(24.241)	-
Lainnya	(21.945)	(15.999)
	40.314	(313.825)

34. OTHER GAINS (LOSSES), NET

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,		
	2015	2014	2013
Foreign exchange gains (losses), net	(427.947)	(4.962)	(887.902)
Loss from dismantling of investment properties	(35.653)	(40.206)	-
Impairment loss of trade receivables (Note 5)	(862)	(225.690)	(36.470)
Impairment loss of goodwill (Notes 11)	-	-	-
Others	(45.118)	4.649	(22.805)
	(509.580)	(266.209)	(947.177)

Rincian keuntungan (kerugian) selisih kurs, neto:

Detail foreign exchange gains (losses), net:

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,	
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs yang berasal dari:		
Pinjaman fasilitas	293.657	(426.602)
Lainnya	(98.252)	153.137
	195.405	(273.465)

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,		
	2015	2014	2013
Foreign exchange gains (losses) in relation to: Facility loan	(648.171)	(119.759)	(1.168.037)
Others	220.224	114.797	280.135
	(427.947)	(4.962)	(887.902)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. UTANG SWAP VALUTA ASING

Pada tanggal 20 November 2014, Protelindo Finance B.V. menandatangani kontrak swap dengan DBS Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga obligasi dalam dolar Singapura. Sehubungan dengan kontrak swap tersebut, Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Protelindo Finance B.V. atas kontrak swap.

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dan nilai wajarnya pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

35. CROSS CURRENCY SWAP PAYABLES

On November 20, 2014, Protelindo Finance B.V. entered into swap contracts with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments of bonds payable in Singapore Dollars. In connection with the swap contracts, the Company provided the corporate guarantee to secure fulfillment of liabilities of Protelindo Finance B.V. for these swap contracts.

Information related to the cross currency swap contracts and their fair values as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

Kontrak-kontrak swap valuta asing	Jumlah nosional/ Notional amount (SGD)	30 Juni/June 30		Nilai wajar/fair value 31 Desember/December 31,			Cross currency swap contracts
		2016	2015	2015	2014	2013	
		DBS Bank Ltd.	144.000.000	(104.778)	(92.586)	(182.290)	
OCBC Bank	36.000.000	(26.474)	(23.043)	(45.664)	(17.516)	-	OCBC Bank
	180.000.000	(131.252)	(115.629)	(227.954)	(87.795)	-	

No.	Pihak Lawan/ Counter parties	Periode kontrak efektif/ Effective Contract period	Tingkat bunga swap tahunan/Annual Interest rate swap	Tanggal penerimaan pendapatan/(beban) swap/Swap income/(expense) receipt date	Jumlah pendapatan (beban) swap diterima (dibayar)/Amount of swap income (expense) received (paid)				
					30 Juni/June 30,		31 Desember/ December 31,		
					2016	2015	2015	2014	2013
1	Oversea-Chinese Banking Corporation Bank	27 November/ November 2014 - 27 November/ November 2024	3,25% dari dolar Singapura sebesar SGD36.000.000 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar 3,60% dari USD27.671.022,29. 3.25% from Singapore dollar of SGD36,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of USD27,671,022.29.	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024. The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.	(1.040)	(931)	(2.121)	(108)	-
2	DBS Bank Ltd.	27 November/ November 2014 - 27 November/ November 2024	3,25% dari dolar Singapura sebesar SGD144.000.000 sebagai pertukaran dengan dolar AS sebesar 3,60% dari USD110.684.089,16. 3.25% from Singapore dollar of SGD144,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of SGD110,684,089.16.	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024. The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.	(4.158)	(3.724)	(8.483)	(432)	-

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

- a. Pada tanggal 4 Juni 2003, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. ("Telkom") Divisi *Fixed Wireless* mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dalam perjanjian terakhir tanggal 2 Juli 2009. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi menara dan dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian.

Pada tanggal 28 Desember 2015, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Telkom terkait pengakhiran perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur tower beserta perjanjian perjanjian pengalihan ("Perjanjian Pengakhiran"). Protelindo dan Telkom sepakat untuk mengakhiri perjanjian sewa dan berita acara penggunaan site (BAPS) terkait terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015, dan berlaku efektif pada saat Perseroan menerima pembayaran sisa sewa dari Telkom sesuai dengan Perjanjian Pengakhiran ini.

- b. Pada tanggal 14 Agustus 2006, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Bakrie Telecom Tbk. ("Bakrie") tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal perjanjian adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa lokasi yang tercantum dalam berita acara sewa terakhir.

Pada tanggal 2 Juli 2007, Perseroan dan Bakrie menandatangani Perjanjian Sewa Induk sebagaimana telah diubah dengan amandemen pertama tanggal 20 Juli 2007 dan dengan amandemen perjanjian kedua tanggal 8 Mei 2009 mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi. Selanjutnya, Bakrie akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan untuk pemakaian listrik bulanan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS

- a. *The Company entered into an agreement with PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. ("Telkom") Fixed Wireless Division dated June 4, 2003, regarding rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment, amended lastly by an agreement dated July 2, 2009. The initial period of the site leases signed under this agreement is for 10 years with a commencement date upon the minutes of site utilization for each tower site which can be extended with mutual agreement.*

On December 28, 2015, the Company and Telkom entered into an agreement with Telkom regarding the settlement agreement on the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment, and assignment agreements (the "Termination Agreement"). The Company and Telkom have agreed to terminate the rental agreement and the relevant minutes to use the site (BAPS) as of June 1, 2015, and shall be effective as of the Company received the last lease payment from Telkom as stipulated under the Termination Agreement.

- b. *On August 14, 2006, the Company entered into an agreement with PT Bakrie Telecom Tbk. ("Bakrie") regarding rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of this agreement is from the execution date until the end of the lease term noted in the latest site lease.*

On July 2, 2007, the Company and Bakrie entered into a Master Lease Agreement as subsequently amended by a first amendment dated July 20, 2007 and by a second amendment dated May 8, 2009 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is for 10 years with a commencement date upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, Bakrie will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- c. Perseroan menandatangani sejumlah perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi menara.

Pada tanggal 27 Oktober 2009, Perseroan dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 April 2015 tentang sewa menyewa infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun yang akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali jika Telkomsel memberitahu Perseroan secara tertulis bahwa Telkomsel tidak bersedia untuk memperpanjang jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa dihitung sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi untuk tiap lokasi. Selanjutnya, Telkomsel akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan pemakaian listrik bulanan.

- d. Pada tanggal 15 Maret 2007, Perseroan dan PT Smartfren Telecom Tbk. (dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk.) ("Smartfren") menandatangani Perjanjian Sewa Induk sebagaimana telah diubah dalam perjanjian terakhir tanggal 1 November 2007 mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa lokasi adalah 11 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak. Selanjutnya, Smartfren akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan pemakaian listrik bulanan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- c. The Company entered into several agreements with PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under these agreements is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On October 27, 2009, the Company and Telkomsel entered into a Master Lease Agreement for *Co-location* as subsequently amended by Amendment No. 1 dated April 6, 2015 regarding the rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Telkomsel informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, Telkomsel will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity cost.

- d. On March 15, 2007, the Company and PT Smartfren Telecom Tbk. (formerly PT Mobile-8 Telecom Tbk.) ("Smartfren") entered into a Master Lease Agreement as subsequently amended by latest amendment dated November 1, 2007 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial term of the sites leases is 11 years, which period may be extended based on written agreements between the parties. In addition, Smartfren will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2010, Perseroan dan Smartfren telah menandatangani Perjanjian Ambil atau Bayar 1.000 Lokasi ("TOPA") sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 7 Juni 2012 dan Amandemen No. 2 tanggal 18 Juli 2014 dimana Smartfren setuju untuk menyewa 1.000 lokasi sebelum 31 Agustus 2015 sesuai dengan Perjanjian Sewa Induk Perseroan dengan Smartfren sebagaimana diubah dengan TOPA. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam TOPA adalah 6 tahun dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 2 periode secara otomatis dengan jangka waktu pembaharuan masing-masing selama 5 tahun kecuali jika Smartfren memberitahu Perseroan untuk tidak memperpanjang.

Pada tanggal 7 Juni 2012, Perseroan dan Smartfren menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk sewa menara atas lokasi-lokasi yang dibeli oleh Perseroan dari penyedia-penyedia menara lain dimana Smartfren adalah penyewa yang telah ada.

Pada tanggal 31 Agustus 2012, Perseroan dan Smartfren menandatangani suatu perjanjian mengenai, antara lain, mengubah TOPA dan Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2009.

- e. Pada tanggal 15 Agustus 2007, Perseroan dan PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications) ("Hutchison") menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 17 Desember 2007, Amandemen No. 2 tanggal 24 Agustus 2010 dan Amandemen No. 3 tanggal 9 Agustus 2012, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang secara langsung untuk 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila Hutchison tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi. Selanjutnya, Hutchison akan melakukan pembayaran atas biaya penambahan pemakaian listrik bulanan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On August 31, 2010, the Company and Smartfren entered into a 1,000 Site Take or Pay Agreement ("TOPA") as subsequently amended by Amendment No.1 dated June 7, 2012 and Amendment No. 2 dated July 18, 2014 whereby Smartfren agreed to lease an additional 1,000 sites before August 31, 2015 in accordance with terms set forth in the Company's Master Lease Agreement with Smartfren as amended by the TOPA. The initial term of the site leases executed under the TOPA is 6 years, and such term is automatically extended for two renewal periods of 5 years each unless Smartfren notifies the Company that it does not wish to renew.

On June 7, 2012, the Company and Smartfren entered into a Master Lease Agreement for acquired sites regarding the rental of tower sites acquired by the Company from other tower providers on which Smartfren is an existing tenant.

On August 31, 2012, the Company and Smartfren entered into an agreement that, among other things, amends the TOPA and Payment Agreement dated December 17, 2009.

- e. *On August 15, 2007, the Company and PT Hutchison 3 Indonesia (formerly PT Hutchison CP Telecommunications) ("Hutchison") entered into a Master Lease Agreement, as subsequently amended by Amendment No. 1 dated December 17, 2007, Amendment No. 2 dated August 24, 2010 and Amendment No. 3 dated August 9, 2012, regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is for 10 years, which period will automatically be extended for two 5 year periods, unless Hutchison informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, Hutchison will pay an additional charge amount for pass-through of monthly electricity costs.*

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 18 Maret 2008, Perseroan dan Hutchison menandatangani Perjanjian Pengalihan Menara mengenai persetujuan pembelian sebanyak sampai dengan 3.692 menara milik Hutchison oleh Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini adalah 18 Maret 2008 hingga 18 Maret 2010. Perseroan menyelesaikan Perjanjian Pengalihan Menara pada bulan Maret 2010 dimana Perseroan memperoleh sebanyak 3.603 menara dari Hutchison.

Pada tanggal 18 Maret 2008, Perseroan dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 24 November 2009, Amandemen No. 2 tanggal 28 Desember 2010 dan Amandemen No. 3 tanggal 9 Agustus 2012, ("Purchase MLA") mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi terhadap lokasi-lokasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2008. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun. Sebagai tambahan, Hutchison akan membayar biaya tambahan untuk biaya listrik bulanan.

Pada tanggal 9 Maret 2010, Perseroan dan Hutchison menandatangani *Closing Agreement* mengenai akuisisi atas menara-menara milik Hutchison berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2008. *Closing Agreement* ini telah diubah pada tanggal 19 September 2011 dan diubah lagi pada tanggal 15 Maret 2012.

Pada tanggal 28 Desember 2010, Perseroan dan Hutchison menandatangani Perjanjian Pengalihan Menara, sebagaimana telah diubah dalam Amandemen No. 1 tanggal 21 Desember 2012 ("Perjanjian Awal") dan terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 2 tanggal 27 Desember 2013 ("Amandemen Kedua") mengenai persetujuan pembelian sebanyak sampai dengan 1.500 menara milik Hutchison oleh Perseroan. Perjanjian Awal dan Amandemen Kedua secara bersama-sama akan disebut sebagai Perjanjian Pengalihan Menara 2010. Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak 28 Desember 2010 hingga tanggal 30 Juni 2014.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On March 18, 2008, the Company and Hutchison entered into a Tower Transfer Agreement regarding the agreement of the Company to acquire up to 3,692 towers from Hutchison. The term of this agreement is from March 18, 2008 until March 18, 2010. The Company concluded this Tower Transfer Agreement in March 2010, whereby the Company acquired a total of 3,603 towers from Hutchison.

On March 18, 2008, the Company and Hutchison entered into a Master Lease Agreement as subsequently amended by Amendment No. 1 dated November 24, 2009, Amendment No. 2 dated December 28, 2010, and Amendment No. 3 dated August 9, 2012, (the "Purchase MLA") regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment for sites acquired under the 2008 Tower Transfer Agreement. The initial period of the site leases signed under this agreement is 12 years, which period may be extended for 6 years. In addition, Hutchison will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

On March 9, 2010, the Company and Hutchison entered into a Closing Agreement regarding the acquisition of telecommunication towers owned by Hutchison pursuant to the 2008 Tower Transfer Agreement. This Closing Agreement was amended on September 19, 2011 and amended again on March 15, 2012.

On December 28, 2010, the Company and Hutchison entered into a Tower Transfer Agreement, as amended by Amendment No. 1 dated December 21, 2012 ("Initial Agreement") and lastly amended by Amendment No. 2 dated December 27, 2013 ("Second Amendment") regarding the agreement of the Company to acquire up to 1,500 towers from Hutchison. The Initial Agreement and the Second Amendment shall be referred collectively as the "2010 Tower Transfer Agreement". The term of this agreement is from December 28, 2010 until June 30, 2014.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2013, Perseroan telah menyelesaikan pembelian 150 menara tambahan, secara total terdapat 1.482 menara yang dibeli berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2010. "Purchase MLA" secara khusus diperbaharui oleh Amandemen No. 2 tanggal 28 Desember 2010 yang mengatur untuk penyewaan kembali menara yang diperoleh dari Perjanjian Pengalihan Menara 2010. Periode awal dari sewa menara yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila Hutchison tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan.

Pada tanggal 30 Desember 2013, Perseroan dan Hutchison menandatangani *Closing Agreement* mengenai akuisisi atas menara-menara dari Hutchison berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2008 dan Perjanjian Pengalihan Menara 2010. *Closing Agreement* ini sekaligus menggantikan *Closing Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Maret 2010, dan perubahannya.

- f. Pada tanggal 4 Desember 2007, Perseroan dan PT XL Axiata Tbk. (sebelumnya PT Excelcomindo Pratama Tbk.) ("XL") menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dalam perjanjian Amandemen No. 1 tanggal 18 April 2008, Amandemen No. 2 tanggal 5 Januari 2010, Amandemen tanggal 7 November 2011, Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Induk BTS dan Colo, tanggal 1 November 2012, tanggal 20 September 2013 dan terakhir kali dengan Perjanjian tanggal 19 Mei 2014. Jangka waktu awal untuk *site leases* dalam perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 1 kali jangka waktu perpanjangan 5 tahun. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi. Sebagai tambahan, XL akan membayar biaya tambahan untuk biaya listrik bulanan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On December 27, 2013, the Company concluded the purchase of an additional 150 towers, making a total of 1,482 towers acquired under the 2010 Tower Transfer Agreement. The Purchase MLA, specifically as amended by Amendment No. 2 dated December 28, 2010, governs the lease back of the towers acquired under the 2010 Tower Transfer Agreement. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5 year periods, unless Hutchison informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term.

On December 30, 2013, the Company and Hutchison entered into a Closing Agreement regarding the acquisition of telecommunication towers from Hutchison pursuant to the 2008 Tower Transfer Agreement and 2010 Tower Transfer Agreement. This Closing Agreement also superseded the Closing Agreement signed on March 9, 2010, as amended.

- f. On December 4, 2007, the Company and PT XL Axiata Tbk. (formerly PT Excelcomindo Pratama Tbk.) ("XL") entered into a Master Lease Agreement, as amended by Amendment No. 1 dated April 18, 2008, by Amendment No. 2 dated January 5, 2010, an Amendment dated November 7, 2011, by the Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements dated November 1, 2012, dated September 20, 2013 and lastly by an Agreement dated May 19, 2014. The initial term for site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for a 5 year renewal period. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, XL will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 19 Juli 2010, Perseroan dan XL menandatangani Perjanjian *Build to Suit* dan Perjanjian Sewa Induk sebagaimana diubah pada tanggal 7 November 2011, 1 November 2012, 19 Februari 2013, 26 Agustus 2013 dan 20 September 2013. Jangka waktu untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila XL tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 28 Maret 2016, Perseroan dan XL menandatangani Perjanjian Pembelian Aset mengenai persetujuan pembelian sebanyak 2.500 menara milik XL oleh Perseroan ("Perjanjian Pembelian Aset"). Bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pembelian Aset, Perseroan dan XL juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menara dimana XL telah setuju untuk menyewa kembali 2.432 menara dari Perseroan untuk jangka waktu 10 tahun. Transaksi ini akan diselesaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan XL telah menyelesaikan transaksi penjualan 2.500 menara telekomunikasi milik XL kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewakan kembali sebanyak 2.433 menara dari menara yang dijual kepada XL, dimana XL merupakan penyewa utama untuk jangka waktu 10 tahun atas dasar Perjanjian Induk Sewa Menara.

- g. Pada tanggal 7 Desember 2007, Perseroan dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna") menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA") mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Sampoerna tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On July 19, 2010, the Company and XL entered into a Build to Suit and Master Lease Agreement as amended on November 7, 2011, November 1, 2012, February 19, 2013, August 26, 2013 and September 20, 2013. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5 year periods, unless XL informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On March 28, 2016, the Company and XL entered into an Asset Purchase Agreement regarding the agreement of the Company to acquire 2,500 towers from XL ("Asset Purchase Agreement"). Concurrent with the signing of the Asset Purchase Agreement, the Company and XL have also entered into a Master Tower Lease Agreement whereby XL will be the anchor tenant on 2,432 towers for a period of 10 years. The closing of this transaction was consummated on June 30, 2016.

On June 30, 2016, the Company and XL has completed the sale transaction of 2,500 telecommunication towers owned by XL to Protelindo and Protelindo has leased back 2,433 towers from the 2,500 towers to XL, where XL is the main lessee for a period of 10 years under a Master Tower Lease Agreement.

- g. *On December 7, 2007, the Company and PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna") entered into a Master Lease Agreement regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Sampoerna notifies the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.*

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 7 Desember 2007, Perseroan dan Sampoerna menandatangani Perjanjian *Build to Suit* dan *Co-location*. Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan ditunjuk oleh Sampoerna untuk mengakuisisi, mengembangkan dan membangun BTS di lokasi yang dibutuhkan oleh Sampoerna, mengidentifikasi dan mengembangkan lokasi yang ada dan menyediakan jasa berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak.

- h. Pada tanggal 14 Desember 2007, Perseroan dan PT Axis Telekom Indonesia (sebelumnya PT Natrindo Telepon Seluler) ("Axis") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi ("MLA Axis") sebagaimana diubah oleh XL, sebagai penerus yang sah dari MLA Axis, melalui Perjanjian tanggal 19 Mei 2014 dengan Perseroan. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Axis tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 8 April 2014, XL dan Axis telah melakukan penggabungan usaha (merger). Pada merger tersebut, Axis bergabung dan menjadi XL. Akibatnya, seluruh aset dan liabilitas Axis beralih seluruhnya kepada XL sebagai perusahaan penerima penggabungan. Sejak tanggal 8 April 2014, seluruh aktifitas dengan Axis dan XL dikonsolidasikan dengan XL.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On December 7, 2007, the Company and Sampoerna entered into a *Build to Suit* and *Co-location* Agreement. Pursuant to the agreement, the Company has been engaged by Sampoerna to acquire, develop and build BTS sites required by Sampoerna, to identify and develop space on existing sites and to perform services based on the needs of the parties.

- h. On December 14, 2007, the Company and PT Axis Telekom Indonesia (formerly PT Natrindo Telepon Seluler) ("Axis") entered into a Master Lease Agreement for *Co-locations* regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment ("Axis MLA") as amended by XL, as the rightful successor in interest of Axis MLA, through an Agreement dated May 19, 2014 with the Company. The initial period of the *site leases* signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Axis notifies the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On April 8, 2014, XL and Axis has accomplished a merger. In this merger, Axis merged with and into XL. As a result, all assets and liabilities of Axis were transferred entirely to XL as the surviving company. Since April 8, 2014, all of the activity with Axis and XL are consolidated with XL.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- i. Pada tanggal 2 Juli 2008, Perseroan dan PT Indosat Tbk. ("Indosat") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* sebagaimana telah diubah dalam perjanjian Amandemen pertama tanggal 22 Juni 2009, Amandemen Kedua tanggal 13 Mei 2011 dan terakhir oleh Amandemen Ketiga tanggal 5 Maret 2012 mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 13 Mei 2011, Perseroan dan Indosat menandatangani Perjanjian *Build to Suit*. Jangka waktu untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 24 Februari 2015, Perseroan dan Indosat menandatangani suatu perjanjian untuk penyewaan menara di tahun 2015. Perjanjian ini berlaku sampai bulan Desember 2015.

- j. Pada tanggal 1 Maret 2010, Perseroan dan PT Smart Telecom ("Smart") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Smart tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- i. On July 2, 2008, the Company and PT Indosat Tbk. ("Indosat") entered into a Master Lease Agreement for *Co-locations* as amended by the First Amendment dated June 22, 2009, by the Second Amendment dated May 13, 2011 and lastly by the Third Amendment dated March 5, 2012 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the *site leases* signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Indosat informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On May 13, 2011, the Company and Indosat entered into a *Build to Suit* Agreement. The period of the *site leases* signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Indosat informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On February 24, 2015, the Company and Indosat entered into an agreement for tower lease in 2015. This agreement is valid up to December 2015.

- j. On March 1, 2010, the Company and PT Smart Telecom ("Smart") entered into a Master Lease Agreement for *Co-locations* regarding the rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment. The initial period of the *site leases* signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Smart informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- k. Pada tanggal 17 Juni 2010, Perseroan dan PT Berca Hardayaperkasa dan PT Berca Global-Access ("Berca") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Berca tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.
- l. Pada tanggal 25 Juni 2010, Perseroan dan PT First Media Tbk. ("First Media") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila First Media tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dengan PT First Media, Tbk ("First Media"), dan PT Internux ("Internux"), tertanggal 11 Oktober 2013 ("Perjanjian Pengalihan"). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan, First Media mengalihkan seluruh hak, kewajiban dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* tertanggal 25 Juni 2010 yang dibuat antara Perseroan dan First Media ("MLA") sehubungan dengan penyewaan 139 lokasi menara milik Perseroan ("Sewa Lokasi yang Telah Ada") kepada Internux. First Media setuju untuk menjamin kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Sewa Lokasi yang Telah Ada berdasarkan MLA untuk suatu periode waktu tertentu.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- k. On June 17, 2010, the Company and PT Berca Hardayaperkasa and PT Berca Global-Access ("Berca") entered into a Master Lease Agreement for *Co-locations* regarding the rental of tower infrastructure for placement of Berca's telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Berca informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.
- l. On June 25, 2010, the Company and PT First Media Tbk. ("First Media") entered into a Master Lease Agreement for *Co-locations* regarding the rental of tower infrastructure for the placement of First Media's telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5 year periods, unless First Media informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

The Company has entered into an Assignment Agreement with First Media, and PT Internux ("Internux"), dated October 11, 2013 ("Assignment Agreement"). Under the Assignment Agreement, First Media assigns all of its rights, title, obligations and interests under the Master Lease Agreement For Colocation dated June 25, 2010 made between the Company and First Media ("MLA") regarding the lease of 139 tower sites owned by the Company ("Existing Site Leases") to Internux. First Media agreed to guarantee the obligations related to the Existing Site Leases under the MLA for a certain period of time.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan dan First Media menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* yang baru mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Juli 2014. Jangka waktu awal untuk *site leases* dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila First Media tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

- m. Pada tanggal 12 Februari 2004, Perseroan menandatangani perjanjian, sebagaimana diubah dengan amandemen pertama tanggal 26 Oktober 2007, dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. - *Fixed Wireless Division* tentang penyewaan *repeater system and indoor base transceiver station*. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian adalah 9 tahun sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Objek Sewa-Menyewa untuk masing-masing lokasi menara (Catatan 8).
- n. Pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah memberikan fasilitas dan program insentif kepada Peter Djatmiko, yang merupakan Presiden Direktur iForte dengan menandatangani *Management Incentive Program Agreement* ("MIP Agreement"). Sehubungan dengan rencana Peter Djatmiko untuk melakukan pembelian 34.000.000 saham SMN berdasarkan MIP Agreement, Perseroan memberikan pinjaman sejumlah US\$9.635.140 kepada Peter Djatmiko dengan menandatangani *Loan Agreement* tertanggal 18 Desember 2015 ("Perjanjian Pinjaman"). Guna menjamin kewajiban Peter Djatmiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perseroan juga telah menandatangani *Pledge of Shares Agreement* tertanggal 18 Desember 2015 sehubungan dengan jaminan atas pemberian pinjaman dari Perseroan kepada Peter Djatmiko.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company and First Media executed a new Master Lease Agreement for *Co-locations* regarding the rental of tower infrastructure for the placement of First Media's telecommunications equipment which was effective as of July 18, 2014. The initial period of the *site leases* signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5 year periods, unless First Media informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the *Ready For Installation Certificate* for each site.

- m. On February 12, 2004, the Company entered into an agreement with PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. - *Fixed Wireless Division* as amended by a first amendment dated on October 26, 2007, in relation to the lease of *repeater systems and indoor base transceiver stations*. The initial period of the *site lease* signed under this agreement is 9 years, commencing upon the minutes of *Lease Object Submission* for each site (Note 8).
- n. On December 18, 2015, the Company has provided facilities and incentive program to Peter Djatmiko who is the President Director of iForte, by signing a *Management Incentive Program Agreement* ("MIP Agreement"). In connection with the plan of Peter Djatmiko to purchase 34,000,000 shares of SMN under the MIP Agreement, the Company provided a loan in the amount of US\$9,635,140 to Peter Djatmiko by signing a *Loan Agreement* dated December 18, 2015 ("Loan Agreement"). In order to guarantee the obligations of Peter Djatmiko under the *Loan Agreement*, the Company has also signed a *Pledge of Shares Agreement* dated December 18, 2015 in connection with the security of the loan provided by the Company to Peter Djatmiko.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- o. Pada tanggal 12 Mei 2015, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham ("PJB") bersyarat dengan pemegang saham "iForte" sehubungan dengan rencana penjualan 100% saham dengan efek dilusi penuh iForte kepada Perseroan ("Transaksi iForte"). Selanjutnya, dengan mengacu kepada PJB, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pengalihan atas seluruh utang obligasi dan waran yang diterbitkan oleh iForte.

Pada tanggal 1 Juli 2015, Perseroan dan para pemegang saham iForte telah menyelesaikan Transaksi iForte dengan memenuhi seluruh ketentuan dan prasyarat sebagaimana diatur dalam PJB dan telah menandatangani Akta Jual Beli Saham atas pengalihan saham dari pemegang saham iForte kepada Perseroan sehingga iForte menjadi entitas anak Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 100%.

Pada tanggal 10 November 2015, SMN membeli 0,01% saham dari Perseroan dalam iForte, sehingga kepemilikan saham Perseroan dalam iForte menurun menjadi 99,99%.

Sehubungan dengan pengalihan 100% saham iForte kepada Perseroan, dibawah ini adalah perjanjian-perjanjian penting yang ditandatangani oleh iForte dengan para pelanggannya:

- p. Pada tanggal 11 Oktober 2013, iForte dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Pole untuk Semi Macro/Mini Macro mengenai sewa *pole* untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 13 Maret 2013, iForte dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 7 Agustus 2015 mengenai sewa infrastruktur semi BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- o. On May 12, 2015, the Company entered into a conditional Shares Sale and Purchase Agreement ("SPA") with the shareholders of PT iForte Solusi Infotek ("iForte") in connection with the proposed sale of 100% equity stake on a fully diluted basis in iForte to the Company ("iForte Transaction"). Pursuant to the signing of the SPA, the Company also entered into an Assignment Agreement in relation to all outstanding bonds and warrants issued by iForte.

On July 1, 2015, the Company and shareholders of iForte have closed the iForte Transaction by fulfilling all terms and conditions in the SPA and signed a Shares Sale and Purchase Deed in connection with the transfer shares from iForte's shareholders to the Company so that iForte became a subsidiary of the Company that is directly owned 100%.

On November 10, 2015, SMN purchased 0.01% iForte's shares from the Company, so that the shares ownership of the Company in iForte decreased to 99.99%.

With respect to the transfer of 100% shares of iForte to the Company, below are the significant agreements entered into by iForte and its customers:

- p. On October 11, 2013, iForte and XL entered into a Pole Lease Agreement for Semi Macro/Mini Macro, regarding lease of pole space for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On March 13, 2013, iForte and XL entered into a Lease Agreement of Semi BTS Hotel Infrastructure as amended by Amendment No. 1 dated August 7, 2015, regarding lease of semi BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

q. Pada tanggal 26 Juni 2014, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di 11 Lokasi mengenai sewa infrastruktur BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 25 Mei 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani *Master Purchase Agreement* Sewa Sarana Infrastruktur *Add System* di 3 Lokasi BTS Hotel mengenai sewa infrastruktur *add system* untuk 3 lokasi BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 24 Juni 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 3 Site di Jabotabek mengenai sewa infrastruktur BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 24 Agustus 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani *Master Purchase Agreement* Sewa Sarana Infrastruktur *Add System* di 6 Lokasi BTS Hotel mengenai sewa infrastruktur BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 1 Oktober 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 15 Site di Regional Jabotabek mengenai sewa infrastruktur BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q. On June 26, 2014, iForte and Telkomsel entered into a *Wor Agreement* for Lease of *BTS Hotel Infrastructure Facilities* at 11 Locations, regarding lease of *BTS Hotel infrastructure* for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 5 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On May 25, 2015, iForte and Telkomsel entered into a *Master Purchase Agreement* for Lease of *Add System Infrastructure* at 3 *BTS Hotel Locations*, regarding lease of *add system infrastructure* at 3 *BTS Hotel locations* for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 5 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On June 24, 2015, iForte and Telkomsel entered into a *Lease Agreement* of *BTS Hotel Infrastructure* at 3 Sites in Jabotabek, regarding lease of *BTS Hotel infrastructure* for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On August 24, 2015, iForte and Telkomsel entered into a *Master Purchase Agreement* for Lease of *Add System Infrastructure* at 6 *BTS Hotel Locations*, regarding lease of *BTS Hotel infrastructure* for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 5 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On October 1, 2015, iForte and Telkomsel entered into a *Lease Agreement* of *BTS Hotel Infrastructure* at 15 Sites in Jabotabek, regarding lease of *BTS Hotel infrastructure* for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 19 November 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel Add System 4 Site Regional Jabotabek mengenai sewa infrastruktur add system untuk 4 lokasi BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 26 Januari 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Master Purchase Agreement Sarana Infrastruktur Tower 10 Site mengenai sewa infrastruktur tower untuk 10 lokasi untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order yang diterbitkan oleh Telkomsel.

Pada tanggal 5 Mei 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Master Purchase Agreement Sarana Infrastruktur Tower 15 Site mengenai sewa infrastruktur tower untuk 15 lokasi untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order yang diterbitkan oleh Telkomsel.

Pada tanggal 24 Mei 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 2 Lokasi di Jabotabek untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 25 Mei 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel Add System 4 Site untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order yang diterbitkan oleh Telkomsel.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On November 19, 2015, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of BTS Hotel Infrastructure Add System at 4 Sites in Jabotabek, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On January 26, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Master Purchase Agreement for Tower Infrastructure Lease at 10 Site, regarding lease of tower infrastructure at 10 locations for installation of telecommunication equipment. The lease period is 5 years as of the date of lease as stated in the Purchase Order issued by Telkomsel.

On May 5, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Master Purchase Agreement for Tower Infrastructure Lease at 15 Site, regarding lease of tower infrastructure at 15 locations for installation of telecommunication equipment. The lease period is 5 years as of the date of lease as stated in the Purchase Order issued by Telkomsel.

On May 24, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of BTS Hotel Infrastructure at 2 Locations in Jabotabek, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On May 25, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of BTS Hotel Infrastructure Add System at 4 Sites, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Purchase Order issued by Telkomsel.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- r. Pada tanggal 14 September 2012, iForte dan Indosat menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Microcell sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 13 Mei 2013 mengenai sewa *microcell* untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dihitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site*.
- s. Pada tanggal 4 September 2013, iForte dan Internux menandatangani Nota Kesepakatan Mengenai Sewa Menyewa Infrastruktur Micro BTS, sebagaimana telah diubah dalam Amandemen I tanggal 4 Desember 2013 ("Nota Kesepahaman I") mengenai sewa infrastruktur micro BTS untuk penempatan peralatan telekomunikasi dengan skema kolokasi. Jangka waktu sewa untuk masing-masing Infrastruktur Micro BTS dalam Nota Kesepahaman ini adalah 5 tahun dihitung sejak hari ke-14 setelah ditandatanganinya Berita Acara Uji Kelayakan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pada tanggal 4 September 2013, iForte dan Internux menandatangani Nota Kesepakatan Mengenai Sewa Menyewa Infrastruktur Micro BTS, sebagaimana telah diubah dalam Amandemen I tanggal 4 Desember 2013 dan Amandemen II tanggal 27 Agustus 2014 ("Nota Kesepahaman II") mengenai sewa infrastruktur micro BTS untuk penempatan peralatan telekomunikasi dengan skema Kolokasi. Jangka waktu sewa untuk masing-masing Infrastruktur Micro BTS dalam Nota Kesepahaman ini adalah 5 tahun dihitung sejak hari ke-14 setelah ditandatanganinya Berita Acara Uji Kelayakan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- t. Pada tanggal 6 April 2016, iForte dan Pemerintah Kota Malang menandatangani Perjanjian mengenai kerjasama sewa menyewa pemanfaatan aset milik pemerintah kota Malang di 50 titik atau lokasi di kota Malang guna pendirian menara Monopole. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- r. On September 14, 2012, iForte and Indosat entered into a Master Cooperation Agreement for Lease of Microcell as amended by a First Amendment dated May 13, 2013, regarding lease of *microcell* for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 years as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.
- s. On September 4, 2013, iForte and Internux entered into a Memorandum of Understanding For Lease of Micro BTS Infrastructure, as amended by Amendment No. I dated December 4, 2013 ("Memorandum of Understanding No. I"), regarding lease of micro BTS infrastructure for installation of telecommunication equipment with colocation scheme. The lease period for each Micro BTS Infrastructure is 5 years as of the 14th day upon signing of the Minutes of Feasibility Test, which period may be extended for 5 years periods based on agreement between the parties.

On September 4, 2013, iForte and Internux entered into a Memorandum of Understanding For Lease of Micro BTS Infrastructure, as amended by Amendment No. I dated December 4, 2013 and lastly amended by Amendment No. II dated August 27, 2014 ("Memorandum of Understanding No. II"), regarding lease of micro BTS infrastructure space for installation of telecommunication equipment with Colocation scheme. The lease period for each Micro BTS Infrastructure is 5 years as of the 14th day upon signing of the Minutes of Feasibility Test, which period may be extended for 5 years based on agreement between the parties.

- t. On April 6, 2016, iForte and the Municipality of Malang entered into an Agreement regarding the cooperation lease in utilizing the asset of the municipality of Malang in 50 points or location in the city of Malang for the construction of Monopole tower. The lease period is 5 years as of the signing of the agreement.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- u. Pada tanggal 16 Desember 2014, iForte dan Hutchison menandatangani *MCP Master Lease Agreement* mengenai sewa *Microcell Pole* untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Periode awal dari sewa *Microcell Pole* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal penandatanganan *Site License* untuk masing-masing lokasi dan dapat diperpanjang 5 tahun oleh Hutchison dengan memberikan pemberitahuan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal.
- v. Pada tanggal 24 Juni 2013, iForte dan PT Iforte Mitra Multimedia ("IMM") menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April 2014. Dalam perjanjian tersebut, IMM sepakat untuk membantu memasarkan seluruh bidang usaha iForte seperti VSAT, jaringan internet M-WIFO, dan micro BTS dengan imbalan sebesar Rp100 setiap bulan. Perjanjian ini telah diakhiri secara efektif terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh dan antara iForte dan IMM.
- w. Pada tanggal 29 Oktober 2012, Perseroan menandatangani *Sale and Purchase Agreement* (the "SPA") dengan KPN B.V. ("KPN"), sebuah penyedia jasa telekomunikasi ternama di Belanda, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membeli 261 menara telekomunikasi dari KPN dengan cara membeli saham-saham pada perusahaan-perusahaan yang telah didirikan oleh KPN. Pada tanggal 3 Desember 2012, Perseroan menunjuk entitas anak tidak langsungnya, Protelindo Towers B.V., sebagai pembeli dalam SPA sebagai pengganti dari Perseroan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- u. On December 16, 2014, iForte and Hutchison entered into a *MCP Master Lease Agreement* regarding lease of *Microcell Pole* for installation of telecommunication equipment. The initial period of lease of *Microcell Pole* signed under this agreement is 5 years as of the date of execution of *Site License* for each site, which period may be extended for 5 years by Hutchison by giving a prior notice no later than 3 months before the expiration of the initial term.
- v. On June 24, 2013, iForte and PT Iforte Mitra Multimedia ("IMM") entered into a *Cooperation Agreement* as amended by *Amendment of Cooperation Agreement* dated April 1, 2014. In the agreement, IMM agrees to assist the marketing of all business sectors of iForte such as VSAT, M-WIFO internet network, and micro BTS with compensation amounting to IDR100 per month. This agreement has been effectively terminated as of June 30, 2015 based on the *Termination of Cooperation Agreement* dated June 30, 2015 by and between iForte and IMM.
- w. On October 29, 2012, the Company signed a *Sale and Purchase Agreement* (the "SPA") with KPN B.V. ("KPN"), a leading telecommunications service provider in the Netherlands, in relation to the Company's plan to purchase 261 telecommunications towers from KPN by purchasing shares in companies that were established by KPN. On December 3, 2012, the Company appointed its indirect subsidiary, Protelindo Towers B.V., as the purchaser under the SPA instead of itself.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2012, Protelindo Towers B.V. menyelesaikan akuisisi atas 261 menara-menara dari KPN berdasarkan SPA dengan membeli saham-saham dari Antenna Mast Company (I) B.V., Antenna Mast Company (II) B.V., Antenna Mast Company (III) B.V., dan Antenna Mast Company (IV) B.V., Mast Companies didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 19 Desember 2012 sebagai hasil dari pengambilalihan menara melalui proses demerger oleh KPN. Harga pembelian untuk saham-saham dalam Mast Companies adalah sebesar €75.000.000 (ditambah pajak pengalihan). Perseroan memiliki 56% kepemilikan saham dan hak suara secara tidak langsung terhadap Mast Companies.

Sehubungan dengan akuisisi 261 menara oleh Protelindo Towers B.V., dibawah ini adalah perjanjian-perjanjian penting yang ditandatangani dengan klien-klien di Belanda.

- x. Pada tanggal 19 Desember 2012, Mast Companies menandatangani Perjanjian Sewa Induk dengan KPN mengenai sewa ruang oleh KPN untuk keperluan jasa telekomunikasi mobile dan penyiaran. Jangka waktu awal untuk perjanjian-perjanjian sewa lokasi yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 15 tahun, dan akan diperpanjang untuk 5 tahun dan kemudian untuk jangka waktu 1 tahun pada suatu waktu, kecuali salah satu pihak mengakhiri perjanjian sewa lokasi. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal dimulainya untuk setiap lokasi.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On December 19, 2012, Protelindo Towers B.V. completed the acquisition of 261 towers from KPN pursuant to the SPA by purchasing all of the shares of Antenna Mast Company (I) B.V., Antenna Mast Company (II) B.V., Antenna Mast Company (III) B.V., and Antenna Mast Company (IV) B.V., The Mast Companies were incorporated under the laws of the Netherlands on December 19, 2012 as a result of, and acquired the towers by means of, a legal demerger by KPN. The purchase price for the shares in the Mast Companies was €75,000,000 (plus transfer taxes). The Company has an indirect capital and voting interest of 56% in the Mast Companies.

With respect to Protelindo Towers B.V.'s acquisition of 261 towers from KPN, below are significant agreements entered with the customers in the Netherlands.

- x. *On December 19, 2012, Mast Companies entered into a Master Lease Agreement with KPN regarding the lease of space by KPN for the benefit of mobile telecommunication and broadcast services. The initial period of the site lease agreements signed under this agreement is 15 years, which period will be extended for 5 years and thereafter for a term of 1 year at a time, unless one party terminates the site lease agreement. The lease period starts upon the commencement date for each location.*

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- y. Pada tanggal 3 Maret 2005, KPN B.V. terakhir kali mengubah Perjanjian *Framework Collocation* dengan Vodafone Libertel N.V. ("Vodafone") mengenai sewa ruang oleh Vodafone untuk keperluan pemasangan dan pengoperasian perangkat telekomunikasi mobile miliknya. Setiap perjanjian sewa lokasi yang terkait untuk penggunaan fasilitas-fasilitas menara akan berlaku pada saat ditandatangani perjanjian tersebut oleh para pihak dan akan berlaku untuk jangka waktu minimal selama 1 tahun terhitung sejak tanggal penyelesaian pemasangan perangkat milik Vodafone. Sehubungan dengan *legal demerger* KPN melalui pendirian Mast Companies, seluruh hak dan kewajiban atas aset yang dipindahkan kepada Mast Companies beralih kepada Mast Companies sesuai dengan ketentuan hukum di Negeri Belanda.
- z. Pada tanggal 19 Juli 2004, KPN Telecom B.V. (kini dikenal sebagai KPN B.V.) terakhir kali mengubah Perjanjian *Framework Collocation* dengan T-Mobile Netherlands B.V. ("T-Mobile") mengenai sewa ruang oleh T-Mobile untuk keperluan pemasangan dan pengoperasian perangkat telekomunikasi mobile miliknya. Setiap perjanjian sewa lokasi yang terkait untuk penggunaan fasilitas-fasilitas menara akan berlaku pada saat ditandatangani perjanjian tersebut oleh para pihak dan akan berlaku untuk jangka waktu minimal selama 1 tahun terhitung sejak tanggal penyelesaian pemasangan perangkat milik T-Mobile. Sehubungan dengan *legal demerger* KPN melalui pendirian Mast Companies, seluruh hak dan kewajiban atas aset yang dipindahkan kepada Mast Companies beralih kepada Mast Companies sesuai dengan ketentuan hukum di Negeri Belanda.
- aa. Pada tanggal 12 Februari 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan iForte ("Perjanjian Pinjaman"). Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tersebut, Perseroan memberikan pinjaman sejumlah Rp30.398 kepada iForte dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun sejak tanggal efektifnya Perjanjian Pinjaman. Tujuan penggunaan pinjaman tersebut adalah untuk modal kerja iForte sehubungan dengan bisnis *micro* BTS nya. Perjanjian Pinjaman tersebut dikenakan bunga yaitu dari jumlah suku bunga per tahun JIBOR ditambah 2,5% per tahun.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- y. On March 3, 2005, KPN B.V. lastly amended a *Collocation Framework Agreement* with Vodafone Libertel N.V. ("Vodafone") regarding the lease of space by Vodafone for the benefit of installing and operating its mobile telecommunication equipment. Each underlying site lease agreement for the use of the tower facilities will take effect on the date it is signed by both parties and will be entered into for a minimum term of 1 year following the date of completion of the installation of Vodafone's equipment. Following the legal demerger of KPN to establish the Mast Companies, all rights and obligations regarding the transferred assets to the Mast Companies were assigned to the Mast Companies by operation of law of the Netherlands.
- z. On July 19, 2004, KPN Telecom B.V. (now known as KPN B.V.) lastly amended a *Collocation Framework Agreement* with T-Mobile Netherlands B.V. ("T-Mobile") regarding the lease of space by T-Mobile for the benefit of installing and operating its mobile telecommunication equipment. Each underlying site lease agreement for the use of the tower facilities will take effect on the date it is signed by both parties and will be entered into for a minimum term of 1 year following the date of completion of the installation of T-Mobile's equipment. Following the legal demerger of KPN to establish the Mast Companies, all right and obligations on the transferred assets to the Mast Companies were assigned to the Mast Companies by operation of law of the Netherlands.
- aa. On February 12, 2016, the Company entered into a *Loan Agreement* with iForte (the "Loan Agreement"). In connection with the Loan Agreement, the Company provided a loan in the amount of Rp30,398 to iForte with a loan term of 5 years as of the effective date of the Loan Agreement. The purpose of the loan is to be used for iForte's working capital in connection with its *micro* BTS business. The Loan Agreement is subject to an interest being the total JIBOR interest rate per annum plus 2.5% per annum.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan:				
Sampai dengan satu tahun	3.167.544	3.692.394	3.493.359	3.187.613
Lebih dari satu tahun				
sampai dengan lima tahun	16.931.064	16.011.378	15.530.710	14.201.281
Lebih dari lima tahun	7.018.023	6.847.786	9.717.396	9.908.421
	27.116.631	26.551.558	28.741.465	27.297.315

Estimated future minimum lease payments:
Within one year
From one year to five years
More than five years

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah telecommunication sites dan total sewa per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

The table below contains the number of telecommunication sites and total site leases as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013.

Perusahaan /Company	30 Juni/June 30, 2016			31 Desember/December 31, 2015		
	Jumlah telecommunication sites - siap untuk diinstalasi/Number of telecommunication sites - ready for installation	Jumlah telecommunication sites - commenced /Number of telecommunication sites - commenced	Jumlah sewa / Number of total sites leases	Jumlah telecommunication sites - siap untuk diinstalasi/Number of telecommunication sites - ready for installation	Jumlah telecommunication sites - commenced /Number of telecommunication sites - commenced	Jumlah sewa / Number of total sites leases
Perseroan dan entitas anaknya/ the Company and its subsidiaries	14.775	14.633	24.726	12.237	12.105	21.038

Perusahaan /Company	31 Desember/December 31, 2014			31 Desember/December 31, 2013		
	Jumlah telecommunication sites - siap untuk diinstalasi/Number of telecommunication sites - ready for installation	Jumlah telecommunication sites - commenced /Number of telecommunication sites - commenced	Jumlah sewa / Number of total sites leases	Jumlah telecommunication sites - siap untuk diinstalasi/Number of telecommunication sites - ready for installation	Jumlah telecommunication sites - commenced /Number of telecommunication sites - commenced	Jumlah sewa / Number of total sites leases
Perseroan dan entitas anaknya/ the Company and its subsidiaries	11.595	11.332	20.138	9.766	9.746	18.322

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah *telecommunication sites* Perseroan dan entitas anaknya yang disewakan kepada masing-masing pelanggan per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The table below contains the number of leases on the Company and its subsidiaries' telecommunication site portfolio per customer as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013.

No	Pelanggan/Customer	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013
			Sewa/Leases	Sewa/Leases	Sewa/Leases	Sewa/Leases
1	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	36a	-	-	185	337
2	PT Telekomunikasi Selular	36c,q	4.925	4.581	4.227	2.529
3	PT Smartfren Telecom Tbk.	36d	1.663	1.671	1.674	1.675
4	PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	36e,u	8.571	7.738	7.675	6.969
5	PT XL Axiata Tbk.	36f,h,p	6.591	4.163	3.994	3.046
6	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	36g	123	97	97	97
7	PT Indosat Tbk.	36i,r	1.094	1.033	919	728
8	PT Smart Telecom	36j	118	60	60	61
9	PT Berca Global-Access	36k	16	14	14	14
10	PT First Media Tbk. / PT Internux	36l,s	1.069	1.023	645	395
11	KPN B.V.	36w	382	483	483	484
12	T-Mobile Netherlands B.V.	36z	88	88	86	86
13	Vodafone Libertel N.V.	36y	77	79	79	81
14	PT Tower Bersama		8	8	-	-
15	Bert Vos Produkties Westerwolde BV		1	-	-	-
16	PT Axis Telecom Indonesia		-	-	-	925
17	PT Bakrie Telecom Tbk.		-	-	-	882
18	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Repeater dan Indoor base transceiver stations)		-	-	-	13
	Jumlah/Total		24.726	21.038	20.138	18.322

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Tabel berikut adalah jumlah transaksi yang telah terjadi dengan pihak berelasi selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta saldo dengan pihak berelasi pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Saldo dengan pihak-pihak berelasi:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Aset				
Pihak-pihak berelasi lainnya:				
Kas dan setara kas				
Rupiah:				
PT Bank Central Asia Tbk.	18.359	155.315	159.575	168.190
Dolar AS:				
PT Bank Central Asia Tbk.	1.372	1.435	12	-
Dolar Singapura:				
PT Bank Central Asia Tbk.	7	7	-	-
Piutang lain-lain				
Dolar AS:				
Direksi Perseroan dan entitas anak	135.775	139.494	4.257	3.062
	<u>155.513</u>	<u>296.251</u>	<u>163.844</u>	<u>171.252</u>
Persentase jumlah aset dari pihak-pihak berelasi dengan total aset	1%	1%	1%	1%

Piutang lain-lain kepada direksi Perseroan dan entitas anak merupakan piutang kepada Peter Djatmiko sebesar AS\$9.635.140 (ekuivalen dengan Rp126.991, 31 Desember 2015: Rp133.171, termasuk akrual bunga) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun (Catatan 36n) dan piutang kepada direksi lain sebesar Rp8.784 (31 Desember 2015: Rp6.323, 31 Desember 2014: Rp4.237 dan 31 Desember 2013: Rp3.062). Piutang kepada Peter Djatmiko akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2019. Sisa piutang lain-lain kepada direksi lain akan diselesaikan dengan cara pemotongan gaji bulanan.

37. RELATED PARTIES INFORMATION

The following table provides the total amount of transactions that have been entered into related party for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015, and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, as well as balances with related parties as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013.

Balances with related parties:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
		2015	2014	2013
Assets				
Other related parties:				
Cash and cash equivalents				
Rupiah:				
PT Bank Central Asia Tbk.	18.359	155.315	159.575	168.190
US Dollar:				
PT Bank Central Asia Tbk.	1.372	1.435	12	-
SGD Dollar:				
PT Bank Central Asia Tbk.	7	7	-	-
Other receivables				
US Dollar:				
The Company and subsidiaries' Directors	135.775	139.494	4.257	3.062
	<u>155.513</u>	<u>296.251</u>	<u>163.844</u>	<u>171.252</u>
Percentage of total assets involving related party to total assets	1%	1%	1%	1%

Other receivables from the Company and subsidiaries' directors are receivable to Peter Djatmiko amounting to US\$9,635,140 (equivalent to Rp126,991), (December 31, 2015: Rp133,171, including accrued interest) with interest rate of 5% per annum (Note 36n) and receivables from other directors amounting to Rp8,784 (December 31, 2015: Rp6,323, December 31, 2014: Rp4,237 and December 31, 2013: Rp3,062). The receivable from Peter Djatmiko will be due on March 31, 2019. The remaining other receivables from other directors will be settled through monthly salary deduction.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

37. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo dengan pihak-pihak berelasi: (lanjutan)

Balances with related parties: (continued)

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Liabilitas					Liabilities
Perusahaan Induk:					<i>Parent Entity:</i>
Utang pembangunan menara dan lainnya					Tower construction and other payables
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	29.515	31.630	16.134	5.782	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
Management Tower Asia Pte.Ltd (MTA)	-	-	2.923	-	- Management Tower Asia Pte. Ltd (MTA)
Beban akrual					<i>Accrued expenses</i>
Noraeg Holdings LLC (Noraeg)	14.177	10.353	-	-	Noraeg Holdings LLC (Noraeg)
Management Tower Asia Pte.Ltd (MTA)	-	12.454	3.359	-	- Management Tower Asia Pte. Ltd (MTA)
	43.692	54.437	22.416	5.782	
Persentase jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi dengan total liabilitas	0%	0%	0%	0%	Percentage of total liabilities involving related party to total liabilities

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi:

Transactions with related parties:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	30 Juni 2015/ June 30, 2015	31 Desember/December 31,			
			2015	2014	2013	
Pihak-pihak berelasi lainnya:						Other related parties:
Pendapatan keuangan	4.123	1.162	2.153	563	1.565	Finance income
Persentase pendapatan keuangan dari pihak berelasi dengan total pendapatan keuangan	13%	16%	17%	8%	39%	Percentage of interest income involving related party to total interest income
Beban usaha:						<i>Operating expense:</i>
Perusahaan induk:						<i>Parent entity:</i>
Biaya pemasaran dan perijinan	18.000	18.000	36.000	36.000	36.000	Marketing and licensing fee
Pihak-pihak berelasi lainnya:						<i>Other related parties:</i>
Sewa kantor	11.019	10.377	21.441	18.921	11.653	Office lease
Jasa profesional	33.226	82.815	161.007	142.151	132.960	Professional fees
	62.245	111.192	218.448	197.072	180.613	
Persentase beban usaha dari pihak berelasi dengan total beban usaha	28%	44%	42%	43%	51%	Percentage of operating expense involving related parties to total operating expenses

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi: (lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan telah membayar jasa manajemen kepada Noraeg dan MTA dengan rincian sebagai berikut:

Jasa personil manajemen
kunci (dalam AS\$)

Untuk Periode Enam Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 Juni/
For the Six-Month Periods
Ended June 30,

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31

	2015 (Tidak diaudit/ Unaudited)		2015	2014	2013	
	2016					
Noraeg Holding LLC	2.971.000	4.167.457	8.753.457	9.745.000	9.200.000	Noraeg Holding LLC
Management Tower Asia Pte.Ltd	-	819.650	2.163.650	2.345.000	4.650.000	Management Tower Asia Pte.Ltd

Sifat dari hubungan

Noraeg

Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Noraeg, tanggal 1 Agustus 2008, untuk jasa berikut:

"Proyek manajemen dan jasa serupa sehubungan dengan proyek-proyek khusus yang berkaitan dengan inisiatif pelanggan, termasuk studi pemasaran, ekonomi dan gambaran pasar dan strategi, pembangunan menara baru, inisiatif kolokasi dan perjanjian pemasaran situs menara, dan jasa-jasa bisnis lainnya yang diminta dari waktu ke waktu oleh perseroan."

Management Tower Asia Pte. Ltd (MTA)

Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan MTA, tanggal 1 Januari 2010, untuk jasa berikut:

37. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transactions with related parties: (continued)

For the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company has paid management services to Noraeg and MTA with the following details:

Key management personnel services.
(in US\$)

Nature of relationship

Noraeg

The Company has entered into an engagement agreement with Noraeg, dated August 1, 2008, for the following services:

"Project management and similar services in connection with special projects relating to customer initiatives, including marketing studies, economic and market overview and strategy, new tower builds, collocation initiatives and tower site marketing agreements, and any other business services requested from time to time by the Company."

Management Tower Asia Pte. Ltd (MTA)

The Company has entered into an engagement agreement with MTA, dated January 1, 2010, for the following services:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Sifat dari hubungan

Management Tower Asia Pte.Ltd (MTA) (lanjutan)

"Jasa teknis sehubungan dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan struktur pembiayaan dan inisiatif pelanggan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, analisis struktur penggalangan dana, penelitian pemasaran, ekonomi dan gambaran pasar dan strategi, pembangunan menara baru, inisiatif kolokasi, masalah terkait dengan akuisisi menara dan perjanjian pemasaran lokasi menara, dan jasa-jasa teknis lainnya diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan."

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Sifat hubungan/Relationship	Pihak-pihak berelasi/ Related parties
<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham/Shareholder 	<ul style="list-style-type: none"> PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> Pihak-pihak berelasi lainnya/Other related parties: <ul style="list-style-type: none"> Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Bank Central Asia Tbk./Family relationship with ultimate shareholders of PT Bank Central Asia Tbk. Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/Affiliated party based on shareholding composition Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/Affiliated party based on shareholding composition Personil manajemen kunci/Key management personnel 	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank Central Asia Tbk. PT Grand Indonesia Peter Djatmiko Noraeg Holdings LLC Management Tower Asia Pte. Ltd

37. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Nature of relationship

Management Tower Asia Pte. Ltd (MTA) (continued)

"Technical services in connection with projects relating to structure financing and customer initiatives, including but not restricted to, fund raising structure analysis, marketing studies, economic and market overview and strategy, new tower builds, colocation initiatives, tower acquisition related matters and tower site marketing agreements, and any other technical services requested from time to time by the Company."

Nature of relationships with related parties

Transaksi/ Transactions
Biaya pemasaran dan perijinan, penggantian biaya (perjanjian pemasaran dan perijinan pada tanggal 1 Agustus 2009 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kedua pada tanggal 26 Juli 2013)/Marketing and licensing fee, reimbursable expenses (the marketing and licensing agreement dated August 1, 2009 as lastly amended by second amendment dated July 26, 2013)
Kas dan setara kas, pinjaman/Cash and cash equivalents, loan
Pembayaran sewa kantor/Payment of office lease
Pinjaman dan pendapatan bunga/Loan and interest income
Jasa konsultasi manajemen kunci/Key management consultation services

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

Personil manajemen kunci Perseroan meliputi Dewan Komisaris dan Direksi. Total kompensasi personil manajemen kunci dalam Perseroan dan entitas anaknya:

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	30 Juni 2015/ June 30, 2015	31 Desember/December 31,		
			2015	2014	2013
Imbalan kerja jangka pendek:					
Dewan Komisaris	1.661	1.544	3.307	2.999	2.339
Direksi	16.957	11.704	20.788	9.370	6.797
Imbalan kerja jangka panjang:					
Direksi	7.622	366	6.266	660	696
	26.240	13.614	30.361	13.029	9.832

Jumlah dalam tabel di atas merupakan jumlah yang diakui sebagai beban selama periode pelaporan sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

38. SEGMENT OPERASI

Segmen bisnis

Perseroan dan entitas anaknya pada saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyewaan menara
- Penyewaan pemancar
- Jasa VSAT
- MWIFO dan Internet

37. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

All transactions with related parties are based on terms and conditions agreed among the parties.

Key management personnel of the Company are the Boards of Commissioners and Directors. Compensation of key management personnel of the Company and its subsidiaries:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	2013
Short-term employee benefits:			
Board of Commissioners	3.307	2.999	2.339
Directors	20.788	9.370	6.797
Long-term employee benefits:			
Directors	6.266	660	696
	30.361	13.029	9.832

The amounts disclosed in the above table are the amounts recognized as expenses during the reporting period related to the key management personnel.

There are no compensation of other long-term benefits, termination benefits, and share-based payment.

38. OPERATING SEGMENTS

Business segments

The Company and its subsidiaries are presently engaged in the following business activities:

- Tower rental
- Repeater leasing
- VSAT Services
- MWIFO and Internet

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen bisnis (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen bisnis:

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Business segments (continued)

Segment information based on business segments is presented below:

Six-month period ended June 30, 2016

	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa VSAT/ VSAT Services	MWIFO dan internet/ MWIFO and internet	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	2.343.383	52.399	27.352	2.423.134	Rental/leasing revenue from third parties
Laba bruto	2.055.274	37.188	13.966	2.106.428	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(22.114)	(1.764)	(3.310)	(27.188)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(180.288)	(8.107)	(5.144)	(193.539)	General and administrative expenses
Penurunan nilai wajar properti investasi	109.730	-	-	109.730	Decrease in fair value of investment properties
Keuntungan (kerugian) lain-lain, neto	40.817	(316)	(187)	40.314	Other gains (losses), net
Laba usaha	2.003.419	27.001	5.325	2.035.745	Operating income
Pendapatan keuangan	31.060	78	41	31.179	Finance income
Biaya keuangan	(278.096)	(4.301)	(2.245)	(284.642)	Finance charges
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.756.383	22.778	3.121	1.782.282	Income before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan	(450.439)	(4.644)	(2.425)	(457.508)	Corporate income tax expense
Laba neto	1.305.944	18.134	696	1.324.774	Net income
LAPORAN POSISI KEUANGAN					STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	25.879.180	252.476	131.792	26.263.448	Total segment assets
Total liabilitas segmen	(17.054.440)	(149.551)	(78.066)	(17.282.057)	Total segment liabilities
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.447.234	10.624	5.546	2.463.404	Net cash provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4.329.710)	(20.403)	(10.650)	(4.360.763)	Net cash used in investing activities
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.595.823	2.687	1.402	2.599.912	Net cash provided by financing activities

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, segment operasi Grup hanya berkaitan dengan sewa menara.

For the six-month period ended June 30, 2015, the Group's business segment only pertains to tower rental.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen bisnis (lanjutan)

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015**

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Business segments (continued)

Year ended December 31, 2015

	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa VSAT/ VSAT Services	MWIFO dan internet/ MWIFO and internet	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	4.421.397	24.193	24.194	4.469.784	Rental/leasing revenue from third parties
Laba bruto	3.870.141	17.737	11.166	3.899.044	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(56.141)	(2.389)	(2.281)	(60.811)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(456.061)	(3.966)	(3.609)	(463.636)	General and administrative expenses
Kenaikan nilai wajar properti investasi	1.631.663	-	-	1.631.663	Increase in fair value of investment properties
Keuntungan lain-lain, neto	(511.941)	770	1.591	(509.580)	Other gain, net
Laba usaha	4.477.661	12.152	6.867	4.496.680	Operating income
Pendapatan keuangan	12.326	16	16	12.358	Finance income
Biaya keuangan	(555.648)	(3.432)	(3.432)	(562.512)	Finance charges
Laba sebelum beban pajak penghasilan	3.934.339	8.736	3.451	3.946.526	Income before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan	(982.600)	(3.588)	(3.588)	(989.776)	Corporate income tax expense
Laba neto	2.951.739	5.148	(137)	2.956.750	Net income
LAPORAN POSISI KEUANGAN					STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	21.123.087	144.932	144.938	21.412.957	Total segment assets
Total liabilitas segmen	(13.531.551)	(111.383)	(111.388)	(13.754.322)	Total segment liabilities
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.398.779	10.906	10.906	3.420.591	Net cash provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.953.256)	(3.852)	(3.853)	(1.960.961)	Net cash used in investing activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(690.970)	(7.904)	(7.904)	(706.778)	Net cash used in financing activities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Segmen bisnis (lanjutan)

Business segments (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Year ended December 31, 2014

	Sewa menara/ Tower rental	Sewa pemancar/ Repeater leasing	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	4.104.806	1.369	4.106.175	Rental/leasing revenues from third parties
Laba bruto	3.529.592	1.178	3.530.770	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(50.915)	(17)	(50.932)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(411.418)	(137)	(411.555)	General and administrative expenses
Penurunan nilai wajar properti investasi	(408.220)	-	(408.220)	Increase in fair value of investment properties
Kerugian lain-lain, neto	(265.984)	(225)	(266.209)	Others losses, net
Laba usaha	2.393.055	799	2.393.854	Operating income
Pendapatan keuangan	6.924	2	6.926	Finance income
Biaya keuangan	(855.301)	(285)	(855.586)	Finance charges
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.544.678	516	1.545.194	Income before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan	(455.358)	(152)	(455.510)	Corporate income tax expense
Laba neto	1.089.320	364	1.089.684	Net income
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	17.274.326	-	17.274.326	Total segment assets
Total liabilitas segmen	(12.569.677)	-	(12.569.677)	Total segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.335.554	1.112	3.336.666	Net cash provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.146.776)	(716)	(2.147.492)	Net cash used in investing activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(791.917)	(264)	(792.181)	Net cash used in financing activities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Segmen bisnis (lanjutan)

Business segments (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Year ended December 31, 2013

	Sewa menara/ Tower rental	Sewa pemancar/ Repeater leasing	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	3.195.372	1.767	3.197.139	Rental/leasing revenues from third parties
Laba bruto	2.727.294	1.509	2.728.803	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(36.137)	(20)	(36.157)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(319.029)	(176)	(319.205)	General and administrative expenses
Penurunan nilai wajar Properti investasi	(670.303)	(371)	(670.674)	Decrease in fair value of investment properties
Kerugian lain-lain, neto	(946.654)	(523)	(947.177)	Others losses, net
Laba usaha	755.171	419	755.590	Operating income
Pendapatan keuangan	3.999	2	4.001	Finance income
Biaya keuangan	(551.040)	(305)	(551.345)	Finance charges
Laba sebelum beban pajak penghasilan	208.130	116	208.246	Income before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan	(58.284)	(32)	(58.316)	Corporate income tax expense
Laba neto	149.846	84	149.930	Net income
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	15.569.335	8.609	15.577.944	Total segment assets
Total liabilitas segmen	(11.880.278)	(6.569)	(11.886.847)	Total segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.430.632	1.344	2.431.976	Net cash provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.775.428)	(982)	(1.776.410)	Net cash used in investing activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(637.252)	(352)	(637.604)	Net cash used in financing activities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen geografis

Tabel berikut menunjukkan distribusi akun-akun di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan konsolidasian dan informasi lainnya berdasarkan segmen geografis:

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

	Indonesia/ Indonesia	Luar negeri/ Overseas	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total
PENDAPATAN				
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	2.362.083	61.051	-	2.423.134
Laba bruto	2.074.852	31.576	-	2.106.428
Beban penjualan dan pemasaran	(27.185)	(3)	-	(27.188)
Beban umum dan administrasi	(189.740)	(3.799)	-	(193.539)
Kenaikan nilai wajar properti investasi	117.928	(8.198)	-	109.730
Keuntungan lain-lain, neto	58.930	(18.616)	-	40.314
Laba usaha	2.034.785	960	-	2.035.745
Pendapatan keuangan	33.047	88.390	(90.258)	31.179
Biaya keuangan	(278.657)	(96.243)	90.258	(284.642)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.789.175	(6.893)	-	1.782.282
Beban pajak penghasilan	(455.107)	(2.401)	-	(457.508)
Laba neto	1.334.068	(9.294)	-	1.324.774
LAPORAN POSISI KEUANGAN				
Total aset segmen	25.770.567	5.060.089	(4.567.208)	26.263.448
Total liabilitas segmen	(16.509.054)	(4.876.396)	4.103.393	(17.282.057)
INFORMASI LAINNYA				
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.421.773	41.631	-	2.463.404
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4.349.882)	(10.881)	-	(4.360.763)
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.601.960	(2.048)	-	2.599.912

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Geographical segments

The following table shows the distribution of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and statement of financial position accounts and other information by geographical segment:

Six-month period ended June 30, 2016

	REVENUES
Rental/leasing revenue from third parties	
Gross income	
Selling and marketing expenses	
General and administrative expenses	
Increase in fair value of investment properties	
Other gains, net	
Operating income	
Finance income	
Finance charges	
Income before corporate income tax expense	
Corporate income tax expense	
Net income	
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	
Total segment assets	
Total segment liabilities	
OTHER INFORMATION	
Net cash provided by operating activities	
Net cash used in investing activities	
Net cash provided by (used in) financing activities	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen geografis (lanjutan)

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2015**

	Indonesia/ <i>Indonesia</i>	Luar negeri/ <i>Overseas</i>	Eliminasi/ <i>Eliminations</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
PENDAPATAN				
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	2.083.090	58.041	-	2.141.131
Laba bruto	1.840.282	30.147	-	1.870.429
Beban penjualan dan pemasaran	(27.680)	(19)	-	(27.699)
Beban umum dan administrasi	(221.453)	(5.713)	-	(227.166)
Kenaikan nilai wajar properti investasi	539.328	(7.900)	-	531.428
Kerugian lain-lain, neto	(307.173)	(6.652)	-	(313.825)
Laba usaha	1.823.304	9.863	-	1.833.167
Pendapatan keuangan	7.204	81.845	(81.845)	7.204
Biaya keuangan	(261.779)	(86.850)	81.845	(266.784)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.568.729	4.858	-	1.573.587
Beban pajak penghasilan	(397.855)	(1.257)	-	(399.112)
Laba neto	1.170.874	3.601	-	1.174.475

INFORMASI LAINNYA

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.356.054	86.029	-	2.442.083
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.059.403)	(6.408)	-	(1.065.811)
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(332.406)	(5.771)	-	(338.177)

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
pada 31 Desember 2015**

Total aset segmen	19.958.932	7.968.371	(6.514.346)	21.412.957
Total liabilitas segmen	(12.280.219)	(7.633.634)	6.159.531	(13.754.322)

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Geographical segments (continued)

Six-month period ended June 30, 2015

REVENUES
Rental/leasing revenue from third parties
Gross income
Selling and marketing expenses
General and administrative expenses
Increase in fair value of investment properties
Other losses, net
Operating income
Finance income
Finance charges
Income before corporate income tax expense
Corporate income tax expense
Net income

OTHER INFORMATION

Net cash provided by operating activities
Net cash used in investing activities
Net cash used in financing activities

**STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION
as of December 31, 2015**

Total segment assets
Total segment liabilities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen geografis (lanjutan)

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015**

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Geographical segments (continued)

Year ended December 31, 2015

	Indonesia/ Indonesia	Luar negeri/ Overseas	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	4.347.926	121.858	-	4.469.784	<i>Rental/leasing revenue from third parties</i>
Laba bruto	3.833.820	65.224	-	3.899.044	<i>Gross income</i>
Beban penjualan dan pemasaran	(60.783)	(28)	-	(60.811)	<i>Selling and marketing expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(456.470)	(7.166)	-	(463.636)	<i>General and administrative expenses</i>
Kenaikan nilai wajar properti investasi	1.631.663	-	-	1.631.663	<i>Increase in fair value of investment properties</i>
Keuntungan (kerugian) lain-lain, neto	(511.941)	770	1.591	(509.580)	<i>Other gains (losses), net</i>
Laba usaha	4.436.289	58.800	1.591	4.496.680	<i>Operating income</i>
Pendapatan keuangan	16.932	172.276	(176.850)	12.358	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	(546.790)	(192.572)	176.850	(562.512)	<i>Finance charges</i>
Laba sebelum beban pajak penghasilan	3.906.431	38.504	1.591	3.946.526	Income before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan	(971.211)	(18.565)	-	(989.776)	<i>Corporate income tax expense</i>
Laba neto	2.935.220	19.939	1.591	2.956.750	Net income
LAPORAN POSISI KEUANGAN					STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	19.958.932	7.968.371	(6.514.346)	21.412.957	<i>Total segment assets</i>
Total liabilitas segmen	(12.280.219)	(7.633.634)	6.159.531	(13.754.322)	<i>Total segment liabilities</i>
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.323.251	155.368	(58.028)	3.420.591	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.949.530)	(11.431)	-	(1.960.961)	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(685.963)	(78.843)	58.028	(706.778)	<i>Net cash used in financing activities</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen geografis (lanjutan)

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014**

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Geographical segments (continued)

Year ended December 31, 2014

	Indonesia/ Indonesia	Luar negeri/ Overseas	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	3.982.272	123.903	-	4.106.175	<i>Rental/leasing revenue from third parties</i>
Laba bruto	3.471.334	59.436	-	3.530.770	<i>Gross income</i>
Beban penjualan dan pemasaran	(50.891)	(41)	-	(50.932)	<i>Selling and marketing expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(398.895)	(12.660)	-	(411.555)	<i>General and administrative expenses</i>
Kenaikan nilai wajar properti investasi	(390.970)	(17.250)	-	(408.220)	<i>Increase in fair value of investment properties</i>
Kerugian lain-lain, neto	(264.653)	(1.556)	-	(266.209)	<i>Other losses, net</i>
Laba usaha	2.365.925	27.929	-	2.393.854	<i>Operating income</i>
Pendapatan keuangan	6.904	167.017	(166.995)	6.926	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	(824.124)	(198.457)	166.995	(855.586)	<i>Finance charges</i>
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	1.548.705	(3.511)	-	1.545.194	<i>Income (loss) before corporate income tax (expense) benefit</i>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(456.588)	1.078	-	(455.510)	<i>Corporate income tax benefit (expense)</i>
Laba (rugi) neto	1.092.117	(2.433)	-	1.089.684	<i>Net income (loss)</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN					STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	16.313.990	6.792.034	(5.831.698)	17.274.326	<i>Total segment assets</i>
Total liabilitas segmen	(11.586.725)	(6.586.729)	5.603.777	(12.569.677)	<i>Total segment liabilities</i>
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.174.347	162.319	-	3.336.666	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.084.280)	(63.212)	-	(2.147.492)	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(665.505)	(126.676)	-	(792.181)	<i>Net cash used in financing activities</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen geografis (lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

38. OPERATING SEGMENTS (continued)

Geographical segments (continued)

Year ended December 31, 2013

	Indonesia/ Indonesia	Luar negeri/ Overseas	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	3.097.433	99.706	-	3.197.139	<i>Rental/leasing revenue from third parties</i>
Laba bruto	2.685.900	42.903	-	2.728.803	<i>Gross income</i>
Beban penjualan dan pemasaran	(36.153)	(4)	-	(36.157)	<i>Selling and marketing expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(310.543)	(9.295)	633	(319.205)	<i>General and administrative expenses</i>
Penurunan nilai wajar Properti investasi	(655.459)	(15.215)	-	(670.674)	<i>Decrease in fair value of investment properties</i>
Keuntungan (kerugian) lain-lain, neto	(946.945)	568	(800)	(947.177)	<i>Other gains (losses), net</i>
Laba usaha	736.800	18.957	(167)	755.590	<i>Operating income</i>
Pendapatan keuangan	3.738	141.571	(141.308)	4.001	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	(523.282)	(169.371)	141.308	(551.345)	<i>Finance charges</i>
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	217.256	(8.843)	(167)	208.246	<i>Income (losses) before corporate income tax benefit (expense)</i>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(60.651)	2.335	-	(58.316)	<i>Corporate income tax benefit (expense)</i>
Laba (rugi) neto	156.605	(6.508)	(167)	149.930	<i>Net income (loss)</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN					STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total aset segmen	14.327.604	6.389.884	(5.139.544)	15.577.944	<i>Total segment assets</i>
Total liabilitas segmen	(10.827.646)	(5.917.346)	4.858.145	(11.886.847)	<i>Total segment liabilities</i>
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.373.388	58.588	-	2.431.976	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.771.544)	(4.866)	-	(1.776.410)	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(427.641)	(209.963)	-	(637.604)	<i>Net cash used in financing activities</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

**39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of the statement of financial position dates are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2016		31 Desember/ December 31, 2015		
	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset:					Assets:
Kas	AS\$ 20.444	269	20.444	282	Cash on hand
Rekening giro- Pihak ketiga	AS\$ 166.905.944	2.199.821	103.989.530	1.434.534	Current account Third parties
	EUR 9.106.669	133.421	6.310.823	95.104	
	SGD 6.283	62	7.541	74	
Pihak berelasi	AS\$ 104.086	1.372	104.064	1.435	Related party
	SGD 671	7	767	7	
Deposito berjangka Pihak ketiga	AS\$ 40.000.000	527.200	48.000.000	662.160	Time deposit Third parties
Piutang usaha - pihak ketiga	AS\$ 6.850.593	90.291	3.104.792	42.831	Trade receivables - third parties
	EUR 869.499	12.739	2.396.375	36.113	
Uang muka	AS\$ 881.127	11.613	565.427	7.800	Advances
Aset tidak lancar lainnya	AS\$ 434.474	5.726	438.793	6.053	Other non-current assets
Piutang lain-lain - pihak berelasi	AS\$ 10.301.615	135.775	10.111.899	139.494	Other receivables - related parties
Total aset	AS\$ 225.498.283	2.972.067	166.334.949	2.294.589	Total assets
	EUR 9.976.168	146.160	8.707.198	131.217	
	SGD 6.954	69	8.308	81	
Liabilitas:					Liabilities:
Utang pembangunan menara dan lainnya					Tower construction and other payables
Pihak ketiga	AS\$ 167.519	2.208	-	-	Third parties
	EUR 11.981	176	468.272	7.057	
	SGD -	-	1.641	16	
Utang lain-lain - pihak ketiga	AS\$ 4.713	62	4.641	64	Other payables - third parties
	EUR 260.818	3.821	-	-	
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Current portion of long-term loans
Pihak ketiga	EUR 14.670.462	214.935	-	-	Third parties
Utang jangka panjang					Long-term loans
Pihak ketiga	AS\$ 378.000.000	4.982.040	340.000.000	4.690.300	Third parties
	EUR 40.000.000	586.036	54.670.462	823.868	
Utang obligasi jangka panjang					Long-term bonds payable
Pihak ketiga	SGD 180.000.000	1.758.702	180.000.000	1.759.458	Third parties
Beban akrual					Accrued expenses
Pihak ketiga	AS\$ 2.004.641	26.421	2.687.367	37.072	Third parties
	EUR 1.452.783	21.285	5.898.065	88.882	
Pihak berelasi	AS\$ 1.075.668	14.177	1.653.294	22.807	Related parties
Utang swap valuta asing	SGD 13.422.676	131.252	23.279.682	227.954	Cross currency swap payables
Total liabilitas	AS\$ 381.252.541	5.024.908	344.345.302	4.750.243	Total liabilities
	EUR 56.396.044	826.253	61.036.799	919.807	
	SGD 193.422.676	1.889.954	203.281.323	1.987.428	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING (lanjutan)**

**39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut (lanjutan):

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of the statement of financial position dates are as follows (continued):

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		
	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset:					Assets:
Kas	AS\$ 20.000	249	-	-	Cash on hand
Rekening giro- Pihak ketiga	AS\$ 120.394.838	1.497.713	98.705.580	1.203.122	Current account Third parties
Pihak berelasi	EUR 4.772.205	72.217	5.814.830	97.813	
Deposito berjangka Pihak ketiga	AS\$ 975	12	-	-	Related party Time deposit Third parties
Piutang usaha - pihak ketiga	AS\$ 20.000.000	248.800	-	-	
Uang muka	AS\$ 4.934.168	61.381	10.265.330	125.124	Trade receivables - third parties
Aset tidak lancar lainnya	EUR 1.733.605	26.235	2.334.514	39.270	
Piutang lain-lain - pihak berelasi	AS\$ 966.151	12.019	-	-	Advances Non-current assets Other receivables - related parties
Total aset	AS\$ 396.639	4.934	-	-	
	AS\$ 342.215	4.257	251.210	3.062	
	AS\$ 147.054.986	1.829.365	109.222.120	1.331.308	Total assets
	EUR 6.505.810	98.452	8.149.344	137.083	
Liabilitas:					Liabilities:
Utang pembangunan menara dan lainnya					Tower construction and other payables Third parties
Pihak ketiga	AS\$ 41.504	517	17.325.000	211.174	
Pihak berelasi	EUR 473.765	7.169	134.965	2.270	
Utang lain-lain - pihak ketiga	AS\$ 235.000	2.923	-	-	Related parties other payables - third parties
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	AS\$ 1.416	18	-	-	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	AS\$ -	-	75.000.000	914.175	Current portion of long-term loans Third parties
Pihak ketiga					
Utang obligasi	AS\$ 340.000.000	4.229.600	400.000.000	4.875.600	Long-term loans, net of current portion Third parties
Beban akrual	EUR 54.670.462	827.343	57.227.723	962.653	
Pihak ketiga	SGD 180.000.000	1.696.343	-	-	Bonds payable Accrued expenses Third parties
Utang obligasi	AS\$ 7.237.876	90.039	3.654.940	44.550	
Beban akrual	EUR 5.827.113	88.183	5.273.861	88.714	
Pihak berelasi	AS\$ 270.000	3.359	-	-	Related parties
Utang swap valuta asing	SGD 9.305.072	87.795	-	-	Cross currency swap payables
Total liabilitas	AS\$ 347.785.796	4.326.456	495.979.940	6.045.499	Total liabilities
	EUR 60.971.340	922.695	62.636.549	1.053.637	
	SGD 189.305.072	1.784.138	-	-	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN**

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya, terdiri dari utang pembangunan menara dan lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, beban akrual, utang jangka panjang, utang obligasi dan utang swap valuta asing. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk keperluan operasi Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitas anaknya memiliki kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan dan entitas anaknya.

Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya didukung oleh Komite Risiko Keuangan yang memberikan saran atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Perseroan dan entitas anaknya. Komite Risiko Keuangan memberikan kepastian kepada Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya bahwa aktivitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga, utang jangka panjang, dan beban akrual.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES**

The Company and its subsidiaries' financial liabilities, are comprised of tower construction and other payables, other payables, short-term employee benefit liabilities, accrued expenses, long-term loans, bonds payable and cross currency swap payable. The main purpose of these financial liabilities is to raise finances for the Company and its subsidiaries' operations. The Company and its subsidiaries have cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and other non-current assets - deposits that arise directly from its operations.

The Company and its subsidiaries are exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries senior management oversee the management of these risks. The Company and its subsidiaries senior management are supported by a Financial Risk Committee that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company and its subsidiaries. The Financial Risk Committee provides assurance to the Company and its subsidiaries' senior management that the Company and its subsidiaries' financial activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Directors review and agree on policies for managing each of these risks which are summarized below.

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Financial instruments affected by market risk include cash and cash equivalent, trade receivables - third parties, other receivables - third party and related parties, tower construction and other payables - third parties, long-term loans, and accrued expenses.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

• **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/ Increase/ decrease in basis point	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on income before tax expenses	
30 Juni 2016			June 30, 2016
Dolar AS	+100	(49.820)	US Dollar
Dolar AS	-100	49.820	US Dollar
Rupiah	+100	(42.005)	Rupiah
Rupiah	-100	42.005	Rupiah
Euro	+100	(8.010)	Euro
Euro	-100	8.010	Euro
31 Desember 2015			December 31, 2015
Dolar AS	+100	(46.903)	US Dollar
Dolar AS	-100	46.903	US Dollar
Rupiah	+100	(18.197)	Rupiah
Rupiah	-100	18.197	Rupiah
Euro	+100	(8.239)	Euro
Euro	-100	8.239	Euro
31 Desember 2014			December 31, 2014
Dolar AS	+100	(42.296)	US Dollar
Dolar AS	-100	42.296	US Dollar
Rupiah	+100	(18.447)	Rupiah
Rupiah	-100	18.447	Rupiah
Euro	+100	(8.660)	Euro
Euro	-100	8.660	Euro

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

• **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company and its subsidiaries' exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to the Company and its subsidiaries' long-term loans with floating interest rates. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the consolidated income before tax expense is affected by the impact on floating rate loans as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

- **Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)**

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/ <i>Increase/ decrease in basis point</i>
31 Desember 2013	
Dolar AS	+100
Dolar AS	-100
Rupiah	+100
Rupiah	-100
Euro	+100
Euro	-100

- **Risiko mata uang asing**

Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dan Euro. Perseroan dan entitas anaknya mengelola risiko ini dengan melakukan perjanjian sewa menara dengan jangka waktu 10 tahun dan 12 tahun dengan *Hutchison* dalam mata uang Dolar AS dan perjanjian sewa menara jangka panjang dengan pelanggan-pelanggan entitas anak di Belanda dalam mata uang Euro. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya berpendapat strategi atas manajemen risiko yang diterapkan, memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Perseroan dan entitas anaknya.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap Dolar AS dan Euro, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian sebagai berikut:

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

- **Interest rate risk (continued)**

Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ <i>Effect on income before tax expenses</i>

	(57.898)	December 31, 2013
	57.898	US Dollar
	(29.725)	US Dollar
	29.725	Rupiah
	(9.627)	Rupiah
	9.627	Euro
		Euro

- **Foreign currency risk**

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company and its subsidiaries' exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company and its subsidiaries' US Dollar and Euro long-term loans. The Company and its subsidiaries manage this risk by entering into 10-year and 12-year tower rental agreements with Hutchison which are denominated in US Dollars and long-term tower rental agreements with subsidiary's customer in Netherlands which are denominated in Euro. The Company and its subsidiaries' management believe that this risk management strategy results in a positive benefit for the Company and its subsidiaries both in the short-term and long-term.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against the US Dollar and Euro, with all other variables held constant, with the effect to the income before corporate income tax expense as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

- Risiko mata uang asing (lanjutan)

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

- Foreign currency risk (continued)

	Perubahan tingkat Rp/ Change in Rp rate	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on income before tax expenses	
30 Juni 2016			June 30, 2016
Dolar AS	1%	(38.764)	US Dollar
Dolar AS	-1%	38.764	US Dollar
Euro	1%	(6.801)	Euro
Euro	-1%	6.801	Euro
Dolar SGD	1%	(18.899)	SGD Dollar
Dolar SGD	-1%	18.899	SGD Dollar
31 Desember 2015			December 31, 2015
Dolar AS	1%	(44.178)	US Dollar
Dolar AS	-1%	44.178	US Dollar
Euro	1%	(7.876)	Euro
Euro	-1%	7.876	Euro
Dolar SGD	1%	(17.551)	SGD Dollar
Dolar SGD	-1%	17.551	SGD Dollar
31 Desember 2014			December 31, 2014
Dolar AS	1%	(42.345)	US Dollar
Dolar AS	-1%	42.345	US Dollar
Euro	1%	(8.242)	Euro
Euro	-1%	8.242	Euro
31 Desember 2013			December 31, 2013
Dolar AS	1%	(47.142)	US Dollar
Dolar AS	-1%	47.142	US Dollar
Euro	1%	(9.166)	Euro
Euro	-1%	9.166	Euro

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RiSIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dan entitas anaknya terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan entitas anak, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai serta piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

30 Juni/June 30, 2016

	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Neither past Due nor impaired</i>	sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>past due but not impaired</i>	Ada penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub Total/ <i>Sub Total</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	3.598.156	-	-	3.598.156	-	3.598.156	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	385.041	184.218	34.728	603.987	(34.728)	569.259	Trade receivable
	3.983.197	184.218	34.728	4.202.143	(34.728)	4.167.415	

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk from its operating activities related to tower rent. Customer credit risk is managed by a Credit Committee subject to the Company and its subsidiaries' established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer receivables are regularly monitored.

The Company's maximum exposure of the credit risk approximates net carrying amounts of trade receivables as disclosed in Note 5.

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Company's policy. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

The following table presents the impaired trade receivables, trade receivables past due but not impaired and trade receivables neither past due nor impaired:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2015

	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Neither past Due nor impaired</i>	sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>past due but not impaired</i>	Ada penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub Total/ <i>Sub Total</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	2.986.279	-	-	2.986.279	-	2.986.279	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	250.580	219.940	270.559	741.078	(270.559)	470.519	Trade receivable
	<u>3.236.859</u>	<u>219.940</u>	<u>270.559</u>	<u>3.727.357</u>	<u>(270.559)</u>	<u>3.456.798</u>	

31 Desember/December 31, 2014

	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Neither past Due nor impaired</i>	Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>past due but not impaired</i>	Ada penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub Total/ <i>Sub Total</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	2.005.669	-	-	2.005.669	-	2.005.669	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	438.495	133.419	269.697	841.611	(269.697)	571.914	Trade receivable
	<u>2.444.164</u>	<u>133.419</u>	<u>269.697</u>	<u>2.847.280</u>	<u>(269.697)</u>	<u>2.577.583</u>	

31 Desember/December 31, 2013

	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Neither past Due nor impaired</i>	sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>past due but not impaired</i>	Ada penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub Total/ <i>Sub Total</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	1.501.784	-	-	1.501.784	-	1.501.784	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	431.025	242.728	44.007	717.760	(44.007)	673.753	Trade receivable
	<u>1.932.809</u>	<u>242.728</u>	<u>44.007</u>	<u>2.219.544</u>	<u>(44.007)</u>	<u>2.175.537</u>	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RiSIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perseroan dan entitas anaknya mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perseroan dan entitas anaknya menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Perseroan dan entitas anaknya memonitor risiko likuiditas dengan menggunakan alat perencanaan likuiditas. Kebijakan Perseroan dan entitas anaknya adalah menjaga rasio-rasio sebagai berikut:

- *Net debt to running EBITDA* (Maksimum 5,00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1,3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1,3)

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Perseroan dan entitas anaknya dapat menjaga rasio-rasio yang telah ditetapkan.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan dan entitas anaknya berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk

Liquidity risk arise in situations where the Company and subsidiaries have difficulties in fulfilling financial liabilities when they become due.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Company and its subsidiaries maintain a balance between continuity of accounts receivable collections and flexibility through the use of bank loans in order to manage liquidity risk.

The Company and its subsidiaries monitor its risk of a shortage of funds by using a recurring liquidity planning tool. The Company and its subsidiaries maintains the following ratios:

- *Net debt to running EBITDA* (Maximum 5.00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1.3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1.3)

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries were in compliance to maintain those ratios level.

The table below summarizes the maturity profile of the Company and its subsidiaries' financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	>3 tahun/ >3 years	Jumlah/ Total	
30 Juni 2016						June 30, 2016
Utang pembangunan menara dan lainnya - Pihak ketiga	145.884	-	-	-	145.884	Tower construction and other payables - Third parties
Pihak berelasi	29.515	-	-	-	29.515	Related parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	7.228	-	-	-	7.228	Other payables Third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22.443	-	-	-	22.443	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual Pihak ketiga	254.479	-	-	-	254.479	Accrued expenses Third parties
Pihak berelasi	14.177	-	-	-	14.177	Related parties
Utang jangka panjang	1.255.713	991.791	968.457	8.620.809	11.836.770	Long-term loans
Utang obligasi	1.136.230	65.647	65.647	2.119.029	3.386.553	Bonds payable
Utang swap valuta asing	-	-	-	131.252	131.252	Cross currency swap payables
	<u>2.865.669</u>	<u>1.057.438</u>	<u>1.034.104</u>	<u>10.871.090</u>	<u>15.828.301</u>	
31 Desember 2015						December 31, 2015
Utang pembangunan menara dan lainnya - Pihak ketiga	216.607	-	-	-	216.607	Tower construction and other payables - Third parties
Pihak berelasi	31.630	-	-	-	31.630	Related parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	20.167	-	-	-	20.167	Other payables Third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	48.398	-	-	-	48.398	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual Pihak ketiga	332.463	-	-	-	332.463	Accrued expenses Third parties
Pihak berelasi	22.807	-	-	-	22.807	Related parties
Utang jangka panjang	757.863	651.562	862.669	6.081.072	8.353.166	Long-term loans
Utang obligasi	168.341	80.257	1.063.341	2.139.150	3.451.089	Bonds payable
Utang swap valuta asing	-	-	-	227.954	227.954	Cross currency swap payables
	<u>1.598.276</u>	<u>731.819</u>	<u>1.926.010</u>	<u>8.448.176</u>	<u>12.704.281</u>	
31 Desember 2014						December 31, 2014
Utang pembangunan menara dan lainnya - Pihak ketiga	468.813	-	-	-	468.813	Tower construction and other payables - Third parties
Pihak berelasi	19.057	-	-	-	19.057	Related parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	39.773	-	-	-	39.773	Other payables Third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	49.300	-	-	-	49.300	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual Pihak ketiga	298.057	-	-	-	298.057	Accrued expenses Third parties
Pihak berelasi	3.359	-	-	-	3.359	Related parties
Utang jangka panjang	497.304	537.808	618.146	6.434.685	8.087.943	Long-term loans
Utang obligasi	160.119	160.119	1.072.328	2.082.638	3.475.204	Bonds payable
Utang swap valuta asing	-	-	-	87.795	87.795	Cross currency swap payables
	<u>1.535.782</u>	<u>697.927</u>	<u>1.690.474</u>	<u>8.605.118</u>	<u>12.529.301</u>	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	>3 tahun/ >3 years	Jumlah/ Total	
31 Desember 2013						December 31, 2013
Utang pembangunan menara dan lainnya - Pihak ketiga	484.822	-	-	-	484.822	Tower construction and other payables - Third parties
Pihak berelasi	5.782	-	-	-	5.782	Related parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	49.774	-	-	-	49.774	Other payables Third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	43.956	-	-	-	43.956	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual Pihak ketiga	244.390	-	-	-	244.390	Accrued expenses Third parties
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	Related parties
Utang jangka panjang	1.158.175	325.236	485.709	7.755.808	9.724.928	Long-term loans
	<u>1.986.899</u>	<u>325.236</u>	<u>485.709</u>	<u>7.755.808</u>	<u>10.553.652</u>	

Manajemen modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan dan entitas anaknya adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dan entitas anaknya mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Dalam pemenuhan kewajiban terhadap bank atas fasilitas kredit yang diterima, rasio yang dipersyaratkan adalah *net debt to running EBITDA* dengan nilai rasio yang disyaratkan tidak lebih dari 5,00 dan *debt service coverage ratio (DSCR)* dengan nilai rasio yang disyaratkan lebih besar dari 1,30. Sampai saat ini Perseroan memenuhi semua persyaratan rasio tersebut. Tidak ada rasio yang disyaratkan terkait dengan struktur permodalan.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk (continued)

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	>3 tahun/ >3 years	Jumlah/ Total	
December 31, 2013						December 31, 2013
Utang pembangunan menara dan lainnya - Pihak ketiga	484.822	-	-	-	484.822	Tower construction and other payables - Third parties
Pihak berelasi	5.782	-	-	-	5.782	Related parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	49.774	-	-	-	49.774	Other payables Third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	43.956	-	-	-	43.956	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual Pihak ketiga	244.390	-	-	-	244.390	Accrued expenses Third parties
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	Related parties
Utang jangka panjang	1.158.175	325.236	485.709	7.755.808	9.724.928	Long-term loans
	<u>1.986.899</u>	<u>325.236</u>	<u>485.709</u>	<u>7.755.808</u>	<u>10.553.652</u>	

Capital management

The primary objective of the Company and its subsidiaries' capital management are to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company and its subsidiaries manage its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013.

In fulfillment of obligations towards the bank loan obtained, the required ratio is net debt to running EBITDA ratio which ratios shall not exceed 5.00 and debt service coverage ratio (DSCR) which ratio is to be greater than 1.30. Until now the Company has fulfilled all of the requirements of these ratios. There is no required ratio associated with capital structure.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan dan entitas anaknya yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

41. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company and its subsidiaries' financial instrument that are carried in the consolidated financial statements:

	30 Juni/June 30, 2016		
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kas dan setara kas	3.598.156	3.598.156	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	569.259	569.259	Trade receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga	4.370	4.370	Other receivables - third parties
Aset tidak lancar			Other non-current
lainnya - uang jaminan	7.690	7.690	assets - deposits
Piutang lain-lain - pihak berelasi	135.775	135.775	Other receivables - related parties
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang pembangunan menara dan lainnya			Tower construction and other payable
Pihak ketiga	145.884	145.884	Third parties
Pihak berelasi	29.515	29.515	Related party
Utang lain-lain	7.228	7.228	Other payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22.443	22.443	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual			Accrued expenses
Pihak ketiga	254.479	254.479	Third parties
Pihak berelasi	14.177	14.177	Related party
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga	750.800	754.328	Current portion of long-term loans - third parties
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			Long-term loans net of current portion - third parties
pihak ketiga	9.078.123	9.229.139	Current portion of long-term bonds payable - third parties
Bagian utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga	994.813	1.009.500	
Utang obligasi setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			Bonds payable net of current portion - third parties
pihak ketiga	1.725.406	1.767.495	Financial liabilities at fair value through profit or loss:
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi:			Cross currency swap payable
Utang swap valuta asing	131.252	131.252	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember/December 31, 2015		
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kas dan setara kas	2.986.279	2.986.279	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	470.519	470.519	Trade receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga	804	804	Other receivables - third parties
Aset tidak lancar			Other non-current
lainnya - uang jaminan	15.622	15.622	assets - deposits
Piutang lain-lain - pihak berelasi	139.494	139.494	Other receivables - related parties
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang pembangunan menara dan lainnya			Tower construction and other payable
Pihak ketiga	216.607	216.607	Third parties
Pihak berelasi	31.630	31.630	Related party
Utang lain-lain	20.167	20.167	Other payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	48.398	48.398	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual			Accrued expenses
Pihak ketiga	332.463	332.463	Third parties
Pihak berelasi	22.807	22.807	Related party
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga	446.139	449.439	Current portion of long-term loans - third parties
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam - waktu satu tahun			Long-term loans net of current portion -
pihak ketiga	6.741.254	6.884.404	third parties
Utang obligasi	2.715.146	2.750.861	Bonds payable
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi:			Financial liabilities at fair value through profit or loss:
Utang swap valuta asing	227.954	227.954	Cross currency swap payable

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember/December 31, 2014		
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset keuangan</u>			<u>Financial assets</u>
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kas dan setara kas	2.005.669	2.005.669	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	571.914	571.914	Trade receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.045	1.045	Other receivables - third parties
Aset tidak lancar			Other non-current
lainnya - uang jaminan	5.325	5.325	assets - deposits
Piutang lain-lain - pihak berelasi	4.257	4.257	Other receivables - related parties
<u>Liabilitas keuangan</u>			<u>Financial liabilities</u>
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan			Financial liabilities measured
diamortisasi:			at amortized cost:
Utang pembangunan menara dan lainnya			Tower construction and other payable
Pihak ketiga	468.813	468.813	Third parties
Pihak berelasi	19.057	19.057	Related parties
Utang lain-lain	39.773	39.773	Other payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	49.300	49.300	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual			Accrued expenses
Pihak ketiga	298.057	298.057	Third parties
Pihak berelasi	3.359	3.359	Related party
Bagian utang jangka panjang yang akan			Current portion of
jatuh tempo dalam waktu			long-term loans - third parties
satu tahun - pihak ketiga	203.002	206.024	
Utang jangka panjang setelah dikurangi			Long-term loans net of
bagian yang akan jatuh tempo dalam			current portion - third parties
waktu satu tahun - pihak ketiga	6.512.960	6.695.619	
Utang obligasi	2.638.020	2.728.651	Bonds payable
Liabilitas keuangan pada nilai wajar			Financial liabilities at fair value
melalui laporan laba rugi:			through profit or loss:
Utang swap valuta asing	87.795	87.795	Cross currency swap payable

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember/December 31, 2013		
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset keuangan</u>			<u>Financial assets</u>
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kas dan setara kas	1.501.784	1.501.784	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	673.753	673.753	Trade receivables
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak ketiga	48	48	Third parties
Aset tidak lancar			Other non-current
lainnya - uang jaminan	4.291	4.291	assets - deposits
Piutang lain-lain - pihak berelasi	3.062	55	Other receivable - related party
<u>Liabilitas keuangan</u>			<u>Financial liabilities</u>
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan			Financial liabilities measured
diamortisasi			at amortized cost:
Utang pembangunan menara			Tower construction and other
dan lainnya			payable
Pihak ketiga	484.822	484.822	Third parties
Pihak berelasi	5.782	5.782	Related party
Utang lain-lain	49.774	49.774	Other payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	43.956	43.956	Short-term employee benefit liabilities
Beban akrual			Accrued expenses
Pihak ketiga			Third parties
Pihak berelasi			Related party
Bagian utang jangka panjang yang akan			Current portion
jatuh tempo dalam waktu satu tahun -			of long-term loans -
pihak ketiga	1.086.355	1.086.355	third parties
Utang jangka panjang setelah dikurangi			Long-term loans net of
bagian yang akan jatuh tempo dalam -			current portion -
waktu satu tahun			third parties
pihak ketiga	8.221.252	8.221.252	

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

The Company and its subsidiaries uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- Level 1: Fair values measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Fair values measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3: Fair values measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi, jika tidak, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga, utang pembangunan menara dan lainnya - pihak berelasi, utang lain-lain - pihak ketiga, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, beban akrual dan utang obligasi mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar dari aset tidak lancar lainnya - uang jaminan dan utang jangka panjang dinilai menggunakan arus kas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar.
- Nilai wajar obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir.
- Nilai wajar dari utang swap valuta asing menggunakan nilai pasar.

42. LABA NETO PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,		
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013
Laba tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.321.510	1.172.982	2.950.500	1.090.934	153.785
Total rata-rata tertimbang saham yang beredar (lembar)	3.322.620.187	3.322.620.187	3.322.620.187	3.322.620.187	3.322.620.187
Laba per saham (rupiah penuh)	398	353	888	328	46

Income for the year/period attributable to the equity holders of parent entity

Weighted average number of shares outstanding (shares)

Earning per share (full amount)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial instruments presented in the consolidated statements of financial position are carried at fair value or amortized cost, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- Cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, tower construction and other payables, tower construction and other payables - related parties, other payables - third parties, short-term employee benefit liabilities, accrued expenses and bonds payable approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.
- The fair value of other non-current assets - deposits and long-term loans are calculated using discounted cash flows at market interest rate.
- The fair value of bonds is estimated by using the last quoted market price.
- The fair value of cross currency swap payables is using the marked to market value.

42. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share is as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas Perseroan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,		
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013
Beban gaji dan overhead proyek pembangunan menara dikapitalisasi	25.732	82.483	156.078	157.930	101.296
Kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran properti investasi	37.445	2.725	31.174	25.248	16.512
	63.177	85.208	187.252	183.178	117.808

43. NON-CASH TRANSACTIONS

Non-cash transactions of the Company and its subsidiaries are as follows:

	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,		
	2016	2015 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2015	2014	2013
Beban gaji dan overhead proyek pembangunan menara dikapitalisasi	25.732	82.483	156.078	157.930	101.296
Kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran properti investasi	37.445	2.725	31.174	25.248	16.512
	63.177	85.208	187.252	183.178	117.808

Capitalized salaries and overhead costs for tower construction
Capitalization of the estimated cost of dismantling of investment properties

44. PENYAJIAN KEMBALI

Pada 31 Desember 2015, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 13 (Properti Investasi) sebagai dasar perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas menara-menara. Penerapan ini berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 27/SEOJK.04/2015 mengenai perlakuan akuntansi untuk aset menara telekomunikasi.

Pengaruh perubahan perlakuan akuntansi pada 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

44. RESTATEMENT

As at December 31, 2015, the Company and its subsidiaries adopted PSAK No. 13 (Investment Properties) as based of accounting treatment and disclosure of towers. This is to comply with Indonesia Financial Service Authority (OJK) a circular letter No. 27/SEOJK.04/2015 concerning the accounting treatment for telecommunication asset towers.

The effects of changing of accounting treatment on June 30, 2015 and December 31, 2013 are as follows:

	30 Juni 2015/June 30, 2015			
	Sebelum disesuaikan/ Before restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah disesuaikan/ After restatement	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIA				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Depresiasi dan amortisasi	(579.607)	408.698	(170.909)	Depreciation and amortization
Beban pokok pendapatan	(679.400)	408.698	(270.702)	Cost of revenue
Laba bruto	1.461.731	408.698	1.870.429	Gross income
Kenaikan nilai wajar properti investasi	-	531.428	531.428	Increase in fair value of investment properties
Kerugian lain-lain, neto	(313.465)	(360)	(313.825)	Other losses, net
Laba usaha	893.401	939.766	1.833.167	Operating income
Beban pajak penghasilan	(164.440)	(234.672)	(399.112)	Corporate income tax
Laba tahun berjalan	469.381	705.094	1.174.475	Income for the year
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	479.222	705.094	1.184.316	Total comprehensive income for the period

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

44. PENYAJIAN KEMBALI (lanjutan)

44. RESTATEMENT (continued)

31 Desember 2013/December 31, 2013

	Sebelum d disesuaikan/ <i>Before restatement</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah d disesuaikan/ <i>After restatement</i>	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Depresiasi dan amortisasi	(930.402)	669.222	(261.180)	<i>Depreciation and amortization</i>
Beban pokok pendapatan	(1.137.558)	669.222	(468.336)	<i>Cost of revenue</i>
Laba bruto	2.059.581	669.222	2.728.803	<i>Gross income</i>
Penurunan nilai wajar properti investasi	-	(670.674)	(670.674)	<i>Decrease in fair value of investment properties</i>
Kerugian lain-lain, neto	(947.870)	693	(947.177)	<i>Other losses, net</i>
Laba usaha	756.349	(759)	755.590	<i>Operating income</i>
Beban pajak penghasilan	(59.075)	759	(58.316)	<i>Corporate income tax</i>

**45. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

**45. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tanggal 30 Juni 2016 diungkapkan di bawah ini. Perseroan dan entitas anaknya berintensi untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) and Indonesian Financial Service Authority (OJK), but not yet effective for June 30, 2016 financial statements are disclosed below. The Company and its subsidiaries intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan. Amandemen ini berlaku efektif 1 January, 2017.
- ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13: Properti Investasi. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset. Interpretasi ini berlaku efektif 1 January, 2017.

- Amendment to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements on Disclosures Initiative. This amendment clarifies, rather than significantly change, existing PSAK No. 1 requirements, among others, to clarify the materiality, flexibility as to the order in which an entity presents the notes to financial statements and identification of significant accounting policies. This amendment comes to effective on January 1, 2017.
- ISAK No. 31: Interpretation on the Scope of PSAK No. 13: Investment Property. The ISAK provides an interpretation of the characteristics of the building used as part of the definition of investment property in PSAK No. 13: Investment Property. The building as investment property refer to structures that have physical characteristics generally associated as a building with the walls, floors, and roofs are attached to the assets. This interpretation comes to effective on January 1, 2017.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF
(lanjutan)**

- SE OJK No.36/SEOJK.04/2016: Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.27/SEOJK.04/2015 tentang perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan. Dengan penjabutan surat edaran tersebut, ISAK 31 berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2018.

Perseroan dan entitas anaknya sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

46. TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA

1. Pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan sebagai penjamin, dan Protelindo Luxembourg S.a.r.l ("Protelindo Luxembourg") sebagai penjual telah menandatangani *Share Purchase Agreement* dengan masing-masing, Cellnex Telecom S.A. ("Cellnex") sebagai pembeli dan Management Tower Europe S.a.r.l. ("Management Tower") sebagai penjual terkait dengan penjualan seluruh saham dalam Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV") kepada Cellnex ("Transaksi"). Berdasarkan Transaksi dimaksud di atas, Cellnex telah sepakat untuk membeli dan menerima pengalihan seluruh saham dalam PNBV, yang dimiliki oleh Protelindo Luxembourg (56%) dan Management Tower Europe S.a.r.l. (44%) (secara bersama-sama "Para Penjual"), yang penyelesaiannya akan dilaksanakan paling lambat pada 31 Oktober 2016. Seluruh rangkaian Transaksi telah diselesaikan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement* pada tanggal 1 Juli 2016.
2. Pada tanggal 1 Juli 2016, Fasilitas Pinjaman MTE telah dilunasi seluruhnya.

**45. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- SE OJK No.36/SEOJK.04/2016: Revocation Circular Letter of Indonesian Financial Service Authority (OJK) No.27/SEOJK.04/2015 concerning the accounting treatment for telecommunication asset towers. Subject to the revocation of the circular letter, ISAK 31 will apply to financial statements submitted to the Indonesian Financial Service Authority starting in 2018.

The Company and its subsidiaries are presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

46. SUBSEQUENT EVENTS

1. On May 27, 2016, the Company as a guarantor, and Protelindo Luxembourg S.a.r.l ("Protelindo Luxembourg") as a seller, have executed *Share Purchase Agreement* ("SPA") with each of Cellnex Telecom S.A. ("Cellnex") as purchaser and Management Tower Europe S.a.r.l. ("Management Tower") as seller in relation to the sale of all shares in Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV") to Cellnex ("Transaction"). Based on the Transaction, Cellnex has agreed to purchase and to receive the transfer of all shares in PNBV, owned by Protelindo Luxembourg (56%) and Management Tower (44%) (together the "Sellers"), which completion will be implemented at the latest by October 31, 2016. All the sequences of the Transaction has been completed by the parties in accordance with the provisions in SPA on July 1, 2016.
2. On July 1, 2016, the MTE Loan Facility has been fully repaid.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

3. Pada tanggal 1 Juli 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Novasi dan Perubahan untuk mengubah Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka EUR20.000.000 dan Kredit Berulang AS\$100.000.000 dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC") ("Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah EUR20.000.000 ("Fasilitas Pinjaman A") dan AS\$100.000.000 ("Fasilitas Pinjaman B") mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas-Fasilitas-Fasilitas OCBC kepada Perseroan dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (capital gain) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan.

46. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

3. On July 1, 2016, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a Novation and Amendment Agreement to amend a EUR20,000,000 Term Loan and a US\$100,000,000 Revolving Credit Facilities Agreement with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (the "OCBC Facilities Agreement") (the "OCBC Novation and Amendment Agreement"). In connection with the OCBC Novation and Amendment Agreement, Protelindo Finance B.V. which has obtained loan facilities in amounts of EUR20,000,000 (the "Loan A Facility"), and US\$100,000,000 (the "Loan B Facility") assigns its rights and obligations under the OCBC Novation and Amendment Agreement to the Company, whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for these facilities. The underlying considerations and reasons on the OCBC Novation and Amendment Agreement are as follows: (i) using the opportunity to conduct the sale of shares of a subsidiary in the Netherlands with substantial capital gains, (ii) to reduce the burden of debt, and (iii) to simplify the structure of loan/financing.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

4. Pada tanggal 1 Juli 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Novasi dan Perubahan untuk mengubah Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Kredit Berulang AS\$90.000.000 dengan grup kreditur yang terdiri BNP Paribas, bertindak melalui cabangnya di Singapura, Credit Suisse AG, Cabang Singapura, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Pusat Keuangan Internasional Dubai, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta dan JPMorgan Chase Bank, N.A, Cabang Jakarta ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi") ("Perjanjian Novasi dan Perubahan Sindikasi"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan Sindikasi tersebut, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah AS\$90.000.000 ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi"), mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi kepada Perseroan dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan Sindikasi adalah untuk (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (capital gain) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Pada tanggal 25 Agustus 2016, Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Sindikasi telah dilunasi seluruhnya.
5. Pada tanggal 1 Juli 2016, iForte dan Perseroan menandatangani Perjanjian Perubahan untuk mengubah Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp350.000 dengan PT Bank DBS Indonesia ("Perjanjian Perubahan BDI"). Tujuan Perjanjian Perubahan BDI ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas BDI dengan perjanjian-perjanjian fasilitas Perseroan yang telah diamandemen dan dinovasi.

46. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

4. On July 1, 2016, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a Novation and Amendment Agreement to amend a US\$90,000,000 Revolving Loan Facilities Agreement with a lender group consisting of BNP Paribas, acting through its Singapore Branch, Credit Suisse AG, Singapore Branch, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Standard Chartered Bank, Dubai International Financial Centre Branch, regulated by the Dubai Financial Services Authority, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch and JPMorgan Chase Bank, N.A, Jakarta Branch (the "Syndicated Facilities Agreement") (the "Syndicated Novation and Amendment Agreement"). In connection with the Syndicated Novation and Amendment Agreement, Protelindo Finance B.V. and the Company which has obtained a loan facility in an amount US\$90,000,000 ("the Syndicated Loan Facilities"), assigns its rights and obligations under the Syndicated Facilities Agreement to the Company, whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for these facilities. The underlying considerations and reasons on the Syndicated Novation and Amendment Agreement are as follows: (i) using the opportunity to conduct the sale of shares of a subsidiary in the Netherlands with substantial capital gains, (ii) to reduce the burden of debt, and (iii) to simplify the structure of loan/financing. On August 25, 2016, the Syndicated Loan Facilities have been fully repaid.
5. On July 1, 2016, iForte and the Company entered into an Amendment Agreement to amend IDR350,000 Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank DBS Indonesia (the "BDI Amendment Agreement"). The purpose of the BDI Amendment Agreement is to align the provisions in the BDI Facility Agreement with facility agreements of the Company which have been amended and novated.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

6. Pada tanggal 14 Juli 2016, Fasilitas Pinjaman ING telah dilunasi seluruhnya.
7. Pada tanggal 14 Juli 2016 dan 28 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan atas Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC masing-masing sebesar EUR20.000.000 dan AS\$40.000.000.
8. Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani (i) Amended and Restated Trust Deed, (ii) Amended and Restated Agency Agreement, (iii) Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement, dengan Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank sebagai Penjamin, DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat, Deutsche Bank AG, Cabang Hong Kong sebagai Principal Paying Agent dan Transfer Agent dan Deutsche Bank Luxembourg S.A. sebagai Registrar. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tindak lanjut diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (bondholders) melalui Consent Solicitation Memorandum pada tanggal 22 Juli 2016 untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Surat Utang, yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Surat Utang ("Transaksi") terhadap para pemegang surat utang (bondholders). Pada tanggal 3 Agustus 2016, Perseroan juga telah menandatangani ISDA 2002 Master Agreement, Novation Agreement dan Termination Deed masing-masing dengan DBS Bank Ltd dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga sehubungan dengan Transaksi.

46. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

6. On July 14, 2016, the ING Loan Facility has been fully repaid.
7. On July 14, 2016 and September 28, 2016, the Company paid the OCBC Loan Facilities in the amount of EUR20,000,000 and US\$40,000,000, respectively.
8. On August 3, 2016, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a (i) Amended and Restated Trust Deed, (ii) Amended and Restated Agency Agreement, (iii) Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement, with Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank as Guarantor, DB Trustees (Hong Kong) Limited as Trustee, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch as Principal Paying Agent and Transfer Agent and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as Registrar. As mentioned above, the signing of those agreements is the implementation upon an approval from bondholders through the Consent Solicitation Memorandum dated July 22, 2016 to amend the provisions related to the transfer of the initial issuer of the Bonds, from Protelindo Finance B.V. to the Company. In connection with the abovementioned, the Company replace Protelindo Finance B.V. position as an issuer of Bonds to the bondholders. On August 3, 2016, the Company has also entered into ISDA 2002 Master Agreement, Novation Agreement and Termination Deed respectively with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments with respect to the Transaction.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

9. Pada tanggal 22 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V., entitas anak, telah didaftarkan untuk proses pembubaran perusahaan di *The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register*, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Register Komersial Kamar Dagang Belanda (*The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register Extract*) tanggal 1 September 2016.
10. Pada tanggal 23 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan sebagian atas Fasilitas Pinjaman DBS sebesar AS\$20.000.000.
11. Pada tanggal 28 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan sebagian atas Fasilitas Pinjaman SMBC sebesar AS\$40.000.000.
12. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak dan untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak, pada tanggal 28 September 2016, Perseroan menyampaikan surat pernyataan harta kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I dan membayarkan uang tebusan sebesar Rp71 juta pada tanggal 26 September 2016.
13. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 259 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., sebagai pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, Perseroan telah menyetujui pengunduran diri Carmen Birgitta Soedarmawan sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	: Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	: Stephen Duffus Weiss
Direktur	: Rinaldy Santosa
Direktur	: Onggo Wijaya
Direktur	: Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen	: Indra Gunawan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Ario Wibisono
Komisaris	: Kenny Harjo
Komisaris Independen	: Bacelius Ruru

46. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

9. On August 22, 2016, Protelindo Finance B.V., subsidiary, has been registered to a liquidation process in *The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register*, as stated on *The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register Extract* on September 1, 2016.
10. On September 23, 2016, the Company partially paid the DBS Loan Facility in the amount of US\$20,000,000.
11. On September 28, 2016, the Company partially paid the SMBC Loan Facility in the amount of US\$40,000,000.
12. Regarding with Tax Amnesty Law No. 11 Year 2016 and to support government of Republic of Indonesia programs to increase tax revenues, on September 28, 2016, the Company filed asset declaration letter for tax amnesty program to the Regional Office of the Directorate General of Taxes (DGT) West Java I and paying compensation totaling to Rp71 million on September 26, 2016.
13. Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 259 dated September 30, 2016, drawn up in the presence of Ferry Sanjaya, S.H., substitute of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notary in Jakarta, the Company has approved the resignation of Carmen Birgitta Soedarmawan as a Director of the Company, and the present members of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as follows:

Board of Directors:

President Director	: Ferdinandus Aming Santoso
Vice President Director	: Adam Gifari
Vice President Director	: Stephen Duffus Weiss
Director	: Rinaldy Santosa
Director	: Onggo Wijaya
Director	: Eko Santoso Hadiprodjo
Independent Director	: Indra Gunawan

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Ario Wibisono
Commissioner	: Kenny Harjo
Independent Commissioner	: Bacelius Ruru

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. TRANSAKSI SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

14. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Iforte dan Perseroan menandatangani Perjanjian Perubahan Kedua untuk mengubah Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp350.000 juta beserta perubahannya dengan PT Bank DBS Indonesia ("Perjanjian Perubahan Kedua BDI"). Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua BDI, tanggal jatuh tempo diperpanjang menjadi tanggal 1 Oktober 2017.

47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perseroan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perseroan, Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang disebut di atas, dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yaitu Catatan-catatan 3, 9, 17, 19, 20b, 45, 46, dan perubahan penyajian pada laporan arus kas konsolidasian.

46. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

14. On October 1, 2016, Iforte and the Company entered into a Second Amendment Agreement to amend the Rp350,000 Revolving Loan Facility Agreement with BDI (the BDI Second Amendment Agreement). Based on the BDI Second Amendment Agreement, the maturity date is extended to October 1, 2017.

47. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company has previously issued its consolidated financial statements, which comprise the consolidated statements of financial position as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 (unaudited) and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013. In connection with the Company's plan to propose public offering of the debt securities, the Company has reissued the above consolidated financial statements, with additional disclosures in notes the consolidated financial statements which are Notes 3, 9, 17, 19, 20b, 45, 46, and change in presentation in consolidated statements of cash flows.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta untuk
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014, dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014, and 2013 and
for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and the Years Ended
December 31, 2015, 2014, and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**48. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Berikut ini adalah Informasi Keuangan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Entitas Induk"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tersendiri Entitas Induk tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain Entitas Induk, laporan perubahan ekuitas Entitas Induk, dan laporan arus kas tersendiri Entitas Induk untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Informasi keuangan Entitas Induk ini merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan periode enam bulan yang berakhir tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

**48. PURPOSE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

These consolidated financial statements were prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company on Indonesia Stock Exchange.

The following is the PT Profesional Telekomunikasi Indonesia's (the "Parent Entity") Financial Information, consisting of the statements of financial position of the Parent Entity as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows of the Parent Entity for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 (unaudited) and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013. The Parent Entity Financial Information is presented as supplementary information to the consolidated financial statements as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, and for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 (unaudited) and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PARENT ENTITY STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3.411.248	2.804.918	1.919.009	1.395.870	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	486.403	402.147	545.679	634.484	Trade receivables
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak ketiga	1.336	548	1.039	-	Third parties
Pihak berelasi	326.611	31.996	7.911	7.609	Related parties
Persediaan	-	-	-	508	Inventories
Pajak dibayar dimuka	344.648	22.231	19.044	-	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	20.707	21.296	23.272	15.813	Prepaid expenses
Uang muka	17.990	17.102	16.096	14.475	Advances
TOTAL ASET LANCAR	4.608.943	3.300.238	2.532.050	2.068.759	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi sewa pembiayaan neto	-	-	-	125	Net investment in finance lease
Properti investasi	17.322.374	14.061.412	12.071.153	10.777.110	Investment properties
Aset tetap	39.493	46.155	52.771	56.331	Fixed assets
Investasi pada entitas anak	1.087.153	1.089.848	227.921	281.400	Investment in subsidiaries
Estimasi pengembalian pajak	-	-	80.380	80.380	Refundable taxes
Sewa lokasi jangka panjang	1.813.274	1.272.239	1.265.876	1.006.959	Long-term site rentals
Piutang lain-lain - pihak berelasi	135.775	139.494	4.257	3.008	Other receivables - related parties
Aset takberwujud	104.813	-	-	-	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	53.556	49.546	79.582	145.969	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	20.556.438	16.658.694	13.781.940	12.351.282	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	25.165.381	19.958.932	16.313.990	14.420.041	TOTAL ASSETS

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PARENT ENTITY STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 Juni 2016/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang pembangunan menara dan lainnya					Tower construction and other payables
Pihak ketiga	133.811	195.786	461.696	483.157	Third parties
Pihak berelasi	29.515	31.630	22.799	7.727	Related parties
Utang lain-lain	2.125	14.552	37.829	49.771	Other payables
Utang pajak	133.270	55.274	332.363	21.178	Taxes payable
Pendapatan diterima dimuka	1.718.880	791.791	632.381	481.691	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	21.520	47.385	49.117	43.855	Short-term employee benefits liability
Beban akrual	234.625	257.474	212.477	154.480	Accrued expenses
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	339.865	265.139	203.002	408.903	Current portion of long-term loans
Utang obligasi	994.813	-	-	-	Bonds payable
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.608.424	1.659.031	1.951.664	1.650.762	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Pendapatan diterima dimuka	76.667	101.236	150.687	177.428	Unearned revenue
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Long-term loans net of current portion
Pihak ketiga	6.676.305	1.640.938	1.829.218	3.099.713	Third parties
Pinjaman pihak berelasi	3.932.320	6.185.059	5.577.538	4.836.339	Intercompany loan
Utang obligasi	-	990.940	983.240	-	Bonds payable
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	64.493	50.215	49.352	36.926	Long-term employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, neto	1.581.853	1.488.178	910.852	873.749	Deferred tax liabilities, net
Provisi jangka panjang	210.516	164.622	134.174	109.975	Long-term provision
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	12.542.154	10.621.188	9.635.061	9.134.130	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	16.150.578	12.280.219	11.586.725	10.784.892	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to the owners of the parent entity
Modal saham					Share capital
Nilai nominal - Rp100 (angka penuh) per saham					Par value - Rp100 (full amount) per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham dan ditempatkan dan disetor penuh 3.322.620.187 saham	332.262	332.262	332.262	332.262	Authorized - 10,000,000,000 shares Issued and fully paid - 3,322,620,187 shares
Saldo laba					Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	300	200	100	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	8.678.511	7.337.033	4.394.903	3.302.887	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	3.730	9.218	-	-	Other comprehensive income
TOTAL EKUITAS	9.014.803	7.678.713	4.727.265	3.635.149	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25.165.381	19.958.932	16.313.990	14.420.041	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015
(tidak diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PARENT ENTITY STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/December 31, For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (tidak diaudit/ unaudited)	2015	2014	2013	
PENDAPATAN	2.236.483	2.083.090	4.255.595	3.982.272	3.097.433	REVENUES
DEPRESIASI DAN AMORTISASI	(150.492)	(143.912)	(294.435)	(276.027)	(208.864)	DEPRECIATION AND AMORTIZATION
BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA	(68.006)	(98.896)	(160.168)	(234.911)	(202.670)	OTHER COST OF REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(218.498)	(242.808)	(454.603)	(510.938)	(411.534)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	2.017.985	1.840.282	3.800.992	3.471.334	2.685.899	GROSS INCOME
BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN	(19.216)	(27.680)	(53.465)	(50.891)	(36.153)	SELLING AND MARKETING EXPENSES
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	(168.880)	(221.453)	(443.750)	(398.895)	(310.543)	GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI WAJAR PROPERTI INVESTASI	125.335	539.328	1.634.231	(390.970)	(655.459)	INCREASE (DECREASE) IN FAIR VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) LAIN-LAIN, NETO	67.636	(307.173)	(505.663)	(264.653)	(946.778)	OTHER GAINS (LOSSES), NET
LABA USAHA	2.022.860	1.823.304	4.432.345	2.365.925	736.966	OPERATING INCOME
PENDAPATAN KEUANGAN, BRUTO	41.074	9.004	21.088	8.630	4.673	FINANCE INCOME, GROSS
PAJAK FINAL ATAS PENDAPATAN KEUANGAN	(8.215)	(1.801)	(4.218)	(1.726)	(935)	FINAL TAX ON INCOME FINANCE
PENDAPATAN KEUANGAN, NETO	32.859	7.203	16.870	6.904	3.738	FINANCE INCOME, NET
BIAYA KEUANGAN	(268.084)	(261.779)	(533.693)	(824.124)	523.282	FINANCE CHARGES
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.787.635	1.568.728	3.915.522	1.548.705	217.422	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(446.057)	(397.855)	(973.292)	(456.589)	(60.651)	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	1.341.578	1.170.873	2.942.230	1.092.116	156.771	INCOME FOR THE YEAR/PERIOD

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015
(Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PARENT ENTITY STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/December 31, For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (tidak diaudit/ unaudited)	2015	2014	2013	
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	1.341.578	1.170.873	2.942.230	1.092.116	156.771	INCOME FOR THE YEAR/PERIOD
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:						Other comprehensive income (loss):
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						<i>Items that will not be reclassified to profit and loss:</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(7.318)	7.369	12.291	-	-	<i>Actuarial gain (loss)</i>
Pajak penghasilan tangguhan terkait	1.830	(1.842)	(3.073)	-	-	<i>Related deferred income tax</i>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun/periode, sesudah pajak	(5.488)	5.527	9.218	-	-	<i>Other comprehensive income (loss) the year/period, net of tax</i>
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN SESUDAH PAJAK	1.336.090	1.176.400	2.951.448	1.092.116	156.771	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR YEAR/PERIOD NET OF TAX

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK
Untuk Periode Enak Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penghasilan (rugi) komprehensif Lainnya/ Other comprehensive income (loss)					
	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange rate differences from translation of financial statements	Keuntungan bersih dari lindung nilai Net loss on cash flow hedges	Keuntungan aktuarial/ Kumulatif/ actuarial gains	Total ekuitas/ Total equity		
Saldo 31 Desember 2012	332.262	-	-	-	3.478.378	Balance as of December 31, 2012
Total laba tahun berjalan	-	-	-	-	156.771	Income for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	-	Other comprehensive loss
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	-	Retained earning appropriation
Saldo 31 Desember 2013	332.262	-	-	-	3.635.149	Balance as of December 31, 2013
Total laba tahun berjalan	-	-	-	-	1.092.116	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	-	Retained earning appropriation
Saldo 31 Desember 2014	332.262	-	-	-	4.727.265	Balance as of December 31, 2014
Total laba tahun berjalan	-	-	-	-	2.942.230	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	9.218	Other comprehensive income
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	-	Retained earning appropriation
Saldo 31 Desember 2015	332.262	-	-	-	7.678.713	Balance as of December 31, 2015

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Periode Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the parent entity						
	Penghasilan komprehensif Lainnyal Other comprehensive Income		Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange rate differences from translation of financial statements				
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Cadangan umum/ Appropriated for general reserve	Belum ditemukan penggunaan/ Unappropriated	Kerugian bersih dari lindung nilai dari arus kas/ Net loss on cash flow hedges	Keuntungan aktuarial/ Cumulative actuarial gains	Total ekuitas/ Total equity	
Saldo 1 Januari 2015	332.262	100	4.394.903	-	-	4.727.265	Balance as of January 1, 2015
Total laba periode berjalan	-	-	1.170.873	-	-	1.170.873	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	5.527	5.527	Other comprehensive income
Pembentukan cadangan wajib	-	100	(100)	-	-	-	Retained earning appropriation
Saldo 30 Juni 2015	332.262	200	5.565.676	-	5.527	5.903.665	Balance as of June 30, 2015
Saldo 31 Desember 2015	332.262	200	7.337.033	-	9.218	7.678.713	Balance as of December 31, 2015
Total laba periode berjalan	-	-	1.341.578	-	-	1.341.578	Income for the period
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(5.488)	(5.488)	Other comprehensive loss
Pembentukan cadangan wajib	-	100	(100)	-	-	-	Retained earning appropriation
Saldo 30 June 2016	332.262	300	8.678.511	-	3.730	9.014.803	Balance as of June 30, 2016

The original Parent Entity financial information as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015
(Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2016 and 2015 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni/ For the Six-Month Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
	2016	2015 (tidak diaudit/ unaudited)	2015	2014	2013	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI:						OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan	3.235.422	3.383.121	4.905.044	4.453.101	3.330.987	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(252.816)	(306.890)	(614.328)	(826.020)	(656.126)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(101.677)	(99.438)	(180.147)	(164.362)	(131.329)	Cash paid to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	2.880.929	2.976.793	4.110.569	3.462.719	2.543.532	Cash flows from operations
Penghasilan bunga yang diterima	27.464	7.058	11.878	6.783	3.788	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(512.087)	(627.962)	(908.207)	(336.703)	(280.059)	Income taxes and other taxes paid
Pengembalian pajak	-	-	76.754	39.222	105.106	Tax refund
Lain-lain	-	164	(29.971)	2.326	987	Others
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.396.306	2.356.053	3.261.023	3.174.347	2.373.354	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI:						INVESTING ACTIVITIES:
Penerimaan investasi sewa pembiayaan	-	-	-	125	246	Receipts from investment in finance lease
Pembelian aset tetap	(5.636)	(11.483)	(20.461)	(22.437)	(21.032)	Acquisition of fixed assets
Pembelian properti investasi	(3.571.006)	(521.540)	(635.768)	(1.606.043)	(1.412.649)	Acquisition of investment properties
Pembayaran sewa tanah jangka panjang	(724.335)	(128.466)	(271.895)	(512.167)	(338.276)	Payments for long-term site rentals
Pembayaran untuk akuisisi bisnis	-	(397.914)	(859.230)	-	-	Payment for business acquisitions
Pemberian piutang pihak berelasi	-	-	(136.000)	-	-	Intercompany receivables
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	450	-	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan deviden	-	-	-	55.791	166	Proceeds from dividend
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4.300.977)	(1.059.403)	(1.923.354)	(2.084.280)	(1.771.545)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN:						FINANCING ACTIVITIES:
Penerimaan utang jangka panjang Pihak ketiga	3.000.308	-	-	365.880	-	Proceeds from long-term loans Third parties
Pihak berelasi	-	-	-	629.730	-	Related party
Pembayaran utang jangka panjang Pihak ketiga	(134.219)	(103.012)	(206.024)	(2.081.784)	(124.752)	Payments of long-term loans Third parties
Pihak berelasi	-	-	-	-	(18.406)	Related party
Penerimaan piutang Pihak berelasi	(98.650)	(77.261)	(166.631)	-	53.392	Proceed from receivables Related party
Pembayaran biaya pinjaman	(28.950)	(624)	(827)	(63.272)	(52.310)	Payments of borrowing costs
Pembayaran biaya pinjaman obligasi	-	-	-	(12.371)	-	Payment of bond issuance costs
Pembayaran beban bunga	(81.998)	(99.009)	(182.602)	(424.938)	(285.564)	Interest paid
Pembayaran beban bunga obligasi	(60.971)	(52.500)	(121.617)	(78.750)	-	Bond interest paid
Penerimaan dari obligasi	-	-	-	1.000.000	-	Proceeds from bond issuance
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.595.520	(332.406)	(677.701)	(665.505)	(427.640)	Net cash provided by (used in) financing activities
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	(84.519)	156.502	225.941	98.578	297.805	Effect from changes in foreign exchange rate on cash and cash equivalent
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	606.330	1.120.746	885.910	523.139	471.974	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/PERIODE	2.804.918	1.919.009	1.919.009	1.395.870	923.896	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR/PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/PERIODE	3.411.248	3.039.755	2.804.918	1.919.009	1.395.870	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR/PERIOD

The original Parent Entity financial information as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS INDUK**

Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan periode enam
bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
PARENT ENTITY**

As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the six-
month period ended June 30, 2016
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

PSAK 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal entitas induk memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang di terapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Group sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), Entitas Induk mencatat penyertaan pada entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Entitas Induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak berikut:

Nama entitas/ Entity name	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month period ended June 30, 2016					Subsidiary
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat 1 Jan. 2016/ Carrying value Jan.1, 2016	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Nilai tercatat 30 Juni 2016/ Carrying value June 30, 2016	
Protelindo Luxembourg S.à r.l	100%	227.921	-	-	227.921	Protelindo Luxembourg S.à r.l
PT Iforte Solusi Infotek	99,99%	861.927	-	(2.695)	859.232	PT Iforte Solusi Infotek
		1.089.848	-	(2.695)	1.087.153	

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of consolidated financial statements

SFAS No. 4 (Revised 2009) regulates that when parent entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investee.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity financial information are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the Group's consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investment in subsidiaries.

In accordance with SFAS No. 4 (Revised 2009), the Parent Entity record investment in subsidiaries using cost method.

2. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK OF SUBSIDIARIES

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, the Parent Entity has the following investments in shares of stock of subsidiaries:

The original Parent Entity financial information as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS INDUK**

**Tanggal 30 Juni 2016 dan
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan periode enam
bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
PARENT ENTITY**

**As of June 30, 2016 and
December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the six-
month period ended June 30, 2016
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK
(lanjutan)**

Tahun yang berakhir pada 31 Desember/ Year ended December 31, 2015					
Nama entitas/ Entity name	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat 1 Jan. 2015/ Carrying value Jan.1, 2015	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Nilai tercatat 31 Des 2015/ Carrying value Dec 31, 2015
Entitas anak					
Protelindo Luxembourg S.à r.l	100%	227.921	-	-	227.921
PT Iforte Solusi Infotek	99,99%	-	861.927	-	861.927
		<u>227.921</u>	<u>861.927</u>	<u>-</u>	<u>1.089.848</u>

Subsidiary

Protelindo Luxembourg S.à r.l
PT Iforte Solusi Infotek

Tahun yang berakhir pada 31 Desember/ Year ended December 31, 2014					
Nama entitas/ Entity name	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat 1 Jan. 2014/ Carrying value Jan.1, 2014	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Nilai tercatat 31 Des 2014/ Carrying value Dec 31, 2014
Entitas anak					
Protelindo Luxembourg S.à r.l	100%	281.400	-	53.479	227.921

Subsidiary

Protelindo Luxembourg S.à r.l

Tahun yang berakhir pada 31 Desember/ Year ended December 31, 2013					
Nama entitas/ Entity name	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat 1 Jan. 2013/ Carrying value Jan.1, 2013	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Nilai tercatat 31 Des 2013/ Carrying value Dec 31, 2013
Entitas anak					
Protelindo Luxembourg S.à r.l	100%	281.400	-	-	281.400

Subsidiary

Protelindo Luxembourg S.à r.l

**3. SALDO DAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN
PIHAK-PIHAK BERELASI**

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan ekuitas langsung dan tidak langsung, dan/atau dibawah kendali pihak yang sama, dan/atau melalui manajemen kunci yang sama. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah seperti yang diungkapkan dalam Catatan 37. Transaksi dengan Entitas anak selain investasi adalah pinjaman jangka panjang dan beban bunga.

**3. SIGNIFICANT BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

The Company engages in transactions with related parties, which are affiliated with the Company through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control, and/or transactions and balances with these related parties are as contained in Note 37. Transaction with subsidiary other than investment are long-term loan and interest expenses.

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. Umum

Obligasi dengan jumlah pokok pada Tanggal Emisi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliananatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliananatan antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat. Jika terdapat perbedaan antara keterangan tentang Obligasi pada Bab ini dengan Perjanjian Perwaliananatan maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Keseluruhan Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. Syarat-syarat Obligasi

- **Nama Obligasi**
Obligasi diterbitkan dengan nama "OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016."
- **Hutang Pokok Obligasi**
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi, dengan ketentuan jumlah Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliananatan.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi apabila Perseroan melakukan Pembelian Kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Perwaliananatan.
- **Jatuh Tempo Obligasi**
 - a. Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:
Tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliananatan, khususnya ketentuan Pasal 17.9 Perjanjian Perwaliananatan;
 - b. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
 - c. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi:
 - 1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang

Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

- **Bunga Obligasi**

- a. Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi:
Seri A dengan tingkat bunga tetap, sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen), Seri B dengan tingkat bunga tetap, sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) dan Seri C dengan tingkat bunga tetap, sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen);
- b. Jadwal dan periode pembayaran:
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga masing-masing Seri Obligasi.
- c. Penghitungan bunga:
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai Pokok Obligasi yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- d. Tata cara pembayaran bunga:
 - 1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku.
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku.
 - 2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
 - 3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - 4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang obligasi melalui Agen Pembayaran dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

- **Denda Obligasi**

- a. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya pada rekening yang ditunjuk untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau bunga Obligasi yaitu sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- b. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. Untuk menghindari keraguan, Perseroan tidak bertanggung jawab kepada distribusi lebih lanjut oleh Agen Pembayaran atas Denda yang dibayarkan Perseroan.

- **Pendaftaran Obligasi di KSEI**

- a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku;
- b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI, sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

- **Obligasi Merupakan Bukti Utang**

- a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan, secara sah dan mengikat, berhutang kepada Pemegang Obligasi dalam jumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi serta Denda (apabila ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan;

- b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

- **Pengalihan Obligasi**

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

- **Satuan Perdagangan Obligasi**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

- **Satuan Pemindahbukuan Obligasi**

- a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- b. Setiap Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

- **Penarikan Obligasi**

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

- **Lain-lain**

- a. Perdagangan Obligasi dan satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bursa Efek.
- b. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- c. Pengelolaan administrasi Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran.
- d. Obligasi harus dilunasi oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- e. Apabila setelah diadakan perhitungan akhir masih terdapat sisa dana pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang tidak dapat dibayar oleh Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi karena sebab apapun, maka dana tersebut wajib disimpan oleh Agen Pembayaran untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi tersebut.
- f. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

3. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya seluruh jumlah Obligasi yang masih terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa suatu alasan yang wajar, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dengan jumlah yang melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, kecuali:
 - a. pinjaman yang diberikan tersebut terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan atau Entitas Anak;
 - b. pinjaman ataupun komitmen pinjaman yang sudah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan dilaksanakan secara wajar;

- d. pinjaman yang diberikan oleh Perseroan yang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan atau sehubungan dengan penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan Obligasi ini; atau
 - e. pinjaman yang diberikan dalam rangka atau terkait dengan Kegiatan Usaha, termasuk dalam rangka membiayai atau memfasilitasi akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha ataupun akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha.
2. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi, atau mengizinkan Entitas Anak untuk melakukan akuisisi atau melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, kecuali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
 - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama atau lebih dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - c. Perusahaan yang menjadi target akuisisi atau konsolidasi tersebut memiliki bidang usaha yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dan pelaksanaan akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
 - d. tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

Untuk menghindari keraguan, ketentuan pada butir 3 poin 2 di atas tidak berlaku dalam hal penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi oleh dan diantara Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak.

3. Melakukan, dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan, akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan, kecuali akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan yang terkait dengan Kegiatan Usaha dan sepanjang pelaksanaan dari akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan dan/atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali:
- a. dalam rangka Kegiatan Usaha; atau
 - b. penjualan pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua dan/atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan); atau
 - c. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini.

Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

5. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha utama Perseroan atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk merubah Kegiatan Usaha, kecuali dalam hal perubahan tersebut merupakan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan jasa penunjang telekomunikasi termasuk melakukan pembelian, pembangunan, penyediaan, penyewaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi (termasuk *fiber optic*).
6. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. Untuk menghindari keraguan, ketentuan terkait dengan pengurangan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap Entitas Anak.
7. Menerbitkan instrumen Efek bersifat hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya non-recourse yang diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Untuk menghindari keraguan, Entitas Anak diperbolehkan menerbitkan dan/atau memperoleh pinjaman yang sifatnya non recourse termasuk untuk menjamin aset-aset yang dimilikinya guna perolehan pinjaman tersebut, dan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

8. Membayar, membagikan atau mendistribusikan dividen atau melakukan pembayaran lain kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan, kecuali pembayaran tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan dividen dari Perseroan Terbatas PT Sarana Menara Nusantara Tbk, dengan ketentuan pelaksanaan pembayaran, pembagian atau pendistribusian dividen atau pelaksanaan pembayaran lain tersebut tidak mengakibatkan dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dan Perseroan tidak sedang dinyatakan lalal berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Perseroan berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan ini.
2. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut selambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya pembayaran kepada KSEI tersebut.

Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

3. Memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat (bertindak secara wajar) mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Wali Amanat dengan menyebutkan perihal mengenai data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang hendak dimintakan dan Perseroan akan memenuhi hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya permintaan tersebut oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan hak Perseroan untuk meminta perpanjangan waktu secara wajar diperlukan Perseroan untuk memenuhi permintaan tersebut (permintaan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar).
4. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis dan peraturan yang berlaku.
5. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan menyebutkan alasan yang wajar serta hal-hal yang akan diperiksa oleh Wali Amanat.

6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perusahaan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian. Dalam hal demikian, Perseroan wajib menyerahkan pada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengetahui terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian kelalaian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang mempunyai dampak negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan ini;

7. Menyampaikan kepada Wali Amanat:

- a. Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.

Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.

- b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
- c. Laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Perseroan harus menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan, yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- d. Laporan Keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan mana yang lebih dahulu.
- e. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan mana yang lebih dahulu.
- f. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (konsolidasi) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak disertai laporan akuntan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- g. Perseroan akan memberikan kepada Wali Amanat sertifikat kepatuhan yang ditanda-tangani oleh pejabat berwenang Perseroan yang mencantumkan (secara wajar) perhitungan-perhitungan terkait dengan kepatuhan terhadap poin 16 huruf a dan b di bawah ini dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyerahan laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 7 huruf d, e dan f di atas. dan konfirmasi bahwa izin mendirikan bangunan yang

dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh menara telekomunikasi milik Perseroan.

- h. Segera mungkin setelah mengetahui yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Perubahan Pengendalian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 20 di bawah ini, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat pemberitahuan mengenai Perubahan Pengendalian Perusahaan tersebut beserta pernyataan dari Perseroan bahwa perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.
8. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam butir 7 di bawah ini atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terhutang lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
9. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan Entitas Anak sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan kecuali yang sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran, mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin pokok dan material yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. Untuk menghindari keraguan, izin-izin pokok dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah izin-izin pokok dan material yang diperlukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang sebagaimana yang dijalankan saat ini termasuk izin mendirikan bangunan atas masing-masing menara telekomunikasi milik Perseroan, izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup atau izin penyelenggaraan jasa akses internet atas kegiatan usaha Anak Perusahaan (sebagaimana berlaku), yang mana, kecuali yang telah sebagaimana diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran, maka ketiadaan izin-izin tersebut akan berdampak negatif material terhadap bisnis maupun kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan berkewajiban, selama masih terdapat jumlah yang terutang berdasarkan Obligasi, memastikan bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh menara telekomunikasi milik Perseroan setiap triwulanan yang disampaikan bersamaan dengan disampaikannya sertifikat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam poin 7 huruf g di atas.
11. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia.
12. Memelihara harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa. Hal tersebut, tidak berlaku terhadap penyusutan nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
13. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
14. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban dan tanggungan Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu dua belas (26-12-2012) nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.
16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan paragraf terakhir dari pasal ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan:

- a. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5 : 1 (lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan melakukan ekspansi usaha, akuisisi, termasuk dalam rangka akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha termasuk menara telekomunikasi dan/atau infrastruktur telekomunikasi (mencakup fiber optik) ataupun akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha, termasuk juga transaksi sesuai dengan kegiatan usaha yang terkait dan/atau dilakukan dengan Telkom, Telkomsel, XL dan/atau Indosat dan/atau masing-masing Entitas-entitas Anak perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "Ekspansi Usaha"), maka Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7 : 1 (tujuh banding satu);
- b. Memelihara perbandingan antara Running EBITDA dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima banding satu)

sebagaimana tercermin dalam laporan triwulanan Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan poin 7 huruf f di atas.

Pinjaman Bersih berarti hutang yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk bunga maupun bagi hasil (instrumen syariah) termasuk hutang bank, hutang sewa guna usaha, hutang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya setelah dikurangi posisi Kas dan Setara Kas.

Pinjaman bersifat *non-recourse* di tingkat proyek yang dimiliki Entitas Anak dan/atau pinjaman yang disubordinasikan tidak termasuk dari perhitungan ini.

Yang dimaksud Running EBITDA adalah laba operasi sebagai hasil "Pendapatan" dikurangi "Beban Pokok Pendapatan", "Beban Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi", selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang hasilnya disetahunkan (annualized). Untuk menghindari keraguan, Running EBITDA di sini tidak dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi dan segala bentuk pajak. Dalam hal Perseroan melakukan Ekspansi Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) atau lebih, maka Running EBITDA yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) di atas, juga akan memperhitungkan tambahan kontribusi EBITDA (kontribusi EBITDA akan diperhitungkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku) dari hasil Ekspansi Usaha tersebut dengan memperhitungkan 12 (dua belas) bulan ke depan (dihitung dengan tambahan penghasilan usaha yang diperoleh dari hasil Ekspansi Usaha) dengan didasarkan nilai yang dimuat dalam kontrak dari hasil Ekspansi Usaha yang timbul dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak: (i) efektifnya Ekspansi Usaha atau (ii) timbulnya tambahan pinjaman baru yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Ekspansi Usaha yang dikurangi dengan biaya operasional dari Ekspansi Usaha selama periode yang relevan, yang perhitungannya akan disampaikan oleh Perseroan pada hari yang sama dengan masing-masing butir (i) atau (ii) tersebut atau bersamaan waktunya dengan kewajiban penyampaian sertifikat kepatuhan sebagaimana diatur dalam poin 7 huruf g di atas.

17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;
18. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.
19. Dalam hal hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Pemeringkat terhadap Obligasi menjadi A+ (*A Plus*) atau peringkat lain yang lebih rendah dari A+ (*A Plus*), maka Perseroan berkewajiban untuk menyediakan dana dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan nilai bunga untuk satu periode (triwulan) ("Dana Cadangan"), yang akan disetorkan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemeringkatan tersebut oleh Perseroan ke dalam suatu rekening khusus yang dibuka atas nama Perseroan dan akan dikelola oleh Wali Amanat. Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(*idn*) (*Double A Minus*), Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa jumlah sebesar Dana Cadangan akan tersedia dalam rekening tersebut.

Para Pihak setuju bahwa Dana Cadangan tersebut wajib dikembalikan oleh Wali Amanat seluruhnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Perseroan dengan melampirkan surat dari Pemeringkat terkait hasil pemeringkatan baru oleh Pemeringkat atas Obligasi dengan peringkat sekurang-kurangnya AA-(*idn*) (*Double A Minus*).

Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(*idn*) (*Double A Minus*), maka seluruh jumlah Dana Cadangan yang disetorkan ke dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang

tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam rekening khusus guna membayar Jumlah Terutang pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

20. Melakukan pelunasan Pokok Obligasi dalam hal terjadinya peristiwa Perubahan Pengendalian Perusahaan. Untuk maksud Pasal ini, Perubahan Pengendalian Perusahaan berarti suatu peristiwa dimana pemegang saham pengendali Perseroan pada saat ini, yaitu Perseroan Terbatas PT Sarana Menara Nusantara Tbk, atau pemegang saham pengendali Perseroan Terbatas PT Sarana Menara Nusantara Tbk, tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
21. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut diumumkan dalam surat kabar.
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 butir 7 bab ini dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 butir 8 bab ini, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 butir 8 bab ini, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;

- c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
 15. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.
 17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

5. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

- 1) RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan bagian ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah pokok Obligasi, suku bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan VI.C.4.
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di bawah dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4.
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Ketentuan pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1

- (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh) satu hari kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian wali amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g di atas,

1. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, diatur sebagai berikut:
 - a) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - I. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - II. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - III. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - IV. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - V. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per

empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- b) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- I. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - II. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - III. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - IV. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - V. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- c) Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- I. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - II. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - III. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - IV. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - V. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara secara notariil.

Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi

Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.

6. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya pada rekening yang ditunjuk untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.: VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di bawah dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4.
- 6) Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwalianamanatan.

7. Kelalaian Perseroan

Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:

- a. Pada huruf a di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
- b. Pada huruf b di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
- c. Pada huruf c di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Emiten untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Emiten, dan meminta Emiten untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Emiten atas seluruh Jumlah Terhutang.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini:

- a. Emiten tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
- b. Emiten tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain Pasal 11.2 huruf a dan Pasal 11.2 huruf c Perjanjian Perwalianamanatan); atau
- c. Apabila Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Emiten berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
- d. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Emiten tentang keadaan atau status keuangan Emiten dan/atau pengelolaan Emiten secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Emiten sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas; atau
- e. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Emiten serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten; atau
- f. Kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Apabila:

- a. Kecuali yang telah sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran, sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Dokumen Emisi lainnya; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
- d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua

atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK

1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, dan berdasarkan hasil pemeringkatan sesuai dengan surat Fitch No. 147/DIR/RAT/IX/2016 tanggal 8 September 2016, yaitu:

AAA_(idn)
(triple A)

2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi.

AAA_(idn)	Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA_(idn)	Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari emiten-emiten atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di surat negara.
A_(idn)	Peringkat nasional "A" menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BBB_(idn)	Peringkat nasional "BBB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BB_(idn)	Peringkat nasional "BB" menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, Pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B_(idn)	Peringkat nasional "B" menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dair kondisi usaha dan perkeonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC_(idn), CC_(idn), C_(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD_(idn), DD_(idn), D_(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA_(idn)" hingga "C_(idn)". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

3. Rating Outlook

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Fitch untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat perusahaan:

Positive	Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.
Negative	Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat
Stable	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil
Developing	Prospek yang belum jelas keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya

Rating Outlook Fitch merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas/atau efek utang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan yang mungkin secara material akan berpengaruh *positive*, *negative* atau *developing* terhadap kinerja entitas dan/atau efek utang yang diperingkat.

4. Rating Rationale

Peringkat nasional di kategori 'AAA' menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan Fitch pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang dengan ekspektasi resiko gagal bayar yang terendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia.

Peningkatan peringkat menggambarkan arus kas berulang yang kuat dan net leverage yang moderat untuk Perseroan, yang didukung oleh kebijakan keuangan yang konsisten dengan target *net debt to EBITDA* di bawah 3,0x (2015: 1,8x). Fitch menilai dengan skala perusahaan saat ini dan posisi finansial yang kuat dapat mendukung kombinasi pertumbuhan perusahaan secara organik dan anorganik dan dividen yang progresif tanpa terjadi penurunan yang material pada profil kredit emiten.

Faktor faktor penggerak peringkat:

- Ruang Peringkat yang Masih Luas: Fitch mengestimasi *funds flow from operations* (FFO) *adjusted net leverage* untuk Perseroan di 2016 akan meningkat menjadi 2,8x (2015: 2,1x) setelah melakukan perjanjian untuk mengakuisisi menara-menara senilai Rp3,6 triliun dari PT XL Axiata Tbk (XL, BBB/Stabil). Namun, penambahan arus kas dari perjanjian sale-and-leaseback tersebut kemungkinan akan menurunkan *net leverage* menjadi 2,4x-2,6x di 2017 dan 2018. Transaksi sebagian besar didanai dari utang, dan dijadwalkan untuk selesai pada pertengahan 2016.

- Peninjauan ulang profil bisnis: Fitch telah merevisi sensitifitas tindakan pemeringkatan negatif untuk Perseroan di mana batas FFO-*adjusted net leverage* menjadi 4,0x dari 3,5x, setelah melakukan perbandingan *peers* dengan perusahaan bisnis infrastruktur telekomunikasi internasional. Fitch melihat tingkat hutang yang moderat, arus kas yang kuat dan mudah diprediksi, dan EBITDA *margin* yang tinggi (2015: 84,2%) mendukung kenaikan peringkat perusahaan. Pada akhir 2015, Perseroan telah mengunci pendapatan sebesar Rp26triliun, didukung oleh kontrak jangka panjang dengan jangka waktu rata-rata 6,2 tahun.

- Transaksi Akuisisi Menara Mendukung Pertumbuhan: Proyeksi Fitch mengasumsi pertumbuhan *single-digit* yang tinggi untuk pendapatan perusahaan di 2016 dan 2017, dimana sebagian besar didukung oleh rencana akuisisi menara. Akuisisi menara tersebut akan meningkatkan portofolio perusahaan menjadi 14.700 menara (2015: 12.237), dan akan memperkuat posisi sebagai perusahaan menara telekomunikasi terbesar dibandingkan dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBI, BB/AA-(idn)/Stabil) dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP, BB-/A+(idn)/Stable). Fitch memproyeksikan pertumbuhan penambahan menara secara organik yang stabil 2017 dan 2018 dengan *rollout Long-term Evolution* (LTE) yang progresif di kota-kota besar.

- Komposisi Penyewa yang Stabil: Kontribusi dari operator telekomunikasi dengan peringkat internasional *investment-grade* akan mencapai sekitar 50% dari pendapatan Protelindo di 2016, naik dari 48% di 2015, setelah akuisisi menara-menara yang baru. Kontribusi tersebut masih lebih rendah dibandingkan TBI sebesar 83% dan STP sebesar 65%. Namun, tingkat utang yang rendah mendukung mitigasi dari resiko counterparty dari perusahaan telekomunikasi yang lebih lemah. Hutchinson dan Smartfren (CCC(idn)) masing-masing memiliki kontribusi 38% dan 7% terhadap pendapatan perusahaan di 2015.

- *Natural Hedge*, Jadwal Jatuh Tempo Hutang yang Positif: Eksposur Protelindo terhadap depresiasi Rupiah dimitigasi oleh perjanjian penyewaan menara jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan, dimana perjanjian dibuat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat memberikan kontribusi sekitar 35% dari pendapat di 2015, sedangkan perjanjian dalam Euro berkontribusi sebesar 3%. Pada akhir 2015, 64% dari hutang Perseroan adalah dalam Dolar Amerika Serikat dan 8% dalam Euro. Perseroan mempunyai jadwal jatuh tempo hutang yang baik, dimana utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Euro akan jatuh tempo setelah 2018.

- Likuiditas yang kuat: Jumlah kas yang tidak dibatasi penggunaannya oleh Perseroan mencapai Rp3 triliun akhir 2015 dan cukup untuk membayar hutang jangka pendek Perseroan sebesar Rp446 miliar dalam 12 bulan ke depan. Fitch mengestimasi likuiditas untuk tetap kuat, didukung oleh pendapatan yang berdasarkan kontrak, *free cash flow* yang positif dan kemampuan refinancing yang cukup kuat dengan memiliki akses ke pasar modal dan bank.

ASUMSI UTAMA

Asumsi utama dari Fitch yang digunakan untuk *rating case* Perseroan termasuk:

- Pembangunan menara untuk melambat menjadi 500-800 menara per tahun di 2016-2018
- Tambahan 600-1.000 sewa kolokasi per tahun di 2016-2018
- Akuisisi menara XL sebanyak 2.500 menara akan selesai pada pertengahan 2016
- Rasio belanja modal terhadap pendapatan sebesar 21%-26% di 2016-2018 (2015: 21,8%)
- 90% dari *pre-dividend free cash flows* akan didistribusi kepada pemegang saham mulai tahun 2017.

SENSITIFITAS PERINGKAT

Positif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menaikkan peringkat antara lain:

- FFO-*adjusted net leverage* berada di bawah 3,0x secara berkelanjutan
- Perbaikan dari komposisi penyewa sehingga operator telekomunikasi yang berperingkat *investment-grade* berkontribusi lebih dari 75% pendapatan
- FCF yang positif.

Negatif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menurunkan peringkat antara lain:

- FFO-*adjusted net leverage* naik di atas 4,0x secara berkelanjutan, dan/atau terjadi penurunan pangsa pasar yang signifikan

Revisi pada sensitifitas leverage menggambarkan peninjauan ulang Fitch dalam menganalisa bisnis resiko pada Perseroan, setelah melakukan perbandingan peers dengan perusahaan bisnis infrastruktur telekomunikasi internasional.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN FITCH YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.

PERSEROAN AKAN MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN.

XIX. ANGGARAN DASAR

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Prospektus ini adalah ketentuan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Prospektus. Ketentuan anggaran dasar yang diuraikan dibawah ini dimuat dalam berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 70, tanggal 18 November 2009 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 125, tanggal 20 November 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32, tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia disingkat PT Protelindo (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
Berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
Menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pembangunan, penyediaan, pembelian dan pengelolaan sarana telekomunikasi;
 - b. menyewakan menara untuk kepentingan khusus sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar), masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 33,23% (tiga puluh tiga koma dua tiga persen) atau sejumlah 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp332.262.018.700,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di bawah ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama.
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (4).
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.
9. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

10. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah negara Republik Indonesia.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. a. (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir a sub (i) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;
 - (iii) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;
 - (iv) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir a sub (ii), sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
 - (v) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir a sub (iv) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;

- (vi) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
 - (vii) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a sub (v) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - (viii) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan;
 - (ix) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
- b.
- (i) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir b sub (i) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;
 - (iii) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir b sub (ii) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
 - (iv) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a sub (v), (vi), (vii), (viii) dan (ix) pasal ini, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir b pasal ini;
- c.
- (i) RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir c sub (i) tidak tercapai dapat diadakan RUPS kedua ;
 - (iii) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir c sub (ii) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
 - (iv) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a sub (v), (vi), (vii), (viii) dan (ix) pasal ini, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir c pasal ini.
2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan keputusan ayat 1 pasal ini.
 3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
 5. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
 8. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus dilakukan secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.
 9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 10. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama (bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama).
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun namun mereka dapat segera diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan atau orang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan RUPS.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam jangka waktu satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
4. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
5. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 a, angka (v), angka (vi), angka (vii), angka (viii) dan angka (ix) mutatis mutandis berlaku bagi rapat untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan..
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
9. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama (bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama).
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau mengisi lowongan atau orang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. meninggal dunia ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN **Pasal 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN PEMBAGIAN DIVIDEN **Pasal 18**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar akan ditahan oleh Perseroan dan akan digunakan sebagai dana operasional.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan persetujuan RUPS.
4. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi tidak lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
5. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
6. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5).
7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
9. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
10. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan oleh para pemegang saham, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, sejumlah 3.322.600.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu seratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp332.260.018.700,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah);
 - b. Perseroan Terbatas PT TRICIPTA MANDHALA GUMILANG, sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - c. Perseroan Terbatas PT CATURGUWIRATNA SUMAPALA, sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- sehingga seluruhnya 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp332.262.018.700,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah).

Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa kepengurusannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya keputusan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama	:	Tuan Ferdinandus Aming Santoso;
Wakil Direktur Utama	:	Tuan Adam Gifari;
Wakil Direktur Utama	:	Tuan Stephen Duffus Weiss;
Direktur	:	Tuan Rinaldy Santosa;
Direktur	:	Tuan Onggo Wijaya;
Direktur	:	Tuan Eko Santoso Hadiprodjo;
Direktur Independen	:	Tuan Indra Gunawan;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Tuan Ario Wibisono;
Komisaris	:	Tuan Kenny Harjo;
Komisaris Independen	:	Tuan Bacelius Ruru.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

- 1. Pemesan yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
- 2. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- 4. Masa Penawaran Obligasi**

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, Pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.
- 6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi**

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
- 7. Penjatahan Obligasi**
 - a. Apabila dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7.
 - b. Selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, pada Hari Kerja ke-2 (dua) setelah penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyampaikan kepada Perseroan: Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yang sah, yang diisi lengkap sebagaimana mestinya dengan merinci nama-nama, alamat-alamat dan pemesan-pemesan yang dikabulkan, jumlah Obligasi untuk dicatatkan atas nama pemesan-pemesan yang diterima baik dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yang sah. Tanggal penjatahan adalah 21 November 2016.
 - c. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
 - d. Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.
 - e. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Bahana Securities.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya tanggal 22 November 2016 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bahana Securities
Nama Bank: Bank Mandiri
Cabang Gedung Energy
No. Rekening: 1020009911550

PT BCA Sekuritas
Nama Bank: Bank Central Asia
Cabang Korporasi Menara BCA
No. Rekening: 2050030060

PT DBS Vickers Securities Indonesia
Nama Bank: Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 3320034016

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 November 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI antara Perseroan dan KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan dapat:

- a) menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; atau
- b) membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya
 - b. menyampaikan informasi penundaan Penawaran Umum Berkelanjutan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a.
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a. kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir disebabkan karena ketentuan yang termaktub dalam Poin 11 ini kecuali bilamana kejadian sebagaimana dimaksud dalam Poin 11 paragraf 1, Perseroan tidak wajib membayar imbalan yang harus dibayar menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Perseroan bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk membayar biaya yang harus dibayar atau membayar kembali kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (jika ada) dan yang telah terhutang sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan tidak melebihi jumlah yang telah disepakati antara Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan.

Untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak diperlukan keputusan pengadilan, karenanya untuk pelaksanaan ketentuan ini para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini dengan ini melepaskan ketentuan yang termaktub dalam kalimat 2 dan 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, sepanjang disyaratkan adanya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan, sedangkan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi selambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan atau Pemegang Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu per seratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah uang pemesanan yang terlambat dibayar, denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengakhiran atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut dihitung secara harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayar lunas) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan Obligasi tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan atau pengakhiran Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pemegang Obligasi hanya dapat menerima pengembalian uang tersebut apabila dapat menunjukkan/menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi atau Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian Obligasi dan untuk hal tersebut pemesan Obligasi tidak dikenakan biaya Bank ataupun biaya transfer.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Permata Tbk (“Permata Bank”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Permata Bank dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 November 2002 No. S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Permata Bank dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 117 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 No. 7 tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. Ref. 1047/SK/SAS/TB/WB/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. RIWAYAT SINGKAT

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Permata Bank Tbk No. 80 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

2. PERMODALAN

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No. 016/DIR-RSR/BNLI/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Komposisi Kepemilikan Saham per 18 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		(%)
	Nilai Nominal Rp 12.500		Nilai Nominal Rp 125		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	42.111.976.600	5.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Pemegang Saham					
PT Astra International Tbk	-	-	9.954.569.331 *)	1.244.321.166.375	44,56
SCB London Shareholding in Permata Masyarakat	-	-	9.954.569.331	1.244.321.166.375	44,56
	26.880.234	336.002.925.000	2.403.911.159	300.488.894.875	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.880.234	336.002.925.000	22.313.049.821	2.789.131.227,625	100,00

Catatan: *) Termasuk 223.399.302 lembar saham yang tidak dicatatkan/ delisting

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No. 38 tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Cheng Teck Lim
Wakil Komisaris Utama	: Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	: Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	: DR.Ir. I. Supomo
Komisaris Independen	: David Allen Worth
Komisaris Independen	: Tony Prasetiantono,P.HD
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komisaris	: Sebastian Ramon Arcuri

DIREKSI

Direktur Utama	: Roy Arman Arfandy
Wakil Direktur Utama	: Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan merangkap sebagai Direktur Independen	: Mirah Dewi W.
Direktur	: Sandeep Kumar Jain
Direktur	: Indri K. Hidayat
Direktur	: Michael Alan Coye
Direktur	: Bianto Surodjo
Direktur	: Anita Siswadi
Direktur Unit Usaha Syariah	: Achmad Kusna Permana

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: Muhamad Faiz
Anggota	: Prof. DR. Jaih

4. KEGIATAN USAHA

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery channel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Bank Permata juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada :
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada :
 - PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada:
 - PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada:
 - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:
 - PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan pasar modal, Bank Permata ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

- a. Wali Amanat (*Trustee*) pada:
 - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
 - Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
 - Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Bank NISP Tahun 2003
 - Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
 - Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Excelcom I Tahun 2003
 - Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
 - Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
 - Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Excelcom II Tahun 2007
 - Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008
 - Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2010
 - Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Obligasi Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
 - Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
 - Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Modernland Realty Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013
 - Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
 - Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Protelindo I Tahun 2014
 - Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014
 - Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015
 - Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015
 - Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015
 - Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015
 - Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015
 - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016
- b. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :
- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
 - PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
 - PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
 - PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
 - PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
 - PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
 - PT BTPN Tbk. Tahun 2008
 - PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
 - PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
 - PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
 - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
 - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
 - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
 - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
 - PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011
 - PT Indostrait Tbk Tahun 2011
 - PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
 - PT Atlas Resources Tbk. Tahun 2011

- PT Cardig Aero Service Tbk. Tahun 2011
 - PT Erajaya Swasembada Tbk. Tahun 2011
 - PT Saranacentral Bajatama Tbk. Tahun 2011
 - PT Surya Esa Perkasa Tbk. Tahun 2012
 - PT Adi Sarana ArmadaTbk. Tahun 2012
 - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Tahun 2012
 - PT Mitra Pinastika Mustika Tbk Tahun 2013
 - PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Tahun 2013
 - PT Arita Prima Indonesia Tahun 2013
 - PT Bank Panin Syariah Tbk
 - PT Bank Ina Perdana Tbk
 - PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
 - PT Garuda Metalindo Tbk
 - PT Anabatic Technologies Tbk
- c. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari:
- PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
 - PT United Tractors Tbk Tahun 2011
 - PT Astra Otoparts Tbk Tahun 2013
- d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok:
- NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
 - Obligasi PT BBI Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa
- f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:
- PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
 - PT Lionmesh Prima
 - PT Pakuwon Jati
 - PT Indospring
- g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- h. *Sub Registry* penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- j. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

5. KANTOR CABANG

Permata Bank memiliki 281 lokasi cabang (termasuk 10 cabang Syariah) yang tersebar di 57 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Sangatta, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

6. TUGAS DAN KEWAJIBAN WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :

- a. Obligasi telah dilunasi baik pokok Obligasi, bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten (jika tidak menggunakan Agen Pembayaran);
- b. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
- c. Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3; atau
- j. Atas permintaan Wali Amanat.
- k. Termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut.

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (*unaudited*), dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Maret		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
ASET				
Kas	1.618.976	2.012.662	2.192.825	2.436.772
Giro pada Bank Indonesia	10.607.546	12.833.823	13.675.893	11.610.722
Giro pada bank-bank lain - bersih	943.809	1.010.124	1.099.697	645.822
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	2.880.175	8.290.830	1.395.967	5.932.174
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	2.288.829	2.989.551	1.905.686	1.571.682
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	4.323.064	-	179.926	4.350.056
Tagihan akseptasi - bersih	3.991.691	4.708.845	6.038.397	5.253.136
Kredit yang diberikan - bersih	119.023.907	125.867.973	131.388.463	118.368.843
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	18.467.721	14.909.196	18.858.037	10.848.348
Investasi pada entitas asosiasi	2.486.660	2.465.417	2.294.284	-
Aset tetap - bersih	2.673.451	2.724.378	1.129.397	1.149.572
Aset tidak berwujud - bersih	483.797	389.266	377.880	350.547
Aset pajak tangguhan - bersih	525.699	422.929	114.217	263.399
Aset lain-lain - bersih	4.406.216	4.064.357	4.703.001	3.056.923
Jumlah Aset	174.721.541	182.689.351	185.353.670	165.837.996
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	1.024.622	448.408	543.553	509.239
Simpanan dari nasabah	136.779.042	145.460.639	148.005.560	133.074.926
Simpanan dari bank-bank lain	3.241.741	2.321.856	2.182.950	1.648.187
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	339.318	178.955	107.485	248.387
Utang akseptasi	4.016.181	4.736.078	6.073.505	5.275.988
Liabilitas Pajak Penghasilan	1.438	-	3.180	110
Pinjaman yang diterima	878	-	10.096	310.336
Obligasi yang diterbitkan	672.448	672.137	1.385.601	1.362.757
Liabilitas imbalan pasca kerja	435.637	431.526	438.411	361.465
Beban masih harus dibayar	1.033.311	1.004.849	1.125.294	1.273.201
Liabilitas lain-lain	651.139	574.237	501.539	481.891
Provisi	144.995	142.786	134.404	157.431
Utang subordinasi – bersih	7.886.037	7.905.036	7.758.983	7.019.660
Jumlah Liabilitas	156.226.787	163.876.507	168.270.561	151.723.578
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.818.122	1.818.122	1.818.122	1.667.159
Tambahan modal disetor- bersih	10.781.784	10.781.784	10.781.784	9.439.382
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	68.000	(22.708)	63.925	(28.357)
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	29.600	62.147	(6.547)	-
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128	128
Cadangan revaluasi aset tetap	1.634.051	1.634.051	-	-
Saldo laba	4.163.060	4.539.311	4.425.688	3.036.096
Kepentingan non-pengendali	9	9	9	10
Jumlah Ekuitas	18.494.754	18.812.844	17.083.109	14.114.418
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	174.721.541	182.689.351	185.353.670	165.837.996

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Pendapatan bunga	3.441.518	14.806.228	14.221.627	10.772.325
Pendapatan syariah	349.666	1.324.594	1.307.951	1.154.274
Beban bunga	(2.157.130)	(9.284.890)	(9.419.502)	(6.224.366)
Beban syariah	(160.299)	(649.033)	(697.522)	(566.678)
Pendapatan bunga & syariah - bersih	1.473.755	6.196.899	5.412.554	5.135.555
Pendapatan provisi dan komisi	323.387	1.357.090	1.270.243	1.088.962
Beban provisi & komisi	(12.110)	(56.440)	(64.565)	(61.097)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	195.257	295.828	167.197	147.618
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	34.051	137.928	18.077	1.429
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	53.790	241.838	241.029	-
Pendapatan operasional lainnya	52.900	176.326	375.068	438.179
Jumlah pendapatan operasional	2.121.030	8.349.469	7.419.603	6.750.646
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(1.543.952)	(3.678.035)	(1.178.152)	(502.595)
Pemulihan penghapusan aset non-produktif	-	-	-	2.922
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(432.165)	(1.773.186)	(1.653.542)	(1.657.242)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(560.700)	(2.223.497)	(2.269.027)	(2.093.150)
Lain-lain	(92.032)	(381.216)	(271.595)	(199.078)
Jumlah beban operasional lainnya	(1.084.897)	(4.377.899)	(4.194.164)	(3.949.470)
Jumlah beban operasional	(2.628.849)	(8.055.934)	(5.372.316)	(4.449.143)
Laba sebelum pajak penghasilan	(507.819)	293.535	2.047.287	2.301.503
Beban pajak penghasilan				
- Kini	(1.438)	(401.273)	(332.565)	(479.384)
- Tangguhan	133.006	354.850	(126.952)	(96.246)
Laba bersih	(376.251)	247.112	1.586.971	1.725.873
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	58.161	1.648.997	60.144	(94.755)
Jumlah laba Komprehensif	(318.090)	1.896.109	1.647.914	1.631.118
Laba bersih yang dapat diatribusikan	(376.251)	247.112	1.587.770	1.725.873
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	(318.090)	1.896.109	1.647.914	1.631.118
Laba bersih per saham dasar	(32)	21	134	162

9. INFORMASI
Alamat Wali Amanat:
PT Bank Permata Tbk

WTC II Lantai 28

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31

Jakarta 12920 Indonesia

Telepon : (021) 523 7788

Faksimili : (021) 250 0529

www.permatabank.com
Up. Head, Securities & Agency Services

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 529 91099
Faksimili: (021) 529 91199

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPO

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Securities
Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2505081
Faksimili: (021) 5225869
Divisi *Settlement*

PT BCA Sekuritas (terafiliasi)
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 23587222
Faksimili: (021) 23587300, 23587250, 23587290
Divisi *Investment Banking*

PT DBS Vickers Securities Indonesia
DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 30034900
Faksimili: (021) 30034944
Divisi *Corporate Finance*